



Pemerintah
Kabupaten Mamuju

RPJPD

KABUPATEN MAMUJU

TAHUN 2025–2045

mamujukab.go.id



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 1. TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU
dan
BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Pedoman adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang

dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

Pasal 2

- (1) RPJPD bertujuan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045.
- (2) RPJPD berfungsi sebagai:
 - a. pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun selama 4 (empat) periode;
 - b. pedoman dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun; dan
 - c. instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 3

- (1) Dokumen RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - d. Visi dan Misi Daerah;
 - e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
 - f. penutup.
- (2) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terjadi perubahan yang mendasar; dan
- d. dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 5

- (1) Bupati bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD tahun 2025-2045.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal .28 Mei 2025

BUPATI MAMUJU,

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal .28 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,


SUAIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2025 NOMOR ..1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN
2025 NOMOR 11-06

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR ~~1~~ TAHUN ~~2025~~
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyatakan dokumen perencanaan pembangunan daerah antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah, selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2045 juga merupakan pedoman dalam upaya mewujudkan cita – cita pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 merupakan pondasi dasar bagi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mamuju untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan. Penggunaan pola baru dengan penetapan *baseline* dan target yang lebih terukur dalam dokumen perencanaan jangka panjang akan berdampak pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dari sisi jangka menengah maupun jangka pendek menjadi jauh lebih terukur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.



KATA PENGANTAR

Dengan rasa hormat dan rasa syukur yang tak terhingga, kami hadirkan dokumen laporan ini sebagai hasil dari upaya bersama dalam merancang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju untuk periode tahun 2025-2045. Laporan ini merupakan suatu landasan penting yang memuat rancangan awal RPJPD, mencerminkan dedikasi dan kerja keras para pemangku kepentingan, pemerintah daerah, masyarakat, serta semua pihak yang terlibat dalam proses perencanaan ini.

Rancangan awal RPJPD Kabupaten Mamuju ini didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melibatkan berbagai elemen dan dimensi kehidupan, perencanaan jangka panjang ini dirancang untuk memberikan arah yang jelas dan terarah dalam mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan. Dokumen ini mencakup tinjauan menyeluruh terhadap kondisi eksisting Kabupaten Mamuju, analisis tantangan dan peluang yang dihadapi, serta strategi dan kebijakan yang diusulkan untuk mengatasi berbagai isu pembangunan. Proses konsultasi publik yang intensif telah dilibatkan untuk memastikan bahwa aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat menjadi landasan utama dalam perumusan RPJPD ini.

Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses perencanaan ini. Semoga laporan ini dapat menjadi panduan yang berharga dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Mamuju yang Keren (Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman) Maju, Adil, dan Berkelanjutan. Terima kasih.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-13
1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya	I-19
1.3.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045.....	I-22
1.3.2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045	I-23
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-25
1.5 Sistematika Penulisan	I-26
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Aspek Geografi	II-1
2.1.2 Aspek Demografi	II-24
2.2 Aspek Kesejahteraan Sosial dan Budaya	II-35
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi.....	II-35
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya	II-53
2.3 Aspek Daya Saing	II-64
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah	II-64
2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)	II-79
2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	II-82
2.3.4 Daya Saing Iklim Berinvestasi	II-92
2.4 Aspek Pelayanan Umum	II-106
2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025	II-111
2.5.1 Tahapan Konsolidasi Periode I (2005-2010)	II-113
2.5.2 Tahapan Pemantapan Periode II (2010-2015)	II-115
2.5.3 Tahapan Percepatan Periode III (2016-2020)	II-116



2.5.4 Tahapan Kemandirian Periode IV (2021-2026).....	II-118
2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik.....	II-120
2.6.1 Kependudukan.....	II-120
2.6.2 Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar	II-124
2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	II-159
2.7.1 Rencana Struktur Ruang Wilayah	II-159
2.7.2 Rencana Pola Ruang Wilayah	II-162
2.7.3 Penetapan Kawasan Strategis.....	II-172
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH.....	III-1
3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	III-1
3.2 Isu Strategis	III-39
3.2.1 Isu Strategis Internasional.....	III-39
3.2.2 Isu Strategis Nasional.....	III-46
3.2.3 Isu Strategis Regional.....	III-59
3.2.4 Isu Strategis Kabupaten Mamuju	III-62
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH.....	IV-1
4.1 Visi Kabupaten Mamuju 2025-2045.....	IV-1
4.2 Sasaran Visi Kabupaten Mamuju 2025-2045	IV-6
4.3 Misi Kabupaten Mamuju 2025-2045.....	IV-7
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH.....	V-1
5.1 Arah Kebijakan Kabupaten Mamuju 2025-2045	V-2
5.2 Sasaran Pokok Kabupaten Mamuju 2025-2045	V-13
BAB VI PENUTUP.....	VI-1
6.1 Kaidah Pelaksanaan	VI-1
6.2 Pembiayaan Pembangunan.....	VI-3



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Kecamatan di Kabupaten Mamuju	II-2
Tabel 2.2	Tinggi Wilayah dan Letak Geografis Kabupaten Mamuju Menurut Kecamatan	II-4
Tabel 2.3	Daftar Sungai di Kabupaten Mamuju	II-9
Tabel 2.4	Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Mamuju (mm), 2019 – 2023	II-13
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Mamuju Tahun 2023	II-25
Tabel 2.6	Pertumbuhan Penduduk 5 Tahun Terakhir Tahun 2019-2023 Kabupaten Mamuju	II-27
Tabel 2.7	Kepadatan Penduduk Kabupaten Mamuju Tahun 2023	II-29
Tabel 2.8	Proporsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Mamuju Tahun 2023	II-30
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk berdasarkan Kewarganegaraan di Kabupaten Mamuju Tahun 2023	II-32
Tabel 2.10	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang dianut di Kabupaten Mamuju Tahun 2023	II-33
Tabel 2.11	Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat 2014-2023	II-35
Tabel 2.12	Indeks Gini di Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2023	II-37
Tabel 2.13	Perkembangan Garis Kemiskinan Terhadap Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2014-2023	II-40
Tabel 2.14	Angka Kemiskinan di Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2023	II-42
Tabel 2.15	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2023	II-43
Tabel 2.16	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2014-2023	II-44



Tabel 2.17	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2023	II-46
Tabel 2.18	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mamuju Terhadap Wilayah Se Sulawesi Barat Tahun 2014-2023	II-48
Tabel 2.19	Perkembangan IPM dan Indikator Pendukung IPM Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2023	II-49
Tabel 2.20	Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2014-2023 Provinsi Sulawesi Barat	II-50
Tabel 2.21	Tingkat Inflasi Kabupaten Mamuju 2014-2023	II-52
Tabel 2.22	Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2014-2023.....	II-53
Tabel 2.23	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2014-2023.....	II-54
Tabel 2.24	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2014-2023	II-56
Tabel 2.25	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2023	II-57
Tabel 2.26	Angka Melek Huruf Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2023	II-59
Tabel 2.27	Capaian 12 Indikator PIS-PK Kabupaten Mamuju 2014-2023	II-61
Tabel 2.28	Angka Kematian Ibu Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2023	II-62
Tabel 2.29	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2023	II-63
Tabel 2.30	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mamuju Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2014-2023	II-65
Tabel 2.31	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mamuju Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2014-2023	II-67
Tabel 2.32	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010=100 Kabupaten	



	Mamuju Tahun 2014-2023 (Juta Rupiah).....	II-69
Tabel 2.33	Perkembangan PDRB Kabupaten Tahun 2019 s.d 2023 atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku di Provinsi Sulawesi Barat	II-72
Tabel 2.34	Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Mamuju, 2014-2023	II-73
Tabel 2.35	Struktur Komponen Konsumsi Rumah tangga Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2023	II-75
Tabel 2.36	Pertumbuhan Rill Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2023	II-78
Tabel 2.37	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2014-2023	II-79
Tabel 2.38	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Mamuju 2014-2023	II-80
Tabel 2.39	Rasio Lulusan (S1/S2/S3)	II-81
Tabel 2.40	Rasio Ketergantungan Tahun 2014-2023 Kabupaten Mamuju.....	II-82
Tabel 2.41	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2023	II-83
Tabel 2.42	Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2023	II-84
Tabel 2.43	Proporsi Panjang Jalan Berkondisi Baik Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2023	II-85
Tabel 2.44	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2023	II-88
Tabel 2.45	Ketersediaan Daya Listrik Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2023	II-90
Tabel 2.46	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2023	II-91
Tabel 2.47	Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju	II-92
Tabel 2.48	Angka Kriminalitas menurut Kepolisian Sektor di Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2023	II-93



Tabel 2.49	Jumlah Demonstrasi Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2023	II-94
Tabel 2.50	Jumlah kasus korupsi Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2023	II-95
Tabel 2.51	Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)	II-97
Tabel 2.52	Capaian Indikator Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Mamuju 2014-2023	II-106
Tabel 2.53	Proyeksi Jumlah Penduduk (Kabupaten Mamuju)	II-122
Tabel 2.54	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (Kabupaten Mamuju)	II-123
Tabel 2.55	Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur (Kabupaten Mamuju)	II-123
Tabel 2.56	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Kabupaten Mamuju)	II-126
Tabel 2.57	Standar Kebutuhan Domestik	II-127
Tabel 2.58	Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kabupaten Mamuju berdasarkan SNI	II-131
Tabel 2.59	Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kabupaten Mamuju	II-133
Tabel 2.60	Jarak Minimum antara Penghantar dengan Tanah dan Benda Lain	II-135
Tabel 2.61	Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kabupaten Mamuju berdasarkan SNI	II-137
Tabel 2.62	Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kabupaten Mamuju	II-139
Tabel 2.63	Standar Kebutuhan Prasarana Persampahan	II-141
Tabel 2.64	Proyeksi Timbunan Sampah dan Kebutuhan TPS di Kabupaten Mamuju berdasarkan SNI	II-142
Tabel 2.65	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Mamuju	II-143
Tabel 2.66	Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Mamuju berdasarkan SNI	II-145
Tabel 2.67	Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Rumah Sakit di	



	Kabupaten Mamuju berdasarkan SNI	II-146
Tabel 2.68	Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Posyandu di Kabupaten Mamuju berdasarkan SNI	II-147
Tabel 2.69	Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan di Kabupaten Mamuju	II-148
Tabel 2.70	Standar Kebutuhan Sarana Pendidikan dan Pembelajaran	II-152
Tabel 2.71	Kebutuhan Sarana Pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Mamuju	II-152
Tabel 2.72	Kebutuhan Sarana Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Mamuju	II-153
Tabel 2.73	Kebutuhan Sarana Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Mamuju.....	II-154
Tabel 2.74	Kebutuhan Sarana Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Mamuju	II-155
Tabel 2.75	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan di Kabupaten Mamuju	II-156
Tabel 2.76	Program Utama Lima Tahunan RTRW Kabupaten Mamuju, Tahun 2019-2039	II-175
Tabel 3.1	Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju	III-3
Tabel 3.2	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Pembangunan Nasional, Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat, dan Pembangunan Kabupaten Mamuju	III-22
Tabel 3.3	Identifikasi Pokok Masalah Pembangunan Kabupaten Mamuju	III-31
Tabel 3.4	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju Tahun 2023	III-57
Tabel 3.5	Perumusan Isu-Isu Strategis dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Prioritas	III-65
Tabel 3.6	Penentuan Isu Strategis per Urusan Kabupaten Mamuju.....	III-70



Tabel 3.7	Daftar Panjang Isu Strategis per Urusan Kabupaten Mamuju dan Penentuan Isu Strategis Daerah.....	III-83
Tabel 3.8	Integrasi Isu Strategis RPJPN 2025-2045, RPJPD Sulawesi Barat 2025-2045, dan RPJMD Kabupaten Mamuju 2021-2026	III-88
Tabel 4.1	Visi Nasional-Provinsi Sulawesi Barat-Kabupaten Mamuju 2025-2045	IV-2
Tabel 4.2	Keselarasan Definisi Visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional-Provinsi Sulawesi Barat-Kabupaten Mamuju 2025-2045	IV-2
Tabel 4.3	Penjelasan Pokok-Pokok Visi Pembangunan Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2045	IV-6
Tabel 4.4	Sasaran Visi Kabupaten Mamuju 2025-2045	IV-7
Tabel 4.5	Keselarasan Misi Nasional-Provinsi Sulawesi Barat-Kabupaten Mamuju 2025-2045	IV-9
Tabel 5.1	Arah Kebijakan Kabupaten Mamuju 2025-2045	V-2
Tabel 5.2	Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok Kabupaten Mamuju 2025-2045	V-5
Tabel 5.3	Sasaran Pokok Kabupaten Mamuju 2025-2045	V-17
Tabel 5.4	Arah Pembangunan Kabupaten Mamuju 2025-2045.....	V-24
Tabel 5.5	Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Mamuju 2025-2045	V-26
Tabel 5.6	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Mamuju 2025-2045	V-37



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RPJPD 2025-2045.....	I-6
Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Mamuju tahun 2018-2023 dalam %.....	I-10
Gambar 1.3 Penyelarasan antara RPJPN 2025-2045 dengan RPJPD 2025-2045	I-24
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Mamuju	II-3
Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Mamuju	II-5
Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Mamuju.....	II-6
Gambar 2.4 Peta Struktur Geologi Kabupaten Mamuju	II-7
Gambar 2.5 Peta Jenis Tanah Kabupaten Mamuju.....	II-8
Gambar 2.6 Peta Hidrologi Kabupaten Mamuju.....	II-12
Gambar 2.7 Peta Klimatologi Kabupaten Mamuju	II-13
Gambar 3.1 Rencana Kerja Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE).....	III-47
Gambar 3.2 Perbandingan Kerangka Pelaksanaan Reformasi Birokasi....	III-52
Gambar 3.3 Double Track Fokus Pelaksanaan Reformasi Birokasi ...	III-53
Gambar 3.4 Megatrend Global 2045	III-54



Pemerintah
Kabupaten Mamuju

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan nasional adalah proses penetapan strategi, kebijakan, dan program untuk mencapai kemajuan menyeluruh di semua sektor negara. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan bertujuan untuk mencapai tujuan yang tepat di masa depan. Hasil dari proses perencanaan ini adalah dokumen perencanaan yang berisi strategi, kebijakan, dan program pembangunan nasional. Tjokromidjojo (1998:12) mengartikan perencanaan sebagai proses penyusunan secara sistematis aktivitas-aktivitas yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses di mana berbagai alternatif atau keputusan dibuat dengan mengacu pada fakta-fakta yang digunakan sebagai dasar untuk menjalankan serangkaian kegiatan atau aktivitas sosial, baik yang bersifat fisik (materi) maupun nonfisik (mental dan spiritual), dengan tujuan mencapai kemajuan yang lebih baik (Riyadi, 2005:7).

Dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks dan cepat berubah, Indonesia menempatkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola sebagai fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia Maju. Ketiga bentuk transformasi ini bukanlah proses yang berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan saling menguatkan untuk menghasilkan perubahan sistemik yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

Transformasi Sosial menekankan pada peningkatan kualitas manusia dan penguatan kohesi sosial sebagai modal dasar pembangunan. Melalui pendidikan yang merata, pelestarian nilai-



nilai budaya, penguatan identitas kebangsaan, serta pemberdayaan masyarakat, transformasi sosial menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang toleran, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan. Secara akademis, transformasi sosial dipahami sebagai perubahan struktur dan budaya masyarakat yang memengaruhi cara manusia berinteraksi dan menjalani kehidupan secara kolektif.

Di sisi lain, Transformasi Ekonomi diarahkan pada pergeseran struktur ekonomi Indonesia dari ekonomi berbasis komoditas dan ekstraksi sumber daya alam menuju ekonomi yang bernilai tambah tinggi, berbasis pengetahuan, inovasi, dan keberlanjutan. Strategi ini mencakup penguatan sektor manufaktur dan industri hijau, digitalisasi UMKM, serta peningkatan daya saing nasional. Dalam konteks teoritis, transformasi ekonomi mencerminkan upaya sistematis untuk mengubah struktur produksi dan distribusi agar dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Transformasi Tata Kelola menjadi jembatan antara aspirasi rakyat dan arah pembangunan nasional. Pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel adalah prasyarat mutlak bagi keberhasilan transformasi sosial dan ekonomi. Dengan mendorong digitalisasi pelayanan publik, reformasi birokrasi, dan penguatan partisipasi masyarakat, Indonesia bergerak menuju tata kelola yang modern dan kolaboratif. Secara akademis, transformasi tata kelola dipahami sebagai pergeseran dari pendekatan pemerintahan yang hierarkis menuju model governance yang terbuka dan partisipatif.

Ketiganya—sosial, ekonomi, dan tata kelola—merupakan pilar yang saling menopang dalam proses transformasi bangsa. Tanpa transformasi sosial, kemajuan ekonomi akan timpang. Tanpa transformasi ekonomi, pembangunan sosial akan terhambat. Dan



tanpa tata kelola yang baik, keduanya tidak akan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan ketiganya dalam satu kerangka besar pembangunan nasional, Indonesia memantapkan langkahnya menuju masa depan yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 menetapkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai metode perencanaan yang menghasilkan rencana-rencana untuk pertumbuhan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Rencana-rencana ini akan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Tujuan dari perencanaan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, dunia usaha, akses dan kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menentukan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu tertentu. Proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan bertujuan untuk mengatur penggunaan sumber daya daerah secara efektif dan efisien. Salah satu dokumen yang wajib disusun oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJPD adalah dokumen perencanaan yang merangkum visi, misi, kebijakan, dan target utama pembangunan daerah dalam rentang waktu dua puluh tahun. Dokumen ini tersusun berdasarkan pedoman dari dokumen perencanaan nasional jangka panjang (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar sejalan dengan perencanaan pembangunan nasional, serta menjadi rujukan utama dalam pembuatan dokumen perencanaan yang lebih spesifik.

Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 telah menerangkan bahwa RPJPN menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD. Prinsip tersebut kembali diberlakukan pada penyusunan RPJPN 2025-2045 melalui Peraturan Menteri Bersama/Surat Edaran Bersama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.

Pada dasarnya, dokumen RPJPD merupakan rencana strategis pembangunan daerah selama 20 tahun yang disusun dengan mempertimbangkan RPJPN dan RTRW di wilayah terkait. RPJPD adalah salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang harus disusun setiap tahun oleh Pemerintah Daerah. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa RPJPD mencakup visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Fungsi utama RPJPD adalah sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan serta sebagai landasan untuk menerapkan program pembangunan di daerah selama dua dekade ke depan. RPJPD juga berperan sebagai landasan untuk penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD), memastikan keterkaitan yang harmonis antara berbagai dokumen perencanaan. Penyusunan RPJPD oleh Pemerintah Daerah menjadi penting guna mengarahkan pembangunan daerah secara terpadu, berkelanjutan, dan mempertimbangkan aspek lingkungan, sekaligus untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang membahas langkah-langkah dalam perencanaan,



pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah, termasuk penilaian terhadap perancangan peraturan daerah terkait rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), serta prosedur perubahan terhadap RPJPD, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, penyusunan RPJPD melibatkan serangkaian tahapan tertentu.



Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RPJPD 2025-2045

Sumber : Imendagri Nomor 1 Tahun 2024



Tahapan-tahapan tersebut mencakup persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, konsultasi mengenai rancangan awal RPJPD, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang, pembentukan rancangan akhir, evaluasi rancangan akhir RPJPD, dan penetapan dokumen RPJPD. Maka dari itu, Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian pada setiap tahapan dalam penyusunan RPJPD ini, demi menciptakan dokumen perencanaan jangka panjang yang berkualitas, menyeluruh, dan sesuai dengan konsistensi dokumen perencanaan lainnya.

Pada 16 Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengumumkan relokasi Ibu Kota Negara Indonesia ke wilayah Kalimantan Timur seluas 256.142 hektar. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan berada di Kecamatan Sepaku dengan luas 6.671 hektar, terbagi antara Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Pemindahan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, yang diundangkan pada 15 Februari 2022. Tahap pertama pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) direncanakan berlangsung pada 2022-2024. Pemerintah bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi inklusif dengan IKN, menghadirkan magnet pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa. IKN juga diharapkan menjadi simbol identitas nasional, mendorong ekonomi hijau, menggunakan energi terbarukan, memiliki transportasi pintar, dan tata kelola pemerintahan yang efisien. Pulau Sulawesi, sebagai pulau terdekat, memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan IKN.

Provinsi Sulawesi Barat, secara khusus, diharapkan dapat berperan sebagai mitra pembangunan dengan menyediakan dukungan prasarana, termasuk pasokan pangan dan kebutuhan pembangunan. Nelayan di Provinsi Sulawesi Barat cenderung



menjual hasil tangkapan mereka ke Provinsi Kalimantan Timur karena harga yang lebih menguntungkan. Meskipun geografisnya berseberangan dengan IKN, Provinsi Sulawesi Barat perlu memperhatikan infrastruktur dan konektivitas terhadap IKN untuk memaksimalkan potensi ekonomi yang ada.

Sejak tahun 2000, telah didirikan Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) sebagai lembaga untuk mengoordinasikan kerjasama antar provinsi di Pulau Sulawesi guna memajukan anggotanya. Sekretariat BKPRS berlokasi di Kota Makassar dan dikelola oleh Sekretaris Jenderal, sementara Ketua BKPRS dijabat oleh para Gubernur yang bergiliran setiap periode tertentu. BKPRS bukan hanya berfungsi sebagai forum kerjasama antar provinsi, tetapi juga memperkuat posisi pemerintah provinsi di Pulau Sulawesi dalam menyampaikan aspirasi dan memperoleh dukungan dari pemerintah pusat.

Dengan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur oleh pemerintah pusat, keberadaan BKPRS menjadi semakin penting dan strategis. BKPRS dapat menjadi platform yang efektif untuk mengembangkan kerjasama antarwilayah, tidak hanya di Pulau Sulawesi tetapi juga dengan Pulau Kalimantan. Sulawesi, sebagai pulau terdekat dari Ibu Kota Negara (IKN), memiliki peluang besar untuk mendukung IKN, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Namun, pemerintah provinsi di Sulawesi perlu bekerja sama dan saling mendukung untuk mengoptimalkan potensi di masing-masing wilayah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga terus meningkatkan konektivitas wilayah dengan daerah lain. Pelabuhan Simboro dan Pelabuhan Mamuju telah disiapkan untuk menyuplai berbagai kebutuhan daerah sekitar, sementara investasi signifikan dilakukan pada tahun 2019 untuk pengembangan infrastruktur



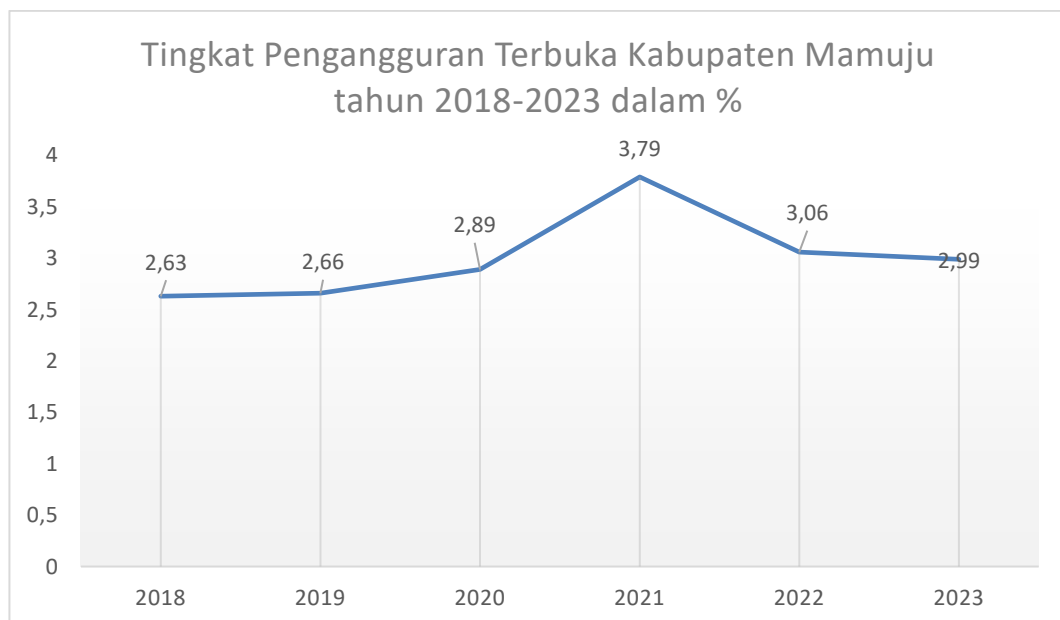
transportasi dan fasilitas lainnya. Isu infrastruktur seperti kondisi jalan, jembatan, dan pengembangan kapasitas bandara perlu menjadi fokus perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Barat agar peluang ekonomi tidak terlewatkan oleh daerah lain yang lebih siap.

Kabupaten Mamuju, sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat di Indonesia, memiliki latar belakang yang kaya dan beragam, mencerminkan keberagaman geografis, sosial, budaya, dan ekonomi yang menjadi ciri khas daerah ini. Kabupaten Mamuju mengalami transformasi signifikan, termasuk pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2013, yang memberikan dampak besar terhadap luas wilayah, jumlah penduduk, dan kondisi geografis daerah tersebut. Selanjutnya, peristiwa gempa bumi dan penyebaran virus Covid-19 pada tahun 2021 menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi di Kabupaten Mamuju. Perubahan-perubahan kondisi ini memiliki potensi untuk menghambat pencapaian hasil yang diinginkan dalam mencapai visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Mamuju 2005-2025. Pandemi Covid-19 yang muncul di Indonesia sejak bulan Maret 2020 tidak hanya mempengaruhi sektor kesehatan, tetapi juga merasuki berbagai aspek lainnya, seperti ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Dampak dari wabah ini telah meluas, menciptakan ketidakpastian mengenai kapan situasi ini akan berakhir, sehingga dibutuhkan tindakan antisipatif baik dalam hal pencegahan maupun penanganan konsekuensi yang timbul.

Isu-isu strategis yang harus dikelola dengan baik dalam perjalanan masyarakat Mamuju dua puluh tahun, yaitu peningkatan ketahanan kinerja PDRB terhadap pengaruh gejolak perekonomian regional, nasional dan global. Perkuatan basis ekonomi kerakyatan yang mendasarkan diri pada optimalisasi



segenap potensi lokal. Perbaikan iklim investasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan investasi swasta. Penurunan jumlah penduduk miskin. Pemerataan dan peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, yang didukung dengan prasarana dan sarana serta sumber daya manusia yang memadai. Peningkatan infrastruktur yang memadai untuk memacu pengembangan wilayah. Belum optimalnya sarana, prasarana dan tenaga layanan kesehatan menjadi permasalahan pada bidang kesehatan.



Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Mamuju tahun 2018-2023 dalam persen

Sumber : BPS Kabupaten Mamuju, 2018-2023

Di Kabupaten Mamuju, sektor tenaga kerja menghadapi beberapa permasalahan serius, yang melibatkan tingkat pengangguran yang masih tinggi dan rendahnya penempatan kerja. Gambaran permasalahan ini dapat ditemukan dalam data statistik yang mencatat bahwa pada tahun 2018, Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 2,63%. Situasi ini semakin memburuk pada tahun 2021, mencapai titik tertinggi sebesar 3,79%. Meskipun



terjadi penurunan pada tahun 2023, dengan catatan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,99%, namun tantangan dalam hal ini masih ada.

Salah satu masalah utama yang dihadapi di bidang tenaga kerja adalah masih adanya sejumlah besar individu yang belum mendapatkan pekerjaan, menciptakan situasi pengangguran yang signifikan. Hal ini dapat memberikan dampak negatif tidak hanya pada tingkat kesejahteraan masyarakat, tetapi juga pada stabilitas sosial dan ekonomi Kabupaten Mamuju secara keseluruhan. Selain itu, rendahnya penempatan kerja menunjukkan bahwa meskipun ada tenaga kerja yang tersedia, kurangnya peluang kerja yang sesuai dengan keterampilan dan keahlian masyarakat menjadi hambatan utama. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja agar dapat lebih mudah diserap oleh pasar kerja lokal maupun nasional.

Peningkatan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan juga menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan ini. Program pelatihan, pengembangan keterampilan, dan pembukaan peluang kerja baru perlu diperkuat untuk memberikan solusi berkelanjutan terhadap masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Mamuju. Dengan demikian, upaya bersama dari berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan peningkatan kualitas tenaga kerja, sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di Kabupaten Mamuju.

RPJPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2045 adalah sebuah panduan perencanaan jangka panjang yang menjadi landasan bagi perkembangan daerah selama 20 tahun ke depan. Dokumen ini dibuat dengan merujuk pada visi dan misi daerah, yang kemudian dijabarkan menjadi tujuan, strategi, dan sasaran utama untuk pe-



riode yang panjang. Arah pembangunan jangka panjang ini disesuaikan dengan urusan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju, dengan mempertimbangkan potensi dan kapasitas daerah. Sesuai dengan aturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 7-10, penyusunan RPJPD Kabupaten Mamuju mengadopsi berbagai pendekatan, termasuk teknokratik, partisipatif, politis, pendekatan dari bawah (*bottom-up*), dan dari atas (*top-down*).

1. **Pendekatan Politis:** Pendekatan ini menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan yang dibahas bersama DPRD. Pendekatan ini menganggap bahwa pemilihan Kepala Daerah merupakan elemen penting dalam pembuatan program. Hal ini karena pilihan rakyat dalam pemilihan didasarkan pada program pembangunan yang ditawarkan oleh calon Kepala Daerah.
2. **Pendekatan Teknokratik:** Pendekatan ini mengacu pada penggunaan metode ilmiah dan kerangka berpikir rasional untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
3. **Pendekatan Partisipatif:** Pendekatan ini melibatkan pemangku kepentingan pembangunan untuk mendapatkan aspirasi, saran, dan masukan dalam penyusunan RPJPD. Tujuannya adalah untuk menciptakan rasa memiliki di antara mereka yang terlibat dalam proses ini.
4. **Pendekatan Atas-Bawah (*Top-Down*) dan Bawah-Atas (*Bottom-Up*):** Ini mencakup perencanaan yang diselaraskan dari tingkat terendah, mulai dari Desa dan Kecamatan, hingga tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, dan Nasional. Proses ini memungkinkan masukan dari berbagai tingkatan dalam merumuskan RPJPD, menciptakan keselarasan vertikal dan horizontal dalam perencanaan pembangunan.



Penyusunan RPJPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2045 disusun dengan memerhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045. Penyusunan RPJPD Kabupaten Mamuju telah melibatkan seluruh pihak berkepentingan melalui forum konsultasi publik dan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) guna memperhitungkan berbagai aspek. Dokumen ini berperan sebagai pedoman untuk menyusun RPJMD Kabupaten Mamuju setiap lima tahun selama periode 20 tahun. Selain itu, dokumen ini memiliki peranan penting dalam mengawasi dan mengevaluasi kemajuan pembangunan di Kabupaten Mamuju. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mamuju perlu merancang RPJPD dengan teliti agar menjadi referensi yang efektif dalam menjalankan program pembangunan, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi daerah di masa mendatang.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 15. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);



18. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
19. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008



- Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
 29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 30. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 22 Nomor 180);
 32. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum



- Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);



40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
42. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034; dan
44. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 127).

1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) huruf a, merupakan rincian dari visi, misi, kebijakan, dan sasaran utama pembangunan Daerah dalam rentang waktu 20 tahun. Penyusunannya dilakukan dengan merujuk pada Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Sistem Perencanaan Pembangunan mencakup perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh



pemerintah dan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional dokumen perencanaan terdiri atas :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) berdimensi panjang 20 tahunan;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berdimensi menengah 5 tahunan;
3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) berdimensi pendek 1 tahunan;
4. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga; dan
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dua landasan hukum utama dalam perencanaan ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. RPJPN dan RPJPD memiliki hubungan erat dan saling melengkapi. RPJPD merupakan dokumen perencanaan daerah yang mengacu pada periode 20 tahun. Isinya meliputi rincian visi, misi, isu strategis, kebijakan, serta tujuan utama daerah. Penyusunan RPJPD dilakukan dengan memperhatikan dan mengikuti pedoman dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

RPJPD Kabupaten Mamuju 2025-2045 memiliki tujuan mendasar untuk mencapai peningkatan dan keterpaduan dalam



pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, perkembangan bisnis, perbaikan layanan publik, serta peningkatan daya saing daerah. Dokumen ini menjadi panduan umum bagi Pemerintah Daerah dan seluruh komunitas di Kabupaten Mamuju dalam menjalankan program pembangunan. RPJPD berperan sebagai kerangka dasar dalam mengelola pembangunan daerah, yang menggambarkan aspirasi masyarakat Mamuju sambil tetap memperhatikan arah RPJP Nasional dan RPJP Provinsi. Dokumen ini menjadi pedoman dalam tata kelola pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan penyediaan layanan publik bagi warga dan seluruh pihak di Kabupaten Mamuju. RPJPD menjadi kunci dalam menetapkan arah pembangunan daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

RPJPD menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Rencana yang terdapat di dalam RPJPD mencakup perencanaan jangka panjang dari seluruh bidang pembangunan, yang dipertimbangkan dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan. Dengan demikian, RPJPD Kabupaten Mamuju dibuat dengan mempertimbangkan dan mengacu pada dokumen perencanaan lain seperti RPJP Nasional, RPJP Provinsi Sulawesi Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, dan RTRW Provinsi Sulawesi Barat. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keterpaduan di antara dokumen perencanaan tersebut baik dari segi sektoral maupun regional, sehingga implementasinya menghasilkan hasil yang tepat dan terarah. Jika diuraikan, hubungan antara RPJPD Kabupaten Mamuju dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:



1.3.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Hubungan antara RPJPN dan RPJPD Kabupaten Mamuju sangat penting untuk memastikan koordinasi yang baik antara tingkat nasional dan tingkat daerah dalam upaya pembangunan. RPJPN merupakan rencana nasional yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan arah pembangunan nasional dalam jangka panjang dalam rentang 20 tahun. RPJPD Kabupaten Mamuju merujuk pada rencana serupa yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan permasalahan, tantangan serta keterbatasan yang dihadapi oleh Indonesia, ditetapkan visi yang dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu:

Menjadi Bangsa yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur

Yang kemudian diterjemaskan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 yaitu :

Visi Indonesia Emas 2045

Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan

Visi tersebut memiliki lima sasaran utama Visi Indonesia 2045 sebagai berikut :

1. Pendapatan per kapita setara negara maju;
2. Kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan bekrurang;
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
5. Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

Upaya mewujudkan Visi Pembangunan Nasional tersebut ditempuh dengan 8 (delapan) misi agenda pembangunan yang terdiri dari 3 (tiga) misi (agenda) transformasi, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi yang



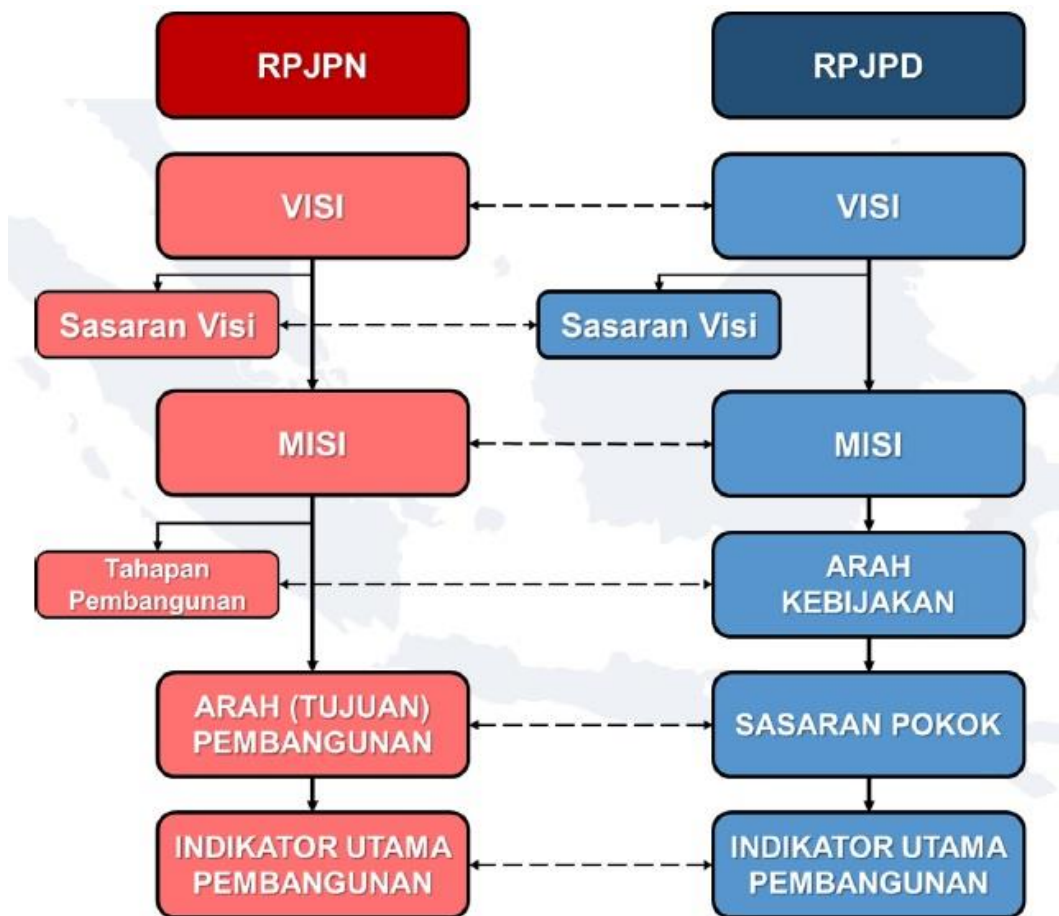
dijabarkan ke dalam 17 arah (tujuan) pembangunan sebagai komitmen Indonesia untuk tetap melanjutkan pembangunan berkelanjutan. Delapan misi (agenda) pembangunan tersebut adalah :

1. Mewujudkan transformasi sosial;
2. Mewujudkan transformasi ekonomi;
3. Mewujudkan transformasi tata Kelola;
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi;
6. Pembangunan kewilayahan;
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan
8. Kestinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas.

1.3.2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tingkat Provinsi dan RPJPD tingkat Kabupaten/Kota memiliki keterkaitan tentang bagaimana perencanaan pembangunan di tingkat provinsi saling berhubungan dan mempengaruhi dengan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota dalam suatu wilayah.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Bersama/Surat Edaran Bersama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, terdapat instruksi penyelarasan muatan sebagai berikut:



**Gambar 1.3 Penyelarasan antara RPJPN 2025-2045 dengan
RPJPD 2025-2045**

Sumber : Paparan Ranwal RPJPD 2025-2045 Provinsi Sulawesi Barat

Terdapat beberapa poin dalam penyelarasan RPJPN 2025-2045 dan RPJPD 2025-2045, antara lain:

- Visi: RPJPD sekurang-kurangnya memuat kata “maju” dan “berkelanjutan”;
- 5 Sasaran Visi: RPJPD wajib memuat sasaran visi RPJPN 1, 2, 4, dan 5, sedangkan sasaran visi 3 ditentukan oleh daerah;
- 8 Misi: Misi RPJPD wajib berjumlah 8 (delapan) dengan memuat kata kunci Misi;
- 4 Tahapan Pembangunan: RPJPD memuat gambaran 4 tahapan yang sesuai dengan karakteristik daerah;
- 17 Arah Pembangunan: RPJPD wajib memuat arah



pembangunan berjumlah 17 (tujuh belas) dengan memuat kata kunci yang sama sesuai karakteristik daerah;

- 45 Indikator: RPJPD wajib memuat indikator berjumlah 45 (empat puluh lima) yang telah diturunkan ke daerah, kecuali untuk yang tidak dapat diturunkan ke daerah ditentukan oleh daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan RPJPD Kabupaten Mamuju, yaitu untuk menjabarkan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. RPJPD ditetapkan dengan Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Selain itu, maksud dari penyusunan RPJPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah Tahun 2025-2045;
2. Memelihara keselarasan dan konsistensi perencanaan pembangunan antara Dokumen Perencanaan baik dengan level nasional maupun Daerah.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Mamuju; dan
5. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Mamuju.

Sedangkan tujuan dari penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2045 dapat dijadikan pedoman untuk:



1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Level Daerah Kabupaten Mamuju;
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Level Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju; dan
3. Penetapan dan Penentuan Isu Strategis dan Kebijakan Pembangunan selama 5 (Lima) Tahunan.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2045 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan dijelaskan terkait latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta keterkaitan RPJPD Kabupaten Mamuju dengan dokumen rencana nasional dan daerah lainnya.

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya

1.4 Maksud dan Tujuan

1.5 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini akan menguraikan dengan logis dasar-dasar analisis serta memberikan gambaran umum tentang kondisi daerah, mencakup aspek geografi,



demografi, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Daya Saing Daerah
- 2.4 Aspek Pelayanan Umum
- 2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025
- 2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik
- 2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Bab III

Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Daerah

Bab ini merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJPD karena menjadi dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah.

- 3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah
- 3.2 Isu Strategis

Bab IV

Visi Dan Misi Daerah

Bab ini akan menguraikan visi dan misi yang mencerminkan gambaran atau harapan terkait hasil pembangunan daerah dalam 20 tahun ke depan.

- 4.1 Visi
- 4.2 Misi

Bab V

Arah Kebijakan Dan Sasaran Pokok Daerah

Dalam bab ini, akan dijelaskan langkah-langkah dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk menetapkan prioritas dan tahapan pembangunan selama



periode 20 tahun guna mencapai tujuan utama dalam setiap lima tahun RPJPD.

5.1 Arah Kebijakan Daerah

5.2 Sasaran Pokok

Bab VI

Penutup



Pemerintah
Kabupaten Mamuju

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Aspek Geografi

Kabupaten Mamuju terletak di sebelah Barat Pulau Sulawesi tepatnya di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Barat. Secara Geografis Kabupaten Mamuju terletak di posisi koordinat 10 38' 110" – 20 54' 552" Lintang Selatan dan 110 54' 47 – 130 5' 35 Bujur Timur atau berada dibagian selatan dari garis ekuator atau garis khatulistiwa. Secara administrasi, Kabupaten Mamuju berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Tengah;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, dan Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur.

Kabupaten Mamuju dengan wilayah yang terdiri dari wilayah pesisir dan laut, daratan, dan pegunungan dan merupakan wilayah terluas di Provinsi Sulawesi Barat memiliki luas wilayah 4.979,89 km², secara administrasi pemerintahan terbagi atas 11 Kecamatan, terdiri dari 88 Desa, dan 13 Kelurahan.

Kecamatan terluas di Kabupaten Mamuju yaitu Kecamatan Kalumpang dengan luas wilayah 1.801,71 Km² atau 36,18 persen, sedangkan Kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Bala-balakang dengan luas wilayah 1,48 Km² atau 0,03 persen, dan untuk ibukota Kabupaten yaitu Kecamatan Mamuju dengan luas 247,48 Km².

Berdasarkan jarak terhadap Ibukota Kabupaten maka Kecamatan Balabalakang memiliki jarak terjauh sekitar 188,62 km,

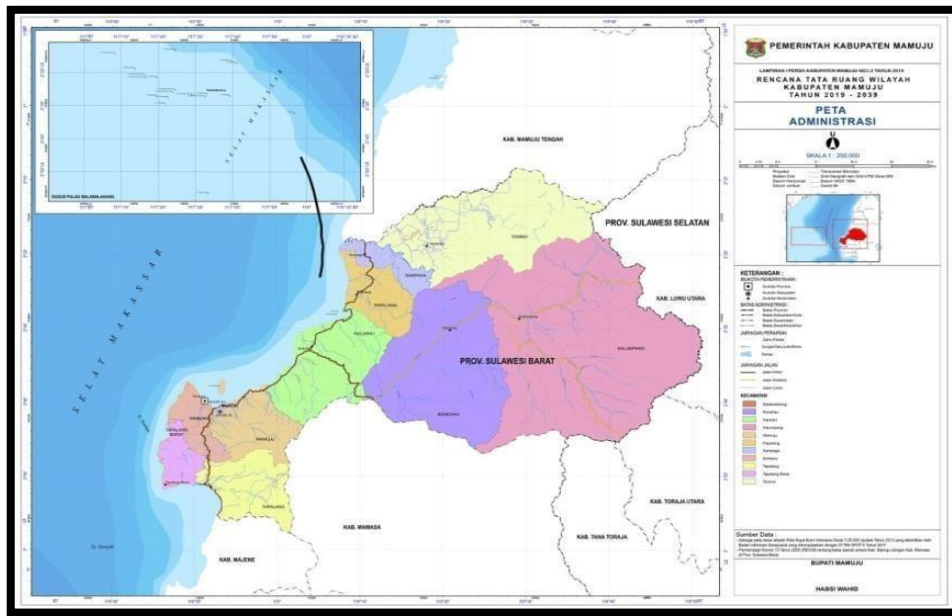


sedangkan yang terdekat adalah Kecamatan Mamuju yang juga merupakan Ibukota Kabupaten Kecamatan Balabalakang juga merupakan satu-satunya Kecamatan di Kabupaten Mamuju yang tidak bisa diakses menggunakan angkutan darat. Untuk lebih jelasnya mengenai letak dan luas Kabupaten Mamuju dapat dilihat sebagaimana pada tabel 2.1 dan Gambar 2.1 sebagai berikut.

Tabel 2.1 Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Kecamatan di Kabupaten Mamuju

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Desa / Kelurahan	Luas km2	Presentase Terhadap Luas Kabupaten (%)
1	Tapalang	Galung	10	273,02	5,48
2	Tapalang barat	Dungkait	7	111,63	2,24
3	Mamuju	Binanga	8	247,48	4,97
4	Simboro	Rangas	8	132,73	2,67
5	Balabalakang	Pulau Salissingan	2	1,48	0,03
6	Kaluku	Kalukku	14	454,98	9,14
7	Papalang	Topore	9	201,92	4,05
8	Sampaga	Bunde	7	110,83	2,23
9	Tommo	Campaloga	14	769,66	15,46
10	Kalumpang	Kalumpang	13	1.801,71	36,18
11	Bonehau	Bonehau	9	874,47	17,56
Jumlah			101	4,979,89	100,00

Sumber : Kabupaten Mamuju Dalam Angka 2024



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Mamuju

Sumber : RTRW Kabupaten Mamuju 2019-2039

Secara geografi Kota Mamuju berada ditepi barat Pulau Sulawesi. Di utara terdapat Teluk Mamuju dan di selatan ada Teluk Lebani. Ketinggian wilayah Kota Mamuju antara 0 sampai >1500 meter di atas permukaan air laut (Mdpl) dengan titik tertinggi berada di Gunung Adang Batambalo. Sungai-sungai besar yang ada di Kota Mamuju diantaranya Sungai Mamuju, Sungai Karema, Sungai Simboro, Sungai Anung, Sungai Taparia, Sungai Anusu, Sungai Tampala dan Sungai Malunda, dll. Secara geologi, wilayah Kota Mamasa tersusun oleh batuan Formasi Gunung Api Adang berupa tuf lapili, breksi bersisipan lava, batupasir dan batu lempung.

Sedangkan wilayah lembah yang dialiri Sungai Taparia serta Sungai Karema tersusun atas Formasi Mamuju berupa Napal, kalkerenit dan batu gamping koral bersisipan tuf dan batu pasir. Kota Mamuju yang beriklim tropis dengan dua musim dalam satu tahunnya yaitu musim kemarau dan penghujan, dengan suhu udara pada siang hari berkisar antara 24 – 34 derajat Celcius.



**Tabel 2.2 Tinggi Wilayah dan Letak Geografis Kabupaten
Mamuju Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah2 (mdpl)	Letak Geografis	
			Lintang Selatan	Bujur Timur
1	Tapalang	0-1000	2,85880	118,86634
2	Tapalang barat	0-500	2,85392	118,7748
3	Mamuju	0-500	2,67627	118,89056
4	Simboro	0-500	2,65978	118,8495
5	Balabalakang	0-500	2,3164	117,2308
6	Kaluku	0-500	2,54229	119,06894
7	Papalang	0-100	2,42470	119,15955
8	Sampaga	0-500	2,33443	119,17461
9	Tommo	0-500	2,31577	119,29969
10	Kalumpang	125-1500	2,4793	119,4855
11	Bonehau	200-500	2,5056	119,3465

Sumber : Kabupaten Mamuju Dalam Angka 2024

A. Topografi

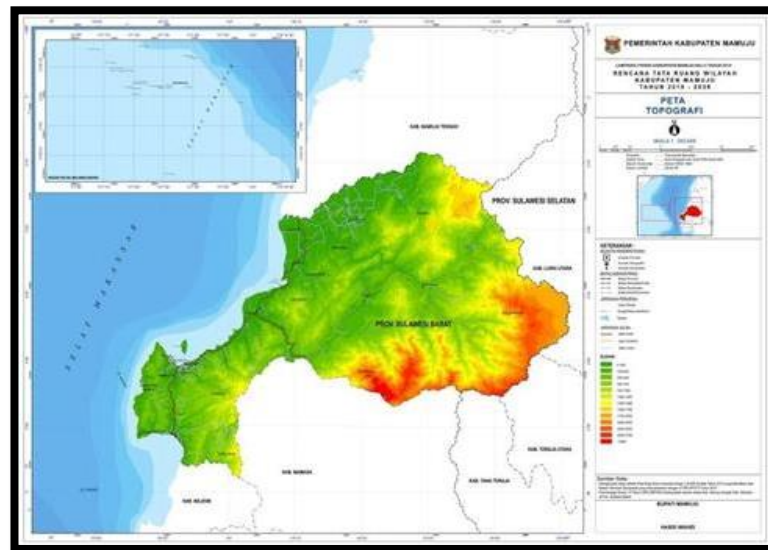
Topografi merupakan bentuk permukaan suatu lahan yang dikelompokkan berdasarkan perbedaan ketinggian (amplitude) dari permukaan bumi (bidang datar) suatu bentuk bentang lahan (landform).

Keadaan topografi Kabupaten Mamuju didominasi oleh daerah curam dan tidak curam dengan kelerengan antara 15 – 45 persen. Kondisi ini berpengaruh terhadap topografi wilayah sehingga bervariasi mulai dari daerah datar, landai hingga agak curam.

Dari segi topografi Kabupaten Mamuju secara umum keadaan topografinya bergunung-gunung dan berbukit-bukit berada pada ketinggian 395 meter dari permukaan laut. Kemiringan lereng yang memiliki porsi terbesar adalah kemiringan antara 12 – 25 persen dengan luas cakupan sebesar 224.910 Ha. Kemiringan lereng

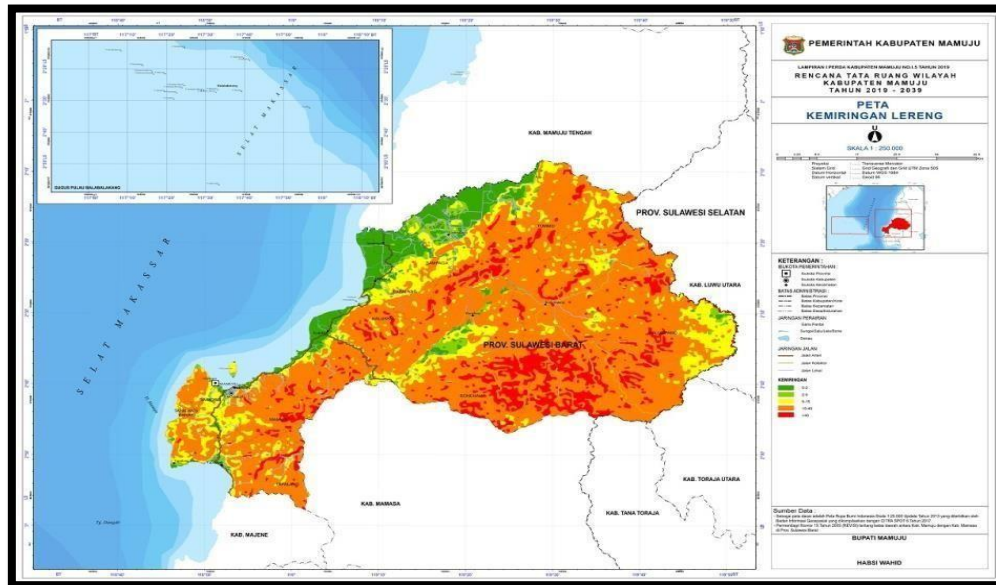
seperti ini terdapat hampir di semua Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mamuju, dengan wilayah Kecamatan Tapalang yang memiliki porsi terbesar seluas 32.613 Ha. Kemiringan antara 25 – 40 persen mencakup wilayah seluas 206.387 Ha. Kemiringan seperti ini dominan terdapat di Kecamatan Kalukku seluas 20.748 Ha. Kemiringan diatas 40 Persen mencakup wilayah seluas 186.336 Ha. Kemiringan seperti ini dominan terdapat di wilayah Kecamatan Kalumpang dan Bonehau dengan luasan mencapai 77.890 Ha.

Kemiringan antara 0 – 2 persen dengan luas cakupan 113.134 Ha. Dominan terdapat di Kecamatan Kalukku 19.069 Ha. Kemiringan seperti ini terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Mamuju. Sedangkan kemiringan antara 2 – 15 persen hanya mencakup wilayah seluas 82.122 Ha tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Mamuju. Untuk lebih jelasnya sebagaimana gambar 2.2 berikut.



Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Mamuju

Sumber : RTRW Kab. Mamuju 2019 – 2039



Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Mamuju

Sumber : RTRW Kab. Mamuju 2019 –2039

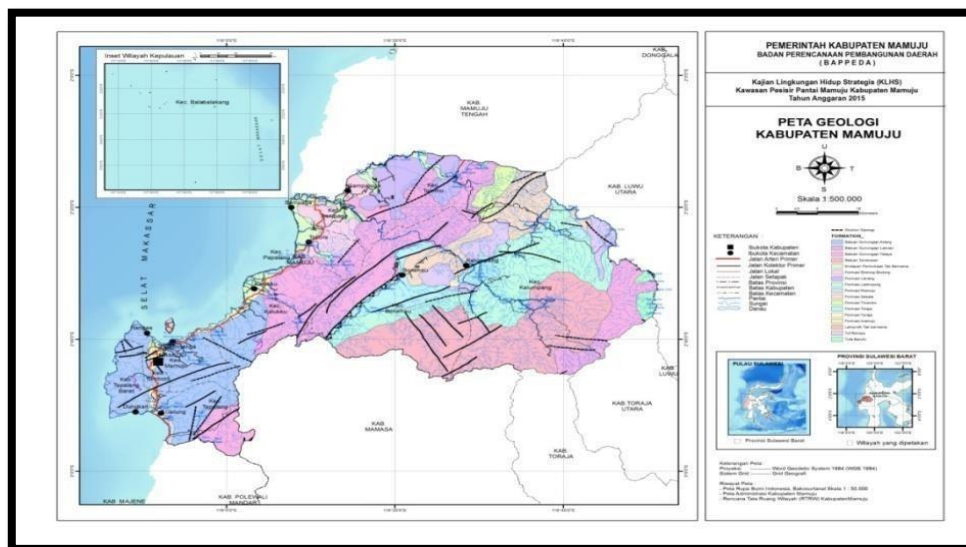
B. Kondisi Geologi

Batuan tertua yang tersingkap di daerah Mamuju dan sekitarnya berupa batuan malihan yang terdiri dari sekis, genes, filit dan batu sabak yang diduga berumur lebih tua dari Kapur. Secara tidak selaras di atasnya ditindih oleh Formasi Latimojong yang terdiri dari batuan-batuan yang termalihkan sangat lemah. Berdasarkan penelitian lapangan, struktur geologi daerah Mamuju dan sekitarnya terbentuk setelah pengendapan Formasi Mamuju yang berumur Miosen Akhir dan Formasi Larian yang berumur Miosen Akhir – Pliosen Awal (Ratman dan Atmawinata, 1993), yang diakibatkan oleh gaya kompresi regional barat – timur. Gaya kompresi ini diperkirakan berhubungan dengan peristiwa tumbukan antara benua mikro (pecahan Benua Australia) dengan Mintakat Geologi Busur Magmatik Tersier Sulawesi Barat yang mencapai klimaksnya pada Miosen Akhir (Coffield dkk, 1993).

Penemuan 4 lapangan batubara di daerah Mamuju dan



sekitarnya, yaitu Kalumpang, Panusuan, Tamalea dan Rante Pandolok. Dari keempat lapangan batubara tersebut Kalumpang merupakan lapangan terbesar. Namun kandungan batubara di lapangan Kalumpang sebesar 292.527 ton dan daerah Tamalea sebesar 351.221 ton (Kartasumantri dan Hadyanto, 1999). Keterdapatan biji besi di daerah Tapango terdiri dari dua kategori, yaitu Primary body dan Floating ore atau deluvial ore. Pembentukan biji besi dihasilkan oleh larutan hidrothermal yang disebabkan oleh adanya aktifitas vulkanisme dan tektonisme di sekitar daerah ini. Tektonisme dan vulkanisme yang terjadi di bagian Sulawesi Barat pada Kala Tersier juga sangat dipengaruhi oleh proses geologi regional yang membentuk Sulawesi bagian barat daya.



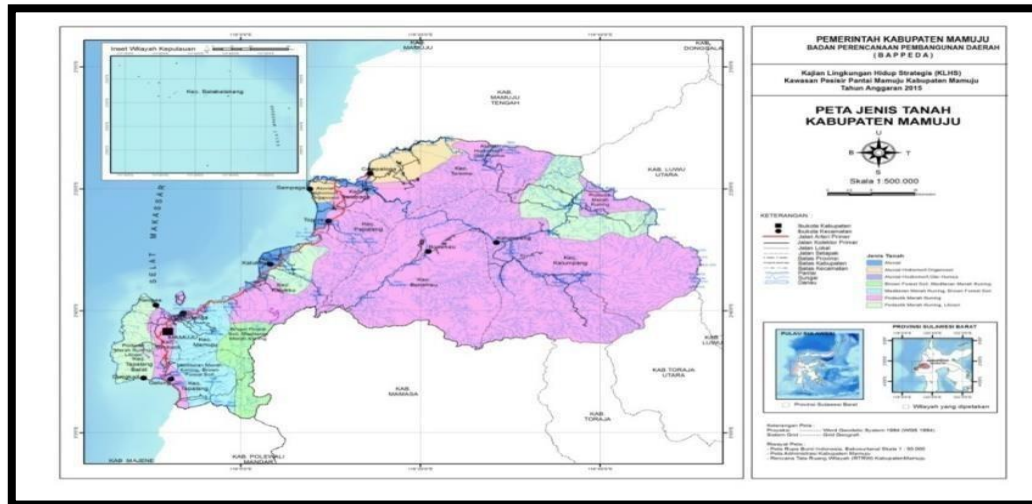
Gambar 2.4 Peta Struktur Geologi Kabupaten Mamuju

Sumber : Bagian Pemerintahan Setdakab. Mamuju, 2016

Berdasarkan data geologi Kabupaten Mamuju, jenis tanah di daerah inidapat digolongkan 5 (lima) jenis, yakni tanah Alluvial, Regosol, Andosol dan tanah Mediteran. Sedang untuk kandungan geologi di Kabupaten Mamuju secara garis besarnya dibagi menjadi 2 (dua), yakni kelompok bahan galian konstruksi dan kelompok



galian industri.



Gambar 2.5 Peta Jenis Tanah Kabupaten Mamuju

Sumber : Bagian Pemerintahan SEKDAKAB. Mamuju, 2016

C. Kondisi Hidrologi

Keadaan hidrologi Kabupaten Mamuju, berdasarkan hasil observasi lapangandibedakan antara lain air permukaan (sungai, rawa dan sebagainya) dan air yang bersumber di bawah permukaan (air tanah). Air dibawah permukaan yang merupakan air tanah merupakan sumber air bersih untuk kehidupan sehari-hari masyarakat.

Sumber air permukaan di wilayah Kabupaten Mamuju bersumber dari beberapa sungai yang tersebar di beberapa kecamatan, yang pemanfaatannya untuk kebutuhan rumah tangga dan kegiatan pertanian. Kecamatan yang paling banyak dilintasi sungai adalah Kecamatan Kalukku dan Kecamatan Tapalang dengan 13 sungai yang melintasinya. Sungai yang terdapat di Kabupaten Mamuju yakni:



Tabel 2.3 Daftar Sungai di Kabupaten Mamuju

Kecamatan	Nama Sungai	
Kecamatan Tapalang	1. Marurinding	2. Petakeang
	3. Bonde Puteh	4. Air Panas
	5. Taosa	6. Ahu
	7. Balehanan	8. Tamao
	9. Kopeang	10. Karang Matti
	11. Anusu	12. Taan
	13. Kebanga	
Kecamatan Tapalang Barat	1. Pasa'bu	2. Tamale
	3. Losa	4. Sulako
	5. Padada	6. Panantai
	7. Takke	8. Pindang
Kecamatan Mamuju	1. Bone-bone	2. Karema
	3. Tumuki	4. Rimuku
	5. Mamuju	
Kecamatan Simboro	1. Sese	2. Kulasi
	3. Simboro	4. Lumandang
	5. Gimbang	6. Malauwa
Kecamatan Kalukku	1. Guliling	2. Gentungan
	3. Pure	4. Ahuni
	5. Kalukku	6. Ampallas
	7. Keang	8. Anusu
	9. Kabuloang	10. Kebanga
	11. Kapaasang	12. Petakeang
	13. Kona	



Kecamatan	Nama Sungai	
Kecamatan Papalang	1. Papalang	2. Salubarana
	3. Paniki	4. Salukayu
	5. Salumasa	
Kecamatan Sampaga	1. Karama	2. Salubarana
Kecamatan Tommo	1. Kanan	2. Sampaga
Kecamatan Kalumpang	1. Pelulasa	2. Kaluttun
	3. Sepang	4. Siraun
	5. Bulu	6. Tulasi
	7. Mabubu	
Kecamatan Bonehau	1. Kalasissi	2. Takkesenga
	3. Pelosian	4. Pauang
	5. Salutiwo	6. Tabola-bola
	7. Saludenge	8. Bunana
	9. Atu-atu	10. Mappu
	11. Salumitto	
Kecamatan Kep. Bala-balakang	Tidak Ada	

Sumber : Kabupaten Mamuju Dalam Angka 2024

1. Sumberdaya Air

Potensi sumberdaya air di Kabupaten Mamuju selain dipengaruhi oleh kondisi klimatologi wilayah, juga dipengaruhi oleh beberapa aliran sungai yang melintas pada beberapa kawasan. Potensi sumberdaya air tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian dan sumber air baku untuk kebutuhan lainnya.

Potensi sumberdaya air di wilayah Kabupaten Mamuju

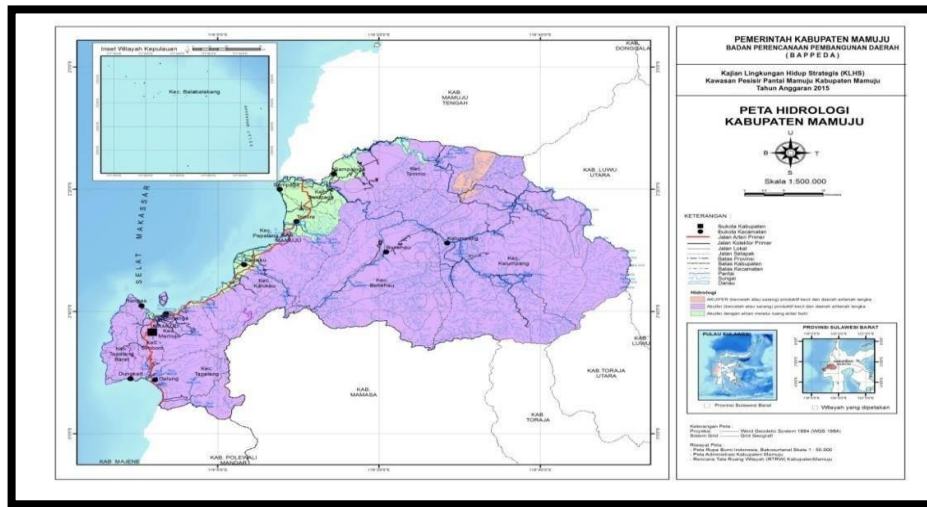


yang telah dimanfaatkan oleh penduduk dalam kehidupan kesehariannya untuk berbagai keperluan bersumber dari air tanah dangkal (air permukaan dan air tanah dalam air tanah dangkal/permukaan dapat berupa air sungai, sumur, rawa-rawa, bendungan, mata air dan lain sebagainya, sedangkan potensi air tanah dalam dengan pemanfaatan air melalui pengeboran).

Penyediaan air minum merupakan suatu kebutuhan pokok penduduk di suatu daerah, terutama pada daerah-daerah yang potensi air tanahnya terbatas dan kualitasnya kurang memadai jika ditinjau dari aspek kesehatan. Meskipun demikian, pengadaan air minum masih terbatas dan umumnya penduduk menggunakan sumur air tanah dangkal, dalam (artesis), air permukaan dan mata air yang bersumber dari pegunungan.

2. Peruntukan Air

Sungai sebagai sumberdaya air yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan yakni kebutuhan air bersih dan kepentingan pertanian (irigasi), dengan keberadaan beberapa sungai menurut Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Mamuju adalah Sungai Karama, dan Sungai Kaluku. Pada kawasan perkotaan peruntukan air lebih difokuskan pada kebutuhan air minum masyarakat perkotaan yang bersumber dari air tanah dangkal dan air tanah dalam serta sumber air yang dikelola oleh PDAM.

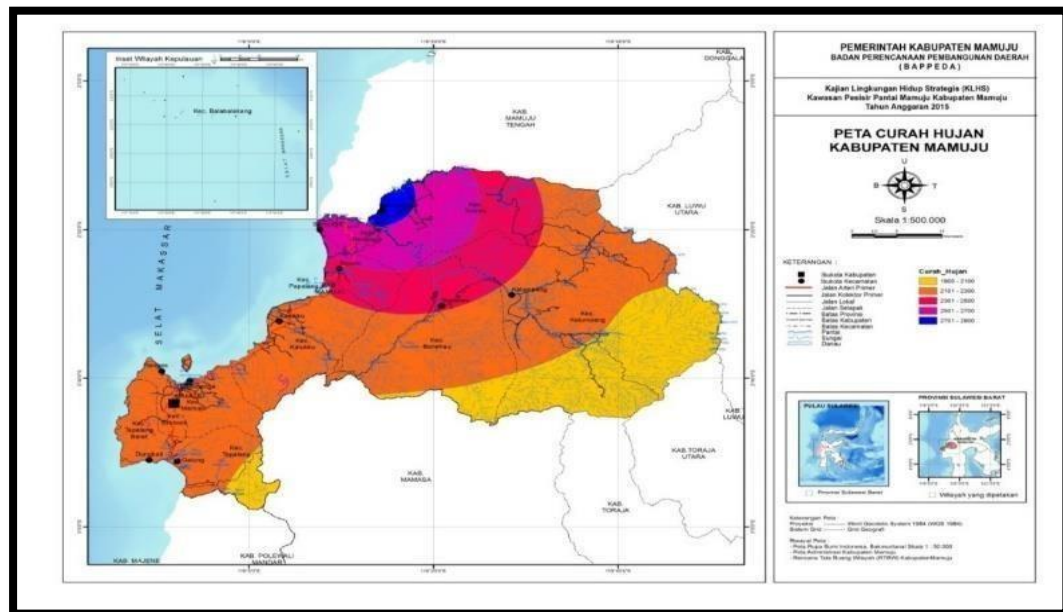


Gambar 2.6 Peta Hidrologi Kabupaten Mamuju

Sumber : Bagian Pemerintahan SEKDAKAB. Mamuju, 2016

D. Kondisi Klimatologi

Iklim di Kabupaten Mamuju tergolong cukup basah sampai sangat basah, yang menurut Klasifikasi iklim Oldeman, digolongkan kedalam kelas iklim C2, C1, B2 & B1 (mayoritas) dan A yang digolongkan sebagai cukup basah sampai sangat basah. Variasi jumlah bulan kering dari nol sampai dua hingga tiga bulan pertahun. Musim hujan dominan terjadi sepanjang bulan Januari-Desember dengan peningkatan terbesar pada bulan Agustus yaitu sebesar 629,6 mm, sedangkan terendah pada bulan April sebesar 138,2 mm.



Gambar 2.7 Peta Klimatologi Kabupaten Mamuju

Sumber : Bagian Pemerintahan SEKDAKAB. Mamuju, 2016

Tabel 2.4 Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Mamuju (mm), 2019 – 2023

Bulan	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	170	333,9	229,9	-	105,30
Februari	150	290,6	197,4	-	193,80
Maret	306	122,5	195,2	-	309,90
April	161	457,9	138,2	106,1	93,30
Mei	43	169,7	285	383,0	183,10
Juni	286	275,3	196,3	359,6	65,10
Juli	26	222,8	203,9	398,6	153,70
Agustus	14	100,5	629,6	204,5	21,20
September	27	213,9	317,3	312,9	97,40
Oktober	59	519,2	400,3	632,2	56,20
November	131	337,8	382,2	263,0	330,00
Desember	189	55,9	313,7	165,1	248,50

Sumber : Kabupaten Mamuju Dalam Angka, 2019 – 2024



E. Kondisi Penggunaan Lahan

Luas lahan sawah di Kabupaten Mamuju adalah sekitar 15.395 ha atau 3,12 persen dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten ini. Lahan sawah tersebut menyebar hampir disetiap kecamatan kecuali Kecamatan Mamuju dan Balabalakang, Kecamatan yang memiliki lahan sawah yang terluas adalah Kecamatan Tommo yaitu sekitar 5.295 ha dan Kecamatan Kalukku sekitar 3.493 ha. Lahan sawah ditinjau dari sistem pengairan atau irigasi yang ada, lahan sawah yang beririgasi, yaitu dengan luas sebesar 4.288 ha atau 27,85 persen dari luas keseluruhan lahan sawah. Sedangkan selebihnya merupakan Sawah tadah hujan dengan luas sebesar 11.107 ha atau 72,15 persen dari luas keseluruhan lahan sawah.

Luas lahan bukan sawah di Kabupaten Mamuju adalah sekitar 155.084 ha, yang juga menyebar di Sebelas Kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju. Kecamatan yang mempunyai lahan bukan sawah yang terluas adalah Kecamatan Tapalang yaitu sekitar 40.845 ha, dan spesifiknya adalah lahan perkebunan yaitu sekitar 21.124 ha dan padang rumput sekitar 12.981 ha. Kemudian Kecamatan yang juga tergolong mempunyai lahan bukan sawah cukup luas adalah Kecamatan Kalukku, yaitu sekitar 27.935 ha, dan spesifiknya juga adalah lahan perkebunan yaitu sekitar 10.844 ha. Sedangkan kecamatan yang mempunyai lahan bukan sawah terkecil adalah Kecamatan Balabalakang yang luasnya kurang lebih 9 ha.

Luas lahan bukan pertanian yang ada di Kabupaten Mamuju adalah sekitar 322.300 ha atau sekitar 65,27 persen dari luas Kabupaten Mamuju. Kecamatan yang terluas lahan bukan pertaniannya adalah Kecamatan Kalumpang yaitu sekitar 150.956 ha atau sekitar 46,84 persen dari keseluruhan lahan bukan



pertanian di Kabupaten Mamuju. Selanjutnya adalah Kecamatan Tommo yaitu sekitar 32.231 ha atau sekitar 10,00 persen dari luas keseluruhan lahan bukan pertanian di Kabupaten Mamuju. Sedangkan Kecamatan yang memiliki lahan bukan pertanian

paling sempit adalah Kecamatan Sampaga yaitu hanya sekitar 1.126 ha atau 0,35 persen dari keseluruhan lahan bukan pertanian di Kabupaten Mamuju.

F. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Mamuju sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Barat, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034 dan memperhatikan Ranperda Rencana Tata Ruang Kabupaten Mamuju Tahun 2016 – 2036, memiliki kebijakan utama pembentukan struktur ruang sebagai berikut :

- a. Pusat-pusat kegiatan
- b. Sistem jaringan prasarana utama
- c. Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju menetapkan adanya PKNP Matabe yang akan memberikan arahan pengembangan Kecamatan Mamuju sebagai pusat kota Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya pengembangan tersebut akan disusun dalam Rencana Tata Ruang Wilayah tiap Kecamatan sehingga akan semakin jelas memberikan arahan pembangunan di Kabupaten Mamuju.

Sebagai gambaran pusat-pusat kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:



- a. Sistem perkotaan di Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud, terdiri atas:
 1. Pusat kegiatan lokal (PKL);
 2. Pusat pelayanan kawasan (PPK); dan
 3. Pusat pelayanan lingkungan (PPL).
- b. PKL sebagaimana dimaksud, yaitu Kecamatan Papalang.
- c. PPK sebagaimana dimaksud, terdiri atas :
 1. kawasan perkotaan Dayanginna di Kecamatan Tapalang;
 2. kawasan perkotaan Salisingan di Kecamatan Bala-balakang;
 3. kawasan perkotaan Campaloga di Kecamatan Tommo;
 4. kawasan perkotaan Kalumpang di Kecamatan Kalumpang;
 5. kawasan perkotaan Pabettengan di Kecamatan Bonehau;
 6. kawasan perkotaan Tarailu di Kecamatan Sampaga; dan
 7. kawasan perkotaan Simboro di Kecamatan Simboro.
- d. PPL sebagaimana dimaksud, terdiri atas:
 1. kawasan permukiman Dungkait di Kecamatan Tapalang Barat;
 2. kawasan permukiman Sumare di Kecamatan Simboro;
 3. kawasan permukiman Buttuada di Kecamatan Bonehau;
 4. kawasan permukiman Toabo di Kecamatan Papalang;
 5. kawasan permukiman Buanasakti di Kecamatan Tommo;
 6. kawasan permukiman Pulau Ambo Kepulauan Balabalakang; dan
 7. Kawasan permukiman Kasambang di Kecamatan Tapalang.

Pengembangan wilayah Kabupaten Mamuju diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan peruntukan pola ruang wilayah sebagai berikut :kehutanan, pertanian, perikanan, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, Permukiman dan Pertanahan dan Keamanan yang seiring dengan peningkatan



kualitas lingkungan. Rencana struktur ruang Kabupaten Mamuju sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan dan Kegiatan Lokal yang didukung oleh peningkatan kualitas jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumberdaya air secara terpadu.

Kabupaten Mamuju sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Barat, memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan sebagaimana termuat dalam peraturan daerah Kabupaten Mamuju tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mamuju, kebijakan pengembangan potensi wilayah sesuai struktur tata ruang, sebagai berikut :

1. Kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 147.000 (seratus empat puluh tujuh ribu) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi terbatas terdapat di; Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalukku Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Papalang, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tommo.
 - b. kawasan hutan produksi tetap terdapat di Kecamatan Bonehau, Kecamatan Papalang, dan Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Tommo, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Mamuju, dan Kecamatan Tapalang; dan
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat di Kecamatan Kalukku, dan Kecamatan Mamuju.
2. Kawasan pertanian di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat selain memiliki hamparan pantai yang sangat luas juga memiliki Kawasan pertanian yang cukup luas yang terbagi dalam kawasan pertanian tanaman pangan, pertanian hortikultura, peruntukan pertanian, perkebunan dan



peternakan, dengan seluas kurang lebih 105.000 (seratus lima ribu) hektar. Potensi strategis ini sebagian besar digeluti oleh masyarakat yang berada di wilayah pedesaan dan sebagian kelurahan yang tujuannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perekonomian masyarakat. Kawasan strategis dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut terdiri atas :

- a. Kawasan tanaman pangan ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), dengan luas kurang lebih 7,921 (tujuh ribu sembilan ratus dua puluh satu) hektar terdapat di Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Papalang, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Simboro, Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tapalang Barat dan Kecamatan Tommo.
 - b. Kawasan perkebunan terdapat di Kecamatan Tapalang Barat, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Papalang, Kecamatan Simboro, Kecamatan Tommo, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Tapalang.
3. kawasan perikanan seluas kurang lebih 1.658 (seribu enam ratus lima puluh delapan) hektar telah dipetakan sesuai dengan kondisi laut diantaranya :
- a. Kawasan perikanan budidaya terdiri atas:
 - kawasan tambak udang dan bandeng terdapat di Kecamatan Kalukku, Kecamatan Papalang, dan Kecamatan Sampaga;
 - kawasan budidaya air tawar terdapat di Kecamatan Tapalang, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Tommo dan Kecamatan Sampaga;



- kawasan budidaya rumput laut terdapat di Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Kalukku; dan
 - kawasan budidaya laut terdapat di Kecamatan Kepulauan Balabalakang, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Tapalang Barat dan Kecamatan Kalukku.
- b. Sarana penunjang perikanan terdiri atas:
- Pelabuhan Perikanan Nusantara, terdapat di Kecamatan Mamuju;
 - Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kasiwa terdapat di Kecamatan Mamuju, PPI Taan di Kecamatan Tapalang, dan PPI Simboro di Kecamatan Simboro.
4. kawasan wilayah pertambangan di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat selain kawasan pertanian dan perikanan juga memiliki kawasan pertambangan yang sangat menjanjikan untuk masa depan generasi penerus bangsa, diantaranya tambang mineral dan batu bara, tambang minyak dan gas bumi, airtanah, tambang rakyat dan panas bumi. Kesemua jenis tambang tersebut penggarapannya ada yang observasi, eksplorasi dan pelaksanaan. Kesemua tambang tersebut ketika dimanfaatkan dan dapat beroperasi sudah tentu akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesemua jenis tambang tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Wilayah Usaha pertambangan mineral, terdiri atas:
- kawasan pertambangan mineral radioaktif, terdapat di Kecamatan Mamuju, Kecamatan Simboro, Kecamatan Tapalang dan Kecamatan Tapalang Barat, Kecamatan Kalukku;
 - Kawasan pertambangan mineral logam terdapat di Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Tommo, Kecamatan



- Kalukku, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Papalang, dan Kecamatan Bonehau;
- Kawasan pertambangan mineral bukan logam terdapat di Kecamatan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Kalukku Kecamatan Tappalang dan Kecamatan Tapalang Barat; dan
 - Kawasan pertambangan batuan terdapat di Kecamatan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Papalang, Kecamatan Tommo, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Tappalang, Kecamatan Tappalang Barat Kecamatan Sampaga.
- b. Wilayah Usaha pertambangan batu bara, terdapat di Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Tappalang, Kecamatan Tommo dan Kecamatan Papalang.
- c. Wilayah Usaha pertambangan minyak dan gas bumi, terdiri dari:
- Blok Budong-budong sebahagian berada di Kecamatan Papalang, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Tommo dan wilayah pesisir pantai sebelah barat laut Kabupaten Mamuju
 - Wilayah Kerja West Budong berada di sepanjang pesisir Pantai Barat (off shore) mamuju melalui pesisir Kecamatan Tommo, Kecamatan Sampaga dan Kecamatan Papalang; dan
 - Kawasan panas bumi, terdapat di Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Kalukku, dan Kecamatan Papalang dan Kecamatan Mamuju, Kecamatan Tapalang Barat.
- d. Wilayah usaha pertambangan rakyat, terdapat di Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Tappalang.



5. Kawasan peruntukan industri yaitu berupa Kawasan Industri seluas kurang lebih 1,314 (seribu tiga ratus empat belas) hektar, yang terdapat di Kecamatan Belang-Belang terpadu dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Belang-Belang.
6. Kawasan pariwisata di Kabupaten Mamuju terbagi dalam tiga (3) kawasan yang tidak kalah strategisnya / menariknya dengan kabupaten dan atau propinsi lain yang ada di Indonesia, dengan luas kurang lebih 106,332 (seratus enam ribu tiga ratus tiga puluh dua) hektar, diantaranya :
 - a. Kawasan peruntukan wisata budaya di Kabupaten Mamuju memiliki beragam budaya dan situs-situs purbakala yang sangat menarik untuk dikunjungi, yang dapat memperkaya wisata budaya di Kabupaten Mamuju. Wisata budaya yang ada di Kabupaten Mamuju terdiri dari :
 - Rumah Adat Raja Mamuju terletak di Kecamatan Mamuju;
 - kuburan Makaramma Pata Mata terletak di Kecamatan Simboro;
 - kuburan Tua Raja Dungkai terletak di Kecamatan Tapalang Barat;
 - kuburan Tua Tosalama' terletak di Kecamatan Tapalang Barat;
 - kuburan Tua Lasalaga (loda batu) terletak di Timbu Kecamatan Mamuju;
 - kuburan maradika Lambagu di Kecamatan Simboro; dan
 - Masossor manurung terletak di Kecamatan Mamuju.
 - b. Kawasan peruntukan wisata alam di Kabupaten Mamuju juga memiliki wisata alam yang tidak kalah menariknya, dengan objek wisata yang ada di daerah lain, diantaranya:
 - permandian So'do terletak di Kecamatan Mamuju;
 - air Terjun Tamasapi terletak di Kecamatan Mamuju;



- air terjun Desa Sondoang Kecamatan Kalukku;
 - air terjun buttuada terletak di Kecamatan Bonehau;
 - air terjun rantepitu terletak di kecamatan Tapalang;
 - air terjun Kalumpang terletak di Kecamatan Kalumpang;
 - kawasan wisata pantai Lombang-Lombang, Salupompong, dan Belang- Belang di Kecamatan Kalukku, Desa Sumare dan Rangas Kecamatan Simboro;
 - kawasan Pasir Putih Bonetangnga dan Pulau Karampuang terletak di Kecamatan Mamuju;
 - pantai Kasambang terletak di Kecamatan Tapalang;
 - pasir Putih Tanjung Ngalo terletak di Kecamatan Tapalang Barat;
 - pantai Lombang-Lombang terletak di Kecamatan Kalukku;
 - pantai Rangas dan Sumare terletak di Kecamatan Simboro;
 - pulau Karampuang terletak di Kecamatan Mamuju;
 - pulau Bakengkeng terletak di Kecamatan Kalukku; dan
 - wisata Kepulauan di Kecamatan Bala-Balakkang.
- c. Kawasan peruntukan wisata buatan di Kabupaten Mamuju sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat untuk memancing wisatawan lokal dan domestik bahkan mancanegara membuat wisata yang menarik dan diminati oleh masyarakat setiap hari libur atau hari-hari tertentu bersama keluarga dan koleganya. Wisata buatan tersebut diantaranya
- Anjungan Pantai Manakarra terletak di Kecamatan Mamuju;
 - sumur jodoh di pulau karampuang terletak di Kecamatan Mamuju;
 - Eco wisata berkah terletak di Kecamatan Simboro;



- pantai Graha Nusa terletak di Kecamatan Simboro; dan
 - landscape Mamuju terletak di Kecamatan Mamuju.
7. Kawasan permukiman seluas kurang lebih 3.702 (tiga ribu tujuh ratus dua)hektar, yang terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan terdapat di Kecamatan Mamuju, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Simboro, Kecamatan Papalang; dan
 - b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan terdapat di Kecamatan Tapalang Barat, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Tapalang, Kecamatan Papalang, Kecamatan Simboro, Kecamatan Tommo, Kecamatan Sampaga, Kecamatan yang terbagi atas:
 - Kawasan pengembangan Permukiman Transmigrasi terdapat di Kecamatan Simboro, Kecamatan Tommo, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalumpang, dan Kecamatan Tapalang;
 - permukiman perdesaan yang tersebar di PPL dan desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Mamuju.
8. Kawasan pertahanan dan keamanan kurang lebih 36 (tiga puluh enam) hektar terdiri atas:
- a. Kawasan Perkantoran Komando Resort Militer (KOREM) di Kecamatan Simboro;
 - b. Kawasan Perkantoran Komando Distrik Militer (KODIM) 1418 di Kecamatan Mamuju;
 - c. Kawasan Perkantoran Komando Rayon Militer (KORAMIL) pengembangannya di seluruh kecamatan mamuju;
 - d. Kawasan Perkantoran Patroli Pos Pengamat TNI Angkatan Laut (Posal) di Kecamatan Simboro;



- e. Kawasan Perkantoran Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah(POLDA) di kecamatan Mamuju dan Simboro;
- f. Kawasan Perkantoran Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (POLRES) dikembangkan di seluruh kecamatan di kabupaten Mamuju;
- g. Kawasan Brimob Polda Sulbar di Kecamatan Simboro.

2.1.2 Aspek Demografi

Jumlah penduduk senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Terdapat beragam faktor yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk. Misalnya, wabah penyakit atau epidemi, kelaparan, dan bencana alam. Di lain pihak, kestabilan wilayah, peningkatan gizi, dan kesehatan dapat mengakibatkan jumlah penduduk cenderung naik. Fenomena bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu dalam suatu wilayah tertentu sehingga gejala dinamika penduduk dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kelahiran (fertilitas atau natalitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (migrasi). Aspek Demografi lain yang perlu dipertimbangkan adalah kepadatan penduduk. Kecamatan Kepulauan Bala-Balakang memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Mamuju dibandingkan daerah lain yaitu sebesar 1.502,03 jiwa per km², karena luas wilayahnya yang sempit. Sementara itu di Kecamatan Kecamatan Kalumpang merupakan wilayah dengan kepadatan terendah dengan tingkat kepadatan sebesar 6,60 jiwa per km².

A. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk adalah total individu yang tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu, sedangkan pertumbuhan penduduk mengacu pada perubahan jumlah tersebut dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor,



termasuk tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan migrasi. Di Indonesia, misalnya, jumlah penduduk terus meningkat secara signifikan, mencapai lebih dari 270 juta jiwa pada tahun 2023. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh tingkat kelahiran yang relatif tinggi dan peningkatan harapan hidup, meskipun ada tantangan terkait dengan urbanisasi dan distribusi sumber daya yang tidak merata. Fenomena ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan di seluruh negeri. Data lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.5 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di
Kabupaten Mamuju Tahun 2023**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Rasio jenis Kelamin
1	Tapalang	21,624	106
2	Tapalang barat	11,793	107
3	Mamuju	67,575	102
4	Simboro	39,517	104
5	Balabalakang	2,244	110
6	Kaluku	62,134	105
7	Papalang	24,662	104
8	Sampaga	16,487	101
9	Tommo	24,606	110
10	Kalumpang	12,022	108
11	Bonehau	9,731	107
Jumlah		292,395	105

Sumber : Kabupaten Mamuju Dalam Angka 2024

Pada tahun 2023, jumlah penduduk di Kabupaten Mamuju mencapai 292.395 jiwa. Angka ini mencerminkan perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan (sex ratio) di Kabupaten Mamuju, yaitu 105 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Jumlah penduduk ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun



sebelumnya, dengan penambahan sebanyak 6.779 jiwa dari tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan dinamika demografis di daerah tersebut, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi. Rasio jenis kelamin yang lebih tinggi pada laki-laki juga bisa memberikan indikasi tentang pola sosial dan ekonomi yang berlaku di Kabupaten Mamuju. Data ini penting bagi perencanaan pembangunan daerah agar dapat memenuhi kebutuhan penduduk yang terus bertambah.

B. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk adalah persentase peningkatan jumlah penduduk dalam suatu wilayah selama periode tertentu, biasanya diukur per tahun. Laju ini mencerminkan seberapa cepat atau lambat populasi bertambah, dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan migrasi. Tingkat kelahiran yang tinggi dan peningkatan harapan hidup umumnya mendorong laju pertumbuhan yang lebih tinggi, sementara tingkat kematian yang tinggi dan migrasi keluar dapat menurunkannya. Pengukuran laju pertumbuhan penduduk penting untuk perencanaan ekonomi dan sosial, karena mempengaruhi kebutuhan akan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja. Pemahaman yang mendalam tentang laju pertumbuhan penduduk membantu pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan demografis. Data lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 2.6 Pertumbuhan Penduduk 5 Tahun Terakhir Tahun
2019-2023 Kabupaten Mamuju**

No	Kecamatan	Tahun					Laju Pertumbuhan Penduduk 2020-2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Tapalang	21.527	20.820	20.995	21.218	21.624	1.39
2	Tapalang Barat	10.710	11.373	11.467	11.588	11.793	1.33
3	Mamuju	74.866	64.696	65.445	66.349	67.575	1.60
4	Simboro	30.926	36.063	36.851	37.739	39.517	3.38
5	Kepulauan Bala-balakang	2.802	2.201	2.209	2.223	2.244	0.71
6	Kalukku	63.427	59.108	59.763	60.559	62.134	1.83
7	Papalang	25.198	23.942	24.107	24.327	24.662	1.08
8	Sampaga	16.324	15.925	16.079	16.271	16.487	1.27
9	Tommo	25.281	23.381	23.582	23.837	24.606	1.87
10	Kalumpang	12.319	11.763	11.814	11.891	12.022	0.80
11	Bonehau	9.946	9.492	9.542	9.614	9.731	0.91
Total		286.389	293.326	278.764	281.845	292.395	1.75

Sumber : Kabupaten Mamuju Dalam Angka 2024

Dalam lima tahun terakhir, jumlah penduduk di Kabupaten Mamuju menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2019, jumlah penduduk tercatat sebanyak 286.389 jiwa, namun pada tahun 2021 menurun menjadi 278.764 jiwa. Kemudian, pada tahun 2022, jumlah penduduk meningkat menjadi 281.845 jiwa. Perubahan jumlah penduduk ini mencerminkan dinamika demografis yang terjadi di wilayah tersebut. Secara khusus, pada tahun 2021 terjadi penurunan yang signifikan dalam jumlah penduduk. Jika dilihat berdasarkan kecamatan, Kecamatan Mamuju memiliki jumlah penduduk terbanyak dibandingkan kecamatan lainnya. Pada tahun



2021, jumlah penduduk di Kecamatan Mamuju mencapai 65.445 jiwa, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 66.349 jiwa. Rata-rata pertumbuhan penduduk di Kecamatan Mamuju dari tahun 2020 hingga 2023 tercatat sebesar 1,60 persen.

C. Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Distribusi Penduduk mengacu pada bagaimana penduduk tersebar di berbagai wilayah dalam suatu area geografis. Ini menggambarkan pola tempat tinggal manusia, yang bisa sangat bervariasi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk meliputi aksesibilitas ke sumber daya seperti air, tanah subur, pekerjaan, dan fasilitas umum seperti pendidikan dan kesehatan. Misalnya, distribusi penduduk di daerah perkotaan biasanya lebih padat karena adanya peluang kerja dan fasilitas yang lebih baik, sedangkan di daerah pedesaan mungkin lebih jarang karena terbatasnya akses ke fasilitas dan peluang ekonomi. Kepadatan Penduduk adalah ukuran jumlah penduduk yang tinggal di suatu area tertentu, biasanya dinyatakan sebagai jumlah orang per kilometer persegi atau mil persegi. Kepadatan penduduk memberikan gambaran tentang tingkat kesesakan dan penggunaan lahan di suatu wilayah. Daerah dengan kepadatan penduduk tinggi sering kali menghadapi tantangan seperti kemacetan, tekanan pada infrastruktur, dan kebutuhan akan perumahan yang lebih besar. Sebaliknya, daerah dengan kepadatan rendah mungkin menghadapi tantangan terkait dengan penyediaan layanan dasar yang efisien dan mempertahankan populasi yang cukup untuk mendukung ekonomi lokal. Data lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 2.7 Kepadatan Penduduk Kabupaten Mamuju Tahun
2023**

No	Kecamatan	Luas Km2	Presentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (/Km2)
1	Tapalang	273,02	7,40	79
2	Tapalang Barat	111,63	4,03	106
3	Mamuju	247,48	23,11	273
4	Simboro	132,73	13,51	298
5	Kep. Balabalakang	1,48	0,77	1.516
6	Kaluku	454,96	21,25	137
7	Papalang	201,92	8,43	122
8	Sampaga	110,83	5,64	149
9	Tommo	769,66	8,42	32
10	Kalumpang	1,801,71	4,11	7
11	Bonehau	874,47	3,33	11
Jumlah		4.979,89	100,00	59

Sumber : Kabupaten Mamuju Dalam Angka Tahun 2024

Pada tahun 2023, kepadatan penduduk di Kabupaten Mamuju tercatat mencapai 59 jiwa per km². Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Kepulauan Bala Balakang, dengan 1.516 jiwa per km². Rasio jenis kelamin di Kabupaten Mamuju melebihi 105, yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Semua kecamatan di Kabupaten Mamuju memiliki rasio jenis kelamin di atas 100. Kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Bonehau, dengan masing-masing 7 jiwa/km² dan 11 jiwa/km². Secara keseluruhan, kepadatan penduduk di Kabupaten Mamuju masih tergolong rendah, yaitu 59 jiwa/km². Distribusi penduduk di Kabupaten Mamuju tidak merata di seluruh



kecamatan, dengan distribusi terbesar berada di Kecamatan Mamuju.

D. Struktur Kependudukan

Struktur Kependudukan Kabupaten Mamuju dapat dilihat berdasarkan struktur penduduk berdasarkan kelompok umur, struktur penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dan struktur penduduk berdasarkan kewarganegaraan, dan agama selanjutnya akan dibahas lebih rinci. Data lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8 Proporsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Mamuju Tahun 2023

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
00-04	14.878	14.407	29,285
05-09	14.272	13.649	27,921
10-14	13.923	13.153	27.076
15-19	14.001	12.960	26.961
20-24	13.430	12.690	26.120
25-29	12.669	12.177	28.846
30-34	11.889	11.973	23.862
35-39	11.490	11.120	22.610
40-44	10.266	9.891	20.157
45-49	8.702	8.312	17.014
50-54	7.088	6.774	13.862
55-59	5.684	5.441	11.125
60-64	4.393	4.054	8.447
65-69	3.119	2.713	5.832
70-74	1.998	1.846	3.844
>=75	1.749	1.684	3.433



Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
KAB. MAMUJU	149.551	142.844	292.395

Sumber : Kabupaten Mamuju Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan data kependudukan tahun 2023, proporsi penduduk di Kabupaten Mamuju bervariasi menurut kelompok umur dari 0 hingga di atas 75 tahun. Kelompok umur dengan jumlah penduduk terbanyak adalah usia 0-4 tahun, yang mencapai 29.285 jiwa. Sebaliknya, kelompok umur dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah usia di atas 75 tahun, yang berjumlah 3.433 jiwa.

E. Penduduk berdasarkan Kewarganegaraan

Penduduk berdasarkan kewarganegaraan mengacu pada klasifikasi individu berdasarkan status hukum mereka sebagai warga negara atau penduduk asing di suatu negara atau wilayah. Warga negara adalah individu yang diakui secara hukum sebagai anggota dari negara tersebut, baik melalui kelahiran, keturunan, atau proses naturalisasi. Mereka memiliki hak-hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Di sisi lain, penduduk asing adalah individu yang tinggal di suatu negara tanpa memiliki kewarganegaraan dari negara tersebut. Mereka mungkin tinggal di sana untuk berbagai alasan seperti pekerjaan, studi, atau kepentingan pribadi, dan dapat memiliki status hukum yang berbeda tergantung pada kebijakan imigrasi negara yang bersangkutan. Pendataan penduduk berdasarkan kewarganegaraan penting untuk keperluan administratif, keamanan nasional, perencanaan ekonomi, serta untuk memastikan perlindungan hak-hak dan kesejahteraan



semua individu yang tinggal di suatu negara. Data lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk berdasarkan Kewarganegaraan di Kabupaten Mamuju Tahun 2023

Kecamatan	Warga Negara Indonesia	
	Laki-laki	Perempuan
Tapalang	11.077	10.360
Tapalang barat	6.082	5.624
Mamuju	34.067	33.177
Simboro	19.717	18.919
Balabalakang	1.176	1.059
Kaluku	31.471	29.876
Papalang	12.530	12.012
Sampaga	8.281	8.179
Tommo	12.659	11.429
Kalumpang	6.225	5.740
Bonehau	5.047	4.637
Jumlah	148.332	141.012

Sumber : BPS Kabupaten Mamuju 2024

Dalam Kabupaten Mamuju tahun 2023, penduduk dibedakan berdasarkan kewarganegaraan dan jenis kelamin, dengan jumlah laki-laki mencapai 148.332 jiwa dan perempuan sebanyak 141.012 jiwa. Distribusi ini mencerminkan komposisi gender penduduk di berbagai kecamatan di wilayah tersebut. Kecamatan Kepulauan Bala Balakang tercatat memiliki jumlah penduduk terendah, sedangkan Kecamatan Mamuju menunjukkan angka tertinggi dalam hal jumlah penduduk. Data ini penting dalam pemahaman tentang struktur demografis dan sosial ekonomi Kabupaten Mamuju, membantu dalam perencanaan pembangunan serta alokasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan penduduk secara merata di seluruh wilayah.



F. Penduduk Berdasarkan Agama

Penduduk berdasarkan agama mengacu pada distribusi individu berdasarkan keyakinan keagamaan mereka di suatu wilayah. Data ini memberikan gambaran tentang keragaman agama dan budaya dalam populasi sebuah daerah, serta memainkan peran penting dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi. Di Kabupaten Mamuju, seperti di banyak wilayah di Indonesia, terdapat berbagai agama yang dianut oleh penduduknya, termasuk Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan tradisional lainnya. Informasi ini tidak hanya membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang mendukung kebebasan beragama dan toleransi antarumat beragama, tetapi juga penting untuk perencanaan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pengembangan infrastruktur yang memadai bagi semua warga. Pemahaman yang mendalam tentang profil agama penduduk merupakan aspek integral dalam upaya menjaga harmoni dan keadilan sosial di Kabupaten Mamuju. Data lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang dianut di Kabupaten Mamuju Tahun 2023

KECAMATAN	A G A M A					
	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Lainnya
	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)
TAPALANG	20.795	297	2	0	0	1
TAPALANG BARAT	11.943	1	0	0	0	0
MAMUJU	61.700	2.993	501	117	83	8
SIMBORO	37.495	676	164	70	11	2
BALA BALAKANG	2.242	0	0	0	0	0
KALUKKU	53.984	5.167	136	28	1	4
PAPALANG	21.687	1.908	75	766	0	0
SAMPAGA	15.569	159	9	2	0	2



KECAMATAN	A G A M A					
	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Lainnya
	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)
TOMMO	14.939	6.827	787	1.772	0	1
KALUMPANG	303	11.512	14	0	0	2
BONEHAU	1.902	7.127	278	0	0	1
KAB. MAMUJU	242.559	36.667	1.966	2.755	95	21

Sumber : Kabupaten Mamuju Dalam Angka 2024

Pada tahun 2023, penduduk Kabupaten Mamuju terbagi berdasarkan agama dengan jumlah terbesar adalah Islam, mencapai 242.559 jiwa, diikuti oleh Kristen sebanyak 36.667 jiwa, Katholik 1.966 jiwa, Hindu 2.755 jiwa, Budha 95 jiwa, dan agama lainnya sebanyak 21 jiwa. Data ini mencerminkan keragaman agama yang ada di wilayah tersebut, yang memiliki peran penting dalam memandu kebijakan pemerintah terkait dengan kebebasan beragama, pelayanan sosial, dan harmoni antarumat beragama di masyarakat.



2.2 Aspek Kesejahteraan Sosial dan Budaya

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki peran krusial dalam memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi dan kemajuan pembangunan di berbagai tingkat pemerintahan, seperti provinsi, kabupaten, atau kota, selama suatu periode tertentu. PDRB dapat dihitung baik dengan dasar harga berlaku maupun dasar harga konstan. Secara esensial, PDRB mencerminkan total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh bisnis dan unit ekonomi yang beroperasi di suatu wilayah. PDRB berdasarkan harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang diukur menggunakan harga saat itu, sedangkan PDRB dengan dasar harga konstan mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang diukur dengan menggunakan harga patokan pada tahun tertentu, yang di Indonesia adalah tahun 2000.

Pentingnya PDRB terletak pada kemampuannya memberikan wawasan mendalam tentang kinerja ekonomi suatu wilayah. Ini memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk membuat keputusan yang tepat dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi. Melalui analisis PDRB, dapat diamati perubahan dalam nilai tambah ekonomi seiring waktu, memberikan indikator yang signifikan untuk mengukur efektivitas langkah-langkah pembangunan dan upaya ekonomi lainnya.

Tabel 2.11 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat 2014-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	8,76	7,6	7,81	7,11	6,03	5,22	-2,29	2,35	3,24	4,37



No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Kabupaten Mamuju											
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat	Persentase	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5,56	-2,34	2,57	2,31	5,25

Sumber : Kabupaten Mamuju Dalam Angka 2024

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mamuju, dalam perbandingan dengan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat, menunjukkan variasi yang cukup menarik selama periode lima tahun dari 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mamuju mencapai 5,22%, sedangkan di Provinsi Sulawesi Barat mencapai 5,56%. Meskipun keduanya mengalami pertumbuhan positif, Provinsi Sulawesi Barat mencatat laju pertumbuhan yang sedikit lebih tinggi daripada Kabupaten Mamuju.

Pada tahun 2020, kedua wilayah tersebut mengalami kontraksi ekonomi, dengan Kabupaten Mamuju mencatat laju pertumbuhan ekonomi sebesar -2,29%, sedangkan Provinsi Sulawesi Barat sebesar -2,34%. Kontraksi ini kemungkinan besar dipicu oleh dampak pandemi COVID-19 yang melanda ekonomi global. Pada tahun 2021, baik Kabupaten Mamuju maupun Provinsi Sulawesi Barat berhasil memulihkan pertumbuhannya, meskipun masih di tingkat yang lebih rendah dari sebelumnya. Kabupaten Mamuju mencatat laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,35%, sedangkan Provinsi Sulawesi Barat mencapai 2,57%.

Pertumbuhan ekonomi terus berlanjut pada tahun 2022, dengan Kabupaten Mamuju mencatat laju pertumbuhan sebesar 3,24%, sedangkan Provinsi Sulawesi Barat sebesar 3,31%. Pada tahun 2023, kedua wilayah tersebut mengalami peningkatan signifikan dalam laju pertumbuhan ekonomi, dengan Kabupaten



Mamuju mencapai 4,37% dan Provinsi Sulawesi Barat mencapai 5,25%. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat mengalami tren yang serupa dalam pertumbuhan ekonomi selama periode tersebut, terdapat variasi dalam tingkat pertumbuhan antara kedua wilayah tersebut. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kedua wilayah tersebut.

B. Indeks Gini/Koefisien Gini

Indeks Gini atau koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan. Indeks Gini yang dihitung berdasarkan kurva Lorenz yakni sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (dalam hal ini pendapatan) dengan distribusi uniform yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Indeks ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum tentang distribusi pendapatan penduduk pada seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang Indeks Gini adalah 0 – 1. Angka Indeks yang semakin mendekati nilai 0 berarti tingkat pendapatan yang semakin merata. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati 1 berarti tingkat pendapatan makin timpang. Berikut adalah pembagian klasifikasi ketimpangan lebih rinci:

Tabel 2.12 Indeks Gini di Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Gini	Indeks	0,33	0,36	0,35	0,39	0,38	0,36	0,37	0,37	0,39	0,37
2	Kriteria Ketimpangan	Kriteria	Mode rat	Mode rat	Mode rat	Mode rat	Mode rat	Mode rat	Mode rat	Mode rat	Mode rat	Mode rat

Sumber : BPS, Kab.Mamuju 2014- 2023



Indeks Gini merupakan sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan di suatu populasi. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1, di mana 0 mengindikasikan distribusi pendapatan yang sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama) dan 1 mengindikasikan distribusi pendapatan yang paling tidak merata (satu orang memiliki seluruh pendapatan). Semakin tinggi nilai Indeks Gini, semakin tidak merata distribusi pendapatan. Di Kabupaten Mamuju, Indeks Gini mengalami fluktuasi selama periode tahun 2014 hingga 2023. Pada tahun 2014, Indeks Gini tercatat sebesar 0,33, menunjukkan tingkat ketidakmerataan yang relatif rendah dalam distribusi pendapatan. Namun, pada tahun 2015, Indeks Gini naik menjadi 0,36, yang menandakan sedikit peningkatan dalam ketidakmerataan distribusi pendapatan.

Tahun-tahun berikutnya, Indeks Gini di Kabupaten Mamuju mengalami variasi. Pada tahun 2016 dan 2019, Indeks Gini turun menjadi 0,35 dan 0,36 berturut-turut, menunjukkan sedikit penurunan dalam ketidakmerataan distribusi pendapatan. Namun, pada tahun 2017 dan 2018, terjadi lonjakan menjadi 0,39 dan 0,38, menandakan peningkatan yang signifikan dalam ketidakmerataan distribusi pendapatan. Selanjutnya, pada tahun 2020 dan 2021, Indeks Gini di Kabupaten Mamuju stabil pada 0,37, menunjukkan ketidakmerataan distribusi pendapatan yang tetap relatif tinggi. Sedangkan pada tahun 2022, terjadi peningkatan menjadi 0,39, menandakan kembalinya peningkatan dalam ketidakmerataan distribusi pendapatan. Pada tahun 2023, capaiannya sebesar 0,37. Fluktuasi dalam Indeks Gini di Kabupaten Mamuju mencerminkan dinamika dalam distribusi pendapatan selama periode waktu yang diamati, dan informasi ini penting untuk memahami tingkat



kesetaraan ekonomi dan merencanakan kebijakan yang tepat untuk mengurangi ketidakmerataan pendapatan.

C. Angka Kemiskinan

Garis Kemiskinan adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan dan 51 komoditi non-makanan (47 komoditi di desa) yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan kilo kalori per kapita per hari. Dengan kata lain, garis kemiskinan dapat diartikan sebagai pengeluaran minimum yang dikeluarkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan minimalnya. Besaran garis kemiskinan menjadi tolak ukur pemerintah dalam menentukan apakah seseorang termasuk kategori miskin atau tidak. Untuk lebih jelasnya terkait Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Mamuju terhadap Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional dapat dilihat pada Tabel berikut.



Tabel 2.13 Perkembangan Garis Kemiskinan Terhadap Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2014-2023

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Garis Kemiskinan Kab.Mamuju	Rp/Kapita/Bulan	195,991	202,167	220,315	241,616	252,429	259,969	277,078	287,896	319,586	340,795
Garis Kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat	Rp/Kapita/Bulan	246,524	277,479	292,519	315,137	324,042	339,838	352,874	384,598	426,299	433,131
Garis Kemiskinan Nasional	Rp/Kapita/Bulan	302,735	330,776	354,386	374,478	40,122	42,525	458,947	472,525	504,469	550,448

Sumber : BPS Kab. Mamuju, BPS Prov.Sulawesi Barat 2014-2023



Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan garis kemiskinan di Kab. Mamuju meningkat setiap tahunnya seiring dengan Prov.Sulbar, peningkatan ini tidak lepas dari inflasi yang terjadi rutin tiaptahunnya, dampak gempa dan dampak dari covid-19 di Tahun 2021. Adapun besaran garis kemiskinan Kab.Mamuju di tahun 2023 sebesar 340.795 rupiah/kapita/bulan, masih berada di bawah garis kemiskinan Prov. Sulawesi Barat sebesar 433.131 rupiah/kapita/bulan dan berada dibawah garis kemiskinan Nasional yang mencapai 550.448 rupiah/kapita/bulan. Dapat disimpulkan bahwa harga kebutuhan pembentuk garis kemiskinan di KabupatenMamuju masih lebih rendah dari rata rata Provinsi dan memerlukan langkah strategi Pemerintah dan swasta untuk tetap menjaga kestabilan harga ditengahpergerakan inflasi rutin tahunan.

Angka kemiskinan mengacu pada persentase atau jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dalam suatu populasi atau wilayah tertentu. Garis kemiskinan biasanya ditetapkan berdasarkan standar pendapatan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Data ini penting untuk mengidentifikasi dan memantau tingkat ketimpangan sosial-ekonomi dalam masyarakat, serta untuk merancang kebijakan publik yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengukuran angka kemiskinan sering dilakukan dengan membandingkan pendapatan rumah tangga atau individu dengan garis kemiskinan yang ditetapkan, dan dapat melibatkan indikator tambahan seperti akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi. Upaya untuk mengurangi angka kemiskinan melibatkan program-program pemerintah,



bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan investasi dalam infrastruktur sosial yang mendorong inklusi dan mobilitas sosial.

**Tabel 2.14 Angka Kemiskinan di Kabupaten Mamuju Tahun
2014-2023**

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Kemiskinan	Persentase	N/A	N/A	6,48	6,88	7,18	7,06	6,92	7,46	7,63	7,57

Sumber : BPS, Kab.Mamuju 2014- 2023

Data mengenai angka kemiskinan di Kabupaten Mamuju tidak tersedia untuk tahun 2014 sampai dengan 2015. Mulai tahun 2016 hingga 2023, terlihat adanya variasi dalam tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Pada tahun 2016, tingkat kemiskinan mencapai 6,48%, yang mengalami sedikit peningkatan menjadi 6,88% pada tahun 2017. Tahun 2018 mencatatkan kenaikan lagi menjadi 7,18%, sebelum sedikit menurun menjadi 7,06% pada tahun 2019. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan kembali turun menjadi 6,92%, namun naik lagi menjadi 7,46% pada tahun 2021. Tahun 2022 mencatatkan peningkatan ke 7,63%, sebelum mengalami sedikit penurunan menjadi 7,57% pada tahun 2023. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika dalam kondisi ekonomi dan sosial di Kabupaten Mamuju, yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Meskipun terdapat penurunan pada beberapa tahun tertentu, perlu upaya berkelanjutan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di masa mendatang.

Jumlah Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kemiskinan di Kabupaten Mamuju diantaranya adanya program- program nasional seperti PKH, bantuan pangan non



tunai, beasiswa untuk siswa miskin dan program Pemerintah Kabupaten Mamuju antara lain bantuan Fasilitas Operasional Pendidikan (FOP) ke masyarakat. FOP bertujuan menekan beban pengeluaran non konsumsi rumah tangga di tengah-tengah masyarakat, meningkatkan pendapatan, pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, pengembangan usaha kecil dan mikro, dan sinergitas serta peningkatan kerjasama penanganan lintas sektor, keterlibatan swasta, perguruan tinggi, perbankan dan unsur masyarakat.

Tabel 2.15 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2023

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah penduduk miskin	jiwa	25,9	17,96	17,47	19,11	19,11	20,42	20,57	22,30	23,26	23,50

Sumber : BPS Kab.Mamuju 2014-2023



Tabel 2.16 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2014-2023

Indikator	Satuan	Tahun									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin Kab.Mamuju	000 Jiwa	25,9	17,96	17,47	19,11	19,11	20,42	20,65	22,30	23,26	23,50
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Barat	000 Jiwa	153,89	160,48	152,73	149,76	151,78	151,4	152,02	157,19	165,72	164,14
Jumlah Penduduk Miskin Nasional	000 Jiwa	27.727,78	28.513,57	27.764,32	26.582,99	25.674,58	24.785,87	27.549,69	26.503,63	26363,27	25.219,2

Sumber : BPS Kab.Mamuju, 2024



Sepanjang kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, bisa dikatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mamuju selalu mengalami kenaikan, ini disebabkan adanya inflasi yang tinggi sehingga membuat harga bahan pokok mengalami kenaikan, bertambahnya jumlah penduduk tiap tahun, masih terbatasnya lapangan pekerjaan yang menyebabkan tingkat pengangguran terbuka naik, dengan kerugian materi yang besar dan krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemic Covid-19.

Selama kurun waktu 2020 hingga tahun 2023 tingkat kemiskinan Kabupaten Mamuju selalu berada dibawah jumlah penduduk miskin Provinsi Sulawesi Barat yang mengalami kenaikan, lain halnya dengan Nasional yang mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Mamuju juga semakin meningkat, selama tahun 2020 hingga tahun 2023 angka ini terus mengalami kenaikan, yang disebabkan karena adanya peningkatan inflasi di Tahun 2023.

Pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan sebesar 165.72 ribu jiwa, namun di Kabupaten Mamuju jumlah penduduk miskinnya mengalami kenaikan sebesar 23.26 ribu jiwa, tetapi untuk Nasional mengalami penurunan sebesar 261.60 ribu jiwa.

Pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 164.14 Ribu Jiwa, Jumlah kemiskinan Nasional sebesar 259.00 ribu jiwa, sedangkan di Kabupaten Mamuju jumlahnya sekitar 23.50 ribu jiwa.

Dengan demikian disimpulkan bahwa jumlah penduduk miskin selalu dibawah jumlah penduduk miskin Propinsi Sulawesi Barat, namun dari Tahun ke Tahun mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin. Kabupaten Mamuju adalah salah satu Kabupaten dengan urutan tingkat kemiskinan yang Keempat



terendah dibandingkan dengan tiga Kabupaten di atasnya.

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang mengukur persentase dari total angkatan kerja yang saat ini tidak memiliki pekerjaan. Angkatan kerja mencakup individu usia kerja, yaitu mereka yang berusia 15 tahun ke atas, yang sedang bekerja, memiliki pekerjaan, atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk mereka yang sedang aktif mencari pekerjaan, individu yang tengah mempersiapkan diri untuk mencari pekerjaan atau memulai usaha baru, mereka yang merasa sulit mendapatkan pekerjaan sesuai kualifikasi mereka, dan individu yang tidak mencari pekerjaan karena mereka sudah bekerja tetapi belum memulai aktivitas.

Mengukur Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan langkah kritis dalam menganalisis situasi ketenagakerjaan suatu wilayah atau negara. Hal ini membantu pemerintah, peneliti, dan organisasi lainnya untuk memahami ketersediaan lapangan kerja, tingkat ketidaksetaraan dalam akses ke pekerjaan, dan dampak kebijakan ketenagakerjaan. Selain itu, data mengenai tingkat pengangguran terbuka dapat digunakan untuk merancang program pelatihan dan kebijakan dengan tujuan mengurangi tingkat pengangguran serta meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam masyarakat

Tabel 2.17 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pengangguran Terbuka	Persentase	N/A	4776	N/A	3063	3253	3581	3991	5723	4776	4269
2	TPT Kabupaten Mamuju	Persentase	1.03	3,78	N/A	2.40	2.46	2.46	2,89	3,79	3,06	2,99



No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3	TPT Sulawesi Barat	Persentase	2,08	3,35	3,33	3,21	3,01	2,98	3,32	3,13	2,34	2,27

Sumber : BPS Kabupaten Mamuju, 2024

Berdasarkan tabel di atas Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2022 tercatat 3,06 persen. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2021 sebesar 3,79 persen. Dalam periode satu tahun TPT di Mamuju mengalami penurunan sebesar 0,73 persen. Hal ini disebabkan karena mulai pulihnya perekonomian akibat dampak covid-19, dan dampak gempa di awal tahun 2021, mulai terpenuhinya permintaan tenaga kerja di Kabupaten Mamuju, mulai banyak penduduk yang bekerja dan mampu mengoptimalkan potensinya dibidang usaha atau perekonomian karena adanya bantuan UMKM dari Pemerintah Kabupaten Mamuju.

E. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan



untuk hidup layak.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial berkorelasi positif dan berbanding lurus dengan IPM. Dengan demikian apabila tingkat IPM semakin tinggi maka bisa dipastikan pembangunan ke arah kesejahteraan semakin dekat dan apabila kesejahteraan sosial tercapai maka IPM suatu daerah akan tinggi. Untuk jelasnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mamuju terhadap wilayah se- Sulawesi Barat Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mamuju Terhadap Wilayah Se Sulawesi Barat Tahun 2014-2023

Prov/Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sulawesi Barat	62,24	62,96	63,6	64,30	65,10	65,73	66,11	66,36	66,92	69,80
Majene	63,74	64,40	64,8	65,40	66,01	66,59	66,91	67,29	67,84	72,44
Polewali Mandar	60,09	60,87	61,51	62,35	63,14	63,74	63,84	64,23	64,79	69,24
Mamasa	62,85	63,17	63,51	63,92	64,66	65,32	66,02	66,63	67,21	68,14
Mamuju	64,71	65,09	65,65	66,32	67,11	67,72	68,15	68,32	68,88	71,07
Pasangkayu	64,04	64,69	65,17	65,67	66,60	67,27	67,79	68,03	68,61	70,42
Mamuju Tengah	61,48	62,22	62,89	63,64	64,43	65,10	65,71	66,18	66,89	67,63

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2024

Di Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2022 Selama tiga tahun terakhir (2017-2023), capaian pembangunan manusia di tingkat Provinsi maupun Kabupaten di Sulawesi Barat terus membaik. Di tingkat Provinsi, capaian IPM pada tahun 2022 di posisi 66,92, angka ini meningkat sebesar 0,56 poin. Pencapaian pembangunan manusia ditingkat Kabupaten seluruhnya berada



pada kategori “sedang”. IPM pada level Kabupaten berkisar antara 64,79 (Polewali Mandar) hingga 68,88 (Mamuju).

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mamuju cenderung mengalami kemajuan dimana pada tahun 2021 IPM Kabupaten Mamuju sebesar 68,32 dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 68,88.

Peningkatan IPM Kabupaten Mamuju dikarenakan adanya peningkatan pada tiap komponen penyusunnya. Angka harapan hidup yang merefleksikan harapan lama hidup penduduk baru lahir meningkat dari 67,77 tahun pada tahun 2021 menjadi 68,21 tahun pada tahun 2022. Komponen kedua adalah harapan lama

sekolah juga meningkat dari 13,24 tahun pada tahun 2021 menjadi 13,25 tahun pada tahun 2022. Indikator pendidikan kedua adalah rata-rata lama sekolah juga meningkat dari 7,96 tahun di tahun 2021 menjadi 8,09 tahun pada tahun 2022. Pengeluaran per kapita disesuaikan penduduk Kabupaten Mamuju sebagai komponen ketiga mengalami kenaikan dari 9.494 ribu rupiah pada tahun 2021 menjadi 9.668 ribu rupiah pada tahun 2022. Perkembangan pencapaian IPM Kabupaten Mamuju dan Indikator pendukung IPM Tahun 2020-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.19 Perkembangan IPM dan Indikator Pendukung IPM di Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2023

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata Rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran PerKapita (Ribu/ Rupiah/ Tahun)
2014	64,71	66,37	12,70	6,91	8.494
2015	65,09	66,38	12,95	6,94	8.557



Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata Rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran PerKapita (Ribu/Rupiah/Tahun)
2016	65,65	66,51	12,95	7,21	8.689
2017	66,32	66,65	13,13	7,26	9.019
2018	67,11	66,94	13,14	7,53	9.308
2019	67,72	67.23	13,18	7,69	9.535
2020	69,64	70.71	13,19	7,95	9.500
2021	69,80	70.94	13,24	7,96	9.494
2022	70,35	71.76	13,25	8,09	9.668
2023	71,07	72.13	13,26	8,16	10.075

Sumber : BPS Kab.Mamuju, Tahun 2024

F. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani (NTP) diukur dari besarnya indeks yang diterima petani (It) dengan jumlah indeks yang dibayar petani (Ib). Berdasarkan tabel di bawah ini, terlihat bahwa nilai tukar petani (NTP) di Kabupaten Mamuju rata-rata di atas 100 dari tahun 2016-2020.

Tabel 2.20 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2014-2023 Provinsi Sulawesi Barat

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks yang diterima petani (It)	Persentase	113	120,3	127,4	131,1	145,93	106,15	115,39	132,28	134,15	143,73
2	Indeks yang dibayar petani (Ib)	Persentase	109,76	115,27	118,63	122,6	139,96	102,47	105,43	108,39	113,95	118,33
3	NTP	Persentase	102,96	104,36	107,4	106,93	104,26	103,59	109,45	122,04	117,72	121,47

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024



Berdasarkan pendekatan dari nilai indikator terhadap nilai tukar petani (NTP), telah menunjukkan stagnasi pada angka 100-105 selama kurung waktu 5 (lima) tahun (2019-2023) namun tetap pada angka di atas 100 yang artinya petani secara umum di Sulawesi Barat dan secara khusus Kabupaten Mamuju surplus atau masih dapat memperoleh atau menikmati keuntungan dari hasil pengelolaan dan pengembangan usaha taninya. Dalam perjalanan waktu tersebut juga terjadi kestabilan terhadap harga sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan masyarakat / petani dalam menjalankan usahatannya, misalnya penggunaan pupuk, benih, obat-obatan serta sarana lainnya, sehingga pengeluaran (cost) tidak terlalu besar dibandingkan dengan penerimaan (revenue). Kondisi tersebut di atas menjadikan indeks harga hasil- hasil produksi pertanian secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan indeks harga barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat/petani dalam kaitannya pengelolaan usahatannya. Hal inilah yang dapat mendorong masyarakat/petani kita dalam penerimaan hasil usaha taninya memberikan keuntungan dari apa yang telah dihasilkan.

G. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi adalah ukuran persentase dari laju kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam perekonomian suatu negara dalam suatu periode waktu tertentu. Ini adalah indikator penting yang digunakan untuk memahami tingkat perubahan daya beli uang dalam masyarakat. Tingkat inflasi diukur dengan membandingkan indeks harga pada periode tertentu dengan indeks harga pada periode sebelumnya, dan hasilnya diekspresikan dalam bentuk persentase. Tingkat inflasi yang rendah cenderung menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, sementara



tingkat inflasi yang tinggi dapat mengakibatkan berbagai masalah ekonomi seperti penurunan daya beli masyarakat, ketidakstabilan ekonomi, dan meningkatnya biaya hidup. Oleh karena itu, pengendalian tingkat inflasi sering menjadi fokus kebijakan moneter dan ekonomi suatu negara.

Tabel 2.21 Tingkat Inflasi Kabupaten Mamuju 2014-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat Inflasi	Persentase	7,88 %	5,07 %	2,23 %	3,79 %	1,80 %	1,43 %	1,78 %	4,39 %	4,85 %	1,82 %

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Tingkat inflasi di Kabupaten Mamuju mengalami fluktuasi selama periode lima tahun dari 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, tingkat inflasi tercatat sebesar 1,43%, menunjukkan kenaikan harga-harga barang dan jasa yang relatif rendah. Namun, pada tahun 2020, tingkat inflasi naik menjadi 1,78%, meskipun masih berada dalam kisaran yang moderat.

Pada tahun 2021, terjadi lonjakan signifikan dalam tingkat inflasi, mencapai 4,39%. Ini menandakan adanya peningkatan yang lebih tajam dalam kenaikan harga-harga di Kabupaten Mamuju pada tahun tersebut. Tren ini berlanjut pada tahun 2022, di mana tingkat inflasi mencapai 4,85%, mencerminkan tekanan inflasi yang lebih tinggi dalam perekonomian daerah tersebut. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan kembali dalam tingkat inflasi, turun menjadi 1,82%. Penurunan ini mengindikasikan adanya stabilisasi dalam kenaikan harga-harga barang dan jasa setelah lonjakan pada tahun sebelumnya. Fluktuasi dalam tingkat inflasi Kabupaten Mamuju selama periode lima tahun mencerminkan dinamika ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhi harga-harga di tingkat lokal. Evaluasi terus-menerus terhadap penyebab fluktuasi ini penting untuk merencanakan kebijakan yang sesuai guna



mengelola inflasi dan mempertahankan stabilitas ekonomi di daerah tersebut.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

A. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah ukuran statistik yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun seseorang diperkirakan akan hidup berdasarkan kondisi saat ini, termasuk tingkat kesehatan, sanitasi, ekonomi, dan layanan medis di suatu wilayah. Ini merupakan indikator penting dalam menentukan kualitas hidup dan kesehatan umum suatu populasi. Angka harapan hidup dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti nutrisi, akses ke perawatan kesehatan, tingkat pendidikan, kondisi lingkungan, dan stabilitas sosial serta ekonomi. Adapun perbandingan usia harapan hidup Kab. Mamuju, Sulawesi Barat dan Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 2.22 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2014-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Harapan Hidup Kabupaten Mamuju	Tahun	66,37	66,38	66,51	66,65	66,94	67,23	70,71	70,94	71,36	72,13
2	Angka Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Barat	Tahun	64,04	64,22	64,31	64,34	64,58	64,82	69,91	70,08	70,42	70,76
3	Angka Harapan Hidup Nasional	Tahun	70,6	70,78	70,98	71,15	90,99	91,07	73,37	73,46	73,70	73,93

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2014-2023

Angka harapan hidup saat lahir adalah estimasi rata-rata panjang usia yang diharapkan bagi bayi yang baru lahir, mencerminkan kualitas pembangunan di bidang kesehatan.



Meningkatnya angka harapan hidup di Kabupaten Mamuju dari 66,37 tahun pada tahun 2014 menjadi 72,13 tahun pada tahun 2023 menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam sektor kesehatan. Meski demikian, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata angka harapan hidup di Sulawesi Barat, yang tercatat sebesar 70,76 tahun pada tahun 2023, tetapi sedikit lebih rendah dibandingkan dengan angka harapan hidup nasional yang mencapai 73,93 tahun pada tahun yang sama. Perbedaan ini menggambarkan variasi dalam kualitas layanan kesehatan dan kondisi sosial ekonomi di berbagai wilayah.

B. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Adapun perbandingan Harapan Lama Sekolah Kab. Mamuju dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.23 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2014-2023

Indikator	Satuan	Angka Harapan Lama Sekolah									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Harapan Lama Sekolah Kab. Mamuju	Persen/ Tahun	12,7	12,95	12,97	13,13	13,14	13,18	13,19	13,24	13,25	13,26



Indikator	Satuan	Angka Harapan Lama Sekolah									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Barat	Tahun	11,78	12,22	12,34	12,48	12,59	12,62	12,77	12,86	12,87	12,88
Harapan Lama Sekolah Nasional	Tahun	12,93	12,55	12,72	12,85	12,91	12,95	12,98	13,08	13,10	13,15

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Harapan Lama Sekolah adalah indikator pembangunan di bidang pendidikan, yang terlihat dari peningkatan di Kabupaten Mamuju dari 12,7 tahun pada tahun 2014 menjadi 13,26 tahun pada tahun 2023. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan Harapan Lama Sekolah di Sulawesi Barat yang tercatat 12,88 tahun, dan juga di atas rata-rata nasional yang mencapai 13,15 tahun pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan tren positif bahwa semakin banyak penduduk Kabupaten Mamuju yang menempuh pendidikan, dengan anak-anak berusia 7 tahun memiliki peluang yang lebih besar untuk menyelesaikan pendidikan hingga lulus SMA. Namun, angka ini masih belum mencapai target yang diharapkan, yaitu sebesar 15,55 tahun.

C. Rata – Rata Lama Sekolah

Perkembangan Pendidikan di Kabupaten Mamuju memperlihatkan hasil yang cukup membaik. Seiring dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah dari tahun ke tahun. Indikator angka rata-rata lama sekolah menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas di seluruh jenjang Pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel Pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat Pendidikan yang sedang diduduki. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Mamuju yang bersekolah (dalam tahun) pada tahun 2020-2022



dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.24 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Mamuju,
Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2014-2023**

Indikator	Satuan	Tahun									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-rata lama sekolah Kab. Mamuju	Tahun	6,91	6,94	7,21	7,26	7,53	7,69	7,95	7,96	8,09	8,16
Rata rata lama Sekolah Provinsi Sulawesi Barat	Tahun	6,88	6,94	7,14	7,31	7,50	7,73	7,89	7,96	8,08	8,13
Rata rata lama sekolah Nasional	Tahun	7,73	7,84	7,95	8,10	8,17	8,34	8,48	8,54	8,69	8,77

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tahun 2024

Berdasarkan Tabel diatas memperlihatkan bahwa pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah sebesar 7,95 tahun, meningkat pada tahun 2023 menjadi 8,16 tahun dan sudah mencapai target sebesar 7,8 tahun. Angka ini sama dengan angka rata-rata lama sekolah Sulawesi Barat dan dibawah angka rata-rata Nasional. Rata-rata lama sekolah Sulawesi Barat pada tahun 2023 adalah 8,13 Tahun, adapun rata-rata lama sekolah Nasional pada tahun 2023 adalah 8,77 Tahun atau lebih tinggi dari angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat. Jika dikonversikan pada tingkat kelulusan, maka rata- rata tingkat pendidikan Kabupaten Mamuju tidak tamat SLTP atau masih kelas 2 (dua) SLTP, oleh karena itu untuk mencapai RLS maksimal 9 tahun (setara Wajar 9 tahun) masih memerlukan pembenahan pada sistem pendidikan yang diselenggarakan pemerintah.

D. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah adalah ukuran persentase anak-anak dalam kelompok usia tertentu yang terdaftar dan bersekolah



pada jenjang pendidikan tertentu, seperti pendidikan dasar, menengah, atau tinggi. Data ini penting untuk mengevaluasi akses dan keterlibatan dalam sistem pendidikan, serta untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam partisipasi pendidikan di antara berbagai kelompok sosial, ekonomi, dan geografis. Angka partisipasi sekolah yang tinggi mencerminkan kemajuan dalam upaya pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa semua anak menerima pendidikan yang layak. Faktor-faktor yang mempengaruhi angka partisipasi sekolah meliputi ketersediaan dan kualitas fasilitas pendidikan, kemampuan ekonomi keluarga, kebijakan pendidikan, serta faktor sosial dan budaya. Upaya untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah sering kali melibatkan pembangunan infrastruktur pendidikan, pemberian beasiswa, program bantuan biaya sekolah, dan kampanye kesadaran akan pentingnya pendidikan.

**Tabel 2.25 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Mamuju
Tahun 2014-2023**

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	98,47	99,17	98,36	98,68	98,14	98,36	98,68	98,14	98,47	98,09
2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	89,94	86,31	87,03	86,5	86,17	86,5	86,39	86,5	86,17	86,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tahun 2024

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang



berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

a. APS SD/MI/Paket A

APS SD/MI/PAKET A Kabupaten Mamuju pada tahun 2014-2023, cenderung fluktuatif. Namun angkanya menunjukkan bahwa sudah 98,09% penduduk usia sekolah di Kabupaten Mamuju yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan SD/MI/Paket A pada tahun 2023.

b. SMP/MTs/Paket B

APS SMP/MTs/Paket B Kabupaten Mamuju pada tahun 2014-2023 cenderung fluktuatif. Namun angkanya menunjukkan bahwa sudah 86,02% penduduk usia sekolah di Kabupaten Mamuju yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan SMP.MTs/Paket B pada tahun 2023.

E. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah ukuran persentase populasi dalam kelompok usia tertentu, biasanya di atas 15 tahun, yang mampu membaca dan menulis dengan pemahaman dasar. Data ini penting untuk menilai tingkat pendidikan dasar dan aksesibilitas pengetahuan dalam suatu masyarakat. Angka melek huruf yang tinggi mencerminkan keberhasilan sistem pendidikan dan program literasi dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sementara angka yang rendah menunjukkan adanya tantangan dalam akses pendidikan dan mungkin mengindikasikan kesenjangan sosial-ekonomi. Upaya untuk meningkatkan angka melek huruf sering melibatkan program pendidikan formal dan non-formal, pelatihan guru, penyediaan bahan bacaan yang terjangkau, dan kampanye



kesadaran akan pentingnya literasi. Peningkatan angka melek huruf memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi, kesehatan, dan partisipasi sosial serta politik dalam masyarakat.

**Tabel 2.26 Angka Melek Huruf Kabupaten Mamuju
Tahun 2014-2023**

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Melek Huruf	Persen	N/A	N/A	97,76	97,83	97,86	98,02	98,37	99,75	100	94,75

**(Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas
Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2023)**

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Melek Huruf	Persen	N/A	N/A	93,15	92,78	93,15	94,65	93,13	93,29	94,37	94,75

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tahun 2024

Data mengenai angka melek huruf di Kabupaten Mamuju tidak tersedia untuk tahun 2014 hingga 2015 serta tahun 2023. Namun, terdapat peningkatan yang konsisten dalam angka melek huruf selama periode 2016 hingga 2023. Pada tahun 2016, angka melek huruf tercatat sebesar 97,76%, yang meningkat sedikit menjadi 97,83% pada tahun 2017. Pada tahun 2018, angka ini meningkat lagi menjadi 97,86%, dan terus naik menjadi 98,02% pada tahun 2019. Tahun 2020 mencatatkan peningkatan lebih lanjut menjadi 98,37%, menunjukkan bahwa upaya dalam meningkatkan pendidikan dan kemampuan baca tulis masyarakat telah membuahkan hasil. Pada tahun 2021, angka melek huruf mengalami lonjakan signifikan menjadi 99,75%, hampir mencapai tingkat melek huruf sempurna. Akhirnya, pada tahun 2022, angka melek huruf mencapai 100%, menunjukkan bahwa seluruh populasi Kabupaten Mamuju telah mencapai kemampuan baca tulis yang sempurna. Peningkatan yang konsisten ini



mencerminkan keberhasilan program pendidikan dan inisiatif literasi yang diterapkan di wilayah tersebut.

F. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. IKS terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Dalam Program PIS-PK ada 12 indikator kesehatan yang harus dicapai oleh masyarakat yaitu sebagai berikut :

- a. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)
- b. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan
- c. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap
- d. Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif
- e. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan
- f. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar
- g. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur
- h. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan
- i. Anggota keluarga tidak ada yang merokok
- j. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- k. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih
- l. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat

IKS dihitung berdasarkan jumlah keluarga yang menyandang statusstatus sehat berdasarkan 12 Indikator di atas dibandingkan dengan jumlah keluarga yang telah diintervensi awal.



**Tabel 2.27 Capaian 12 Indikator PIS-PK Kabupaten Mamuju
2014-2023**

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Keluarga mengikuti program KB *)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	41.44	47.14	56.05	63.08
2	Persalinan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	71.05	74.64	80.79	84.53
3	Bayii mendapatkan imunisasi dasar lengkap	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80.14	83.74	89.5	91.75
4	Bayi mendapatkan ASI Eksklusif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	74.65	76.69	78.53	80.79
5	Pertumbuhan Balita dipantau	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	69.25	72.91	77.08	80.65
6	Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	39.03	39.95	52.49	58.17
7	Penderita hipertensi yang berobat teratur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28.16	29.43	33.48	38.67
8	Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.31	12.89	20.19	32.36
9	Anggota keluarga tidak ada yang merokok	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	39.12	41.25	41.75	43.35
10	Keluarga sudah menjadi anggota JKN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	42.73	48.64	63.02	74.67
11	Keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85.56	87.75	89.98	92.95
12	Keluarga memiliki akses/menggunakan jamban keluarga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	69.81	74.84	78.62	82.86

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2024

G. Angka Kematian Ibu

Kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya



atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebabsebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain.

**Tabel 2.28 Angka Kematian Ibu Kabupaten Mamuju Tahun
2014-2023**

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Kematian Ibu	Per 1000 Kelahiran Hidup	N/A	N/A	131/10000 KH	94,9/100.0 KH	13 (246/100.0 KH)	8 (153/100.0 KH)	11 (193/100.0 KH)	(184/100.0 KH)	179/100.0 KH	170/100.000 KH

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2024

Jumlah kematian ibu (AKI) menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. Pada Tabel diatas menjelaskan bahwa angka kematian ibu di Tahun 2019 sebesar 153 per 100.000 kelahiran hidup, ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yaitu sebesar 246 per 100.000 kelahiran hidup, namun mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar 193 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini kemungkinan disebabkan Adanya 3T (Terlambat mengambil keputusan, Terlambat dirujuk, Terlambat di tangani).

H. Balita Gizi Buruk

Balita gizi buruk adalah anak-anak di bawah usia lima tahun yang mengalami kekurangan gizi parah, yang ditandai dengan berat badan yang sangat rendah dibandingkan dengan tinggi badan atau usia mereka. Kondisi ini mencerminkan defisiensi nutrisi esensial yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Gizi buruk pada balita dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kemiskinan, kurangnya akses terhadap makanan



bergizi, penyakit, serta kurangnya pengetahuan orang tua tentang nutrisi yang tepat. Balita yang mengalami gizi buruk berisiko tinggi mengalami masalah kesehatan serius, keterlambatan perkembangan fisik dan mental, serta kematian. Upaya untuk mengatasi masalah ini melibatkan pemberian makanan tambahan, program suplementasi gizi, perbaikan akses terhadap layanan kesehatan, serta pendidikan dan penyuluhan bagi orang tua mengenai pentingnya gizi yang seimbang untuk anak-anak. Peningkatan kondisi gizi balita adalah indikator penting dari kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan program kesehatan dan gizi yang dijalankan oleh pemerintah dan organisasi terkait.

**Tabel 2.29 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2023**

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Per 1000 Kelahiran Hidup	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2024

Selama periode dari tahun 2016 hingga 2023, Kabupaten Mamuju berhasil mencapai cakupan 100 persen dalam memberikan perawatan bagi balita yang mengalami gizi buruk. Hal ini menunjukkan bahwa setiap balita yang membutuhkan perhatian medis dan nutrisi telah menerima penanganan yang memadai. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen kuat dari pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam menangani masalah gizi buruk pada anak-anak di bawah usia lima tahun. Upaya yang konsisten dan berkelanjutan dalam menyediakan perawatan dan intervensi gizi yang tepat telah memastikan bahwa tidak ada balita yang terabaikan dalam program kesehatan tersebut. Pencapaian ini juga menunjukkan efektivitas program kesehatan masyarakat dan



kolaborasi yang baik antara berbagai pihak untuk mengatasi tantangan gizi buruk di Kabupaten Mamuju.

2.3 Aspek Daya Saing

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai penyelenggara pemerintahan. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi biasanya digunakan sebagai alat ukur keberhasilan dari pelaksanaan proses pembangunan. Bukan saja tingkat pertumbuhan yang tinggi yang diharapkan namun tentu saja tingkat pemerataan pendapatan juga diharapkan sejalan dengan perkembangan tersebut. Hal ini sebagai upaya untuk memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Salah satu indikator utama untuk menilai perkembangan perekonomian suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan

ekonomi dapat dihitung berdasarkan analisis pertumbuhan PDRB suatu wilayah. Analisis pada pertumbuhan PDRB dapat dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan perekonomian aktual serta perkiraan perkembangan yang akan datang selain itu juga dapat dilakukan untuk penelaahan potensi pengembangan di masa depan. Analisis PDRB juga dapat dilakukan berdasarkan sektor. Cara ini dapat memberikan gambaran distribusi PDRB untuk setiap sektor lapangan usaha yang menjadi pendukung aktivitas perekonomian di suatu wilayah.

Total Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mamuju menurut hasil perhitungan Badan Pusat Statistik menunjukan pada tahun 2023 mengalami kenaikan



dibandingkan tahun 2022. Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamuju tahun 2023 adalah sekitar 4,37 persen. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha (yang sudah bebas dari pengaruh inflasi) mulai melonggarnya pembatasan mobilitas akibat pandemic covid-19, serta yang paling utama adalah besarnya aktifitas rehabilitasi/perbaikan infrastruktur pasca gempa. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel-tabel berikut:

**Tabel 2.30 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Mamuju Atas Dasar Harga Konstan Menurut
Lapangan Usaha (Persen), 2014-2023**

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	7,24	6,75	4,99	8,12	6,02	1,96	2,06	0,7	3,19	4,04
2	Pertambangan & Penggalian	12,25	8,22	9,90	8,25	8,87	6,14	-6,13	9,19	-0,54	3,64
3	Industri Pengolahan	10,96	7,22	8,57	8,57	6,85	4,98	-0,05	5,38	3,39	13,64
4	Pengadaan Listrik Gas	12,68	7,12	23,97	8,50	7,98	5,48	9,11	-2,89	7,09	10,38
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,63	7,77	12,19	9,65	8,49	10,7	2,35	-7,23	-0,25	6,27
6	Konstruksi	10,78	9,29	9,64	5,85	5,09	8,96	-15,5	16,7	0,06	4,18
7	Perdagangan Besar & Eceran, reparasi	8,06	3,24	3,77	5,63	6,26	6,17	-3,25	2,25	1,36	5,45
8	Transportasi dan Pergudangan	9,27	7,19	15,15	9,32	4,86	1,83	-7,29	-4,17	7,61	8,73
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	6,94	4,42	8,50	0,89	10,01	12,9	-8,46	-3,32	17,2	12,30
10	Informasi dan Komunikasi	12,14	10,22	10,04	9,98	8,46	7,33	10,29	-1,14	2,57	9,08
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,29	5,78	6,95	10,73	5,80	4,23	5,72	10,1	-0,09	-4,85
12	Real Estate	6,22	6,61	5,06	5,58	7,04	9,00	1,6	-5,62	6,55	3,84



No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
13	Jasa Perusahaan	5,87	6,22	3,24	5,41	3,72	9,00	-5.89	1.58	4.85	5.58
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan SosialWajib	9,83	12,12	13,73	3,69	4,82	4.09	-6.97	2.88	3.03	1.59
15	Jasa Pendidikan	6,99	6,10	10,59	6,01	4,09	13,73	-10.5	-6.02	4.89	0.31
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,24	7,20	13,90	6,29	7,30	5,00	2.36	-3.69	20	0.32
17	Jasa Lainnya	14,83	8,18	8,10	9,16	5,83	11,10	-5.04	2.1	7.66	6.73
PDRB		8,76	7,60	7,81	7,39	6,03	5,22	-2.29	2.4	3.15	4,37

Sumber : BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Mamuju, 2014-2023

Rata-rata pertumbuhan PDRB Kab. Mamuju tahun 2014-2023 pada tabel diatas nilainya signifikan mengalami kenaikan untuk setiap sektor, artinya setiap sektor yang terlibat dalam perhitungan PDRB mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Rata- rata pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamuju selama tiga tahun terakhir adalah 4,37 persen. Selama setahun terakhir Kabupaten Mamuju sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Barat terus berbenah dan menggenjot perekonomian daerahnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju tercatat mengalamipeningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2022, keadaan ini harusnya menjadi catatan kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk kembali mempercepat laju pertumbuhan ekonomi agar semakin membaik.

Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi kedua adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 17,16 persen yang disebabkanoleh meningkatnya penjualan makan minum semakin marak di tahun 2023, seiring pencabutan larangan untuk berkumpul. Cafe dan warung kembali buka secara normal pasca gempa dan covid di tahun 2021. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:



**Tabel 2.31 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional
Bruto Kabupaten Mamuju Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha (Persen) 2014-2023**

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	35,94	36,43	36,12	36,68	37,20	35,84	37.7	37.76	38.18	38.68
2	Pertambangan & Penggalian	3,13	3,35	3,40	3,35	3,38	3,42	3.28	3.41	3.26	3.35
3	Industri Pengolahan	3,50	3,32	3,18	3,31	3,24	3,24	3.48	3.76	3.92	4.03
4	Pengadaan Listrik Gas	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0.05	0.05	0.05	0.05
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,35	0,04	0,34	0,34	0,34	0,36	0.37	0.32	0.31	0.30
6	Konstruksi	9,90	0,34	10,22	10,17	10,22	10,59	9.07	10.38	10.16	10.17
7	Perdagangan Besar & Eceran, reparasi	10,84	10,05	10,34	10,26	10,12	10,17	10.03	9.9	9.82	10.00
8	Transportasi dan Pergudangan	2,01	10,60	1,99	1,91	1,86	1,91	1.82	1.69	1.9	2.09
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	0,27	2,00	0,26	0,25	0,26	0,27	0.25	0.24	0.27	0.28
10	Informasi dan Komunikasi	6,66	0,26	6,59	6,73	6,81	6,90	7.81	7.31	6.97	7.10
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,80	6,55	2,67	2,78	2,77	2,62	2.78	3.04	3.05	2.72
12	Real Estate	2,25	2,24	2,20	2,13	2,09	2,16	2.2	2	2.06	2.07
13	Jasa Perusahaan	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0.08	0.08	0.08	0.08
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan SosialWajib	12,32	12,39	12,71	11,99	11,75	11,95	11.31	11	10.06	10.08
15	Jasa Pendidikan	5,17	4,90	4,98	5,10	5,07	5,56	4.99	4.55	4.52	4.19
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,02	2,03	2,14	2,10	2,08	2,06	2.12	1.94	2.19	2.08



No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
17	Jasa Lainnya	2,70	2,70	2,71	2,76	2,69	2,80	2.67	2.6	2.67	2.73
	PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Mamuju Dalam Angka Tahun 2023

Dilihat dari distribusi persentase pembentuk PDRB per sektor dapat diketahui bahwa sektor pertanian masih memiliki share produk yang paling tinggi sampai tahun 2023 dengan rata-rata per tahun 38,68 persen. Sementara itu yang paling rendah adalah pengadaan listrik dan gas 0,05 persen. Jika kita amati untuk sektor jasa perusahaan juga memiliki rata-rata share per tahun yang rendah (0,08 persen). Data-data tersebut memberikan informasi bahwa sektor-sektor yang tumbuh dengan laju yang tinggi ternyata share-nya terhadap PDRB masih relatif rendah. Artinya pada iklim usaha yang terjaga dengan baik kedua sektor ini memiliki potensi pengembangan dan target investasi yang cukup baik.



Tabel 2.32 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010=100 Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2023 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2.061.572,0	2.200.572,0	2.310.504,6	2.498.196,44	2.648.507,56	2 700 449,50	2 755 974,02	2 775 309,69	2 863 801,34	2979487.99
2	Pertambangan & Penggalan	195.390,0	211.444,9	232.368,7	251.539,40	273.852,27	290 679,94	272 328,77	297 345,67	295 728,11	306480.42
3	Industri Pengolahan	222.840,3	238.915,9	245.591,3	266.631,41	284.896,12	299 083,08	298 944,89	315 054,36	325 729,29	370173.95
4	Pengadaan Listrik Gas	4.696,1	5.030,40	6.236,1	6.766,28	7.306,47	7 707,22	8 409,36	8 166,10	8 744,67	9652.24
5	Pengadaan Air, Pengolaaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21.681,8	23.365,5	26.214,5	28.743,87	31.184,01	34 503,89	35 316,06	34 236,69	34 151,09	36290.82
6	Konstruksi	606.541,4	662.913,1	726.822,4	769.325,68	808.501,51	880 960,27	744 029,53	868 552,94	869 035,16	905404.07
7	Perdagangan Besar & Eceran, reparasi	632.598,0	653.080,9	677.710,0	715.897,74	760.685,08	807 638,19	781 406,31	799 012,64	809 857,10	854020.10
8	Transportasi dan Pergudangan	130.798,6	140.204,2	161.450,3	176.501,3	185.084,40	188 466,75	173 119,39	167 439,42	180 187,97	195914.32
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	17.097,4	17.852,8	19.370,2	19.541,64	21.498,58	24 264,91	22 212,83	21 834,07	25 581,49	28727.90



No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10	Informasi dan Komunikasi	443.002,7	488.294,6	537.295,7	590.928,36	640.930,48	690 388,51	761 419,56	752 707,34	772 087,60	842168.93
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	164.578,6	174.092,4	186.193,5	206.166,86	218.131,41	217 619,35	230 076,21	253 390,14	253 172,43	240894.63
12	Real Estate	140.334,1	149.612,8	157.183,2	165.598,86	177.635,56	193 622,76	196 715,90	185 652,18	197 812,40	205400.82
13	Jasa Perusahaan	6.780,7	7.202,7	7.436,4	7.838,49	8.130,42	8 862,15	8 340,44	8 472,06	8 882,94	9378.73
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan SosialWajib	733.477,1	822.397,4	935.342,0	969.847,85	1.016.626,55	1 058 202,47	984 449,44	1 012 758,22	1 043 435,78	1060055.95
15	Jasa Pendidikan	338.493,3	359.125,8	397.163,8	421.045,86	438.281,82	498 463,54	445 968,73	419 135,03	439 634,93	440978.24
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	120.077,8	128.718,9	146.607,9	155.826,84	167.200,87	175 560,91	179 695,85	173 056,56	207 591,78	208265.91
17	Jasa Lainnya	172.442,9	186.541,8	201.492,3	219.952,85	232.786,25	258 620,00	245 588,91	250 752,42	269 962,06	288137.87
PDRB		6012.402,7	6.469.545,9	6.974.983,1	7.470.709,96	7.921.239,36	8 335 093,44	8 143 996,20	8 342 875,53	8 605 396,14	8981432.89

Sumber : Badan Pusat Statistik, rok2024



Tabel di atas menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Mamuju ditahun 2023 tingkat pertumbuhannya mengalami kenaikan, kondisi ini terjadi karena banyak faktor, diantaranya karena secara umum perekonomian nasional mulai mengalami peningkatan atau jika dilihat dari struktur pembentukan PDRB Kabupaten Mamuju yang banyak ditopang oleh pertanian, kehutanan dan pertanian artinya lahan ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja dan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah masih melakukan beberapa kali penghematan anggaran/recofussion. Hal ini berlaku mulai dari pemerintah pusat sampai daerah, termasuk adanya moratorium pada beberapa pengadaan barang modal maupun infrastruktur pemerintah. Kejadian-kejadian tersebut tentu mempengaruhi pengeluaran pemerintah dan secara langsung mempengaruhi pola pembentukan PDRB.



Tabel 2.33 Perkembangan PDRB Kabupaten Tahun 2019 s.d 2023 atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku di Provinsi Sulawesi Barat

Kabupaten	PDRB (Miliar Rupiah)									
	2019		2020		2021		2022		2023	
	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
Majene	4.973	3.576	4.993	3.527	5.204	3.598	5.536	3.685	5.969	3.878
Polewali Mandar	13.37	9.392	13.27	9.249	13.8	9.414	14.84	9.715	16.003	10.257
Mamas a	2.974	2.242	2.983	2.213	3.127	2.255	3.294	2.295	3.474	2.359
Mamuj u	11.736	8.36	11.624	8.185	12.483	8.342	13.378	8.605	14.379	8.981
Pasang kayu	10.225	7.435	10.013	7.123	12.379	7.389	13.185	7.379	14.386	7.879
Mamuj u Tengah	3.154	2.239	3.185	2.23	3.546	2.282	3.813	2.332	4.065	2.397
PDRB Provinsi	46.365,79	32.843,81	46.465,91	32.074,02	50.565,53	32.898,30	54.078,35	35.426,01	58.551,82	35.426,01
PDRB Nasional	15.832.67,20	10.949.155,40	15.443.353,20	10.722.999,30	16.976.751,40	11.120.059,70	19.588.089,90	12.301.393,60	20.892.376,70	12.301.393,60

Sumber : BPS, PDRB Provinsi Sulawesi Barat Menurut Pengeluaran 2019-2023



Dari tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2023, PDRB ADHB Provinsi Sulawesi Barat mencapai 58.551 triliun rupiah sedangkan PDRB ADHK mencapai 33.65 triliun rupiah. Untuk melihat kinerja ekonomi Sulawesi Barat (dengan mengabaikan inflasi) dipergunakan PDRB ADEHK. Secara umum tampak pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tahun 2022 mengalami peningkatan hingga 3.729 triliun rupiah.

PDRB Perkapita Salah satu indikator lain dalam melihat perkembangan perekonomian suatu daerah adalah PDRB per Kapita. PDRB per Kapita adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, dimana semakin tinggi PDRB Perkapita suatu daerah semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk, meskipun masih terdapat keterbatasan indikator ini sudah cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu daerah dalam lingkup makro.

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu dalam periode tertentu, maka akan dihasilkan angka PDRB perkapita. PDRB per kapita yang dimaksud adalah PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), sehingga menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk sesuaikan dengan periode waktu tertentu tersebut.

**Tabel 2.34 Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Mamuju,
2014-2023**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai PDRB (Juta Rp)	7.326.9 37,2	8.216.0 60,4	9.090.2 69,3	10.051. 751	11.043. 198	11.726. 508	11.70 2,47	12.43 3,51	13.38 0,49	14.37 9,47
Jumlah Penduduk (jiwa)	258.984	265.800	272.258	279.39 3	286.39 3	293.32 6	278.0 85	281.8 54	285.6 16	292.3 95



Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB perkapita HB (Juta Rp)	28,24	30.91	33.39	35.98	38,56	39,99	41.98	44.11	46.85	49.17
PDRB perkapita HK (Juta Rp)	N/A	7.6	7.81	7.11	6.03	9.11	29.22	29.6	30.13	30.71

Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Mamuju, 2014-2023

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Mamuju baik dinilai atas harga berlaku maupun atas dasar harga konstan terus meningkat seiring pergantian tahun. Menurut harga berlaku, Nilai PDRB per kapita Kabupaten Mamuju meningkat dari sekitar 46.85 juta rupiah di tahun 2022 menjadi 49.17 juta rupiah pada tahun 2023. Sementara itu, jika dinilai atas dasar harga konstan, PDRB per kapita Kabupaten Mamuju meningkat dari 30.13 juta rupiah di tahun 2022 menjadi 30.71 juta rupiah pada tahun 2023. Dimana artinya bahwa produktivitas masyarakat di Kabupaten Mamuju semakin meningkat, khususnya dalam hal menekuni profesi atau aktivitas usaha yang dilakukannya dan PDRB per kapita juga sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk setiap tahunnya.

B. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Menurut tujuan penggunaannya besaran pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga didominasi untuk konsumsi sub komponen makanan, minuman dan rokok. Besaran nilai pengeluaran untuk rincian ini mencapai hingga lebih 50

persen dari total PKRT dengan tren yang cenderung meningkat hingga tahun 2023, sementara sisanya untuk konsumsi non makanan yang terdiri dari 6 (enam) sub komponen lain. Hal ini menunjukkan bahwa pola perekonomian masyarakat Mamuju masih tergolong ke dalam pola hidup primer dimana sebagian besar pendapatannya masih digunakan untuk pemenuhan kebutuhan



makan-minum.

Untuk PKRT non makanan, sub komponen yang mengambil porsi terbesar adalah pengeluaran untuk Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya yaitu berkisar antara 16-19 persen. Porsi PKRT urutan terbesar selanjutnya digunakan untuk keperluan Perumahan Perkakas Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga yang nilainya berkisar 16-17 persen. Hal yang perlu dicermati adalah bahwa porsi pengeluaran untuk sub komponen ini cenderung stabil setiap tahunnya dari tahun 2014-2023. Di sisi lain, proporsi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pokok sandang (pakaian dan alas kaki) tercatat hanya sekitar 2-3 persen setiap tahun. Sementara itu, pengeluaran untuk keperluan kesehatan dan pendidikan kontribusinya tercatat berada di kisaran 5-7 persen dimana menyentuh puncaknya pada tahun 2020 yakni pada masa awal pandemi COVID-19. Kedepannya perekonomian Kabupaten Mamuju diharapkan dapat terus meningkat mengingat Kabupaten Mamuju merupakan daerah pemekaran dengan potensi sumber daya perkebunan yang cukup besar.

**Tabel 2.35 Struktur Komponen Konsumsi Rumah tangga
Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2023**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Makanan, Minuman, dan Rokok	47,21	47,50	48,24	47,97	47.80	47.24	49.70	50,98	50.85	50,49
2.	Pakaian dan Alas Kaki	2,82	2,84	2,96	2,94	2.96	2.95	2.88	2.82	2.73	2,64
3.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	16,25	16,29	16,33	16,77	16.88	16.76	16.96	16.71	16.45	16,02



No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4.	Kesehatan dan Pendidikan	5,54	5,33	5,81	6,04	6.32	6.46	6.55	6.30	5.90	5,81
5.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	19,89	19,78	18,64	18,62	18.43	19.08	16.20	15.73	16.58	17,44
6.	Hotel dan Restoran	3,43	3,36	3,32	3,30	3.25	3.24	3.21	3.13	3.24	3,37
7.	Lainnya	4,86	4,91	4,71	4,45	4.36	4.27	4.50	4.36	4.25	4,23
Total Konsumsi		100,00	100,00	100,00	100,00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Dari sudut pandang pertumbuhan riil, dalam rentang tahun 2014-2023, keseluruhan rincian dalam kelompok pengeluaran rumah tangga mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan perubahan keberagaman jumlah, baik secara kuantitas, kualitas maupun volume barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga di Mamuju setiap tahunnya.

Dari tujuh sub komponen yang menyusun pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT), semua kelompok mengalami pertumbuhan positif di tahun 2022, kecuali pada sub komponen kesehatan dan pendidikan. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kelompok pengeluaran untuk Transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya yakni sebesar 7,39 persen. Hal ini sejalan dengan pelonggaran mobilitas di era pandemi covid-19 dan pesawat di Bandar Udara Tampa Padang mulai beroperasi dan sudah mulai terbukanya tempat-tempat hiburan serta dilaksanakan bermacam even oleh pemerintah seperti, Sandeq Race, Isra Miraj dengan pawai obor, Sossok Manurrung acara budaya daerah Kabupaten Mamuju.

Kelompok konsumsi makanan, minuman dan rokok memiliki pertumbuhan yang semakin melambat dari tahun ke tahun, yakni 4,14 persen di tahun 2018 menjadi hanya 0,99 persen di tahun 2021. Namun pada tahun 2022, tumbuh lebih cepat sebesar 3,23



persen. Hal ini disebabkan produksi kebutuhan primer seperti pertanian, peternakan, dan perikanan meningkat berimbas pada kebutuhan masyarakat khususnya kebutuhan pangan. Kelompok kebutuhan pokok lainnya yakni sandang (pakaian dan alas kaki) secara tren juga mengalami pola melambat yakni tumbuh sebesar 3,29 persen pada tahun 2018 kemudian berkontraksi pada tahun 2020 sebesar 3,16 persen karena pandemik covid-19 sehingga banyaknya usaha pakaian dan alas kaki yang tutup. Selanjutnya, pada tahun 2022 tumbuh kembali sebesar 1,40 persen dikarenakan setelah pandemik dan gempa membuat toko pakaian dan alas kaki kembali buka dan membuat daya tarik masyarakat meningkat. Sementara itu, laju pertumbuhan konsumsi sub komponen kesehatan dan pendidikan pada tahun 2022 berkontraksi sampai 0,93 persen. Hal ini tentu saja berkaitan erat dengan pelonggaran peraturan covid-19 dari kantor atau jalan ke luar kota sehingga masyarakat mengeluarkan uang untuk swab atau rapid antigen hampir tidak ada. Meskipun berbagai kegiatan pertemuan (rapat/seminar/pelatihan) mulai dibolehkan, namun oleh karena beberapa fasilitas hotel dan rumah makan mengalami rusak berat, membuat pertumbuhan konsumsi untuk kelompok Hotel dan restoran hanya tumbuh 1,04 persen di tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022, tumbuh pesat sampai 6,83 persen berimbas banyaknya even rekreasi dan budaya yang juga meningkat dan kondisi pasca gempa bumi yang sudah stabil dan dengan di operasikannya kembali hotel-hotel dan penginapan di Kabupaten Mamuju membuat berbagai even kegiatan yang biasanya dilakukan di Kabupaten Mamuju. Selain itu, adanya kegiatan UMKM Makan minum yang diadakan di event provinsi Sulawesi Barat membuat daya tarik masyarakat dan keinginan untuk membeli meningkat. Sementara itu, untuk konsumsi kebutuhan lainnya, sepanjang



tahun 2014-2023 rata-rata tumbuh sebesar 1,86 persen.

**Tabel 2.36 Pertumbuhan Rill Pengeluaran Konsumsi Rumah
Tangga Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2023**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Makanan, Minuman, dan Rokok	1,03	8,34	4,48	2,28	4.14	3.00	1.83	0.99	3.23	2,86
2.	Pakaian dan Alas Kaki	7,40	10,25	8,83	1,92	3.29	2.74	-3.16	1.09	1.40	0,57
3.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,80	6,99	3,08	4,43	5.45	2.81	2.96	2.92	1.29	0,46
4.	Kesehatan dan Pendidikan	6,44	4,43	13,49	7,15	3.04	3.35	2.70	0.67	-0.93	3,54
5.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	7,30	6,57	-2,97	1,85	5.59	7.46	-11.02	1.22	7.39	5,61
6.	Hotel dan Restoran	4,63	7,03	2,87	1,46	5.13	3.64	-3.24	1.04	6.83	6,20
7.	Lainnya	4,80	9,52	0,17	0,19	2.91	3.09	1.96	1.29	0.07	0,66
Total Konsumsi		6,57	4,21	2,62	2,94	4.54	3.95	-1.06	1.36	3.40	3,01

Sumber : Mamuju Dalam Angka 2023

C. Pengeluaran Per Kapita

Dimensi yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012). Pada Tahun 2023 pengeluaran perkapita masyarakat Sulawesi Barat sebesar Rp.9.718 juta per tahun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pengeluaran perkapita masyarakat Sulawesi Barat mengalami peningkatan.

Sedangkan untuk pengeluaran perkapita masyarakat Indonesia telah mencapai Rp.11.890 juta per tahun, yang dimana



ada peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah lebih dari dua tahun pandemik covid-19 melanda Indonesia, pengeluaran riil perkapita mulai meningkat kembali setelah mengalami penurunan pada tahun 2021. Di Kabupaten Mamuju terjadi peningkatan pengeluaran perkapita sebesar Rp.10.075 juta per tahun, yang mengindikasikan bahwa perekonomian Kabupaten Mamuju kini tengah menuju kearah yang lebih baik. Peningkatan pengeluaran per kapita ini lantaran pertumbuhan perekonomian UMKM, peningkatan penyerapan tenaga kerja, dan menurunnya tingkat pengangguran. Hal ini juga menunjukkan daya beli masyarakat juga terus mengalami peningkatan seiring perbaikan kondisi ekonomi Kabupaten.

Adapun perbandingan pengeluaran per Kapita Kab. Mamuju, Sulawesi Barat dan Nasional dalam periode 2014-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.37 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2014-2023

Indikator	Satuan	Pengeluaran Per Kapita									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Per Kapita Kab. Mamuju	Juta/ Orang/Thn	8.494	8.557	8.689	9.109	9.308	9.535	9.500	9.494	9.668	10.075
Pengeluaran Per Kapita Provinsi Sulawesi Barat	Juta/ Orang/Thn	8.170	8.260	8.450	8.736	9.051	9.235	9.168	9.153	9.358	9.718
Pengeluaran Per Kapita Nasional	Juta/ Orang/Thn	9.903	10.150	10.420	10.664	11.059	11.299	11.013	11.156	11.479	11.899

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2023

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Salah satu indikator yang menggambarkan tingkat keaktifan



penduduk dalam kegiatan ekonomi adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja). TPAK diukur persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja. Tingginya nilai TPAK menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia kerja yang terlibat didalam kegiatan ekonomi, atau berusaha untuk terlibat memproduksi barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu.

Tabel 2.38 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Mamuju 2014-2023

URAIAN	Tahun									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Angkatan Kerja	188780	126363	-	127.841	140.457	138.259	138.144	150.881	155.961	138.194
Jumlah Penduduk Usia Kerja	254864	180373	-	191.050	213.330	204.806	209.709	214.813	219.897	208.749
TPAK	74,0	70,0	-	66,9	65,84	67,73	65,85	70,24	70,92	68,24

Sumber: BPS Kabupaten Mamuju 2024

Dari tabel diatas menggambarkan terjadinya peningkatan dan penurunannilai TPAK dari tahun 2014 sampai tahun 2023. Pada lima tahun terakhir rata rata nilai TPAK meningkat terus. Kenaikan nilai TPAK menjadi ukuran meningkatnya keaktifan penduduk yang semakin bertambah untuk memproduksi barang atau jasa.

B. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1, S2, dan S3)

Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka diharapkan semakin baik kualitas SDM yang ada.



Tabel 2.39 Rasio Lulusan (S1/S2/S3)

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah lulusan S1/S2/S3	15.337	14.818	-	12.761	626	17.151	7.638	18.446	N/A	N/A
2	Jumlah Penduduk	258.984	265.262	272.258	279.393	286.289	293.326	278.764	281.854	285.616	292.395
3	Rasio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	58,47	27,40	N/A	N/A	N/A

Sumber : BPS, Mamuju Dalam Angka 2021

Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 selama periode 2014-2023 di Kabupaten Mamuju mengalami angka yang fluktuatif naik-turun. Tahun 2020 rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Mamuju sebesar 27,40 yang artinya dari 1.000 penduduk terdapat 27 lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Mamuju.

C. Tingkat Ketergantungan.

Tingkat Ketergantungan di Kabupaten Mamuju diuraikan berdasarkan gambaran jumlah penduduk. Pada tabel ini dijelaskan pada rasio Ketergantungan dimana pada tahun 2018 didapatkan rasio ketergantungan sebesar 53% sedangkan ditahun 2019 didapatkan rasio ketergantungan sebesar 54%. Trend yang meningkat ini memberi gambaran bahwa struktur Kependudukan di Kabupaten Mamuju mengarah pada proporsi penduduk usia produktif yang lebih besar. Kondisi ini menuju pada pencapaian bonus demografi, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (dependency ratio) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (labor supply), tabungan (saving), dan kualitas sumber daya manusia (human capital). Kondisi tersebut menguntungkan dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten



Mamuju. Untuk mencapai hal tersebut, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keahlian tenaga kerja diharapkan perlu diupayakan agar tenaga kerja produktif mampu menghadapi persaingan kerja yang kian kompetitif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.40 Rasio Ketergantungan Tahun 2014-2023
Kabupaten Mamuju

No	Uraian	2016		2017		2018	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
		Male	Female	Male	Female	Male	Female
1	Jumlah penduduk usia < 15 Tahun	44.796	42.782	45.516	43.726	46.296	44.657
2	Jumlah penduduk > 64	3.852	3.936	3.974	4.079	4.110	4.233
3	Jumlah penduduk usia tidak Produktif	87.578		89.242		90.953	
4	Jumlah penduduk usia 15-64 Tahun	176.892		182.098		187.093	
5	Rasio ketergantungan	54%		53%		53%	

Sumber : Analisis Kab. Mamuju, 2019

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kondisi dan kualitas lingkungan di suatu wilayah berdasarkan berbagai indikator, seperti kualitas udara, air, tanah, serta keanekaragaman hayati. Data ini dikumpulkan dan dianalisis oleh lembaga lingkungan, pemerintah, dan organisasi internasional untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang



kesehatan ekosistem dan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Indeks ini membantu dalam mengidentifikasi masalah lingkungan yang mendesak, seperti polusi, deforestasi, dan perubahan iklim, serta mengukur efektivitas kebijakan dan program lingkungan yang telah diterapkan. Dengan memahami Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, pembuat kebijakan, peneliti, dan masyarakat dapat bekerja sama untuk merumuskan solusi yang lebih baik guna melestarikan dan memperbaiki kualitas lingkungan untuk generasi mendatang.

Tabel 2.41 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	IKLH	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	42	78,94	77,68

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju, 2024

Data mengenai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Mamuju dari tahun 2014 hingga 2020 tidak tersedia. Namun, pada tahun 2021, IKLH mencapai angka 42. Tahun berikutnya, pada 2022, terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 78,94, menunjukkan perbaikan yang substansial dalam kualitas lingkungan hidup. Meskipun demikian, pada tahun 2023, terjadi sedikit penurunan menjadi 77,68, meskipun tetap berada pada level yang relatif tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan drastis dalam IKLH antara 2021 dan 2022 mencerminkan kemungkinan adanya inisiatif atau program yang berhasil dalam meningkatkan kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Mamuju. Meskipun demikian, fluktuasi yang terjadi pada tahun 2023 menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di masa mendatang.



B. Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau adalah area atau lahan di suatu wilayah yang didominasi oleh vegetasi, seperti taman, hutan kota, lapangan, atau kebun, yang berfungsi untuk mendukung ekosistem dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini dirancang untuk menyediakan manfaat ekologis, sosial, dan kesehatan, seperti mengurangi polusi udara, mengatur suhu lingkungan, menyediakan habitat bagi flora dan fauna, serta menawarkan ruang rekreasi dan interaksi sosial bagi penduduk. Ruang terbuka hijau juga berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim dengan menyerap karbon dioksida dan mengurangi efek rumah kaca. Pemerintah dan perencana kota sering mendorong peningkatan dan pelestarian ruang terbuka hijau sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan dan upaya menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan seimbang.

Tabel 2.42 Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	RTH	Rasio	N/A	N/A	N/A	N/A	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79

Sumber : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju, 2024

Data mengenai luas ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Mamuju tidak tersedia untuk periode 2014 hingga 2017. Namun, mulai tahun 2018 hingga 2023, luas RTH di Kabupaten Mamuju mencatatkan angka sebesar 1,79 hektar. Ketidakhadiran data untuk periode sebelum 2018 menyulitkan untuk melakukan analisis tren jangka panjang terkait dengan pengelolaan dan peningkatan luas RTH di wilayah tersebut. Meskipun demikian, pencatatan luas RTH sebesar 1,79 hektar dari tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan upaya untuk mempertahankan atau mungkin meningkatkan keberadaan ruang terbuka hijau di Kabupaten



Mamuju sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

C. Proporsi Panjang Jalan Berkondisi Baik

Proporsi panjang jalan berkondisi baik merujuk pada bagian dari total jaringan jalan di suatu wilayah atau negara yang terpelihara dengan baik dan memenuhi standar keamanan serta kenyamanan pengguna jalan. Data ini penting untuk mengevaluasi infrastruktur transportasi dan keselamatan jalan, serta untuk merencanakan perawatan jalan yang efektif. Evaluasi proporsi panjang jalan berkondisi baik dapat mencakup aspek-aspek seperti kehalusan permukaan, kemampuan drainase, keberadaan rambu-rambu lalu lintas yang jelas, dan fasilitas pengamanan bagi pejalan kaki dan pengendara. Peningkatan proporsi ini dapat meningkatkan efisiensi transportasi, mengurangi kecelakaan lalu lintas, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang menggunakan jalan tersebut secara rutin.

Tabel 2.43 Proporsi Panjang Jalan Berkondisi Baik Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang Jalan Kondisi Baik	Angka	N/A	N/A	N/A	N/A	28,85 %	28,52 %	16,19 %	28,02 %	26%	32,61 %

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju, 2024

Data mengenai proporsi panjang jalan berkondisi baik di Kabupaten Mamuju tidak tersedia untuk periode 2014 hingga 2017. Mulai tahun 2018 hingga 2023, terdapat variasi yang signifikan dalam kondisi jalan tersebut. Pada tahun 2018, proporsi jalan berkondisi baik mencapai 28,85%, menunjukkan komitmen dalam pemeliharaan infrastruktur jalan. Namun, pada tahun 2019, persentase ini sedikit menurun menjadi 28,52%. Tahun 2020



mencatatkan penurunan yang lebih signifikan menjadi 16,19%, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor perawatan atau kondisi cuaca. Pada tahun 2021, persentase jalan berkondisi baik sedikit meningkat menjadi 28,02%, namun kembali menurun pada tahun 2022 menjadi 26%. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan yang signifikan dengan mencapai 32,61%, menunjukkan upaya dalam pemulihan atau peningkatan kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Mamuju. Fluktuasi ini mengindikasikan perlunya manajemen yang lebih efektif dalam pemeliharaan jalan untuk memastikan aksesibilitas dan keamanan transportasi yang optimal bagi penduduk Kabupaten Mamuju.

D. Ketaatan Terhadap RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju tahun 2019-2039, disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju nomor 10 Tahun 2019, hal ini berarti pelaksanaan RTRW menjelang 1 (satu) tahun dan belum dilakukan evaluasi ketaatan terhadap RTRW sehingga pelanggaran pemanfaatan penataan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju belum dapat diketahui presentase besaran defiasi.

E. Luas Wilayah Produktif

Wilayah produktif di Kabupaten Mamuju meliputi wilayah pertanian, wilayah perkebunan dan wilayah kehutanan (hutan rakyat), luasan wilayah produktif akan mengalami pergeseran setiap tahunnya mengingat perubahan peruntukan lahan khususnya perkembangan pemukiman atau perumahan yang sangat cepat. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 – 2039, luas wilayah produktif di Kabupaten Mamuju seluas 41,15 Ha. Kawasan Wilayah Produktif ini berada



pada semua wilayah Kecamatan di Kabupaten Mamuju, kecuali Kecamatan Bala-balakang.

F. Luas Wilayah Industri

Untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik pemerintah melakukan upaya pembangunan kawasan industri melalui penyediaan lokasi industri. Kawasan ini harus terencana dan didukung oleh fasilitas serta prasarana yang lengkap dan berorientasi pada kemudahan dalam pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah industri. Dalam pengelolaan kawasan industri disamping oleh pemerintah (BUMN) juga dilakukan oleh pihak swasta. Perkembangan luas kawasan industri di Kabupaten Mamuju dalam beberapa tahun terakhir tidak mengalami perubahan, bahkan sebagian kawasan industri sudah tidak memungkinkan lagi untuk diperluas karena keterbatasan lahan yang tersedia sampai tahun 2021, realisasi luas kawasan industri yang dikembangkan di Kabupaten Mamuju baru mencapai 0,51 Ha sementara wilayah kawasan industri yang ditetapkan masih berada pada Kecamatan Kalukku.

G. Luas Wilayah Perkotaan

Kawasan perkotaan di Kabupaten Mamuju menunjukkan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan yang ditetapkan menurut Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten merupakan kawasan perkotaan dengan hierarki Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Kawasan perkotaan yang berada di wilayah administrasi kabupaten



dihitung berdasarkan bagian/wilayah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan. Sedangkan untuk kawasan perkotaan pada wilayah administrasi kota dihitung secara utuh. Berdasarkan hasil olah data yang diperoleh mengenai luas wilayah perkotaan diseluruh wilayah di Kabupaten Mamuju sampai tahun 2021, sebesar 2.141,88 Ha, dengan peruntukan wilayah untuk Kecamatan Mamuju seluas 1.409,15 Ha dan untuk wilayah Kecamatan Simboro seluas 732,67 Ha.

H. Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih.

Penyediaan air bersih untuk masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan lingkungan atau masyarakat, yakni mempunyai peranan dalam menurunkan angka penderita penyakit, khususnya yang berhubungan dengan air, dan berperan dalam meningkatkan standar atau taraf/kualitas hidup masyarakat. Sampai saat ini, penyediaan air bersih untuk masyarakat diindonesia masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang cukup kompleks dan sampai saat ini belum dapat diatasi sepenuhnya. Salah satu masalah yang masih dihadapi sampai saat ini yakni masih rendahnya tingkat pelayanan air bersih untuk masyarakat.

Data Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih dijabarkan pada tabel dibawah ini

Tabel 2.44 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	RT yang menggunakan Air Bersih	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	59	62	68	69	70	71,76

Sumber :Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju, 2024

Data mengenai persentase rumah tangga (RT) yang



menggunakan air bersih di Kabupaten Mamuju tidak tersedia untuk periode 2014 hingga 2017. Mulai tahun 2018 hingga 2023, terlihat peningkatan yang konsisten dalam penggunaan air bersih di wilayah tersebut. Pada tahun 2018, sebanyak 59% rumah tangga menggunakan air bersih, yang meningkat menjadi 62% pada tahun 2019. Tahun 2020 mencatatkan peningkatan lebih lanjut menjadi 68%, menunjukkan upaya dalam meningkatkan akses terhadap air bersih bagi masyarakat. Pada tahun 2021, persentase ini naik menjadi 69%, dan terus meningkat pada tahun 2022 menjadi 70%. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan lagi dengan mencapai 71,76% rumah tangga yang menggunakan air bersih. Kenaikan ini mencerminkan kemajuan dalam infrastruktur air bersih dan keberlanjutan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Mamuju melalui akses yang lebih baik terhadap sumber air bersih.

Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutubaik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Untuk konsumsi air minum menurut departemen kesehatan, syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidakberbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat risiko bahwa air telah tercemar oleh bakteri atau zat-zat berbahaya.

I. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah



Kabupaten Mamuju berkewajiban untuk mengaliri listrik hingga dapat diakses oleh masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah Rasio Ketersediaan Daya Listrik Kabupaten Mamuju.

Daya listrik terpasang di lingkup Daerah Kabupaten Mamuju dalam kurun waktu tahun 4 (empat) tahun cukup mengalami peningkatan yang signifikan. Ditahun 2019 memiliki daya 95.273 KW kemudian meningkat pada tahun 2022 sebesar 119.744 KW. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 2.45 Ketersediaan Daya Listrik Kabupaten Mamuju
Tahun 2014-2023**

No	Uraian	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Daya Terpasang	KW	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95.273	104.167	110.414	119.744
2	Produksi Listrik	KWh	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	132.174.432	128.728.368	117.282.053	130.564.511
3	Listrik Terjual	KWh	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	118.694.620	121.181.689	115.252.365	121.159.064
4	Dipakai Sendiri	KWh	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	150.271	211.519	1.238.207	1.589.536
5	Susut / Hilang	KWh	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.329.540	7.335.169	7.914.810	7.815.911

Sumber : Mamuju Dalam Angka 2023

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik mengacu pada proporsi dari total jumlah rumah tangga dalam suatu populasi yang memiliki akses dan menggunakan listrik sebagai sumber energi untuk keperluan sehari-hari. Data ini penting dalam mengukur tingkat aksesibilitas energi listrik di suatu negara atau wilayah, serta dalam menilai kemajuan dalam penyediaan infrastruktur energi bagi penduduk. Persentase ini mencerminkan tingkat ketersediaan listrik, distribusi energi yang merata, dan juga dapat menjadi indikator dalam mengukur kemajuan pembangunan ekonomi dan sosial. Upaya untuk meningkatkan persentase rumah



tangga yang menggunakan listrik sering kali melibatkan investasi dalam infrastruktur energi, kebijakan subsidi, dan program pemerintah untuk memperluas akses listrik ke daerah-daerah terpencil atau masyarakat berpenghasilan rendah.

Tabel 2.46 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	RT yang menggunakan Listrik	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	87,91	86,83	88,36	91,89	91,82	95,56

Sumber : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju, 2024

Data mengenai persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan listrik di Kabupaten Mamuju tidak tersedia untuk periode 2014 hingga 2017. Mulai tahun 2018 hingga 2023, terlihat peningkatan yang signifikan dalam akses listrik di wilayah tersebut. Pada tahun 2018, sebanyak 87,91% rumah tangga sudah menggunakan listrik, menunjukkan adanya kemajuan dalam penyediaan infrastruktur listrik di pedesaan. Persentase ini sedikit turun menjadi 86,83% pada tahun 2019, namun kembali meningkat menjadi 88,36% pada tahun 2020. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan yang signifikan lagi menjadi 91,89%, mencerminkan upaya dalam meningkatkan cakupan listrik bagi masyarakat. Tingkat akses listrik terus stabil pada tahun 2022 dengan mencapai 91,82%, dan meningkat lagi pada tahun 2023 menjadi 95,56%. Peningkatan yang konsisten ini mencerminkan komitmen dalam meningkatkan infrastruktur energi di Kabupaten Mamuju untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik, Pencapaian persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Mamuju telah menunjukkan di angka sebanyak 76.727



RT. Namun capaian ini belum optimal disebabkan karena masih banyak rumah tangga yang belum berlistrik atau masih berlistrik non PLN.

Perkembangan jumlah Rumah Tangga yang menggunakan Listrik selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.47 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju

No	Kecamatan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tapalang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.295	5.875	6.613	7.116	7.650
2	Tapalang Barat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.353	1.601	2.104	2.265	2.281
3	Mamuju	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22.409	22.880	23.052	24.808	26.629
4	Simboro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.191	9.791	9.977	10.737	11.534
5	Kepulauan Bala Balakang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Kalukku	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.312	10.631	11.220	12.075	12.970
7	Papalang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.938	5.204	5.247	5.647	6.074
8	Sampaga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.774	3.838	3.924	4.224	4.548
9	Tommo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.346	4.007	4.274	4.599	4.950
10	Kalumpang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	937	1.246	2.703	2.909	3.137
11	Bonehau	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.697	2.022	2.180	2.347	2.535
Total		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	62.252	67.095	71.294	76.727	82.308

Sumber : Mamuju Dalam Angka 2023

2.3.4 Daya Saing Iklim Berinvestasi

A. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas adalah ukuran tingkat kejadian tindak kejahatan dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Data ini dikumpulkan dan dianalisis oleh lembaga penegak hukum, seperti polisi, untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam aktivitas kriminal serta merumuskan strategi pencegahan dan penegakan



hukum. Angka kriminalitas mencakup berbagai jenis kejahatan, termasuk pencurian, perampokan, pembunuhan, dan kejahatan seksual. Analisis angka kriminalitas dapat dilakukan berdasarkan wilayah, waktu, dan demografi, sehingga membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kejahatan. Informasi ini sangat penting untuk penegakan hukum yang efektif dan pembuatan kebijakan yang tepat guna mengurangi tingkat kejahatan di masyarakat. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat jumlah kriminalitas yang terjadi pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.48 Angka Kriminalitas menurut Kepolisian Sektor di Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Kriminalitas	Angka	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	378	363	378	N/A

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju, 2024

Data kriminalitas di Kabupaten Mamuju selama periode 2014 hingga 2019, serta tahun 2023, tidak tersedia. Namun, data yang ada menunjukkan bahwa pada tahun 2020, jumlah kasus kriminalitas mencapai 378 kasus. Tahun berikutnya, pada 2021, angka ini menurun menjadi 363 kasus, menunjukkan sedikit penurunan dalam tingkat kriminalitas. Meskipun demikian, pada tahun 2022, angka kriminalitas kembali naik, mencatat jumlah yang sama seperti tahun 2020, yaitu 378 kasus. Ketiadaan data pada beberapa tahun tersebut menyulitkan analisis tren jangka panjang, namun fluktuasi yang tercatat dalam tiga tahun terakhir menunjukkan adanya dinamika yang perlu diteliti lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan angka kriminalitas di Kabupaten Mamuju.

B. Jumlah Demonstrasi

Jumlah demonstrasi adalah ukuran frekuensi terjadinya aksi



protes atau unjuk rasa oleh sekelompok orang di suatu wilayah selama periode tertentu. Data ini biasanya dikumpulkan oleh lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, atau peneliti untuk memahami tingkat ketidakpuasan sosial dan politik di masyarakat. Analisis jumlah demonstrasi dapat memberikan wawasan mengenai isu-isu yang menjadi perhatian publik, seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, atau pelanggaran hak asasi manusia. Dengan memahami pola dan tren demonstrasi, pihak berwenang dapat merumuskan respons yang tepat, baik melalui dialog konstruktif maupun kebijakan yang lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat. Data jumlah demonstrasi di Kabupaten Mamuju tahun 2014 hingga 2023 lebih jelasnya sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.49 Jumlah Demonstrasi Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Demonstrasi/ Unjuk Rasa	Angka	N/A	N/A	1	4	2	1	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan DAMKAR Kab. Mamuju, 2024

Data mengenai jumlah demonstrasi di Kabupaten Mamuju tidak tersedia untuk periode 2014 hingga 2015 serta 2020 hingga 2023. Meskipun demikian, pada tahun 2016 tercatat ada satu demonstrasi. Jumlah ini meningkat signifikan pada tahun 2017, di mana terdapat empat demonstrasi. Pada tahun berikutnya, 2018, angka demonstrasi menurun menjadi dua kasus, dan kembali menurun menjadi satu kasus pada tahun 2019. Ketiadaan data untuk beberapa tahun tersebut membuat analisis tren jangka panjang sulit dilakukan, namun variasi dalam jumlah demonstrasi selama periode 2016 hingga 2019 menunjukkan adanya fluktuasi dalam aktivitas protes di Kabupaten Mamuju. Penurunan yang



terjadi setelah puncak tahun 2017 mungkin mencerminkan perubahan dalam dinamika sosial dan politik di wilayah tersebut, yang memerlukan studi lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perubahan jumlah demonstrasi dari tahun ke tahun.

C. Jumlah Kasus Korupsi

Jumlah kasus korupsi adalah ukuran banyaknya kejadian tindak pidana korupsi yang terdeteksi dan dilaporkan dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Data ini dikumpulkan oleh lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, serta oleh lembaga anti-korupsi khusus, misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia. Analisis jumlah kasus korupsi penting untuk menilai tingkat integritas dan transparansi di sektor publik maupun swasta. Dengan mengetahui tren dan pola kasus korupsi, pemerintah dan lembaga terkait dapat merumuskan kebijakan dan strategi pencegahan yang lebih efektif, serta memperkuat upaya penegakan hukum untuk memberantas korupsi. Transparansi dalam melaporkan jumlah kasus korupsi juga penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan sistem hukum.

Tabel 2.50 Jumlah kasus korupsi Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kasus korupsi	Angka	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0

Sumber : Evaluasi RPJPD Kabupaten Mamuju 2005-2025

Data menunjukkan bahwa jumlah kasus korupsi di Kabupaten Mamuju dari tahun 2014 hingga 2016, serta dari tahun 2018 hingga 2023, tercatat nol kasus. Namun, pada tahun 2017,



terjadi dua kasus korupsi. Ketidakhadiran kasus korupsi selama beberapa tahun tersebut menunjukkan periode yang relatif bebas dari pelanggaran korupsi. Meskipun demikian, peningkatan mendadak dengan dua kasus yang tercatat pada tahun 2017 menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor yang memicu terjadinya korupsi di tahun tersebut. Keberadaan kasus korupsi pada 2017 di tengah periode lainnya yang bebas dari kasus serupa mengindikasikan adanya dinamika tertentu yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Ini juga menyoroti pentingnya upaya pencegahan dan pengawasan yang konsisten dalam menjaga integritas dan transparansi pemerintahan di Kabupaten Mamuju.

D. Perizinan

Dalam mendukung pelayanan perizinan yang baik dan transparan BPPT memberikan akses informasi dan pengaduan pelayanan perizinan melalui beberapa media seperti Website, sms, Akun Facebook, email, dan pengaduan langsung pada loket pengaduan dan informasi yang telah BPPT sediakan. Untuk memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha BPPT menyediakan loket pelayanan bagi SKPD teknis untuk memberikan pelayanan pendukung berupa rekomendasi teknis yang dibutuhkan oleh pemohon izin maupun non perizinan. Standar pelayanan perizinan dan non perizinan diatur dalam peraturan Bupati Mamuju nomor 2 tahun 2012 tentang Standar Operational Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mamuju, secara umum SOP ini mengatur tentang standar waktu, biaya dan persyaratan apa saja yang dibutuhkan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



**Tabel 2.51 Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)**

No	Nama Izin	Waktu (Hari)	Biaya
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin Mendirikan Bangunan Reklame; Duplikasi Izin Mendirikan Bangunan; Pemecahan Izin Mendirikan Bangunan; Perubahan Izin Mendirikan Bangunan; Balik Nama Izin Mendirikan Bangunan;	5 Hari	Retribusi pembangunan baru : $L \times It \times 1,00 \times HSbg$ Retribusi Rehabilitas/Renovasi Bangunan : $L \times It \times 1,00 \times HSbg$ Retribusi Prasarana Bangunan sebelum tahun 2009 (Sebelum terbitnya perda retribusi IMB) : $L \times I \times 1,00 \times (100\% - Dibun \times 2\%) \times HSbg$ Retribusi Rehabilitas Prasarana Bangunan : $V \times I \times Tk \times HSbg$ Retribusi Prasarana Bangunan : $V \times I \times Tk \times HSbg$
2	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	5 Hari	GRATIS
3	Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	5 Hari	GRATIS
4	Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	5 Hari	GRATIS
5	Izin Lokasi	5 Hari	GRATIS
6	Izin Lingkungan	5 Hari	GRATIS
7	Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5 Hari	GRATIS
8	Izin Pengelolaan Persampahan	5 Hari	GRATIS
9	Izin Toko Obat	5 Hari	GRATIS
10	Izin Apotek	5 Hari	GRATIS
11	Izin Pendirian Optik	5 Hari	GRATIS
12	Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	5 Hari	GRATIS
13	Izin Pengumpulan Sumbangan	5 Hari	GRATIS
14	Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah	5 Hari	GRATIS
15	Izin Penyelenggara Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan	5 Hari	GRATIS
16	Izin Penyelenggaraan Angkutan Kawasan Tertentu (Taksi)	5 Hari	GRATIS



No	Nama Izin	Waktu (Hari)	Biaya
17	Izin Usaha Angkutan Laut	5 Hari	GRATIS
18	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayanan Rakyat	5 Hari	GRATIS
19	Izin Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau	5 Hari	GRATIS
20	Izin Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan	5 Hari	GRATIS
21	Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal	5 Hari	GRATIS
22	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan	5 Hari	GRATIS
23	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	5 Hari	GRATIS
24	Izin Usaha Pengumpul Lokal Di Pelabuhan	5 Hari	GRATIS
25	Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pengumpul Lokal	5 Hari	GRATIS
26	Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpul Lokal	5 Hari	GRATIS
27	Izin Pengerukan Perairan Pelabuhan	5 Hari	GRATIS
28	Izin Reklamasi Perairan Pelabuhan	5 Hari	GRATIS
29	Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Yang Di Simpan Di lembaga Kearsipan	5 Hari	GRATIS
30	Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya	5 Hari	Untuk IUP Penangkapan, Ukuran Kapal : Budidaya Air Tawar, Luas Lahan 1 – 1.2.2 Ha Sebesar Rp. 50.000,- Lebih Dari 3 Ha Sebesar Rp. 100.000,- Lebih dari 5Ha Sebesar Rp. 250.000,- Budidaya Air Payau, Luas Lahan: 1 – 3 Ha Sebesar Rp. 100.000,- Lebih dari 3 – 5 Ha Sebesar Rp. 350.000,- 10 – 50 Ha Sebesar Rp. 1.000.000,- Budidaya Laut : Rumput Laut – 0,5 – 1 Ha Rp. 150.000,- - Lebih Dari 1 Ha



No	Nama Izin	Waktu (Hari)	Biaya
			Rp. 200.000,- Karamba Ukuran 4 x 4 x 3 (1 Unit) Rp. 200.000, Teripang dan Lobster Ukuran 4 x 1 m (1 unit) Rp. 200.000,-
31	Izin Usaha Peternakan	5 Hari	GRATIS
32	Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	5 Hari	GRATIS
33	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	5 Hari	GRATIS
34	Izin Usaha Minuman Beralkohol	5 Hari	
35	Izin Usaha Toko Swalayan	5 Hari	GRATIS
36	Izin Usaha Industri (IUI)	5 Hari	GRATIS
37	Izin Usaha Pertanian	5 Hari	GRATIS
38	Izin Usaha Produksi Benih / Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah sakit Hewan, Rumah Potong Hewan	5 Hari	GRATIS
39	Izin Usaha Pengecer Obat hewan	5 Hari	GRATIS
40	Izin Usaha	5 Hari	GRATIS
41	Izin Pengelolaan Pasar Rakyat	5 Hari	GRATIS
42	Izin Membuka Tanah	5 Hari	GRATIS
43	Izin Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	5 Hari	GRATIS
44	Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5 Hari	GRATIS
45	Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	5 Hari	GRATIS
46	Izin Toko Alat Kesehatan	5 Hari	GRATIS
47	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	5 Hari	GRATIS
48	Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga	5 Hari	GRATIS
49	Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	5 Hari	GRATIS
50	Izin Pendidikan Dasar yang	5 Hari	GRATIS



No	Nama Izin	Waktu (Hari)	Biaya
	diselenggarakan Oleh Masyarakat		
51	Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	5 Hari	GRATIS
52	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaan	5 Hari	GRATIS
53	Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek Dalam Daerah	5 Hari	GRATIS
54	Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	5 Hari	GRATIS
55	Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan LepasLandas Helikopter	5 Hari	GRATIS
56	Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Dalam Daerah Kabupaten	5 Hari	GRATIS
57	Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya MelintasBatas Dalam Daerah Kabupaten	5 Hari	GRATIS
58	Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus Yang Jaringanya Dalam Daerah Kabupaten	5 Hari	GRATIS
59	Izin Usaha Simpan Pinjam	5 Hari	GRATIS
60	Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan KantorKas Koperasi Simpan Pinjam	5 Hari	GRATIS
61	Izin Perluasan Usaha Industri	5 Hari	GRATIS
62	Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri	5 Hari	GRATIS
63	Tanda Daftar Gudang (TDG)	5 Hari	GRATIS



No	Nama Izin	Waktu (Hari)	Biaya
64	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	5 Hari	GRATIS
65	Rekomendasi Kegiatan	5 Hari	GRATIS
66	Rekomendasi Peminjaman Fasilitas Umum	5 Hari	GRATIS
67	Rekomendasi Kelayakan Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya	5 Hari	GRATIS
68	Rekomendasi Kelayakan Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan	5 Hari	GRATIS
69	Surat Keterangan Asal	5 Hari	GRATIS
70	Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB)	5 Hari	GRATIS
71	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	5 Hari	GRATIS
72	Surat Keterangan Asal	5 Hari	GRATIS
73	Rekomendasi Penerbitan PKAPT dan Pelaporan Rekapitulasi Perdagangan Kayu atau Pulau	5 Hari	GRATIS
74	Rekomendasi Kegiatan	5 Hari	GRATIS
75	Rekomendasi Peminjaman Fasilitas Umum	5 Hari	GRATIS
76	Rekomendasi Kelayakan Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya	5 Hari	GRATIS
77	Rekomendasi Kelayakan Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan	5 Hari	GRATIS
78	Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan	5 Hari	GRATIS
79	Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara	5 Hari	GRATIS
80	Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batubara	5 Hari	GRATIS
81	Rekomendasi Izin Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan	5 Hari	GRATIS
82	Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan pemurnian	5 Hari	GRATIS
83	Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pertambangan	5 Hari	GRATIS
84	Rekomendasi Penelitian	5 Hari	GRATIS



No	Nama Izin	Waktu (Hari)	Biaya
85	Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1(satu) tertentu dan PKRT Kelas 1(satu) tertentuPerusahaan Rumah Tangga	5 Hari	GRATIS
86	Sertifikat Kepemilikan Bagunan Gedung (SKBG)	5 Hari	GRATIS

Sumber : DPM-PTSP Kab. Mamuju, 2024

E. Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Peran pajak dalam pembangunan terlihat dalam setiap proyek yang dilaksanakan pemerintah selalu di dengungkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Dengan demikian perlu kiranya dievaluasi dan dibahas mengenai bagaimana peran pajak dan retribusi daerah terhadap pelaksana pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat.

Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. PBB-P2;
2. BPHTB;
3. PBJT;
4. Pajak Reklame;
5. PAT;
6. Pajak MBLB;



7. Pajak Sarang Burung Walet;
8. Opsen PKB; dan
9. Opsen BBNKB.

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Objek Retribusi terdiri atas tiga yaitu:

1. Jasa Umum;
2. Jasa Usaha dan; dan
3. Perizinan Tertentu.

Dari ketiga Objek retribusi tersebut diatas maka dijelaskan Definisi dan Jenis Objek retribusi dengan uraian sebagai berikut :

1. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;



1. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
 - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
 - a. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
 - b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - c. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - d. Retribusi Izin Gangguan;



- e. Retribusi Izin Trayek; dan
- f. Retribusi Izin Usaha Perikanan.



2.4 Aspek Pelayanan Umum

A. Kondisi Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan adalah serangkaian proses, kebijakan, dan praktik yang digunakan untuk mengarahkan, mengelola, dan mengawasi jalannya pemerintahan serta administrasi publik. Tata kelola yang baik (*good governance*) mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, serta supremasi hukum. Transparansi berarti keputusan dan kebijakan dibuat dan dilaksanakan dengan cara yang terbuka, memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang relevan. Akuntabilitas mengharuskan pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan mereka dan dapat diaudit oleh masyarakat maupun institusi pengawas. Partisipasi melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan mereka kesempatan untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi. Efektivitas dan efisiensi memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Supremasi hukum berarti semua tindakan pemerintahan harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan adanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik merupakan kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Berikut ini data terkait tata kelola pemerintahan di Kabupaten Mamuju berkaitan dengan capaian kinerjanya.

**Tabel 2.52 Capaian Indikator Tata Kelola Pemerintahan
Kabupaten Mamuju 2014-2023**

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Reformasi	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	43,38	47,01	48,65	54,21



No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Birokrasi											
2	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,34	3,39	3,73	2,65
3	Nilai SAKIP Daerah	Nilai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	61,62	61,62	62,65	62,67
4	Maturitas SPIP	Level	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	3	3	3	3
5	Kapabilitas APIP	Level	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2+	3	3	3	3
6	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju, 2024

Indeks Reformasi Birokrasi adalah suatu indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Mamuju menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Pada tahun 2020, indeks tersebut tercatat sebesar 43,38, mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam implementasi reformasi birokrasi di daerah tersebut. Setahun kemudian, pada 2021, indeks meningkat menjadi 47,01, menandakan adanya perbaikan dalam beberapa aspek tata kelola pemerintahan dan birokrasi. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan indeks mencapai 48,65, menunjukkan bahwa upaya reformasi terus berlanjut dan menghasilkan hasil yang lebih baik. Puncaknya, pada tahun 2023, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Mamuju mencapai 54,21, sebuah lompatan yang signifikan dibandingkan tiga tahun sebelumnya. Peningkatan bertahap ini mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem birokrasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi publik, serta memperkuat tata



kelola yang baik.

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Mamuju mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, indeks tersebut berada di angka 3,34, menunjukkan kondisi pelayanan publik yang memerlukan perbaikan signifikan. Pada tahun 2021, terjadi sedikit peningkatan dengan indeks naik menjadi 3,39, mencerminkan adanya upaya untuk memperbaiki kualitas layanan publik. Perbaikan ini semakin terlihat pada tahun 2022 ketika indeks mencapai 3,73, menunjukkan peningkatan yang lebih substansial dalam pelayanan publik di Kabupaten Mamuju. Namun, pada tahun 2023, indeks pelayanan publik mengalami penurunan drastis menjadi 2,65. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Fluktuasi ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan publik serta langkah-langkah strategis untuk memastikan perbaikan berkelanjutan di masa mendatang.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sebuah sistem yang dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Nilai SAKIP daerah menggambarkan seberapa baik pemerintah daerah tersebut dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan kinerja



mereka sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Nilai ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya publik untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Penilaian SAKIP daerah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui evaluasi atas beberapa komponen utama, seperti perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Pemerintah daerah yang memperoleh nilai SAKIP tinggi menunjukkan bahwa mereka berhasil menerapkan prinsip-prinsip good governance dan mampu memberikan pelayanan publik yang baik serta mencapai target-target pembangunan secara optimal. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Mamuju menunjukkan konsistensi yang cukup baik dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, nilai SAKIP Kabupaten Mamuju tercatat sebesar 61,62 dengan predikat B, yang mencerminkan akuntabilitas kinerja yang cukup baik meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Nilai ini tetap stabil pada tahun 2021, masih di angka 61,62 dan mempertahankan predikat B. Tahun berikutnya, 2022, terjadi peningkatan nilai menjadi 62,65, meskipun tetap dalam kategori predikat B, menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam sistem akuntabilitas dan kinerja pemerintahan. Pada tahun 2023, nilai SAKIP sedikit meningkat lagi menjadi 62,67 dengan predikat B. Peningkatan bertahap ini menunjukkan adanya komitmen yang berkelanjutan dari pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja dan akuntabilitas, meskipun perubahannya tidak signifikan. Secara keseluruhan, predikat B yang konsisten mengindikasikan bahwa Kabupaten Mamuju memiliki sistem akuntabilitas kinerja yang baik, namun masih perlu upaya lebih lanjut untuk mencapai predikat yang lebih tinggi.



Maturitas SPIP adalah tahap kematangan dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi sistem tersebut. Proses mencapai maturitas SPIP melibatkan pengembangan dan penerapan kontrol internal yang kuat, pemantauan yang teratur terhadap operasi pemerintahan, serta evaluasi terus-menerus terhadap kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan mencapai maturitas SPIP, sebuah entitas pemerintahan dapat meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Mamuju menunjukkan tingkat konsistensi yang baik dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, maturitas SPIP Kabupaten Mamuju tercatat sebesar 3, menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern telah terimplementasi, namun masih memerlukan peningkatan dalam beberapa aspek. Tingkat maturitas ini tetap stabil pada tahun 2021, 2022, dan 2023, yang kembali menunjukkan bahwa upaya-upaya untuk meningkatkan SPIP terus berlanjut namun belum mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Meskipun nilai yang stabil menunjukkan konsistensi dalam implementasi SPIP, evaluasi terus-menerus perlu dilakukan untuk mengidentifikasi area-area di mana perbaikan masih diperlukan guna meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan memastikan keberlanjutan dalam pengelolaan risiko dan pencapaian tujuan organisasi pemerintah.

Kapabilitas Audit Internal Pemerintah (APIP) di Kabupaten Mamuju menunjukkan tingkat konsistensi yang stabil dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, kapabilitas APIP Kabupaten Mamuju tercatat sebesar 3, menunjukkan bahwa fungsi audit



internal pemerintah telah berjalan dengan baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Nilai ini tetap stabil pada tahun 2021, 2022, dan 2023, yang menunjukkan bahwa kapabilitas APIP tetap terjaga dan tidak mengalami perubahan yang signifikan selama periode tersebut. Meskipun nilai yang stabil menunjukkan konsistensi dalam kapabilitas APIP, evaluasi terus-menerus diperlukan untuk memastikan bahwa fungsi audit internal terus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan lingkungan eksternal dan internal. Dengan mempertahankan tingkat kapabilitas yang baik, APIP dapat terus berkontribusi pada peningkatan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik di Kabupaten Mamuju.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Kabupaten Mamuju selama periode 2020 hingga 2023 menunjukkan konsistensi yang luar biasa dengan penilaian “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) setiap tahunnya. Opini WTP menunjukkan bahwa BPK telah menemukan bahwa laporan keuangan Kabupaten Mamuju disajikan secara wajar, transparan, dan dapat dipercaya, serta mencerminkan kinerja keuangan yang baik.

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Pembangunan Kabupaten Mamuju mulai tahun 2005 terbagi menjadi empat (4) periode yang menunjukkan kemajuan meskipun dalam pelaksanaannya terdapat dinamika yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal Pemerintah Kabupaten Mamuju. Visi Kabupaten Mamuju pada tahun 2005-2025 adalah **Terwujudnya Masyarakat Mamuju yang Maju dan Mandiri**. Penetapan visi tersebut didukung fakta dan data bahwa Terwujudnya Masyarakat Mamuju yang Maju dan Mandiri merupakan suatu visi yang mendasari upaya pemerintah daerah



dalam memimpin dan mengembangkan kawasan tersebut. Sebagai sebuah narasi, perjalanan menuju masyarakat yang maju dan mandiri di Mamuju mencakup berbagai aspek pembangunan yang mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk dan mewujudkan potensi yang ada.

Pertama-tama, dalam bidang ekonomi, Mamuju telah mengalami pertumbuhan yang pesat dengan memanfaatkan sumber daya alam dan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan. Melalui pengembangan sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, dan industri lokal, masyarakat Mamuju telah berhasil menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Di samping itu, pemerintah daerah Mamuju juga giat dalam memajukan sektor pendidikan. Investasi dalam pembangunan infrastruktur pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan mutu pendidikan menjadi landasan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Masyarakat Mamuju, khususnya generasi muda, didorong untuk memiliki keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman, sehingga dapat bersaing secara global. Dalam upaya mencapai kemandirian, Mamuju juga menekankan pada pemberdayaan masyarakat melalui program-program sosial dan ekonomi. Program kesejahteraan sosial, bantuan untuk usaha kecil dan menengah, serta pelatihan untuk pengembangan potensi lokal menjadi instrumen pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat secara merata. Selain itu, upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam menjadi fokus penting. Pemerintah daerah Mamuju berkomitmen untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan, dengan menerapkan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan konservasi alam.



Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju untuk jangka waktu 20 tahun ke depan. Arah kebijakan tersebut dituangkan pada 5 (lima) misi yaitu:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
2. Membangun Ekonomi yang Maju
3. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Baik
4. Mendorong Penataan Wilayah yang Nyaman, Asri dan Berwawasan Lingkungan
5. Mewujudkan Stabilitas Daerah.

Secara keseluruhan, narasi perjalanan menuju Masyarakat Mamuju yang Maju dan Mandiri mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk membangun fondasi yang kuat untuk perkembangan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Mamuju berusaha menjadi contoh masyarakat yang dinamis, berdaya saing, dan berwawasan masa depan. Pelaksanaan tahapan RPJPD tahun 2005-2025 terbagi dalam 4 (empat) tahapan, diringkas pada penjelasan dibawah ini.

2.5.1 Tahapan Konsolidasi Periode I (2005-2010)

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Kabupaten Mamuju periode 2005-2025 dilakukan dengan cara menganalisis dan membandingkan visi, misi dan arah kebijakan yang berada pada dokumen RPJPD dengan dokumen RPJMD. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian/relevansi visi, misi dan arah kebijakan pada dokumen RPJPD 2005-2025 dengan dokumen RPJMD tahun 2005-2010. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian/relevansi antara visi dan misi dokumen RPJPD dengan dokumen RPJMD. Tindaklanjut dari



hasil evaluasi tersebut menjadi bahan penyusunan dokumen RPJMD pada periode RPJMD berikutnya yaitu pada tahun 2010-2015. Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Kabupaten Mamuju dengan periode RPJMD 2005-2010 dapat dilihat pada lampiran 2.1 dokumen (Evaluasi RPJPD Kabupaten Mamuju 2005-2025) Tahapan pembangunan lima tahun pertama diarahkan untuk meletakkan dasar, melakukan konsolidasi, melakukan penataan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Mamuju agar menjadi lebih baik dari pada sebelumnya.

Sasaran pokok yang ingin dicapai pada tahapan ini adalah terciptanya dan terjaganya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Terkait dengan pemerintahan, sasaran pokok lainnya yang dicapai adalah birokrasi yang semakin tertata, kelembagaan pemerintah yang semakin kuat, dan kapasitas SDM aparatur yang semakin meningkat. Pada tahapan ini, konsentrasi utama pembangunan daerah diarahkan pada upaya mengatasi ketertinggalan, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Pada akhir tahapan ini, persentase penduduk miskin ditargetkan berada dikisaran 8 persen dan Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan sebesar 69 poin.

Untuk pencapaian tahapan ini tahun 2010 sasaran pokok terciptanya dan terjaganya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dilihat dari indikator angka kriminalitas berada pada angka 9 kasus, jumlah demonstrasi 1 kasus, dan untuk jumlah kasus yang dipicu oleh SARA masih nihil. Upaya untuk mengatasi ketertinggalan dan pengentasan kemiskinan dilakukan melalui kebijakan pembangunan daerah akan diarahkan pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan akses penduduk terhadap layanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan, peningkatan akses



penduduk terhadap layanan kesehatan, dan peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat di semua wilayah. Pencapaian indikator untuk persentase penduduk miskin tahun 2010 sebesar 8,17 persen masih cukup tinggi dari target tahapan ini, sedangkan untuk IPM tahun 2010 cukup rendah dari yang ditargetkan yaitu sebesar 61,65 poin.

2.5.2 Tahapan Pemantapan Periode II (2010-2015)

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Kabupaten Mamuju periode 2005-2025 dilakukan dengan cara menganalisis dan membandingkan visi, misi dan arah kebijakan yang berada pada dokumen RPJPD dengan dokumen RPJMD. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian/relevansi visi, misi dan arah kebijakan pada dokumen RPJPD 2005-2025 dengan dokumen RPJMD tahun 2010-2015. Untuk periode RPJMD 2010-2015 mempunyai visi “Gerakan Membangun Mamuju menuju masyarakat Maju dan Mandiri (Gerbang Maju)” yang cukup relevan dengan dokumen RPJPD 2005-2025. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian/relevansi antara visi dan misi dokumen RPJPD dengan dokumen RPJMD. Tindaklanjut dari hasil evaluasi tersebut menjadi bahan penyusunan dokumen RPJMD pada periode RPJMD berikutnya yaitu pada tahun 2016-2020. Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Kabupaten Mamuju dengan periode RPJMD 2010-2015 dapat dilihat pada lampiran 2.2 dokumen (Evaluasi RPJPD Kabupaten Mamuju 2005-2025).

Tahapan pembangunan lima tahun kedua diarahkan pada upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan sarana dan prasarana wilayah, dan mendorong aksesibilitas wilayah, agar Kabupaten Mamuju dapat keluar dari status sebagai daerah



tertinggal.

Sasaran besar yang ingin dicapai di akhir tahapan ini adalah keluarnya Kabupaten Mamuju dari status sebagai daerah tertinggal. Untuk mencapai sasaran besar ini, pada tahun 2015 pendapatan per kapita ditargetkan sebesar Rp 30 juta, tingkat kemiskinan sebesar 6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,0 persen, IPM sebesar 72 poin. Untuk pencapaian tahapan kedua terkait aksebilitas wilayah dapat dilihat dari indikator Proporsi RT yang memiliki akses terhadap air bersih tahun 2015 hanya mencapai 17,89 persen dan untuk Proporsi RT yang memiliki akses terhadap listrik (non-PLN) sebesar 68,52 persen. Dan terkait indikator untuk pendapatan perkapita capaian tahun 2015 sebesar 30,91 juta melebihi target akhir periode tahapan ini, namun untuk capaian persentase kemiskinan masih sedikit diatas dari yang ditargetkan yaitu sebesar 6,70 persen. Terkait tingkat pengangguran terbuka mencapai 3,78 persen cukup meningkat sangat signifikan lebih dari 2 persen yang ditargetkan pada akhir periode tahapan ini. Hal ini cukup dipengaruhi oleh pembentukan Daerah Otonomi Baru yaitu Mamuju Tengah yang dibentuk pada tahun 2014, dan untuk IPM tahun 2015 mencapai 65,09 poin masih cukup jauh dari yang ditargetkan.

2.5.3 Tahapan Percepatan Periode III (2016-2020)

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Kabupaten Mamuju periode 2005-2025 dilakukan dengan cara menganalisis dan membandingkan visi, misi dan arah kebijakan yang berada pada dokumen RPJPD dengan dokumen RPJMD. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian/relevansi visi, misi dan arah kebijakan pada dokumen RPJPD 2005-2025 dengan dokumen RPJMD tahun 2016-2020. Untuk periode RPJMD 2016-2020 mempunyai visi “Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera,



dan Ramah” yang cukup relevan dengan dokumen RPJPD 2005-2025.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian/relevansi antara visi dan misi dokumen RPJPD dengan dokumen RPJMD. Tindaklanjut dari hasil evaluasi tersebut menjadi bahan penyusunan dokumen RPJMD pada periode RPJMD berikutnya yaitu pada tahun 2021-2026. Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Kabupaten Mamuju dengan periode RPJMD 2016-2020 dapat dilihat pada lampiran 2.3 dokumen (Evaluasi RPJPD Kabupaten Mamuju 2005-2025).

Tahapan pembangunan lima tahun ketiga bertumpu pada kemajuan dan kesejahteraan sebagai penanda keberlanjutan dari tahapan pembangunan sebelumnya. Pasca keluarnya Kabupaten Mamuju dari status sebagai daerah tertinggal yang ditargetkan pada akhir tahapan pembangunan lima tahun kedua, maka prioritas pembangunan daerah lima tahun berikutnya adalah melakukan akselerasi pembangunan guna mewujudkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran pokok yang ingin dicapai pada tahapan ini adalah meningkatnya perekonomian daerah dan membaiknya taraf hidup masyarakat. Pada periode ini, pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada dikisaran 9,07 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar itu, pendapatan per kapita ditargetkan mencapai Rp 50 juta pada akhir tahapan ini. Sedangkan tingkat kemiskinan ditargetkan berada di 6,17 persen pada tahun 2020. Begitu pula IPM ditargetkan sebesar 70 poin pada tahun 2020. Berdasarkan data hasil evaluasi pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan hingga berada pada angka -2,60 persen hal ini disebabkan oleh banyak factor, namun hal mendasar yang sangat mempengaruhi yaitu adanya pandemic COVID-19 yang melanda



Indonesia pada tahun 2019 dan terjadinya gempa bumi di Kabupaten Mamuju pada Tahun 2020 dengan kekuatan 6,2 SR. kemudian untuk pendapatan perkapita tahun 2020 hanya mencapai 38,71 juta, sedangkan untuk persentase kemiskinan tahun 2020 mencapai 6,92 persen sangat tinggi dari yang ditargetkan dan untuk capaian IPM berada pada angka 68,15 poin dengan tingkat capaian dari target sebesar 97,36 persen.

2.5.4 Tahapan Kemandirian Periode IV (2021-2026)

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Kabupaten Mamuju periode 2005-2025 dilakukan dengan cara menganalisis dan membandingkan visi, misi dan arah kebijakan yang berada pada dokumen RPJPD dengan dokumen RPJMD. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian/relevansi visi, misi dan arah kebijakan pada dokumen RPJPD 2005-2025 dengan dokumen RPJMD tahun 2021-2026. Untuk periode RPJMD 2021-2026 mempunyai visi “MAMUJU KEREN (Terwujudnya Masyarakat Mamuju Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman)” yang cukup relevan dengan dokumen RPJPD 2005-2025.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian/relevansi antara visi dan misi dokumen RPJPD dengan dokumen RPJMD. Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Kabupaten Mamuju dengan periode RPJMD 2021-2026 dapat dilihat pada lampiran 2.4 dokumen (Evaluasi RPJPD Kabupaten Mamuju 2005-2025). Tahapan pembangunan lima tahun keempat bertumpu pada kemandirian sebagai penanda keberhasilan pembangunan daerah. Proses pembangunan yang berlangsung dalam jangka panjang diharapkan dapat bermuara pada kemandirian daerah, yang dicirikan dengan meningkatnya daya saing daerah dan menurunnya ketergantungan terhadap daerah lain.



Sasaran pokok yang ingin dicapai pada tahapan ini adalah meningkatnya daya saing daerah, yang ditandai dengan membaiknya kualitas sumberdaya manusia, membaiknya infrastruktur jalan dan jembatan, meningkatnya arus penanaman modal, dan kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban. IPM pada periode ini ditargetkan sudah berada pada kelompok IPM tinggi di 75 poin. Tingkat kemiskinan sudah berada pada angka yang paling moderat 4 persen. Pertumbuhan ekonomi berada pada level yang sangat kuat yaitu 9,1%. Pendapatan per kapita berada pada level Rp 80 juta. Konflik sosial yang dipicu oleh isu SARA sama sekali tidak terjadi.

Untuk capaian indikator sarana dan prasarana wilayah dapat dilihat dari kondisi mantap jalan Kabupaten Mamuju tahun 2022 hanya mencapai 32,6 persen untuk indikator keamanan dan ketertiban angka kriminalitas tahun 2022 mencapai 25 kasus, jumlah demonstrasi meningkat menjadi 55 kasus, dan untuk jumlah kasus yang dipicu oleh SARA masih nihil.

Untuk capaian IPM tahun 2021 berada pada angka 68,32, persentase kemiskinan tahun 2021 berada 7,46%, pertumbuhan ekonomi cukup melambat dan sangat jauh dari target akhir RPJPD yaitu 2,4%, dan pendapatan perkapita tahun 2021 hanya mencapai setengah dari target yaitu 44,1 juta, namun untuk indikator Indeks Kepuasan Publik capaian tahun 2022 sebesar 85,14 persen.

Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJPD Kabupaten Mamuju dilakukan sebanyak tiga puluh empat (34) jenis kegiatan dan terdapat penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian, serta dilengkapi dengan tindak lanjut penyempurnaan apabila hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.



2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Penduduk dan fasilitas pelayanan publik merupakan dua elemen utama yang secara umum diberikan perhatian mendalam dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) di Indonesia. RPJPD berfungsi sebagai alat perencanaan strategis yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membimbing pembangunan regional dalam rentang waktu yang cukup panjang. Penduduk memiliki berbagai macam kebutuhan, termasuk kebutuhan akan sarana pelayanan publik. Sarana pelayanan publik yang dibutuhkan oleh penduduk antara lain pendidikan seperti sekolah, sarana kesehatan seperti puskesmas, posyandu, dan rumah sakit, listrik, volume sampah, air bersih.

2.6.1 Kependudukan

Pentingnya penghitungan jumlah penduduk atau kependudukan memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pembangunan suatu negara. Ada beberapa alasan mengapa penghitungan jumlah penduduk sangat penting, antara lain:

1. **Perencanaan Pembangunan:** Informasi mengenai jumlah penduduk menjadi landasan perencanaan pembangunan di sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi. Dengan mengetahui jumlah penduduk, pemerintah dapat merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. **Distribusi Sumber Daya:** Pengetahuan tentang jumlah penduduk membantu dalam distribusi sumber daya seperti anggaran, tanah, air, dan energi. Pemahaman yang mendalam tentang jumlah penduduk dapat menghindarkan ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya.



3. **Pelayanan Kesehatan:** Penghitungan jumlah penduduk juga penting untuk perencanaan dan penyediaan layanan kesehatan, dengan mengetahui jumlah penduduk, pemerintah dapat memastikan bahwa fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas, didistribusikan secara merata dan dapat menjangkau seluruh masyarakat.
4. **Pendidikan:** Data kependudukan juga digunakan untuk perencanaan pendidikan, memungkinkan pemerintah untuk membangun sekolah yang memadai dan menyediakan fasilitas pendidikan yang sesuai dengan jumlah anak usia sekolah.
5. **Perencanaan Pasar Kerja:** Dalam aspek ekonomi, data penduduk membantu perencanaan pasar kerja, termasuk identifikasi kebutuhan tenaga kerja, pengembangan keterampilan, dan perencanaan ekonomi masa depan.
6. **Ketertiban dan Keamanan:** Pemerintah membutuhkan informasi tentang jumlah penduduk untuk menjaga ketertiban dan keamanan, melibatkan perencanaan kepolisian, kebijakan keamanan, dan manajemen keadaan darurat.
7. **Penyusunan Anggaran:** Jumlah penduduk menjadi faktor kunci dalam penyusunan anggaran pemerintah, memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kebutuhan dan prioritas pembangunan.
8. **Pemilihan Umum:** Data kependudukan digunakan dalam penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan umum, memastikan bahwa hak suara setiap warga negara dapat diakses dan digunakan.

Pemerintah perlu mengetahui jumlah penduduk yang akurat dan terkini untuk dapat merencanakan dan mengambil keputusan yang tepat dalam pembangunan suatu negara. Penghitungan jumlah penduduk dapat memberikan gambaran yang akurat



tentang kebutuhan dan prioritas pembangunan, serta membantu pemerintah dalam memastikan bahwa pembangunan tersebut berkelanjutan.

Berikut ini adalah rumus pertumbuhan penduduk dengan metode eksponensial :

$$P_n = P_0 \times e^{rn}$$

P₀ : Penduduk pada tahun awal

n : Waktu dalam tahun (periode proyeksi)

r : Angka pertumbuhan penduduk (%)

P_n : Penduduk pada tahun n

e : Bilangan pokok sistem logaritma natural = 2,7182818

Berikut merupakan perhitungan proyeksi penduduk Kabupaten Mamuju hingga tahun 2045 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju.

Tabel 2.53 Proyeksi Jumlah Penduduk (Kabupaten Mamuju)

Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
292.395	301.900	325.210	347.840	374.566	405.990

Sumber : BPS Proyeksi Penduduk, 2025-2035 dan Penulis, 2024

Menurut data BPS Kabupaten Mamuju, jumlah penduduk pada tahun 2023 yaitu 292.395 jiwa. Proyeksi jumlah penduduk untuk dua puluh tahun ke depan menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Mamuju akan terus meningkat. Pada tahun 2025, jumlah penduduk diperkirakan akan mencapai 301.900 jiwa, dan pada tahun 2045 diperkirakan akan mencapai 405.990 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk dapat berdampak signifikan pada berbagai sektor, seperti ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk mengelola dampak dari pertumbuhan penduduk yang cepat



agar sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal dan keberlanjutan dapat terjaga.

Tabel 2.54 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (Kabupaten Mamuju)

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-laki	149.551	154.110	165.200	175.900	188.402	202.901
Perempuan	142.844	147.790	160.010	171.940	186.164	203.089
Rasio	1,047	1,043	1,032	1,023	1,012	0,999

Sumber : BPS Proyeksi Penduduk, 2025-2035 dan Penulis, 2024

Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kabupaten Mamuju berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2023 adalah 149.551 jiwa laki-laki dan 142.844 jiwa perempuan, dengan rasio jenis kelamin 1,047. Perubahan rasio jenis kelamin ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kebijakan keluarga, preferensi budaya, dan migrasi. Preferensi terhadap anak laki-laki atau anak perempuan dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Hal ini dapat mempengaruhi proyeksi pertumbuhan penduduk di masa depan. Perubahan rasio jenis kelamin dapat mempengaruhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan sosial lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan perubahan rasio jenis kelamin dalam perencanaan kebijakan di tingkat lokal maupun nasional.

Tabel 2.55 Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur (Kabupaten Mamuju)

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14 Tahun	84.282	85.240	87.980	89.730	91.528	93.370
15-64 Tahun	195.004	202.090	218.050	233.570	251.300	271.391



Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
>65 Tahun	13.109	14.570	19.180	24.540	31.738	41.229
Angka Ketergantungan	49,94%	49,39%	49,14%	48,92%	49,05%	49,60%

Sumber : BPS Proyeksi Penduduk, 2025-2035 dan Penulis, 2024

Menurut hasil proyeksi penduduk dari Badan Pusat Statistik, yang menggunakan alat ukur proyeksi eksponensial, jumlah penduduk Kabupaten Mamuju terus meningkat hingga tahun 2045. Hal ini juga berlaku bagi penduduk usia kerja, yang dapat memengaruhi kondisi ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dapat menjadi faktor penentu kemajuan suatu daerah. Dengan penduduk usia kerja yang memiliki keterampilan yang memadai, wilayah tersebut berpotensi untuk berkembang karena meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM), yang pada akhirnya dapat mendorong kemajuan daerah tersebut. Namun, peningkatan jumlah penduduk juga berimplikasi pada peningkatan jumlah penduduk usia kerja, yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat atau tingkat pengangguran. Kesejahteraan masyarakat akan meningkat jika penduduk usia kerja dapat bersaing di pasar kerja, sementara tingkat pengangguran akan meningkat jika mereka tidak dapat berkontribusi secara efektif.

2.6.2 Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar

Untuk mengetahui kebutuhan sarana prasarana terhadap jumlah penduduk di masa depan, dapat menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Selain itu, penentuan kebutuhan sarana prasarana juga dapat didasarkan pada NSPK dari



kementerian/lembaga terkait. Proyeksi kebutuhan sarana prasarana yang disajikan setidaknya meliputi rumah/tempat tinggal, air bersih, energi/listrik, persampahan, sarana kesehatan, dan sarana pendidikan.

1.2.3 Rumah/ Tempat Tinggal

Proyeksi kebutuhan rumah atau tempat tinggal melibatkan analisis terhadap beberapa faktor, termasuk pertumbuhan populasi, perubahan gaya hidup, dan faktor-faktor demografis lainnya. Pertumbuhan jumlah penduduk merupakan faktor utama yang memengaruhi kebutuhan perumahan, karena semakin banyak orang, semakin banyak pula yang membutuhkan rumah. Perubahan gaya hidup dan perkembangan ekonomi juga dapat memengaruhi kebutuhan perumahan, misalnya dengan meningkatnya permintaan akan rumah yang lebih modern, berkelanjutan, atau terintegrasi dengan teknologi. Proyeksi kebutuhan rumah yang akurat harus mempertimbangkan semua faktor ini untuk memahami kebutuhan pasar secara menyeluruh.

Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan kebutuhan permukiman. Untuk mengetahui kebutuhan permukiman hingga tahun 2045, diperlukan proyeksi penduduk di tahun 2045 agar dapat diketahui jumlah unit rumah dan luas lahan minimum yang dibutuhkan. Proyeksi kebutuhan rumah ini menggunakan asumsi dari SNI 03-1733-2004, yaitu setiap unit rumah rata-rata ditempati oleh 4 orang dan luas minimum kavling per unit adalah 100 meter persegi. Berdasarkan data BPS, rata-rata jumlah anggota rumah tangga di Kabupaten Mamuju tahun 2022 adalah 4 orang per rumah. Berikut adalah hasil proyeksi kebutuhan rumah Kabupaten Mamuju.



**Tabel 2.56 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal
(Kabupaten Mamuju)**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	292.395	301.900	325.210	347.840	374.566	405.990
Proyeksi Kebutuhan Rumah	73.099	75.475	81.303	86.960	93.641	101.497

Sumber : BPS Proyeksi Penduduk, 2025-2035 dan Penulis, 2024

Menurut hasil proyeksi penduduk dari BPS, jumlah penduduk Kabupaten Mamuju pada tahun 2023 sebanyak 292.395 jiwa. Dengan asumsi setiap rumah tangga terdiri dari 4 orang, maka kebutuhan rumah di Kabupaten Mamuju pada tahun 2023 sebanyak 73.099 unit. Proyeksi kebutuhan rumah ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2045 diperkirakan mencapai 101.497 unit. Berdasarkan hasil proyeksi, kebutuhan rumah di Kabupaten Mamuju akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Hal ini perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang, agar kebutuhan perumahan dapat terpenuhi secara memadai.

1.2.4 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Daya dukung air adalah kemampuan suatu wilayah atau sistem untuk menyediakan air yang cukup untuk kebutuhan manusia dan ekosistem. Faktor-faktor yang mempengaruhinya meliputi curah hujan, ketersediaan air permukaan dan air tanah, serta pengelolaan air yang efektif. Daya dukung air penting untuk keberlanjutan sumber daya air, mengingat tekanan yang meningkat di seluruh dunia akibat perubahan iklim, urbanisasi, dan pertumbuhan penduduk.

Penyediaan air minum di Kabupaten Mamuju berasal dari



sistem perpipaan yang diatur oleh PDAM. Upaya utama adalah memastikan sebagian besar kebutuhan air bersih dipenuhi oleh PDAM. Analisis kebutuhan air bersih ini bergantung pada proyeksi pertumbuhan penduduk, konsumsi rata-rata air, dan tingkat kehilangan air. Rencana kebutuhan air bersih di kawasan perkotaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kebutuhan air domestik adalah kebutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, mandi, dan menyiram tanaman. Perhitungannya bergantung pada jumlah penduduk. Konsumsi air per orang setiap hari disesuaikan dengan standar kriteria serta tingkat pelayanan yang sesuai dengan skala atau kategori kota tersebut.

Tabel 2.57 Standar Kebutuhan Domestik

Kategori Kota	Jumlah Penduduk	Keb.Domestik (Ltr/Org/Hari)	Non Domestik
Metropolitan	> 1 juta	190	Berdasarkan survey masterplan
Kota Besar	500 ribu – 1 juta	170	
Kota Sedang	100 – 500 ribu	150	
Kota Kecil	20 – 100 ribu	130	20-30% keb. Domestik
Kota Kecamatan	3 – 20 ribu	100	10-20% keb. Domestik
Pedesaan	< 3000	60	

Sumber : SK-SNI Air Bersih

Perhitungan kebutuhan air domestik dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

Kebutuhan Air Domestik = Jumlah Penduduk x Kebutuhan Air Per Kapita.

Pada tahun 2022, Kabupaten Mamuju memiliki jumlah penduduk sebanyak 285.616 jiwa dan diklasifikasikan sebagai



kota sedang. Oleh karena itu, standar kebutuhan air bersih per individu per hari untuk kebutuhan domestik adalah sebanyak 150 liter/orang/hari. Menurut prediksi untuk tahun 2045, jumlah penduduk Kabupaten Mamuju diperkirakan akan meningkat menjadi 406.990 jiwa, dengan tetap mempertahankan klasifikasinya sebagai kota besar. Dengan demikian, kebutuhan air bersih per individu per hari untuk kebutuhan domestik di Kabupaten Mamuju diharapkan tetap sebesar 150 liter/orang/hari.

2. Kebutuhan Non Domestik

Kebutuhan air non domestik melibatkan penggunaan air untuk kegiatan di luar konteks rumah tangga, seperti di sektor komersial, industri, fasilitas umum, dan sektor lainnya. Proporsi atau estimasi kebutuhan air non domestik ini dihitung setiap tahun dengan diasumsikan tumbuh sejalan dengan kebutuhan domestik, berkisar antara 10-20% dari total kebutuhan air domestik. Asumsi untuk masing-masing jenis kebutuhan air non domestik dapat dijelaskan sebagai berikut:

Fasilitas Umum: $15\% \times \text{Kebutuhan Domestik}$

Kantor: $15\% \times \text{Kebutuhan Domestik}$

Komersial: $20\% \times \text{Kebutuhan Domestik}$

Industri: $10\% \times \text{Kebutuhan Domestik}$

Melalui penjelasan ini, kita dapat memahami proporsi kebutuhan air non domestik yang setara dengan pertumbuhan kebutuhan domestik dan asumsi spesifik untuk masing-masing kategori penggunaan air non domestik.

3. Kebocoran/ Kehilangan Air

Kebocoran air dapat dijelaskan sebagai perbedaan antara volume air yang diproduksi oleh penyedia air dan jumlah air yang benar-benar tercatat atau terjual kepada konsumen



melalui meteran air. Kondisi ini umumnya disebut sebagai “air yang tidak terhitung” (*uncounted water*). Umumnya, diperkirakan bahwa kebocoran air mencapai sekitar 10% dari total kebutuhan air, yang dapat terjadi selama proses distribusi air kepada setiap konsumen. Kebocoran atau kehilangan air dapat dibagi menjadi dua jenis utama:

- a) Kehilangan Teknis: Terjadi karena perbedaan dalam jumlah air yang digunakan (volume) yang tercatat pada meter air pelanggan atau karena adanya kebocoran pada sistem perpipaan air bersih.
- b) Kehilangan Non-Teknis: Terjadi karena kesalahan pembacaan meter air atau kolusi antara petugas dan konsumen, serta karena adanya penyambungan pipa air bersih yang tidak sah.

Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Mamuju, dampaknya adalah peningkatan kebutuhan air bersih di wilayah perencanaan tersebut. Kebutuhan standar untuk air bersih dihitung berdasarkan serangkaian perhitungan yang melibatkan beberapa faktor:

- Kebutuhan Air Domestik = $\sum \text{Penduduk} \times \text{Kebutuhan Air per Kapita}$
- Kebutuhan Non Domestik
 - Fasilitas umum = 15% x kebutuhan domestik
 - Kantor = 15% x kebutuhan domestik
 - Komersial = 20% x kebutuhan domestik
 - Industri = 10% x kebutuhan domestik
- Hidran air = 20% x (keb. Domestik + keb. Non domestik)
- Kehilangan Air = 10% x (keb. Domestik + keb. Non domestik)
- Kebutuhan Total = kebutuhan domestik + kebutuhan non domestik + hidran



- Kebutuhan Rata-rata Harian = kebutuhan domestik + kebutuhan non domestik + hidran + kehilangan air
- Kebutuhan Harian Maksimum = $1,15 \times$ kebutuhan rata-rata harian.

Dengan menggunakan perhitungan di atas, proyeksi kebutuhan air bersih di Kabupaten Mamuju untuk masa depan dapat ditemukan dalam tabel berikut:



Tabel 2.58 Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kabupaten Mamuju berdasarkan SNI

Tahun	Jumlah Penduduk	Proyeksi Kebutuhan Air (L/O/H)									
		Domestik	Non Domestik				Hidran Air	Kehilangan Air	Kebutuhan Total	Kebutuhan Rata-Rata	Kebutuhan Harian Maksimum
			Fasilitas Umum	Kantor	Komersial	Industri					
2022	287640	43.146.000	6.471.900	6.471.900	8.629.200	4.314.600	13.806.720	6.903.360	82.840.320	89.743.680	103.205.232
2023	292380	43.857.000	6.578.550	6.578.550	8.771.400	4.385.700	14.034.240	7.017.120	84.205.440	91.222.560	104.905.944
2024	297110	44.566.500	6.684.975	6.684.975	8.913.300	4.456.650	14.261.280	7.130.640	85.567.680	92.698.320	106.603.068
2025	301900	45.285.000	6.792.750	6.792.750	9.057.000	4.528.500	14.491.200	7.245.600	86.947.200	94.192.800	108.321.720
2026	306630	45.994.500	6.899.175	6.899.175	9.198.900	4.599.450	14.718.240	7.359.120	88.309.440	95.668.560	110.018.844
2027	311310	46.696.500	7.004.475	7.004.475	9.339.300	4.669.650	14.942.880	7.471.440	89.657.280	97.128.720	111.698.028
2028	315990	47.398.500	7.109.775	7.109.775	9.479.700	4.739.850	15.167.520	7.583.760	91.005.120	98.588.880	113.377.212
2029	320610	48.091.500	7.213.725	7.213.725	9.618.300	4.809.150	15.389.280	7.694.640	92.335.680	100.030.320	115.034.868
2030	325210	48.781.500	7.317.225	7.317.225	9.756.300	4.878.150	15.610.080	7.805.040	93.660.480	101.465.520	116.685.348
2031	329790	49.468.500	7.420.275	7.420.275	9.893.700	4.946.850	15.829.920	7.914.960	94.979.520	102.894.480	118.328.652
2032	334330	50.149.500	7.522.425	7.522.425	10.029.900	5.014.950	16.047.840	8.023.920	96.287.040	104.310.960	119.957.604
2033	338850	50.827.500	7.624.125	7.624.125	10.165.500	5.082.750	16.264.800	8.132.400	97.588.800	105.721.200	121.579.380
2034	343340	51.501.000	7.725.150	7.725.150	10.300.200	5.150.100	16.480.320	8.240.160	98.881.920	107.122.080	123.190.392
2035	347840	52.176.000	7.826.400	7.826.400	10.435.200	5.217.600	16.696.320	8.348.160	100.177.920	108.526.080	124.804.992



Tahun	Jumlah Penduduk	Proyeksi Kebutuhan Air (L/O/H)									
		Domestik	Non Domestik				Hidran Air	Kehilangan Air	Kebutuhan Total	Kebutuhan Rata-Rata	Kebutuhan Harian Maksimum
			Fasilitas Umum	Kantor	Komersial	Industri					
2036	352856,1	52.928.415	7.939.262	7.939.262	10.585.683	5.292.842	16.937.093	8.468.546	101.622.557	110.091.103	126.604.769
2037	358029,7	53.704.455	8.055.668	8.055.668	10.740.891	5.370.446	17.185.426	8.592.713	103.112.554	111.705.266	128.461.056
2038	363367,6	54.505.140	8.175.771	8.175.771	10.901.028	5.450.514	17.441.645	8.720.822	104.649.869	113.370.691	130.376.295
2039	368877,1	55.331.565	8.299.735	8.299.735	11.066.313	5.533.157	17.706.101	8.853.050	106.236.605	115.089.655	132.353.103
2040	374565,8	56.184.870	8.427.731	8.427.731	11.236.974	5.618.487	17.979.158	8.989.579	107.874.950	116.864.530	134.394.209
2041	380441,5	57.066.225	8.559.934	8.559.934	11.413.245	5.706.623	18.261.192	9.130.596	109.567.152	118.697.748	136.502.410
2042	386512,7	57.976.905	8.696.536	8.696.536	11.595.381	5.797.691	18.552.610	9.276.305	111.315.658	120.591.962	138.680.757
2043	392788,2	58.918.230	8.837.735	8.837.735	11.783.646	5.891.823	18.853.834	9.426.917	113.123.002	122.549.918	140.932.406
2044	399277,3	59.891.595	8.983.739	8.983.739	11.978.319	5.989.160	19.165.310	9.582.655	114.991.862	124.574.518	143.260.695
2045	405989,8	60.898.470	9.134.771	9.134.771	12.179.694	6.089.847	19.487.510	9.743.755	116.925.062	126.668.818	145.669.140

Sumber : BPS Proyeksi Penduduk, 2025-2035 dan Penulis, 2024



Tabel 2.59 Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kabupaten Mamuju

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	292.395	301.900	325.210	347.840	374.565	405.989
Proyeksi Kebutuhan Air Minum	84.205.440	86.947.200	93.660.480	100.177.920	107.874.950	116.925.062

Sumber : BPS Proyeksi Penduduk, 2025-2035 dan Penulis, 2023



Berdasarkan perhitungan proyeksi kebutuhan air bersih di Kabupaten Mamuju pada tahun 2045, terdapat kebutuhan domestik air bersih sebesar 116.925.062 liter. Pada tahun 2023, kebutuhan harian air bersih mencapai 84.205.440 liter dan mengalami peningkatan menjadi 34.084.742 liter per hari pada tahun 2045. Peningkatan ini dipicu oleh perubahan dalam pola penggunaan lahan yang terus berkembang seiring berjalannya waktu yang membutuhkan pasokan air bersih di Kabupaten Mamuju.

1.2.5 Energi/listrik

Infrastruktur kelistrikan di wilayah perencanaan bergantung pada Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagai sarana utama untuk mendistribusikan listrik. Arus listrik yang melewati SUTM kemudian disalurkan melalui gardu distribusi yang tersebar di berbagai lokasi, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, baik untuk industri, penerangan, rumah tangga, dan sebagainya. Manajemen dan pengelolaan jaringan listrik di Kabupaten Mamuju menjadi tanggung jawab dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Instalasi distribusi primer dan sekunder dalam konstruksi umumnya memiliki kapasitas tertentu, sesuai dengan kebutuhan pelayanan listrik di wilayah tersebut yaitu Instalasi distribusi sekunder (SUTM) – dengan kapasitas 20-50Kv dan instalasi distribusi tersier (SUTR) – dengan kapasitas 220V.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/M.PE/1992 mengenai Ruang Bebas Saluran Udara, ditetapkan jarak minimal antara penghantar listrik dengan permukaan tanah dan objek lainnya dengan persyaratan sebagai berikut:



Tabel 2.60 Jarak Minimum antara Penghantar dengan Tanah dan Benda Lain

No	Lokasi	SUTT		SUTET	SUTM	SUTR	Saluran Kabel	
		66 KV	150 KV	500 KV			SKTM	SKTR
1	Bangunan Beton	20 m	20 m	20 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
2	Pompa Bensin	20 m	20 m	20 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3
3	Penimbunan Bahan Bakar	50 m	20 m	50 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
4	Pagar	3 m	20 m	3 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
5	Lapangan Terbuka	6,5 m	20 m	15 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
6	Jalan Raya	8 m	20 m	15 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
7	Pepohonan	3,5 m	20 m	8,5 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
8	Bangunan Tahan Api	3,5 m	20 m	8,5 m	20 m	1,5 m	20 m	20 m
9	Rel Kereta Api	8 m	20 m	15 m	20 m	20 m	20 m	20 m
10	Jembatan Besi/ Tangga Besi/ Kereta Api	3 m	20 m	8,5 m	20 m	20 m	20 m	20 m
11	Lapangan Olah Raga	2,5 m	20 m	14 m	20 m	20 m	20 m	20 m
12	SUTT lainnya penghantar udara tegangan rendah, jaringan telekomunikasi, televisi	2,5 m	20 m	8,5 m	20 m	20 m	20 m	20 m

Sumber : Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 01.P/47/M.PE/1992

Peningkatan jumlah penduduk berdampak pada peningkatan permintaan listrik. Semakin banyak populasi, permintaan listrik juga akan meningkat. Oleh karena itu, dalam merencanakan pengembangan jaringan listrik, perlu mempertimbangkan proyeksi



kebutuhan listrik berdasarkan pertumbuhan jumlah penduduk. Ini menekankan signifikansi proyeksi kebutuhan listrik per individu untuk beberapa tahun ke depan. Estimasi kebutuhan listrik untuk dua dekade mendatang dapat dihitung dengan memperhatikan standar layanan yang telah ditetapkan oleh PLN, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Rumah Tangga: 750 watt, setara dengan 0,75 KVA per rumah tangga.
- b) Industri & Perdagangan: 70% dari kebutuhan rumah tangga.
- c) Fasilitas Sosial & Ekonomi: 15% dari kebutuhan rumah tangga.
- d) Fasilitas Perkantoran: 10% dari kebutuhan rumah tangga.
- e) Penerangan Jalan: 1% dari kebutuhan rumah tangga.
- f) Cadangan: 5% dari kebutuhan rumah tangga.

Dengan demikian, perhitungan ini memberikan panduan untuk merencanakan kapasitas listrik yang memadai untuk memenuhi kebutuhan yang beragam dalam masyarakat seiring pertumbuhan jumlah penduduk. Berikut adalah tabel hasil proyeksi kebutuhan listrik di Kabupaten Mamuju:



Tabel 2.61 Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kabupaten Mamuju berdasarkan SNI

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Proyeksi Kebutuhan Listrik (KVA)						
			Rumah Tangga	Industri dan Perdagangan	Fasilitas Sosial dan Ekonomi	Perkantoran	Penerangan Jalan	Cadangan	Jumlah
2022	287640	71.910	53.932,50	37.752,75	8.089,88	5.393,25	539,33	2.696,63	108.404,33
2023	292380	73.095	54.821,25	38.374,88	8.223,19	5.482,13	548,21	2.741,06	110.190,71
2024	297110	74.278	55.708,13	38.995,69	8.356,22	5.570,81	557,08	2.785,41	111.973,33
2025	301900	75.475	56.606,25	39.624,38	8.490,94	5.660,63	566,06	2.830,31	113.778,56
2026	306630	76.658	57.493,13	40.245,19	8.623,97	5.749,31	574,93	2.874,66	115.561,18
2027	311310	77.828	58.370,63	40.859,44	8.755,59	5.837,06	583,71	2.918,53	117.324,96
2028	315990	78.998	59.248,13	41.473,69	8.887,22	5.924,81	592,48	2.962,41	119.088,73
2029	320610	80.153	60.114,38	42.080,06	9.017,16	6.011,44	601,14	3.005,72	120.829,89
2030	325210	81.303	60.976,88	42.683,81	9.146,53	6.097,69	609,77	3.048,84	122.563,52
2031	329790	82.448	61.835,63	43.284,94	9.275,34	6.183,56	618,36	3.091,78	124.289,61
2032	334330	83.583	62.686,88	43.880,81	9.403,03	6.268,69	626,87	3.134,34	126.000,62
2033	338850	84.713	63.534,38	44.474,06	9.530,16	6.353,44	635,34	3.176,72	127.704,09
2034	343340	85.835	64.376,25	45.063,38	9.656,44	6.437,63	643,76	3.218,81	129.396,26
2035	347840	86.960	65.220,00	45.654,00	9.783,00	6.522,00	652,20	3.261,00	131.092,20



Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Proyeksi Kebutuhan Listrik (KVA)						
			Rumah Tangga	Industri dan Perdagangan	Fasilitas Sosial dan Ekonomi	Perkantoran	Penerangan Jalan	Cadangan	Jumlah
2036	352856,1	88.214	66.160,52	46.312,36	9.924,08	6.616,05	661,61	3.308,03	132.982,64
2037	358029,7	89.507	67.130,57	46.991,40	10.069,59	6.713,06	671,31	3.356,53	134.932,44
2038	363367,6	90.842	68.131,43	47.692,00	10.219,71	6.813,14	681,31	3.406,57	136.944,16
2039	368877,1	92.219	69.164,46	48.415,12	10.374,67	6.916,45	691,64	3.458,22	139.020,56
2040	374565,8	93.641	70.231,09	49.161,76	10.534,66	7.023,11	702,31	3.511,55	141.164,49
2041	380441,5	95.110	71.332,78	49.932,95	10.699,92	7.133,28	713,33	3.566,64	143.378,89
2042	386512,7	96.628	72.471,13	50.729,79	10.870,67	7.247,11	724,71	3.623,56	145.666,97
2043	392788,2	98.197	73.647,79	51.553,45	11.047,17	7.364,78	736,48	3.682,39	148.032,05
2044	399277,3	99.819	74.864,49	52.405,15	11.229,67	7.486,45	748,64	3.743,22	150.477,63
2045	405989,8	101.497	76.123,09	53.286,16	11.418,46	7.612,31	761,23	3.806,15	153.007,41

Sumber : BPS Proyeksi Penduduk, 2025-2035 dan Penulis, 2024



Tabel 2.62 Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kabupaten Mamuju

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	292.395	301.900	325.210	347.840	374.565	405.989
Proyeksi Kebutuhan Listrik	110.190,71	113.778,56	122.563,52	131.092,20	141.164,49	153.007,41

Sumber : BPS Proyeksi Penduduk, 2025-2035 dan Penulis, 2024



Analisis menunjukkan bahwa kebutuhan listrik di Kabupaten Mamuju terus mengalami peningkatan dari tahun 2023 hingga 2045. Pada awal periode tersebut, wilayah ini memiliki jumlah penduduk sekitar 292.395. Proyeksi kebutuhan listrik untuk tahun 2045 dilakukan berdasarkan jumlah rumah tangga di wilayah tersebut. Total proyeksi kebutuhan listrik Kabupaten Mamuju pada tahun 2045 mencapai 153.007,41 KVA, jumlah yang signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan pada tahun 2023 yang mencapai 110.190,71 KVA.

Peningkatan yang cukup besar ini menunjukkan perlunya pengembangan infrastruktur listrik yang matang untuk mengantisipasi pertumbuhan yang terus berkembang, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Mamuju. Memiliki pemahaman yang mendalam terhadap pola kebutuhan listrik menjadi faktor kunci dalam merancang strategi pengembangan yang efisien dan berkelanjutan. Ini menjadi sangat penting untuk memastikan ketersediaan listrik yang memadai dan handal, yang mendukung kehidupan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.

1.2.6 Fasilitas Persampahan

Evaluasi manajemen sampah dilakukan untuk mengukur jumlah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan manusia di suatu wilayah. Perkiraan akumulasi sampah menggunakan panduan SNI-3242-2008 sebagai dasar perhitungan, yang selanjutnya dibandingkan dengan standar prasarana yang diatur dalam SNI 03-1733-2004. Tujuannya adalah untuk meramalkan kebutuhan infrastruktur persampahan yang diperlukan dalam wilayah penelitian. Menurut ketentuan yang tercantum dalam SNI-3242-2008 dan SNI 03-1733-2004, estimasi volume sampah yang



dihasilkan dan infrastruktur yang dibutuhkan di kota kecil adalah sekitar 2,5 liter per orang per hari, sedangkan di kota besar ditetapkan sekitar 3 liter per orang per hari.

Tabel 2.63 Standar Kebutuhan Prasarana Persampahan

Lingkup Prasarana	Prasarana			Keterangan	
	Sarana Pelengkap	Status	Dimensi		
Rumah (5 Jiwa)	Tong Sampah	Pribadi	-	-	
RW (2500 Jiwa)	Gerobak Sampah	TPS	2 m3	Jarak Bebas TPS dengan Lingkungan Hunian Minimal 30 m	Gerobak mengangkut 3x seminggu
	Bak Sampah Kecil		6 m3		
Kelurahan (30.000 Jiwa)	Gerobak Sampah	TPS	2 m3		Gerobak mengangkut 3x seminggu
	Bak Sampah Besar		12 m3		
Kecamatan (120.000 Jiwa)	Mobil Sampah	TPS/TPA Lokal	-		Mobil mengangkut 3x seminggu
	Bak Sampah Besar		25 m3		
Kota (>480.000 Jiwa)	Bak Sampah Akhir	TPA	-		-
	Tempat Daur Ulang Sampah		-		

Sumber : Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan (SNI 03-1733-2004)

Berdasarkan regulasi tersebut, untuk meningkatkan layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah di tingkat kecamatan, diperlukan fasilitas persampahan seperti kendaraan pengangkut sampah dan bak sampah berkapasitas 25 m3 di Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Pembuangan Akhir



(TPA) setempat. Proyeksi hasil volume sampah dan kebutuhan sarana pengelolaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.64 Proyeksi Timbunan Sampah dan Kebutuhan TPS di Kabupaten Mamuju berdasarkan SNI

Tahun	Jumlah Penduduk	Volume Sampah (L/org/hari)	Kebutuhan TPS	Kebutuhan TPA	Kebutuhan mobil sampah
2022	287640	862.920	35	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
2023	292380	877.140	35		
2024	297110	891.330	36		
2025	301900	905.700	36		
2026	306630	919.890	37		
2027	311310	933.930	37		
2028	315990	947.970	38		
2029	320610	961.830	38		
2030	325210	975.630	39		
2031	329790	989.370	40		
2032	334330	1.002.990	40		
2033	338850	1.016.550	41		
2034	343340	1.030.020	41		
2035	347840	1.043.520	42		
2036	352856,1	1.058.568	42		
2037	358029,7	1.074.089	43		
2038	363367,6	1.090.103	44		
2039	368877,1	1.106.631	44		
2040	374565,8	1.123.697	45		
2041	380441,5	1.141.325	46		
2042	386512,7	1.159.538	46		
2043	392788,2	1.178.365	47		
2044	399277,3	1.197.832	48		
2045	405989,8	1.217.969	49		

Sumber : BPS Proyeksi Penduduk, 2025-2035 dan Penulis, 2024



**Tabel 2.65 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan di
Kabupaten Mamuju**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Timbulan Sampah				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	292.395	301.900	325.210	347.840	374.565	405.989
Proyeksi Timbulan Sampah	877.140	905.700	975.630	1.043.520	1.123.697	1.217.969

Sumber : BPS Proyeksi Penduduk, 2025-2035 dan Penulis, 2024

Pada tahun 2023, dengan jumlah penduduk 292.395 jiwa di Kabupaten Mamuju, volume sampah yang dihasilkan setiap hari diperkirakan sekitar 877.140 liter per individu. Analisis ini didasarkan pada standar SNI yang menetapkan bahwa rata-rata setiap orang akan menghasilkan sampah sebanyak 3 liter per hari. Dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk, proyeksi untuk tahun 2045 menunjukkan peningkatan jumlah penduduk menjadi 405.989 jiwa, yang kemudian diperkirakan dapat menghasilkan volume sampah sekitar 1.217.969 liter per orang setiap hari. Peningkatan yang signifikan dalam volume sampah menunjukkan kebutuhan yang sangat penting untuk diperhatikan dalam perencanaan manajemen sampah di masa mendatang. Meskipun terjadi peningkatan volume sampah, pada tahun 2045, Kabupaten Mamuju memiliki kelebihan Tempat Penampungan Sementara (TPS). Diperkirakan bahwa kebutuhan untuk TPS pada tahun tersebut sekitar 49 unit. Meski kebutuhan akan Tempat Penampungan Sementara (TPS) telah terpenuhi, penting untuk mempertimbangkan lokasi yang strategis dan berkelanjutan dalam manajemen sampah agar layanan dapat berjalan efektif dan menjaga lingkungan tetap terjaga. Oleh karena itu, dalam perencanaan strategi manajemen sampah di Kabupaten Mamuju,



evaluasi yang menyeluruh diperlukan, termasuk pemantauan pertumbuhan jumlah penduduk serta penerapan kebijakan yang mendukung pengurangan timbulan sampah dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah di setiap kecamatan.

1.2.7 Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan sangat penting dalam menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan juga memiliki dampak strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta mengendalikan pertumbuhan penduduk. Penyediaan fasilitas ini didasarkan pada jumlah penduduk yang akan dilayani oleh fasilitas tersebut. Pendekatan desain ruangan juga akan mempertimbangkan unit atau kelompok lingkungan yang ada, yang terkait dengan pembentukan grup bangunan atau blok sesuai dengan konteks lingkungan. Penempatan fasilitas ini akan memperhitungkan jangkauan area layanan yang sesuai dengan kebutuhan dasar fasilitas yang harus dipenuhi untuk melayani area tertentu. Beberapa jenis fasilitas yang diperlukan mencakup:

- a) Posyandu berfungsi memberikan layanan kesehatan kepada anak-anak usia balita.
- b) Balai pengobatan warga menyediakan pelayanan kesehatan kepada penduduk dengan penekanan pada penyembuhan tanpa perawatan, berobat, dan juga melakukan vaksinasi pada waktu tertentu.
- c) Balai kesejahteraan ibu dan anak (BKIA) atau Klinik Bersalin melayani ibu sebelum, selama, dan setelah melahirkan, serta memberikan layanan kepada anak-anak hingga usia 6 tahun.
- d) Puskesmas dan balai pengobatan berperan sebagai pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pengobatan penyakit, serta melaksanakan program



pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit di wilayah kerjanya.

- e) Puskesmas pembantu dan balai pengobatan berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan sederhana yang memberikan layanan terbatas dan membantu kegiatan puskesmas dalam wilayah yang lebih kecil.
- f) Tempat praktek dokter adalah sarana yang memberikan layanan kesehatan secara individu dengan fokus pada usaha penyembuhan tanpa perawatan.
- g) Apotik melayani penduduk dalam menyediakan obat-obatan, baik untuk penyembuhan maupun pencegahan.

Menurut ketentuan SNI 03-1733-2004, standar kebutuhan sarana kesehatan adalah sebagai berikut: untuk fasilitas puskesmas, kapasitasnya dirancang untuk mendukung populasi sebesar 120.000 jiwa, sedangkan untuk sarana rumah sakit, kapasitasnya diatur untuk mendukung populasi sekitar 240.000 jiwa. Standar ini menjadi acuan dalam menentukan kebutuhan sarana kesehatan di Kabupaten Mamuju.

**Tabel 2.66 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Puskesmas
di Kabupaten Mamuju berdasarkan SNI**

Tahun	Jumlah Penduduk	Penduduk Pendukung	Jenis Fasilitas	Eksisting	Kebutuhan	Belum Terpenuhi
2022	287640	120.000	Puskesmas	13	2	-11
2023	292380	120.000	Puskesmas	13	2	-11
2024	297110	120.000	Puskesmas	13	2	-11
2025	301900	120.000	Puskesmas	13	3	-10
2026	306630	120.000	Puskesmas	13	3	-10
2027	311310	120.000	Puskesmas	13	3	-10
2028	315990	120.000	Puskesmas	13	3	-10
2029	320610	120.000	Puskesmas	13	3	-10
2030	325210	120.000	Puskesmas	13	3	-10



Tahun	Jumlah Penduduk	Penduduk Pendukung	Jenis Fasilitas	Eksisting	Kebutuhan	Belum Terpenuhi
2031	329790	120.000	Puskesmas	13	3	-10
2032	334330	120.000	Puskesmas	13	3	-10
2033	338850	120.000	Puskesmas	13	3	-10
2034	343340	120.000	Puskesmas	13	3	-10
2035	347840	120.000	Puskesmas	13	3	-10
2036	352856,1	120.000	Puskesmas	13	3	-10
2037	358029,7	120.000	Puskesmas	13	3	-10
2038	363367,6	120.000	Puskesmas	13	3	-10
2039	368877,1	120.000	Puskesmas	13	3	-10
2040	374565,8	120.000	Puskesmas	13	3	-10
2041	380441,5	120.000	Puskesmas	13	3	-10
2042	386512,7	120.000	Puskesmas	13	3	-10
2043	392788,2	120.000	Puskesmas	13	3	-10
2044	399277,3	120.000	Puskesmas	13	3	-10
2045	405989,8	120.000	Puskesmas	13	3	-10

Sumber : BPS Proyeksi Penduduk, 2025-2035 dan Penulis, 2024

**Tabel 2.67 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Rumah
Sakit di Kabupaten Mamuju berdasarkan SNI**

Tahun	Jumlah Penduduk	Penduduk Pendukung	Jenis Fasilitas	Eksisting	Kebutuhan	Belum Terpenuhi
2022	287640	240.000	RS	2	1	-1
2023	292380	240.000	RS	2	1	-1
2024	297110	240.000	RS	2	1	-1
2025	301900	240.000	RS	2	1	-1
2026	306630	240.000	RS	2	1	-1
2027	311310	240.000	RS	2	1	-1
2028	315990	240.000	RS	2	1	-1
2029	320610	240.000	RS	2	1	-1
2030	325210	240.000	RS	2	1	-1



Tahun	Jumlah Penduduk	Penduduk Pendukung	Jenis Fasilitas	Eksisting	Kebutuhan	Belum Terpenuhi
2031	329790	240.000	RS	2	1	-1
2032	334330	240.000	RS	2	1	-1
2033	338850	240.000	RS	2	1	-1
2034	343340	240.000	RS	2	1	-1
2035	347840	240.000	RS	2	1	-1
2036	352856,1	240.000	RS	2	1	-1
2037	358029,7	240.000	RS	2	1	-1
2038	363367,6	240.000	RS	2	2	0
2039	368877,1	240.000	RS	2	2	0
2040	374565,8	240.000	RS	2	2	0
2041	380441,5	240.000	RS	2	2	0
2042	386512,7	240.000	RS	2	2	0
2043	392788,2	240.000	RS	2	2	0
2044	399277,3	240.000	RS	2	2	0
2045	405989,8	240.000	RS	2	2	0

Sumber : BPS Proyeksi Penduduk, 2025-2035 dan Penulis, 2024

Tabel 2.68 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Posyandu di Kabupaten Mamuju berdasarkan SNI

Tahun	Jumlah Penduduk	Penduduk Pendukung	Jenis Fasilitas	Eksisting	Kebutuhan	Belum Terpenuhi
2022	287640	1.250	Posyandu	407	230	-177
2023	292380	1.250	Posyandu	407	234	-173
2024	297110	1.250	Posyandu	407	238	-169
2025	301900	1.250	Posyandu	407	242	-165
2026	306630	1.250	Posyandu	407	245	-162
2027	311310	1.250	Posyandu	407	249	-158
2028	315990	1.250	Posyandu	407	253	-154
2029	320610	1.250	Posyandu	407	256	-151
2030	325210	1.250	Posyandu	407	260	-147



Tahun	Jumlah Penduduk	Penduduk Pendukung	Jenis Fasilitas	Eksisting	Kebutuhan	Belum Terpenuhi
2031	329790	1.250	Posyandu	407	264	-143
2032	334330	1.250	Posyandu	407	267	-140
2033	338850	1.250	Posyandu	407	271	-136
2034	343340	1.250	Posyandu	407	275	-132
2035	347840	1.250	Posyandu	407	278	-129
2036	352856,1	1.250	Posyandu	407	282	-125
2037	358029,7	1.250	Posyandu	407	286	-121
2038	363367,6	1.250	Posyandu	407	291	-116
2039	368877,1	1.250	Posyandu	407	295	-112
2040	374565,8	1.250	Posyandu	407	300	-107
2041	380441,5	1.250	Posyandu	407	304	-103
2042	386512,7	1.250	Posyandu	407	309	-98
2043	392788,2	1.250	Posyandu	407	314	-93
2044	399277,3	1.250	Posyandu	407	319	-88
2045	405989,8	1.250	Posyandu	407	325	-82

Sumber : BPS Proyeksi Penduduk, 2025-2035 dan Penulis, 2024

**Tabel 2.69 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan di
Kabupaten Mamuju**

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Sarana Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	292.395	301.900	325.210	347.840	374.565	405.989
Proyeksi Sarana Puskesmas	2	3	3	3	3	3
Proyeksi Sarana Rumah Sakit	1	1	1	1	2	2



Proyeksi Sarana Posyandu	234	242	260	278	300	325

Sumber : BPS Proyeksi Penduduk, 2025-2035 dan Penulis, 2024

Dari data yang tercantum pada tabel di atas, terungkap bahwa kebutuhan sarana kesehatan seperti puskesmas pada tahun 2023 sebanyak 2 unit, dan saat ini Kabupaten Mamuju telah memiliki 13 puskesmas non rawat inap, dan 10 puskesmas rawat inap. Hal ini menunjukkan bahwa sarana kesehatan berupa puskesmas di Kabupaten Mamuju sudah dapat memenuhi kebutuhan yang ada. Pada tahun 2045, kebutuhan puskesmas diproyeksikan sebanyak 3 unit, sedangkan jumlah puskesmas yang ada saat ini 13 puskesmas non rawat inap, dan 10 puskesmas rawat inap.

Hal yang sama berlaku untuk sarana kesehatan berupa rumah sakit. Saat ini, terdapat 4 rumah sakit umum dan 1 rumah sakit khusus yang beroperasi di Kabupaten Mamuju. Proyeksi kebutuhan rumah sakit pada tahun 2045 adalah 2 unit, dan jumlah rumah sakit yang ada saat ini 4 rumah sakit umum dan 1 rumah sakit khusus. Untuk sarana kesehatan berupa posyandu, saat ini terdapat 407 posyandu yang beroperasi di Kabupaten Mamuju. Pada tahun 2045, proyeksi kebutuhan posyandu adalah sebanyak 325 unit, sedangkan jumlah posyandu yang ada saat ini tetap 407 unit. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa saat ini sarana kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit dan posyandu sudah mampu memenuhi kebutuhan kesehatan untuk 20 tahun ke depan. Namun, untuk menjaga dan meningkatkan standar kualitas fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Mamuju, perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan aktif oleh Dinas Kesehatan setempat. Ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan fasilitas sarana kesehatan yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan penduduk



dalam kurun waktu 20 tahun mendatang.

1.2.8 Fasilitas Pendidikan

Landasan penyelenggaraan fasilitas pendidikan memiliki tujuan untuk mempertimbangkan setiap unit administrasi pemerintahan, baik yang bersifat informal seperti RT dan RW maupun yang bersifat formal seperti Kelurahan dan Kecamatan. Keputusan terkait penyediaan fasilitas ini tidak hanya bergantung pada jumlah penduduk yang akan dilayani, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain.

Pertimbangan dalam penyediaan fasilitas pendidikan juga mencakup desain ruang yang sesuai untuk unit atau kelompok lingkungan yang ada, dengan memperhatikan kesesuaian bentuk bangunan atau blok dengan karakteristik lingkungan lokal. Pemilihan lokasi tempat penyediaan fasilitas ini juga harus memperhitungkan jangkauan radius area layanan yang sesuai dengan kebutuhan dasar sarana untuk melayani area tertentu.

Dengan demikian, aspek penyediaan fasilitas pendidikan tidak hanya melibatkan jumlah penduduk yang dilayani, melainkan juga mempertimbangkan karakteristik lingkungan, desain ruang yang cocok, dan jangkauan layanan yang dibutuhkan oleh area tersebut. Dalam perencanaan fasilitas pendidikan, sangat penting untuk mempertimbangkan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Fasilitas pembelajaran dan ruang belajar harus direncanakan agar mendukung siswa dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara optimal. Oleh karena itu, dalam perencanaan sarana pendidikan, hal-hal yang perlu diperhatikan melibatkan:

- a. Berapa jumlah anak yang memerlukan fasilitas ini pada area perencanaan;
- b. Optimalkan kapasitas dengan satu shift;



- c. Tingkatkan efisiensi dan efektivitas potensi penggunaan ruang belajar secara terpadu;
- d. Gunakan sarana dan prasarana pendukung secara optimal;
- e. Pastikan keserasian dan keselarasan dengan konteks setempat, terutama dengan berbagai jenis sarana lingkungan lainnya.

Fasilitas pendidikan yang dijelaskan dalam standar ini hanya mencakup sektor pendidikan formal, termasuk taman kanak-kanak, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah/negeri. Pengelompokan jenis sarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran ini mencakup:

- a. Taman Kanak-Kanak (TK), berfungsi sebagai penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar pada tingkatan pra belajar dengan fokus 75% pada kegiatan bermain, sementara sisanya bersifat pengenalan;
- b. Sekolah Dasar (SD), merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun;
- c. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP), merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program tiga tahun setelah sekolah dasar (SD);
- d. Sekolah Menengah Umum (SMU) atau Sekolah Menengah Atas (SMA), sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan menengah dengan fokus perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi;
- e. Sarana pembelajaran lainnya, seperti taman bacaan atau perpustakaan umum di lingkungan, berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan minat membaca, menambah ilmu pengetahuan, rekreasi, dan sebagai penunjang pendidikan.



Tabel 2.70 Standar Kebutuhan Sarana Pendidikan dan Pembelajaran

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	1.250
2.	Sekolah Dasar (SD)	1.600
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	4.800
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	4.800

Sumber : SNI 03-1733-2004

Perencanaan kebutuhan fasilitas pendidikan di Kabupaten Mamuju dilakukan dengan melakukan perhitungan proyeksi jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu, seperti 3-6 tahun untuk Taman Kanak-Kanak (TK), 7-12 tahun untuk Sekolah Dasar (SD), 13-15 tahun untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 16-18 tahun untuk Sekolah Menengah Atas (SMA). Informasi terperinci mengenai tingkat Sekolah Dasar dapat ditemukan dalam tabel yang tersedia di bawah ini.

Tabel 2.71 Kebutuhan Sarana Pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Mamuju

Tahun	Jumlah Penduduk 3-6 Tahun	Penduduk Pendukung	Jenis Fasilitas	Eksisting	Kebutuhan	Belum Terpenuhi
2022	25.860	1.250	TK	98	21	-77
2023	26.079	1.250	TK	98	21	-77
2024	26.289	1.250	TK	98	21	-77
2025	26.485	1.250	TK	98	21	-77
2026	26.663	1.250	TK	98	21	-77
2027	26.799	1.250	TK	98	21	-77
2028	26.909	1.250	TK	98	22	-76
2029	26.995	1.250	TK	98	22	-76
2030	27.081	1.250	TK	98	22	-76



Tahun	Jumlah Penduduk 3-6 Tahun	Penduduk Pendukung	Jenis Fasilitas	Eksisting	Kebutuhan	Belum Terpenuhi
2031	27.163	1.250	TK	98	22	-76
2032	27.254	1.250	TK	98	22	-76
2033	27.341	1.250	TK	98	22	-76
2034	27.418	1.250	TK	98	22	-76
2035	27.504	1.250	TK	98	22	-76
2036	27.591	1.250	TK	98	22	-76
2037	27.679	1.250	TK	98	22	-76
2038	27.767	1.250	TK	98	22	-76
2039	27.855	1.250	TK	98	22	-76
2040	27.944	1.250	TK	98	22	-76
2041	28.033	1.250	TK	98	22	-76
2042	28.122	1.250	TK	98	22	-76
2043	28.211	1.250	TK	98	23	-75
2044	28.301	1.250	TK	98	23	-75
2045	28.391	1.250	TK	98	23	-75

Sumber: BPS Proyeksi Penduduk, 2025-2035 dan Penulis, 2024

Tabel 2.72 Kebutuhan Sarana Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Mamuju

Tahun	Jumlah Penduduk 7-12 Tahun	Penduduk Pendukung	Jenis Fasilitas	Eksisting	Kebutuhan	Belum Terpenuhi
2022	35.379	1.600	SD	310	22	-288
2023	35.562	1.600	SD	310	22	-288
2024	35.794	1.600	SD	310	22	-288
2025	36.047	1.600	SD	310	23	-287
2026	36.327	1.600	SD	310	23	-287
2027	36.610	1.600	SD	310	23	-287
2028	36.927	1.600	SD	310	23	-287
2029	37.225	1.600	SD	310	23	-287



Tahun	Jumlah Penduduk 7-12 Tahun	Penduduk Pendukung	Jenis Fasilitas	Eksisting	Kebutuhan	Belum Terpenuhi
2030	37.504	1.600	SD	310	23	-287
2031	37.749	1.600	SD	310	24	-286
2032	37.903	1.600	SD	310	24	-286
2033	38.058	1.600	SD	310	24	-286
2034	38.180	1.600	SD	310	24	-286
2035	38.309	1.600	SD	310	24	-286
2036	38.493	1.600	SD	310	24	-286
2037	38.680	1.600	SD	310	24	-286
2038	38.867	1.600	SD	310	24	-286
2039	39.056	1.600	SD	310	24	-286
2040	39.245	1.600	SD	310	25	-285
2041	39.436	1.600	SD	310	25	-285
2042	39.628	1.600	SD	310	25	-285
2043	39.820	1.600	SD	310	25	-285
2044	40.014	1.600	SD	310	25	-285
2045	40.208	1.600	SD	310	25	-285

Sumber : BPS Proyeksi Penduduk, 2025-2035 dan Penulis, 2024

**Tabel 2.73 Kebutuhan Sarana Pendidikan Tingkat Sekolah
Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Mamuju**

Tahun	Jumlah Penduduk 13-15 Tahun	Penduduk Pendukung	Jenis Fasilitas	Eksisting	Kebutuhan	Belum Terpenuhi
2022	15.133	4.800	SMP	65	3	-62
2023	15.150	4.800	SMP	65	3	-62
2024	15.167	4.800	SMP	65	3	-62
2025	15.195	4.800	SMP	65	3	-62
2026	15.239	4.800	SMP	65	3	-62
2027	15.297	4.800	SMP	65	3	-62



Tahun	Jumlah Penduduk 13-15 Tahun	Penduduk Pendukung	Jenis Fasilitas	Eksisting	Kebutuhan	Belum Terpenuhi
2028	15.379	4.800	SMP	65	3	-62
2029	15.480	4.800	SMP	65	3	-62
2030	15.589	4.800	SMP	65	3	-62
2031	15.705	4.800	SMP	65	3	-62
2032	15.831	4.800	SMP	65	3	-62
2033	15.966	4.800	SMP	65	3	-62
2034	16.095	4.800	SMP	65	3	-62
2035	16.218	4.800	SMP	65	3	-62
2036	16.346	4.800	SMP	65	3	-62
2037	16.476	4.800	SMP	65	3	-62
2038	16.607	4.800	SMP	65	3	-62
2039	16.739	4.800	SMP	65	3	-62
2040	16.873	4.800	SMP	65	4	-61
2041	17.007	4.800	SMP	65	4	-61
2042	17.142	4.800	SMP	65	4	-61
2043	17.279	4.800	SMP	65	4	-61
2044	17.417	4.800	SMP	65	4	-61
2045	17.555	4.800	SMP	65	4	-61

Sumber: BPS Proyeksi Penduduk, 2025-2035 dan Penulis, 2024

**Tabel 2.74 Kebutuhan Sarana Pendidikan Tingkat Sekolah
Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Mamuju**

Tahun	Jumlah Penduduk 16-18 Tahun	Penduduk Pendukung	Jenis Fasilitas	Eksisting	Kebutuhan	Belum Terpenuhi
2022	17.476	4.800	SMA	23	4	-19
2023	17.541	4.800	SMA	23	4	-19
2024	17.579	4.800	SMA	23	4	-19
2025	17.599	4.800	SMA	23	4	-19



Tahun	Jumlah Penduduk 16-18 Tahun	Penduduk Pendukung	Jenis Fasilitas	Eksisting	Kebutuhan	Belum Terpenuhi
2026	17.599	4.800	SMA	23	4	-19
2027	17.579	4.800	SMA	23	4	-19
2028	17.560	4.800	SMA	23	4	-19
2029	17.560	4.800	SMA	23	4	-19
2030	17.605	4.800	SMA	23	4	-19
2031	17.696	4.800	SMA	23	4	-19
2032	17.857	4.800	SMA	23	4	-19
2033	18.076	4.800	SMA	23	4	-19
2034	18.307	4.800	SMA	23	4	-19
2035	18.525	4.800	SMA	23	4	-19
2036	18.703	4.800	SMA	23	4	-19
2037	18.884	4.800	SMA	23	4	-19
2038	19.066	4.800	SMA	23	4	-19
2039	19.250	4.800	SMA	23	4	-19
2040	19.436	4.800	SMA	23	4	-19
2041	19.624	4.800	SMA	23	4	-19
2042	19.814	4.800	SMA	23	4	-19
2043	20.005	4.800	SMA	23	4	-19
2044	20.199	4.800	SMA	23	4	-19
2045	20.394	4.800	SMA	23	4	-19

Sumber: BPS Proyeksi Penduduk, 2025-2035 dan Penulis, 2024

**Tabel 2.75 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan di
Kabupaten Mamuju**

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	292.395	301.900	325.210	347.840	374.565	405.989



Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Sarana TK	21	21	22	22	22	23
Proyeksi Sarana SD	22	23	23	24	25	25
Proyeksi Sarana SMP	3	3	3	3	4	4
Proyeksi Sarana SMA	4	4	4	4	4	4

Sumber: BPS Proyeksi Penduduk, 2025-2035 dan Penulis, 2024

Dari tabel di atas disebutkan kebutuhan sarana pendidikan di tingkat TK pada tahun 2023 yaitu 21 sarana, dan sarana pendidikan tingkat TK di Kabupaten Mamuju yang ada pada saat ini yaitu 98 sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa sarana pendidikan tingkat TK yang ada di Kabupaten Mamuju sudah memenuhi kebutuhan. Pada tahun 2045, kebutuhan sarana pendidikan tingkat TK yaitu 23 sarana, dan sarana pendidikan tingkat TK di Kabupaten Mamuju yang ada pada saat ini yaitu 98 sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa sarana pendidikan TK yang ada pada saat ini sudah dapat mencakup kebutuhan akan sarana pendidikan TK untuk 20 tahun kedepan. Dari tabel di atas disebutkan kebutuhan sarana pendidikan di tingkat SD pada tahun 2023 yaitu 22 sarana, dan sarana pendidikan tingkat SD di Kabupaten Mamuju yang ada pada saat ini yaitu 312 sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa sarana pendidikan tingkat SD yang ada di Kabupaten Mamuju sudah memenuhi kebutuhan. Pada tahun 2045, kebutuhan sarana pendidikan tingkat SD yaitu 25 sarana, dan sarana pendidikan tingkat SD di Kabupaten Mamuju yang ada pada saat ini yaitu 312 sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa sarana pendidikan SD yang ada pada saat ini sudah dapat



mencakup kebutuhan akan sarana pendidikan SD untuk 20 tahun kedepan.

Kebutuhan sarana pendidikan di tingkat SMP pada tahun 2023 yaitu 3 sarana, dan sarana pendidikan tingkat SMP di Kabupaten Mamuju yang ada pada saat ini yaitu 65 sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa sarana pendidikan tingkat SMP yang ada di Kabupaten Mamuju sudah memenuhi kebutuhan. Pada tahun 2045, kebutuhan sarana pendidikan tingkat SMP yaitu 4 sarana, dan sarana pendidikan tingkat SMP di Kabupaten Mamuju yang ada pada saat ini yaitu 65 sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa sarana pendidikan SMP yang ada pada saat ini sudah dapat mencakup kebutuhan akan sarana pendidikan SMP untuk 20 tahun kedepan.

Kebutuhan sarana pendidikan di tingkat SMA pada tahun 2023 yaitu 4 sarana, dan sarana pendidikan tingkat SMA di Kabupaten Mamuju yang ada pada saat ini yaitu 23 sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa sarana pendidikan tingkat SMA yang ada di Kabupaten Mamuju sudah memenuhi kebutuhan. Pada tahun 2045, kebutuhan sarana pendidikan tingkat SMA yaitu 4 sarana, dan sarana pendidikan tingkat SMA di Kabupaten Mamuju yang ada pada saat ini yaitu 23 sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa sarana pendidikan SMA yang ada pada saat ini sudah dapat mencakup kebutuhan akan sarana pendidikan SMA untuk 20 tahun kedepan.

Agar sarana pendidikan di Kabupaten Mamuju terus berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan peserta didik hingga 20 tahun ke depan, penting bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju untuk melakukan pengawasan dan pemantauan yang cermat terhadap fasilitas pendidikan yang sudah ada saat ini. Hal



ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan fasilitas pendidikan agar dapat mengakomodasi kebutuhan pendidikan yang akan datang.

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah telah merumuskan strategi pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Melalui analisis mendalam terhadap potensi ekonomi, sumber daya alam, dan karakteristik wilayah, pemerintah mengidentifikasi kawasan strategis yang memiliki keunggulan untuk dijadikan pusat pertumbuhan. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah ini bukan hanya menciptakan kawasan yang dinamis dan berdaya saing, tetapi juga berupaya menjawab kebutuhan masyarakat secara holistik. Dengan landasan RTRW yang kokoh, diharapkan pusat pertumbuhan wilayah mampu menjadi motor penggerak pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

2.7.1 Rencana Struktur Ruang Wilayah

Pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mamuju tahun 2019-2039, terdapat dua bagian utama yang mencakup Rencana Struktur Ruang Wilayah, yaitu sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana. Rencana ini diilustrasikan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000, sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam Lampiran I.4 dokumen RTRW Kabupaten Mamuju.

A. Sistem perkotaan di Kabupaten Mamuju melibatkan beberapa elemen, yaitu:



1. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
 - a. Kecamatan Papalang.
2. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
 - a. kawasan perkotaan Dayanginna di Kecamatan Tapalang;
 - b. kawasan perkotaan Salisingan di Kecamatan Bala-balakang;
 - c. kawasan perkotaan Campaloga di Kecamatan Tommo;
 - d. kawasan perkotaan Kalumpang di Kecamatan Kalumpang;
 - e. kawasan perkotaan Pabettengan di Kecamatan Bonehau;
 - f. kawasan perkotaan Tarailu di Kecamatan Sampaga; dan
 - g. kawasan perkotaan Simboro di Kecamatan Simboro.
3. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
 - a. kawasan permukiman Dungkait di Kecamatan Tapalang Barat;
 - b. kawasan permukiman Sumare di Kecamatan Simboro;
 - c. kawasan permukiman Buttuada di Kecamatan Bonehau;
 - d. kawasan permukiman Toabo di Kecamatan Papalang;
 - e. kawasan permukiman Buanasakti di Kecamatan Tommo;
 - f. kawasan permukiman Pulau Ambo Kepulauan Balabalakang; dan
 - g. kawasan permukiman Kasambang di Kecamatan Tapalang.



B. Sistem Jaringan Prasarana di Kabupaten Mamuju melibatkan beberapa elemen, yaitu:

1. Sistem Jaringan Transportasi merujuk pada organisasi dan tata kelola jalan, jembatan, serta sarana transportasi lainnya yang membentuk suatu jaringan terpadu untuk memfasilitasi pergerakan orang dan barang di suatu wilayah atau lokasi.
2. Sistem Jaringan Energi adalah suatu struktur yang melibatkan distribusi, penyimpanan, dan pengelolaan sumber daya energi dalam suatu wilayah atau lokasi. Hal ini mencakup infrastruktur yang mendukung transportasi, distribusi, dan penyediaan energi kepada konsumen, serta memastikan ketersediaan dan keberlanjutan sumber daya energi.
3. Sistem Jaringan Telekomunikasi merujuk pada struktur yang terdiri dari berbagai komponen teknologi dan infrastruktur yang dirancang untuk mentransfer informasi dan komunikasi antara berbagai lokasi. Ini mencakup jaringan kabel, peralatan nirkabel, stasiun pemancar, dan perangkat keras serta perangkat lunak lainnya yang mendukung transmisi suara, data, dan multimedia. Tujuan utamanya adalah memfasilitasi komunikasi efektif dan efisien antara individu atau entitas di berbagai lokasi geografis.
4. Sistem Jaringan Sumber Daya Air adalah struktur yang mencakup distribusi, manajemen, dan pengelolaan sumber daya air di suatu wilayah atau lokasi tertentu. Ini melibatkan jaringan sungai, danau, reservoir, saluran irigasi, serta infrastruktur terkait lainnya yang digunakan untuk mengelola air secara berkelanjutan. Sistem ini bertujuan



untuk memastikan ketersediaan air yang memadai untuk berbagai keperluan seperti konsumsi manusia, pertanian, industri, dan lingkungan, serta menjaga keseimbangan ekosistem air.

5. Sistem jaringan prasarana lainnya dapat merujuk pada rangkaian elemen dan fasilitas yang mendukung keberlangsungan dan keberfungsian suatu wilayah atau lokasi. Ini bisa mencakup berbagai aspek seperti jaringan listrik, jaringan gas, sistem sanitasi, sistem limbah, dan infrastruktur lain yang memainkan peran penting dalam penyediaan layanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat serta pengembangan wilayah secara keseluruhan.

2.7.2 Rencana Pola Ruang Wilayah

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mamuju periode 2019-2039, terdapat dua meliputi rencana kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Penyajian rencana ini dijelaskan secara detail pada peta dengan tingkat akurasi 1:50.000, sebagaimana tertera dalam Lampiran I.4 dokumen RTRW Kabupaten Mamuju.

- A. Kawasan peruntukan lindung adalah wilayah tertentu yang ditetapkan untuk tujuan pelestarian alam, konservasi, atau perlindungan lingkungan dengan batasan-batasan tertentu guna memastikan keberlanjutan ekosistem dan menjaga keberagaman hayati.
 1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas:
 - a. Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud terdapat di Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalukku,



Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Papalang, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Simboro, Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tapalang Barat dan Kecamatan Tommo.

- b. Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud terdapat di seluruh bagian hulu DAS yang ada di Kabupaten Mamuju.
2. Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:
 - a. Sempadan pantai sebagaimana dimaksud terdapat di:
 - 1) daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat, terdapat di Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tapalang Barat, Kecamatan Simboro, Kecamatan Kepulauan Balabalakang, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Papalang, Kecamatan Sampaga dan Kecamatan Mamuju;
 - 2) daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai; dan
 - 3) sempadan Pantai dengan jarak 100 meter dari pasang tertinggi di luar permukiman dan pulau – pulau kecil akan di atur lebih lanjut dalam RDTR.
 - b. Sempadan sungai sebagaimana dimaksud terdapat di:
 - 1) daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar 100 (seratus) meter dari tepi sungai, sempadan ini meliputi sempadan sungai di Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tapalang Barat, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Simboro, Kecamatan



- Kepulauan Balabalakang, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Papalang, Kecamatan Tommo, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Bonehau, dan Kecamatan Sampaga;
- 2) daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai; dan/atau
 - 3) untuk sungai dikawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 meter.
- c. kawasan sempadan danau atau waduk, sebagaimana terdapat di Kecamatan Tommo.
3. Kawasan konservasi terdiri atas:
- a. Kawasan pelestarian alam (KPA), sebagaimana dimaksud memiliki luas kurang lebih 72,965 (tujuh puluh dua ribu koma sembilan ratus enam puluh lima) hektar yaitu taman nasional Gandang Dewata, terdapat di Kecamatan Bonehau, Kecamatan Tommo dan Kecamatan Kalumpang.
 - b. Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil sebagaimana terdiri atas:
 - 1) suaka pulau kecil seluas kurang lebih 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) hektar, yang terdapat di pulau malamber kecamatan pulau Bala – balakang.
 - 2) taman pulau kecil seluas kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hektar, yang terdapat di pulau gusung durian, pulau kamarian kayyang, pulau samanga kayyang, pulau sumanga marinni, lamudaan marinni, lamudaan kayyang, malamber marinni,



pulau tappilagaan, pulau lumu – lumu kecamatan
pulau Bala – balakang.

4. Kawasan lindung geologi terdiri atas:
 - a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana yang di maksud yaitu sempadan mata air yang berupa kawasan sempadan mata air berjarak 200 m di sekitar mata air yang ada di wilayah kabupaten mamuju.
5. Kawasan rawan bencana alam yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi terdiri atas:
 - a. Kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi dan longsor, sebagaimana terdapat di Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Simboro Kecamatan Papalang, Kecamatan Tommo, Kecamatan Tapalang dan Tapalang Barat.
 - b. Kawasan rawan banjir sebagaimana terdapat di Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Papalang, Kecamatan Tapalang dan Kecamatan Mamuju.
 - c. Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana terdapat di Kecamatan Tapalang, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Simboro, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Papalang, Kecamatan Sampaga.
6. Kawasan ekosistem mangrove terdiri atas:
 - a. kawasan pantai berhutan mangrove di Kecamatan Tapalang Barat;
 - b. kawasan pantai berhutan mangrove di Kecamatan Mamuju;



- c. kawasan pantai berhutan mangrove di Kecamatan Kalukku;
- d. kawasan pantai berhutan mangrove di Kecamatan Simboro; dan
- e. kawasan pantai berhutan mangrove di Kecamatan Papalang.

B. Kawasan peruntukan budidaya adalah area yang secara khusus ditetapkan untuk kegiatan pertanian atau budidaya dengan tujuan memanfaatkan lahan tersebut untuk kegiatan pertanian, perkebunan, atau kegiatan budidaya lainnya. Kawasan ini dapat diidentifikasi berdasarkan rencana tata ruang dan peruntukan tertentu yang mendukung kegiatan agraris.

1. Kawasan hutan produksi terdiri atas:

- a. Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana terdapat di; Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalukku Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Papalang, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tommo.
- b. Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana terdapat di Kecamatan Bonehau, Kecamatan Papalang, dan Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Tommo, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Mamuju, dan Kecamatan Tapalang.
- c. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana terdapat di Kecamatan Kalukku, dan Kecamatan Mamuju.

2. Kawasan pertanian terdiri atas:

- a. Kawasan tanaman pangan sebagaimana terdiri atas:



- 1) kawasan Pertanian lahan basah tersebar di Kecamatan Bonehau, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tapalang Barat, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Papalang, Kecamatan Tommo, Kecamatan Kalumpang, dan Kecamatan Sampaga; dan
- 2) kawasan pertanian lahan kering tersebar di Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tapalang Barat, Kecamatan Simboro, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Papalang, Kecamatan Tommo, 43 Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Sampaga dan Kecamatan Mamuju.
- b. Kawasan perkebunan sebagaimana terdapat di Kecamatan Tapalang Barat, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Papalang, Kecamatan Simboro, Kecamatan Tommo, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Tapalang.
3. Kawasan perikanan terdiri atas:
 - a. Kawasan perikanan budidaya, sebagaimana terdiri atas:
 - 1) kawasan tambak udang dan bandeng terdapat di Kecamatan Kalukku, Kecamatan Papalang, dan Kecamatan Sampaga;
 - 2) kawasan budidaya air tawar terdapat di Kecamatan Tapalang, Kecamatan Kalumpang, 44 Kecamatan Bonehau, Kecamatan Tommo dan Kecamatan Sampaga;
 - 3) kawasan budidaya rumput laut terdapat di Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Kalukku; dan d. kawasan budidaya laut terdapat di Kecamatan



- Kepulauan Balabalakang, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Tapalang Barat dan Kecamatan Kalukku.
- b. Sarana penunjang perikanan, sebagaimana terdiri atas:
- 1) pelabuhan perikanan nusantara. Terdapat di Kecamatan Mamuju; dan
 - 2) pangkalan pendaratan ikan (PPI) Kasiwa terdapat di Kecamatan Mamuju, PPI Taan di Kecamatan Tapalang, dan PPI Simboro di Kecamatan Simboro.
4. Kawasan wilayah pertambangan dan energi terdiri atas:
- a. Wilayah Usaha pertambangan mineral, sebagaimana terdiri atas:
- 1) kawasan pertambangan mineral radioaktif, terdapat di Kecamatan Mamuju, Kecamatan Simboro, Kecamatan Tapalang dan Kecamatan Tapalang Barat, Kecamatan Kalukku;
 - 2) Kawasan pertambangan mineral logam terdapat di Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Tommo, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Papalang, dan Kecamatan Bonehau;
 - 3) Kawasan pertambangan mineral bukan logam terdapat di Kecamatan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Kalukku Kecamatan Tappalang dan Kecamatan Tapalang Barat; dan
 - 4) Kawasan pertambangan batuan terdapat di Kecamatan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Papalang, Kecamatan Tommo, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Tappalang, Kecamatan Tappalang Barat Kecamatan Sampaga.



- 5) Wilayah Usaha pertambangan batu bara, sebagaimana terdapat di Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Tappalang, Kecamatan Tommo dan Kecamatan Papalang.
- 6) Wilayah Usaha pertambangan minyak dan gas bumi, sebagaimana terdiri dari:
 - 1) blok Budong-budong sebahagian berada di Kecamatan Papalang, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Tommo dan wilayah pesisir pantai sebelah barat laut Kabupaten Mamuju;
 - 2) wilayah Kerja West Budong berada di sepanjang pesisir Pantai Barat (off shore) mamuju melalui pesisir Kecamatan Tommo, Kecamatan Sampaga dan Kecamatan Papalang; dan
 - 3) kawasan panas bumi, sebagaimana terdapat di Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Kalukku, dan Kecamatan Papalang dan Kecamatan Mamuju, Kecamatan Tapalang Barat.
 - 4) Wilayah usaha pertambangan rakyat, sebagaimana terdapat di Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Tappalang.
5. Kawasan peruntukan industri terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud yaitu berupa Kawasan Industri seluas kurang lebih 1,314 (seribu tiga ratus empat belas) hektar, yang terdapat di Kecamatan Belang-Belang terpadu dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Belang- Belang.
6. Kawasan pariwisata terdiri atas:



- a. Kawasan peruntukan wisata budaya sebagaimana terdiri atas:
 - 1) rumah Adat Raja Mamuju terletak di Kecamatan Mamuju;
 - 2) kuburan Makaramma Pata Mata terletak di Kecamatan Simboro;
 - 3) kuburan Tua Raja Dungkait terletak di Kecamatan Tapalang Barat;
 - 4) kuburan Tua Tosalama' terletak di Kecamatan Tapalang Barat;
 - 5) kuburan Tua Lasalaga (loda batu) terletak di Timbu Kecamatan Mamuju;
 - 6) kuburan maradika Lambagu di Kecamatan Simboro; dan
 - 7) masossor manurung terletak di kecamatan mamuju.
- b. Kawasan peruntukan wisata alam sebagaimana terdiri atas:
 - 1) permandian So'do terletak di Kecamatan Mamuju;
 - 2) air Terjun Tamasapi terletak di Kecamatan Mamuju;
 - 3) air terjun Desa Sondoang Kecamatan Kalukku;
 - 4) air terjun buttuada terletak di Kecamatan Bonehau;
 - 5) air terjun rantepitu terletak di kecamatan Tapalang;
 - 6) air terjun Kalumpang terletak di Kecamatan Kalumpang;
 - 7) kawasan wisata pantai Lombang-Lombang, Salupompong, dan Belang-Belang di Kecamatan Kalukku, Desa Sumare dan Rangas Kecamatan Simboro;
 - 8) kawasan Pasir Putih Bonetangnga dan Pulau Karampuang terletak di Kecamatan Mamuju;



- 9) pantai Kasambang terletak di Kecamatan Tapalang;
 - 10) pasir Putih Tanjung Ngalo terletak di Kecamatan Tapalang Barat;
 - 11) pantai Lombang-Lombang terletak di Kecamatan Kalukku;
 - 12) pantai Rangas dan Sumare terletak di Kecamatan Simboro;
 - 13) pulau Karampuang terletak di Kecamatan Mamuju;
 - 14) pulau Bakengkeng terletak di Kecamatan Kalukku;
dan
 - 15) wisata Kepulauan di Kecamatan Bala-Balakkang.
- c. Kawasan peruntukan wisata buatan sebagaimana terdiri atas:
- 1) anjungan Pantai Manakarra terletak di Kecamatan Mamuju;
 - 2) sumur jodoh di pulau karampuang terletak di Kecamatan Mamuju;
 - 3) eco wisata berkah terletak di Kecamatan Simboro;
 - 4) pantai Graha Nusa terletak di Kecamatan Simboro;
dan
 - 5) landscape Mamuju terletak di Kecamatan Mamuju.
7. Kawasan permukiman terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Mamuju, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Simboro, Kecamatan Papalang.
 - b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Tapalang Barat, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalumpang,



Kecamatan Kalukku, Kecamatan Tapalang, Kecamatan Papalang, Kecamatan Simboro, Kecamatan Tommo, Kecamatan Sampaga, Kecamatan yang terbagi atas:

- 1) kawasan pengembangan Permukiman Transmigrasi terdapat di Kecamatan Simboro, Kecamatan Tommo, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalumpang, dan Kecamatan Tapalang; dan
- 2) permukiman perdesaan yang tersebar di PPL dan desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Mamuju.

8. Kawasan pertahanan dan keamanan terdiri atas:

- a. Kawasan Perkantoran Komando Resort Militer (KOREM) di Kecamatan Simboro;
- b. Kawasan Perkantoran Komando Distrik Militer (KODIM) 1418 di Kecamatan Mamuju;
- c. Kawasan Perkantoran Komando Rayon Militer (KORAMIL) pengembangannya di seluruh kecamatan mamuju;
- d. Kawasan Perkantoran Patroli Pos Pengamat TNI Angkatan Laut (Posal); di Kecamatan Simboro;
- e. Kawasan Perkantoran Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA); di kecamatan Mamuju dan Simboro;
- f. Kawasan Perkantoran Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (POLRES) dikembangkan di seluruh kecamatan di kabupaten Mamuju; dan
- g. Kawasan Brimob Polda Sulbar di Kecamatan Simboro.

2.7.3 Penetapan Kawasan Strategis

Dalam RTRW Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2039, terdapat dua kawasan strategis yaitu Kawasan Strategis Provinsi



dan Kawasan Strategis Kabupaten. Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.4 dokumen RTRW Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2039.

A. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan di Kabupaten Mamuju. Lokasi kawasan strategis ini berada di tiga Kawasan yang memiliki nilai strategis, yaitu:

1. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri dari:
 - a. DI tommo, DI Papalang, DI Sampaga;
 - b. kawasan perkebunan kelapa sawit;
 - c. kawasan terpadu pelabuhan, industri, pergudangan Belang – belang;
 - d. kawasan Mamuju – Tampa Padang – Belang – belang (MATABE); dan
 - e. kawasan pengembangan kawasan pesisir dan pulau pulau kecil di Pulau Karampuang dan Pulau Bala-balakang.
2. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terdiri dari:
 - a. blok minyak karama dan budong – budong;
 - b. PLTU Mamuju, PLTA Karama, dan PLT Hydrogen; dan
 - c. bendungan Tommo.
3. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri dari:



- a. suaka marga satwa kalumpang;
 - b. taman nasional Ganda Dewata; dan
 - c. hutan lindung.
- B. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan di Kabupaten Mamuju. Lokasi kawasan strategis ini berada di dua Kawasan yang memiliki nilai strategis, yaitu:
1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas:
 - a. kawasan Perkotaan di Kecamatan Papalang;
 - b. kawasan Agropolitan di Kecamatan Kalukku;
 - c. kawasan Minapolitan di Kecamatan Mamuju, bonda dan mala'bi; dan
 - d. kawasan Wisata Pulau Karampuang.
 2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan Fungsi dan Daya dukung lingkungan hidup terdiri atas:
 - a. kawasan Taman Nasional Gandang Dewata dan sekitarnya di Kecamatan kalumpang; dan
 - b. kawasan Pesisir dan Pulau – pulau kecil Di Kecamatan Kepulauan Bala-balakang.



Tabel 2.76 Program Utama Lima Tahunan RTRW Kabupaten Mamuju, Tahun 2019-2039

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039
6.1	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG									
A.1	PERWUJUDAN PUSAT-PUSAT PELAYANAN KOTA									
	Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Pengembangan dan Peningkatan 1 Fungsi Kota sebagai :									
	1 Pusat Pemerintahan Kab Mamuju, melalui:									
	· Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi	- Kec. Mamuju - Kec. Simboro - Kec. Papalang	5 Dokumen/Regulasi	APBN/ APBD Kota	- Kementrian ATR/BPN - Dinas PUPR					



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039
	· Penyediaan infrastruktur yang memadai	- Kec. Mamuju - Kec. Simboro	2 kawasan	- APBN - APBD Prov - APBD Kota	- Kementerian PU-PR - Dinas PU-PR Provinsi - Dinas PU-PR Kab					
	1 Sub Pusat Pelayanan Kawasan Pengembangan dan peningkatan fungsi kota sebagai sub pusat pelayanan:									



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039
	1 Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana di pusat kecamatan	- Kecamatan Tapalang - Kecamatan Tapalang Barat - Kecamatan Balabalakang - Kecamatan Papalang - Kecamatan Tommo - Kecamatan Kalumpang - Kecamatan Bonehau - Kecamatan Sampaga	Sarana prasana dasar di 8 Kecamatan	APBD Kota	- Dinas PUPR Kab					
	1 Pusat Pelayanan Lingkungan Peningkatan sebaran infrastruktur dasar di pusat-pusat layanan skala lingkungan	- Seluruh Kelurahan di Wilayah kab mamuju	13 Kelurahan	APBD Kota	- Dinas PUPR Kab					



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039
	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA UTAMA									
	I Perwujudan sistem jaringan transportasi di wilayah kota									
	1.1. Perwujudan Sistem Transportasi Darat									
	1.1.1 Program Penyelenggaraan Jalan									
	A. Sistem Jaringan Jalan Nasional dalam wilayah kota									



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039
	1 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Primer	- Jalan arteri ruas tapalang barat – sumare – rangas – mamuju – tanpa padang – belang belang.	34 Km	APBN	- Kementrian PU-PR					
	2 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer 1	- Jalan topoyo - tarailu - Jalan tarailu - kalukku - Jalan kalukku – bts kota - Jalan poros kalukku - Jalan sultan hasanuddin - Jalan kalukku – salubatu	1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas	- APBN - APBD Prov - APBD kab	- Kementrian PU-PR - Dinas PU-PR Prov - Dinas PU-PR Kab					
	B. Sistem Jaringan Jalan Provinsi dalam wilayah kota									



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039
	1 Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan Kolektor Primer 2	a. Jaringan jalan kolektor primer K-2, terdiri atas : - Jalan kalukku – bonehau – kalumpang – batuisi – batas luwu utara. - Jalan batuisi – batas toraja utara - Jalan kalukku – bonehau – mambi	1 ruas 1 ruas 1 ruas	- APBN - APBD Prov	- Kementrian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas PUPR Provinsi					
	C. Sistem Jaringan Jalan kewenangan kabupaten									



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039
	1 Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan Kolektor Sekunder	- Jalan Nuri - Jalan Diponegoro - Jalan bau massepe - Jalan pongтику - Jalan baharuddin lopa - Jalan kelapa - Jalan emmy saelan - Jalan kali mamuju	1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas	APBD Kab	Dinas PUPR Kab					



	2 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Jalan Lokal sekunder	- Jln nelayan - Jln nelayan II - Jln BTN Graha Nusa - Jln KPU - Jln H. Basir - Jln BTN Tegar 77 - Jln kampong baru - Jln tanete pao – pasa'bu - Jln atiek sutedja - Jln tengku umar - Jln ambo tjaja - Jln batu ampa - Jln toabo – bunde	1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas	APBD Kab	Dinas PUPR Kab					
	3 Permbangunan									



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039
	Jaringan Jalan Lokal Sekunder									
	a. Pembangunan Jalan-jalan baru di lingkungan permukiman	- Kecamatan Simboro - Kecamatan mamuju - Kecamatan kalukku	8 Km	- APBD Kab - Swasta	- Developer - Dinas PUPR Kab					
	1.1.2. Sistem Jaringan Kereta Api									
	1 Rencana Pembangunan jalur Kereta Api	Kabupaten Mamuju	-	- APBN - BUMN	- Kemenhub - PT. Kereta Api Indonesia					
	2 Rencana Pembangunan Stasiun Kereta Api berupa stasiun penumpang di Kab Mamuju	Kabupaten Mamuju	1 Kawasan	- APBN - BUMN	- Kemenhub - PT. Kereta Api Indonesia					
	1.1.3. Sistem Jaringan Angkutan Sungai, danau, dan									



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039
	Penyeberangan									
	1 Rencana pengembangan pelabuhan belang-belang	Kecamatan Kalukku	1 Kawasan	- APBN	- Kemenhub					
	1.2. Sistem Jaringan Transportasi Laut									
	- Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana pendukung Pelabuhan Belang – belang dan Rencana Pengembangan fasilitas pendukung di Pelabuhan Belang – belang berupa Terminal Kontainer. - Pengembangan Kapasitas sarana dan prasarana	- Kecamatan Kalukku - Kecamatan Simboro	2 Kawasan	- APBN	- Kemenhub - Pertamina Persero - PT.PELINDO					



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039
	pelabuhan penyeberangan fery									
	II Sistem Jaringan Energi									
	Rencana pengembangan sistem jaringan kelistrikan, meliputi :									
	- Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, meliputi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan	Kab Mamuju		- APBN - BUMN	- PLN					



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039
	Menengah (SUTM)									
	- Pembuatan dan Pengembangan Sistem Jaringan Listrik bawah tanah yang ada di jalan-jalan arteri dan kolektor	Kab Mamuju		- APBN - BUMN	- PLN					
	III Sistem Jaringan Telekomunikasi									
	1 Rencana pengembangan sistem jaringan bergerak									
	a. Pengembangan kapasitas infrastruktur telepon nirkabel melalui penataan lokasi menara telekomunikasi	Kab Mamuju	Maksimal 10 Titik Lokasi	- Swasta - APBD	- telkom					



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039
	bersama									
	IV. Sistem Jaringan Sumber Daya Air									
	1 Penataan dan Normalisasi Wilayah Sungai (WS) Mamuju, (WS) Karema dan (WS) Kalukku	Kab Mamuju	15 KM	APBN	- Kementerian PUPR - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov					
	2 Pengelolaan Sumber Daya Air, meliputi:									
	a. Perlindungan dan pengendalian terhadap sumber Mata air di semua kecamatan	Semua Kecamatan	8 Lokasi	APBD Kota	- Dinas PU-PR Kab - Dinas Lingkungan Hidup Kab					
	b. Pemeliharaan Sistem jaringan irigasi di semua	Kab Mamuju	50 KM	APBN	Kementerian PU-PR					



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039
	daerah irigasi									
	V. Infrastruktur Perkotaan									
	1 Sistem Penyediaan Air Minum, Meliputi									
	a. Pemeliharaan dan Pengembangan Kapasitas Instalasi Pengelolaan Air (IPA)	Kab Mamuju	7 Unit IPA	- APBN - APBD Kota	- PDAM - Dinas PU-PR Kab - Dinas PU-PR Prov					
	b. Pembangunan jaringan pipa pada kawasan pesisir untuk mengurangi krisis air bersih.	Kecamatan Tapalang Barat dan Kecamatan Mamuju, Kecamatan Simboro	10 KM	- APBN - APBD Kota	- PDAM - Dinas PU-PR Kab - Dinas PU-PR Prov					
	2 Program Pengelolaan Limbah Padat dan Limbah Cair :									



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039
	a Pengembangan Sistem pembuangan air limbah (sewage) Terpusat	Kecamatan Mamuju	I Unit IPAL	- APBN - APBD Kota	- Kementerian PU-PR - Dinas PU-PR Kab - DLHK Kab					
	b Pemeliharaan Sistem IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja)	Kecamatan Simboro	I Unit IPLT	- APBN - APBD Kota	- Kementerian PU-PR - Dinas PU-PR Kab - DLHK Kab					
	C. Penataan Sistem Pengelolaan Limbah Rumah Tangga	- Kecamatan Mamuju - Kecamatan Simboro - Kecamatan Kalukku	2500 Rumah Tangga	- APBN - APBD Kota	- Kementerian PU-PR - Dinas PU-PR Kab - DLHK Kab					
	3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, meliputi Pembangunan TPS 3R (Tempat Penampungan Sampah dengan	8 Kecamatan	10 Unit Sarana TPS3R	- APBN - APBD Kota	- Kementerian PU-PR - DLHK Kab					



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039
	sistem Reduce, Reuse, Recycle) di seluruh kecamatan									
	4 Pengembangan jalur khusus jalur evakuasi meliputi pemasangan atribut jalur menuju lokasi akhir tempat evakuasi bencana	Kabupaten Mamuju	35 Km	- APBD Propinsi - APBD Kab	- BPBD Propinsi - BPBD Kab Mamuju					
	5 Rencana sistem drainase meliputi :									
	a Pemeliharaan saluran saluran pada ruas – ruas blok drainase, terdiri dari :	Kab Mamuju	10 Ruas Drainase	- APBN - APBD Propinsi - APBD Kab	- Kementerian PUPR - Dinas PU-PR Prov - Dinas PU-PR Kab					



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039
	b Pengembangan Sistem Polder melalui pembangunan kolam retensi	Kecamatan Mamuju Kecamatan Simboro	2 Lokasi Kolam Retensi	- APBN - APBD Propinsi - APBD Kab	- Kementerian PUPR - Dinas PU-PR Prov - Dinas PU-PR Kab					
	6 Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki,	Kab Mamuju	15 Km	- APBN - APBD Propinsi - APBD Kab	- Kementerian PUPR - Dinas PU-PR Prov - Dinas PU-PR Kab					
	7 Penyediaan dan Pemanfaatan prasarana dan sarana perkotaan lainnya Melalui :									
	a. Penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran	Kab Mamuju	10 Titik Hidrant Kebakaran	- APBD Kab	- BPBD Kab					



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039
	b. Pengembangan Jalur dan koridor pelayanan Bus Rapid Transit (BRT)	Kab Mamuju	9 Koridor	- APBD Kab	- Dinas Perhubungan Kab Mamuju - Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Barat					
6,2	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG									
B.1	Perwujudan Kawasan Lindung									
	A. Kawasan yang memberikan perlindungan di bawahannya									
	1 Hutan Lindung									
	Reboisasi dan Penghijauan dan Peremajaan Hutan Lindung -	Kecamatan Kalumpang	153 Ha	APBN	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Dinas Kehutanan Prov Sulbar					



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039
	2 Kawasan Resapan Air									
	- Pengendalian dan Pengawasan terhadap daerah sekitar kawasan resapan air	Kecamatan Mamuju Kecamatan Kalukku Kecamatan Kalumpang Kecamatan Bonehau Kecamatan Sampaga	1000 Ha	APBD Kab	- DLHK Kab					
	B. Kawasan Lindung Geologi									
	1 Konservasi terhadap kawasan sumber mata air tanah	Semua Kecamatan	20 Ha	APBD Kab	- DLHK Kab					
	C. Kawasan Rawan Bencana :									
	1 Pengembangan system peringatan dini jarak jauh pada kawasan	Kabupaten mamuju	8 Lokasi	- APBN - APBD Prov - APBD	- BNPB - BPBD Propinsi Sulbar					



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039
	rawan bencana			Kab	- BPBD Kab					
	D. Kawasan Ruang Terbuka Hijau									
	1 Pelestarian dan pengembangan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota	- Kecamatan Mamuju - Kecamatan Simboro	500 Ha	APBD Kab	- PU-PR Kab - DLHK Kab					
B.2	Perwujudan Kawasan Budidaya									
	A. Kawasan Pertanian									
	1 Pengendalian, Pengawasan dan Pelestarian kawasan pertanian tanaman pangan	Semua Kecamatan	59,51 Ha	APBD Kab	- Dinas PU-PR Kab - Dinas Pertanian dan peternakan Kab					
	B. Kawasan Pertambangan									



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039
	1 Pengelolaan dan pengendalian aktifitas kawasan pertambangan Galian C	- Kecamatan Kalumpang - Kecamatan Bonehau - Kecamatan Kalukku	3 Lokasi	APBD Kota	- Dinas Pertambangan dan ESDM Provinsi					
	C. Kawasan Perikanan									
	1 Peningkatan dan Pengembangan prasarana untuk pelabuhan khusus dan tempat pelelangan ikan	Kecamatan Mamuju	1 Kawasan	APBD Propinsi	- Dinas Kelautan Perikanan dan Kelautan Propinsi					
	D. Kawasan Pariwisata									



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039
	1 Peningkatan sarana dan fasilitas pendukung terhadap kawasan pariwisata di kab Mamuju	Kabupaten Mamuju	11 Objek Wisata	- APBN - APBD Propinsi - APBD Kab	- Kementerian PU-PR - Kementerian Pariwisata - Dinas Pariwisata Propinsi - Dinas Pariwisata Kab - Dinas PU-PR Propinsi - Dinas PU-PR Kab					
	E. Kawasan Permukiman									
	1 Kawasan Perumahan									
	- Peningkatan aksesibilitas jalan kawasan perumahan dan permukiman	Kabupaten Mamuju	5 Akses baru ke kawasan perumahan	- APBN - APBD Propinsi - APBD Kab	- Dinas Perkim Provinsi - Dinas Perkimta Kab - Dinas PU-PR Propinsi - Dinas PU-PR Kab					



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039
	- Program Pengembangan Perumahan	Kab Mamuju	8 Kawasan Perumahan yang telah diserahkan	- APBN - APBD Propinsi - APBD Kab	- Dinas Perkim Provinsi - Dinas Perkimta Kab - Dinas PU-PR Propinsi - Dinas PU-PR Kab					
	- Program Pencegahan, Penataan dan Peningkatan Kualitas Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Kawasan Kumuh dan RTLH sesuai SK	1000 Unit	-APBN - APBD Propinsi - APBD Kab	- Kementerian PU-PR - Dinas Perkim Propinsi - Dinas Pekimta Kab - Dinas PU-PR Kab					
	F Kawasan Perdagangan Dan Jasa									



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039
	1 Revitalisasi pasar Sentral dan pasar-pasar tradisional	Kab Mamuju	10 Pasar	- APBN - APBD Kab	- Dinas Perdagangan kab - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab					
	2 Pengendalian dan penataan Pusat perbelanjaan dan toko modern	Kab Mamuju	1 Kawasan	- APBD Propinsi - APBD Kab	- Dinas Perhubungan Propinsi - Dinas Perhubungan Kab					
	3 Peningkatan kualitas dan kapasitas akses kawasan pergudangan	Kab Mamuju	1 Kawasan	- APBD Propinsi - APBD Kab	- Dinas PU-PR Propinsi - Dinas PU-PR Kab					
	G Kawasan Perkantoran									



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039
	1 Peningkatan sarana prasarana perkantoran pemerintah	- Kecamatan Mamuju - Kecamatan Simboro	5 Kawasan Perkantoran	- APBN - APBD Propinsi - APBD Kota	- Kemendagri - Dinas PU-PR Propinsi - Dinas PU-PR Kab					
	H Kawasan Peribadatan									
	1 Rencana Pembangunan Islamic Center Kab Mamuju	Kab Mamuju	13 Ha	APBD Kabupaten	Dinas PU-PR Kab					
	I Kawasan Pendidikan									
	1 Peningkatan prasarana dan sarana kawasan pendidikan	Kab Mamuju	Tersebar di 11 Kecamatan	- APBD Propinsi - APBD Kab	- Dinas PU-PR Provinsi - Dinas PU-PR Kab - Dikpora Propinsi - Dikpora Kab					
	J Kawasan Kesehatan									



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039
	1 Peningkatan dan Pembangunan sarana dan Prasarana kesehatan	Kab Mamuju	Tersebar di 11 Kecamatan	- APBD Propinsi - APBD Kab	- Dinas PU-PR Provinsi - Dinas PU-PR Kab - Dinas Kesehatan Propinsi - Dinas Kesehatan Kab					
	K Kawasan Olahraga									
	1 Peningkatan fasilitas pendukung untuk kegiatan olahraga	Kab Mamuju	GOR	APBN	- Kemendikbud - Dinas PU-PR Kab					
	L Kawasan Transportasi									
	1 Peningkatan dan Pemeliharaan fasilitas penunjang terminal penumpang Type A	Kecamatan Simboro	Luas 5 Ha	APBN	Kementrian Perhubungan					



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039
	2 Peningkatan dan Pemeliharaan fasilitas penunjang terminal penumpang Type B	- Kecamatan Kalukku - Kecamatan Papalang	2 Kecamatan	APBD Kab	- Dinas Perhubungan - Dinas PU-PR Kab					
	M Kawasan Ruang Evakuasi Bencana									
	1 Pengembangan dan penyediaan sarana prasarana ruang evakuasi bencana	Kab Mamuju	15 Titik	APBD Kab	- Dinas PU-PR Kab - BPBD Kab					
	N Kawasan Peruntukan Ruang bagi kegiatan sektor Informal									
	Penataan dan Pengendalian pemanfaatan ruang kegiatan sektor informal /Kuliner	Kab Mamuju	2 Kawasan	APBD Kab	- Dinas PU-PR Kab - Dinas Perdagangan Kab					



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039
	O Kawasan Fasum Fasos	- Kec. Mamuju - Kec. Simboro	2 Kecamatan	APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
	P Kawasan Pertahanan dan Keamanan Pembangunan fasilitas militer dalam rangka peningkatan sistem pertahanan dan keamanan di tingkat Kecamatan (Koramil)	Kab Mamuju	5 Koramil	APBN	Kementerian Pertahanan					
	Q Kawasan Pertahanan dan Keamanan Pembangunan fasilitas POLAIRUD	Kab Mamuju	1 Polairud	APBN	POLRI					
6,3	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS									



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039
	A. Rencana Kawasan Strategis Ekonomi									
	1 Peningkatan dan Pembangunan jaringan sarana prasarana dan utilitas pada kawasan strategis pertumbuhan ekonomi	Kab Mamuju	1 Kawasan Mat	- APBN - APBD Prov - APBD Kab	- Kementerian PU-PR - Dinas PU-PR Propinsi - Dinas PU-PR Kab					
	B. Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi	- Kecamatan Papalang - Kecamatan Kalukku - Kecamatan Mamuju	4 Kawasan	- APBN - APBD Kab	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Bappepan					
	C. Kawasan Strategis Lingkungan Hidup									
	- Perlindungan dan peremajaan terhadap kawasan lindung dan hutan lindung.	- Kecamatan Kalumpang - Kecamatan Bonehau	72,965 Ha	- APBN - APBD Prov - APBD Kab	- Kementerian LH - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi					



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039
	‘- Taman Nasional Gandang Dewata									

Sumber : RTRW Kabupaten Mamuju 2019-2039



Pemerintah
Kabupaten Mamuju

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Selain itu, permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Mamuju dapat diidentifikasi berdasarkan urusan pemerintah daerah. Urusan pemerintah daerah terdiri dari dua jenis, yaitu urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan pemerintahan umum terdiri dari urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti perdagangan, perindustrian, pertanian, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, maupun penanaman modal.



Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah adalah suatu permasalahan daerah yang dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJPD di tahun rencana permasalahan prioritas dari rencana pembangunan nasional. Adapun Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah adalah sebagai berikut:



Tabel 3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju

Indikator dan Capaian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Identifikasi Masalah
PDRB per kapita (Rp 44,1 juta)		1. wabah covid-19 dan terjadinya peristiwa bencana alam gempa bumi 2. Kurang maksimalnya pendapatan daerah utamanya dari sumbangsih pendapatan asli daerah	Rendahnya pendapatan per kapita
IPM (68,32 poin)	1. Banyak penduduk yang dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi 2. Terbentuknya beberapa perguruan tinggi swasta di Kab. Mamuju	1. masih kurangnya cakupan kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS) agar dapat memberikan kesempatan sekolah-sekolah untuk membebaskan biaya pendidikan. 2. Peningkatan kualitas data Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), serta menggalakkan program beasiswa tidak mampu memberikan bantuan biaya untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia dari keluarga prasejahtera dapat menikmati pendidikan. 3. Tenaga kerja yang tersedia saat ini hanya cukup untuk mendukung sektor pertanian dan industri kecil.	Rendahnya tingkat pembangunan manusia



Indikator dan Capaian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Identifikasi Masalah
Angka kemiskinan (7,46%)	1. Meningkatnya kapasitas dan keterampilan masyarakat untuk diserap dalam lapangan kerja	1. jumlah penduduk yang besar, namun tidak diimbangi dengan pemerataan penduduk dan peningkatan kesempatan kerja. 2. Terus meningkatnya garis kemiskinan yang ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) juga menjadi perangkap bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk turun ke bawah garis kemiskinan. 3. Pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang tidak merata 4. Kesempatan kerja yang terbatas dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan pandemic Covid-19 5. Angkatan kerja yang belum memiliki kualifikasi mumpuni 6. Kesenjangan pasokan tenaga kerja dengan kebutuhan tenaga kerja yang tidak memadai 7. Motivasi kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah	Tingginya angka kemiskinan
Rata-rata lama sekolah (7,96 tahun)	1. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup 2. Adanya pendidikan kesetaraan 3. Peningkatan akses sarana dan prasarana pendidikan	1. kekurangan kebutuhan pokok, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. 2. Adanya pengasingan sosial, ketergantungan, dan	Rendahnya tingkat pendidikan formal penduduk Kab. Mamuju



Indikator dan Capaian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Identifikasi Masalah
		ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat 3. Kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai	
Angka Melek Huruf (99,79%)	Banyaknya generasi muda yang bisa mengakses pendidikan dibanding generasi yang lebih tua	1. rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya baca tulis terutama di wilayah pedesaan 2. Minimnya data mikro by name by address	Belum tercapainya Kab. Mamuju dari bebas buta huruf
Angka Partisipasi Sekolah 7-12 tahun (97,87%)	1. Ketersediaan daya tampung (ruang kelas dan guru berkualifikasi) 2. Pendidikan orang tua 3. Beasiswa dari pemerintah maupun swasta	1. tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya 2. Kecenderungan orang tua dengan pendapatan dan Pendidikan rendah tidak memiliki proyeksi untuk menyekolahkan anaknya di atas Pendidikan menengah 3. Sulitnya akses fisik kepada Lembaga Pendidikan disebabkan oleh kondisi geografis 4. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap program dari pemerintah pusat provinsi, yang mana terbatasnya APBD dapat mengurangi kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan APS ke tingkat yang lebih tinggi.	Rendahnya tingkat pendidikan formal penduduk Kab. Mamuju di atas tingkat SD



Indikator dan Capaian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Identifikasi Masalah
Angka Partisipasi Sekolah 13-15 tahun (86,5%)	Beasiswa dan perlengkapan sekolah gratis	1. tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya 2. Kecenderungan orang tua dengan pendapatan dan Pendidikan rendah tidak memiliki proyeksi untuk menyekolahkan anaknya di atas Pendidikan menengah 3. Sulitnya akses fisik kepada Lembaga Pendidikan disebabkan oleh kondisi geografis 4. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap program dari pemerintah pusat provinsi, yang mana terbatasnya APBD dapat mengurangi kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan APS ke tingkat yang lebih tinggi.	Rendahnya tingkat pendidikan formal penduduk Kab. Mamuju di atas tingkat SMP
Angka Harapan Lama Sekolah (13,26 tahun; BPS 2024)	1. Meningkatnya kemudahan akses pendidikan 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk bersekolah ke jenjang lebih tinggi	1. Masih terdapat anak putus sekolah karena faktor ekonomi dan kondisi geografis jarak antara rumah dan sekolah yang jauh 2. Masih terdapat masyarakat dengan pemahaman yang kurang mendukung partisipasi dalam pendidikan	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi



Indikator dan Capaian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Identifikasi Masalah
Angka Harapan Hidup (67,77 tahun)	Ketersediaan tenaga kesehatan, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan	1. rendahnya wawasan masyarakat tentang PHBS 2. Sulitnya pemenuhan asupan gizi karena faktor ekonomi dan sosial 3. Belum meratanya kemudahan akses pada fasilitas kesehatan karena faktor lokasi dan geografis	Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat
Angka Kematian Ibu (145:100.000)	1. Penguatan pelayanan dasar kesehatan dasar dan rujukan 2. Penguatan sistem informasi manajemen kesehatan 3. Penyediaan, persebaran, dan kualitas SDM kesehatan	1. Pengetahuan masyarakat tentang kehamilan beresiko masih kurang. 2. Sarana dan prasarana di Tingkat Pustu/ Poskesdes belum sesuai standar 3. Distribusi Tenaga Kesehatan khususnya Bidan tidak merata dan terpusat di daerah perkotaan 4. TIM PONED sudah tidak lengkap sehingga pelayanan poned tidak maksimal	Belum tercapainya penurunan jumlah ibu yang meninggal setelah persalinan
Angka Kematian Bayi (7,9:1.000)	1. Penguatan pelayanan dasar kesehatan dasar dan rujukan 2. Penguatan sistem informasi manajemen kesehatan 3. Penyediaan, persebaran, dan kualitas SDM kesehatan	1. Pengetahuan masyarakat tentang kehamilan beresiko masih kurang. 2. Sarana dan prasarana di Tingkat Pustu/ Poskesdes belum sesuai standar 3. Distribusi Tenaga Kesehatan khususnya Bidan tidak merata dan terpusat di daerah perkotaan 4. TIM PONED sudah tidak lengkap sehingga pelayanan poned tidak maksimal 5. Belum optimalnya KN lengkap sesuai standar	Belum tercapainya penurunan tingkat kematian bayi



Indikator dan Capaian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Identifikasi Masalah
		6. Peran lintas sektor belum optimal 7. Distribusi Tenaga Kesehatan khususnya bidan tidak merata dan terpusat di daerah perkotaan	
Balita Gizi Buruk (46 kasus)	1. SOP penatalaksanaan Gizi Buruk 2. Penguatan penanganan dan Rujukan Balita Bermasalah Gizi 3. Penyediaan Fasilitas dan SDM yang terstandar 4. Dukungan Lintas Sektor dan Lintas Program, termasuk Pemerintah Desa dalam pendampingan dan pelacakan Gizi buruk	1. penanggulangan kasus gizi buruk masih sektoral (kesehatan) padahal permasalahannya multifaktor bukan hanya dari aspek kesehatan/Gizi tapi juga dari aspek Kemiskinan, Lingkungan, Air bersih dan lainnya (Intervensi Sensitif dan Spesifik) 2. Belum semua PKM memiliki Tim Tatalaksana Gizi Buruk 3. Tidak semua keluarga bersedia dirujuk Anak gizi buruknya 4. Tidak semua tenaga pelaksana Gizinya adalah ASN, dan belum semua sudah terlatih 5. Pendampingan terhadap keluarga balita bermasalah Gizi belum maksimal.	Tingginya jumlah balita gizi buruk



Indikator dan Capaian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Identifikasi Masalah
Indeks Keluarga Sehat (N/A)	1. Meningkatnya persalinan ibu di FPK 2. Meningkatnya jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap dan ASI eksklusif 3. Meningkatnya pemantauan pertumbuhan balita 4. Meningkatnya jumlah penderita hipertensi yang teratur berobat 5. Meningkatnya jumlah keluarga yang menjadi anggota JKN 6. Meningkatnya jumlah keluarga dengan akses air bersih dan jamban keluarga	1. Menurunnya persentase penderita TB paru yang berobat sesuai standar 2. Masih terdapat anggota keluarga yang merokok 3. Masih terdapat keluarga yang belum mengikuti program KB	1. Belum optimalnya pengobatan TB sesuai standar 2. Belum optimalnya pencegahan terhadap kegiatan merokok 3. Belum maksimalnya penerapan KB
Prevalensi Stunting (30,3%, SSGI 2021)	Kinerja instansi pemerintah lintas sektor, seperti Tim Percepatan Penurunan Stunting, program penyiapan asupan pangan bergizi bagi anak-anak, dan pola bapak asuh oleh TNI	Kurangnya kunjungan masyarakat yang membawa balita ke posyandu	Perlunya penanganan stunting di tingkat pemerintah daerah selaku pihak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat



Indikator dan Capaian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Identifikasi Masalah
Pertumbuhan ekonomi (2,4%)	1. peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam 2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia 3. Pembangunan infrastruktur dasar yang dapat mendorong peningkatan akses menuju kantong-kantong produksi maupun meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa 4. Penanaman modal untuk penciptaan lapangan kerja	1. akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang belum memadai. 2. Masih kurangnya ketersediaan dan kondisi infrastruktur untuk menghubungkan simpul-simpul ekonomi dalam rangka meningkatkan produksi dan distribusi barang dan jasa 3. Kepastian hukum dan jaminan keamanan investasi daerah. Utamanya pada isu kepastian pelayanan perizinan dan status lahan	Rendahnya pertumbuhan ekonomi
PDRB ADHB (Rp 11.066,43 T)	Penyumbang terbesar dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Perdagangan Besar dan Eceran dan Konstruksi	sektor jasa perusahaan dan pengadaan listrik dan gas masih menduduki peringkat dengan kontribusi paling rendah, disebabkan oleh kurangnya infrastruktur non jalan seperti instalasi listrik, penyediaan air maupun pengelolaan sampah dan limbah	Belum optimalnya kontribusi ekonomi di luar sektor pertanian dan pemerintahan
Nilai Tukar Petani (117,72%; NTP Prov. Sulawesi Barat 2022)	Kestabilan terhadap harga sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan masyarakat / petani dalam menjalankan usahatani, misalnya penggunaan pupuk, benih, obat-obatan serta sarana lainnya, sehingga pengeluaran (cost) tidak terlalu besar dibandingkan dengan	Terdapat indikasi kerugian dalam perdagangan di tahun 2021 (NTP: 122,04), di mana harga komoditas hasil pertanian menurun dan harga barang keperluan konsumsi dan produksi meningkat	Terdapat resiko kerugian perdagangan yang memengaruhi Nilai Tukar Petani



Indikator dan Capaian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Identifikasi Masalah
	penerimaan (revenue).		
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita (makanan, minuman, dan rokok: 50,62%) (Mamuju dalam Angka 2023)	Meningkatnya produksi kebutuhan primer dan melonggarnya mobilitas saat pandemi COVID-19	Menurunnya pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan	Belum meratanya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan
Pengeluaran per Kapita (Rp 10.075 juta/orang/tahun) (BPS 2023)	Pertumbuhan perekonomian UMKM, peningkatan penyerapan tenaga kerja, dan menurunnya tingkat pengangguran	1. Masih terdapat kekurangan pada aspek interkoneksi antara kawasan perkotaan dan kegiatan lokal 2. Pengeluaran masih didominasi untuk kebutuhan makanan	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pada komponen selain makanan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (70,92) (BPS Kab. Mamuju 2022)	Pulihnya perekonomian pasca bencana alam dan pandemi COVID-19	1. Kesenjangan antara kemampuan tenaga kerja dengan skill yang dibutuhkan 2. Jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja	Masih terdapat penganggur dalam angkatan kerja
Rasio Lulusan S1, S2, dan S3 (27,4) (Mamuju dalam Angka, 2021)	1. Berdirinya perguruan tinggi swasta di Kabupaten Mamuju 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan ke perguruan tinggi	Perpindahan penduduk ke kota besar	Rendahnya jumlah penduduk yang menempuh perguruan tinggi



Indikator dan Capaian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Identifikasi Masalah
Tingkat Ketergantungan (53%)	1. Adanya bonus demografi 2. Meningkatnya kualitas hidup	Bertambahnya penduduk usia tidak produktif	Masih banyaknya penduduk produktif yang menanggung hidup penduduk usia tidak produktif
Tingkat Pengangguran Terbuka (3,06%)	1. tumbuhnya UMKM 2. Peningkatan kapasitas oleh perangkat daerah maupun instansi vertikal 3. Pemberian bantuan modal usaha 4. Meningkatnya penggunaan jaminan sosial ketenagakerjaan	1. jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada 2. Kurang tersanggupnya standar upah minimum kabupaten oleh pengusaha, sehingga berpengaruh pada tingkat permintaan tenaga kerja 3. Tingginya tingkat inflasi yang berpengaruh pada tingkat bunga pinjaman, sehingga mengurangi investasi pada sektor-sektor produktif yang dapat membuka lapangan kerja	Tingginya tingkat pengangguran
Inflasi (4,39%)	1. peningkatan tarif pajak 2. Penekanan belanja pemerintah	1. besarnya permintaan barang dan jasa yang tidak diimbangi oleh kemudahan sarana dan prasarana distribusi 2. Keterbatasan/ketiadaan pengganti barang dan jasa yang diminta, terutama ikan cakalang dan cabai	Belum terkendalinya inflasi



Indikator dan Capaian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Identifikasi Masalah
Jumlah kasus korupsi (0 kasus)	1. meningkatnya kesadaran dari nilai moral, agama, integritas, dan sosial 2. Pendapatan yang mencukupi 3. Stabilitas politik 3. Kewajiban menjalankan organisasi yang akuntabel dan transparan 4. Efek jera hukum 5. Dukungan lingkungan dan masyarakat antikorupsi	1. Hambatan struktural: bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. 2. Hambatan kultural: bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. 3. Hambatan instrumental: bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. 4. Hambatan manajemen: bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.	Belum maksimalnya pencegahan korupsi pada tata kelola pemerintahan
Indeks Kepuasan Publik (85,14%)	meningkatnya Perencanaan, Koordinasi, Pengawasan, dan Kepemimpinan	1. kurangnya sumber daya pegawai yang terlatih dalam melakukan pelayanan 2. Kurangnya sarana prasarana yang mendukung pelayanan publik	Belum optimalnya pelayanan publik



Indikator dan Capaian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Identifikasi Masalah
Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah (N/A)	Masih terdapat sektor pertanian dan perkebunan yang beroperasi	Bertambahnya wilayah permukiman dengan pesat	Terdapat resiko pengurangan luasan wilayah produktif
Luas Wilayah Produktif (41,15 Ha; RTRW Kab. Mamuju 2019-2039)	Masih terdapat sektor pertanian dan perkebunan yang beroperasi	Bertambahnya wilayah permukiman dengan pesat	Terdapat resiko pengurangan luasan wilayah produktif
Luas Wilayah Industri (0,51 Ha)	Upaya dari Pemkab Mamuju untuk membangun kawasan industri yang terencana	Sebagian kawasan industri sudah tidak memungkinkan lagi untuk diperluas karena keterbatasan lahan	Terbatasnya luasan kawasan industri
Luas Wilayah Perkotaan (Kec. Mamuju: 1.409, 15 Ha; Kec. Simboro: 732,67 Ha)	Meningkatnya jumlah fasilitas di kawasan perkotaan Kabupaten Mamuju	Meningkatnya aktivitas perkotaan yang menimbulkan eksternalitas negatif	Perlunya penanganan eksternalitas negarif (polusi udara, suara, dll) di kawasan perkotaan Kabupaten Mamuju
Pelayanan perizinan (86 layanan; DPMPSTSP Kab. Mamuju 2021)	1. Beragam layanan perizinan dan nonperizinan yang sebagian besar bebas biaya 2. Terdapat beragam saluran layanan informasi dan pengaduan perizinan	Masih terdapat pelaku usaha yang belum mengurus perizinan	Perlunya sosialisasi layanan perizinan
Pajak daerah dan retribusi daerah (PAD: Rp 101.272.745.140,85; RLPPD 2023)		Kurangnya sumbangsih PAD terhadap pendapatan daerah	Belum tercapainya kemandirian fiskal daerah



Indikator dan Capaian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Identifikasi Masalah
Proporsi panjang jalan berkondisi baik (32,6%)	-	1. Drainase yang tidak berfungsi/tidak adanya drainase, mengakibatkan air menjadi tergenang di badan jalan. Air pada asphalt hotmix akan mengakibatkan terjadi pelepasan butiran agregat asphalt hotmix atau mengurangi daya lekat aspal sehingga jalan akan mudah terjadi kerusakan. 2. Mutu Asphalt Hotmix yang tidak baik 3. Overtonase (kelebihan beban tonase) kendaraan 4. Kesalahan perencanaan tebal perkerasan jalan 5. Lapis pondasi agregat yang tidak padat, menyebabkan aspal hotmix di atasnya menjadi bergelombang atau menjadi tidak stabil menahan terhadap beban lalu lintas di atasnya 6. Kondisi konstruksi tanah dasar yang tidak stabil 7. Faktor bencana alam 8. Pelaksanaan pekerjaan pengaspalan yang tidak baik 9. Tidak dilakukan perawatan jalan secara berkala	Minimnya jalan berkondisi baik
Rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih (84,88%)	Program Kementerian PUPR terkait air bersih salah satunya program PAMSIMAS	1. pemanfaatan yang tidak optimal terhadap sumber air seperti sungai dan sumur. 2. Akses mendapatkan air bersih	Sulitnya akses rumah tangga terhadap air bersih



Indikator dan Capaian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Identifikasi Masalah
		juga terlalu jauh sehingga memerlukan pemipaan yang teramat Panjang.	
Rumah tangga yang memiliki akses terhadap listrik (95,19%)	1. keinginan desa atau dusun untuk maju 2. Fasilitasi infrastruktur di desa atau dusun memadai sehingga akses untuk listrik lebih mudah.	1. akses desa yang terlalu jauh dan rawan untuk dapat memasukkan jaringan listrik 2. Kurangnya peran aktif masyarakat dalam mengembangkan desanya dengan menggunakan air mengalir yang bisa dapat menghasilkan listrik untuk masyarakat sekitarnya	Sulitnya akses rumah tangga terhadap listrik
Indeks Gini (0,36)	Kabupaten Mamuju merupakan daerah penghubung antara Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Merupakan jalur strategis dalam distribusi barang dan jasa pada wilayah pulau Sulawesi.	1. Pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju yang masih belum mendukung sepenuhnya kebutuhan masyarakat sehingga terjadi ketimpangan baik itu antar desa dan kecamatan 2. Kurangnya peluang usaha yang menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat	Tingginya ketimpangan ekonomi



Indikator dan Capaian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Identifikasi Masalah
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (54,45)	1. kapasitas sumberdaya aparatur yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kaitannya dalam tata cara pengukuran indeks ini 2. Adanya perhatian dan keterlibatan Masyarakat atau Stakeholder lainnya seperti Komunitas Penggiat/Pecinta Lingkungan dalam menangani isu lingkungan	1. Diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur tata laksana dan tata Kelola Kualitas Lingkungan Hidup daerah 2. Melakukan Penyusunan Anggaran Pengelolaan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 3. Mengoptimalkan anggaran APBD Khusus untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), sehingga Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan baik sesuai target 4. Agar menetapkan target Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Tutupan lahan kedalam RPJMD 5. Melakukan peningkatan jumlah kegiatan Pemantauan dengan Menggunakan Anggaran APBD, dengan tujuan untuk menambah lokasi pemantauan yang telah ditetapkan di Permen LHK No. 27 Tahun 2021. 6. Kurangnya sarana dan Prasarana dalam Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup



Indikator dan Capaian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Identifikasi Masalah
Ruang Terbuka Hijau (7,14%)	apabila kebijakan alokasi RTH untuk kebijakan tata ruang wilayah tepat serta komitmen masyarakat dan lembaga untuk mewujudkan Kota Hijau, adanya kegiatan green action di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi, serta tersedianya anggaran untuk pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau.	a) Diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur Ruang Terbuka Hijau (RTH). b) Kurangnya dukungan anggaran dalam penanganan Ruang Terbuka Hijau (RTH). c) Perlunya Penambahan area Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota. d) Pemerintah Belum menjadi perhatian akan pentingnya kualitas lingkungan hidup yang berpotensi sebagai obyek wisata kedepannya. e) Banyaknya pembangunan dalam Kabupaten Mamuju tanpa memperhatikan dampak terhadap lingkungan sekitarnya.	Belum terwujudnya ruang terbuka hijau
Angka kriminalitas (25 kasus)	Standar Operasi Prosedur (SOP) yang jelas serta koordinasi yang baik dengan berbagai instansi terkait.	a) Belum terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat. b) Masih rendahnya penegakan hukum. c) Masih kurang dan belum optimalnya personil Linmas yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. d) Masih lemahnya penyelesaian pelanggaran perda.	Tingginya angka kriminalitas



Indikator dan Capaian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Identifikasi Masalah
Jumlah demonstrasi (1)	peningkatan pengetahuan anggota Satpol PP tentang penanganan unjuk rasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Masih adanya unjuk rasa dan kejadian insidentil yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, yang merupakan salah satu hambatan dalam menyelesaikan aksi demonstrasi. 2. Tidak adanya pemberitahuan unjuk rasa 3. Kurangnya koordinasi 4. Adanya provokasi yang direncanakan 5. Seringnya tidak adanya perwakilan untuk melakukan diskusi 6. Sikap petugas yang tidak mengindahkan perintah dan larangan 7. Kurangnya personil dan terbatasnya perlengkapan pendukung.	Tingginya jumlah demonstrasi yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan
Jumlah kasus yang dipicu isu SARA (0)	1) Pemerintah melakukan Kegiatan Keagamaan, 2) Sosialisasi tentang pentingnya saling menghargai dan menghormati sesama warga negara, 3) Sosialisasi pentingnya menghargai Keberagaman dan tidak cepat terhasut akan isu-isu (Hoax) yang membuat emosional sehingga terpicu konflik	1. Perbedaan akses atau kesempatan ekonomi 2. Perbedaan ideologi, perbedaan biologis 3. Latar belakang geografis 4. Kesenjangan ekonomi dan kebudayaan	Tingginya jumlah kasus ketertiban umum akibat isu SARA



Indikator dan Capaian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Identifikasi Masalah
Indeks Reformasi Birokrasi (2023: 54,21)	Kemampuan daerah dalam berinovasi dan kemampuan menerapkan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE).	Sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal	Belum tercapainya reformasi birokrasi yang mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
Indeks Pelayanan Publik (2023: 2,65)		1. Belum diterapkannya inovasi dalam pelayanan publik 2. Kurangnya penerapan teknologi dalam pelayanan publik	Pelayanan publik yang kurang inovasi dan kurang menerapkan SPBE
Nilai SAKIP Daerah (2023: 62,67)		Kabupaten Mamuju belum secara intensif melakukan perbaikan SAKIP	Belum tercapainya akuntabilitas tata kelola pemerintahan secara menyeluruh
Maturitas SPIP (2023: 3)	Dukungan internal Inspektorat baik dari komitmen pimpinan, SDM, anggaran, dan pola pengawasan	Kelebihan beban tugas, adanya temuan berulang, perencanaan anggaran belum maksimal, tiadanya sistem deteksi dini dalam mencegah TIPIKOR, manajemen kinerja dan manajemen resiko belum terbangun dengan baik	Pengawasan internal pemerintah daerah yang belum menguat
Kapabilitas APIP (2023: 3)	Pembaruan paradigma peran Inspektorat sebagai pembinaan atau consulting	1. Layanan konsultasi/pembinaan belum disusun secara terencana, terstruktur dan sistematis 2. Orientasi pemeriksaan masih masih memprioritaskan post-audit, belum optimal dalam pendekatan audit kinerja serta reuiu	Belum optimalnya penguatan kapabilitas APIP dalam pembinaan/konsultasi



Indikator dan Capaian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Identifikasi Masalah
Opini BPK (2023: WTP)	Laporan keuangan telah memenuhi syarat-syarat kewajaran informasi keuangan	Tim TAPD belum maksimal dalam melakukan perencanaan anggaran sesuai Permendagri 18/2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2024	Belum terpenuhinya perencanaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan

Sumber : Evaluasi RPJPD Kab. Mamuju 2005-2025 (2021)



Tabel 3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Pembangunan Nasional, Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat, dan Pembangunan Kabupaten Mamuju

Permasalahan Nasional		Permasalahan Provinsi Sulawesi Barat	Permasalahan Kabupaten Mamuju
Umum	Wilayah Sulawesi		
Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat	Masih adanya hambatan pada aspek daya saing di seluruh provinsi Wilayah Sulawesi	Rendahnya kualitas SDM	Rendahnya mutu dan daya saing sumber daya manusia
Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi	Wilayah Sulawesi masih dihadapkan pada isu pembangunan sosial, khususnya terkait SDM		
Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai	Ketimpangan gender, perkawinan anak, dan pembangunan kebudayaan masih menjadi isu dalam pembangunan ketahanan sosial budaya		
Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah			
Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal			
Infrastruktur dan literasi digital masih terbatas			



Permasalahan Nasional		Permasalahan Provinsi Sulawesi Barat	Permasalahan Kabupaten Mamuju
Umum	Wilayah Sulawesi		
Akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial untuk mencapai tingkat kemiskinan 0% tahun 2045			
Kualitas pendidikan yang masih rendah			
Tantangan dalam jaminan sosial meliputi belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah			
Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah	Kontribusi ekonomi Wilayah Sulawesi terhadap PDB nasional masih rendah	Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi	Rendahnya perkembangan perekonomian



Permasalahan Nasional		Permasalahan Provinsi Sulawesi Barat	Permasalahan Kabupaten Mamuju
Umum	Wilayah Sulawesi		
Belum optimalnya pemafaatan potensi pariwisata	Aspek daya saing, kendala makro dan fiskal, serta aspek pembiayaan masih menjadi hambatan pembangunan di Sulawesi		
Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut	Penegakan stabilitas pertahanan dan keamanan, khususnya wilayah perbatasan laut, masih kurang optimal		
Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi			
Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas			
Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi			
Stabilitas ekonomi makro Indonesia saat ini cukup solid di tengah ketidakpastian global, namun perlu kebijakan fiskal dan moneter yang pro-pertumbuhan untuk menghadapi tantangan ke depan			



Permasalahan Nasional		Permasalahan Provinsi Sulawesi Barat	Permasalahan Kabupaten Mamuju
Umum	Wilayah Sulawesi		
Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan	Infrastruktur dasar maupun konektivitas masih belum optimal	Belum meratanya pembangunan antar wilayah	Belum terpenuhinya infrastruktur serta lingkungan berkelanjutan yang mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar untuk publik
Akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi	Produksi tenaga listrik masih didominasi oleh energi fosil, walaupun bauran pembangkit listrik terbarukan di Sulawesi menjadi salah satu terbesar secara nasional	Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup	
Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau	Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sudah cukup merata, tetapi masih digunakan secara terbatas untuk penggunaan telekomunikasi		
Ketahanan ekologi menghadapi tantangan berupa tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan	Deforestasi, ketersediaan air, kerentanan pesisir, dan bencana masih menjadi isu dalam pembangunan ketahanan ekologi		



Permasalahan Nasional		Permasalahan Provinsi Sulawesi Barat	Permasalahan Kabupaten Mamuju
Umum	Wilayah Sulawesi		
Ketimpangan antar Jawa dan luar Jawa masih cukup tinggi	Wilayah Sulawesi memiliki ancaman bencana hidrometrologi dan geologi, antara lain gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kekeringan, banjir, longsor, dan likuefaksi		
Pembangunan infrastruktur telah meningkat pesat di berbagai wilayah Indonesia, namun masih jauh di bawah kebutuhan			
Konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antarpulau belum optimal			
Regulasi yang berlebih (hyper regulation) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun di daerah	Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah saat ini masih belum optimal	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	Rendahnya kinerja tata kelola pemerintahan
Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif			



Permasalahan Nasional		Permasalahan Provinsi Sulawesi Barat	Permasalahan Kabupaten Mamuju
Umum	Wilayah Sulawesi		
Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif			
Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D			
ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik dalam birokrasi, khususnya di pemerintahan daerah			
Belum meratanya kualitas pelayanan publik			
Kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat			
Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar, antara lain disparitas dukungan infrastruktur telekomunikasi dan informasi antardaerah dan rendahnya literasi digital			



Permasalahan Nasional		Permasalahan Provinsi Sulawesi Barat	Permasalahan Kabupaten Mamuju
Umum	Wilayah Sulawesi		
Permasalahan terkait integritas yang masih terjadi pada partai politik			
Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal			
Prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan			
Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan			
Demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis pemilihan dan hubungan formal kelembagaan			
Belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, K/L/D, serta konsistensi pencapaian sasaran jangka			



Permasalahan Nasional		Permasalahan Provinsi Sulawesi Barat	Permasalahan Kabupaten Mamuju
Umum	Wilayah Sulawesi		
panjang			
Kapasitas memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta nonpublik masih terbatas			
	Pembangunan belum dirasakan secara merata di Wilayah Sulawesi	Masih tingginya angka kemiskinan	Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat
Keamanan nasioanl menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik kawasan, terutama di perbatasan			



Permasalahan Nasional		Permasalahan Provinsi Sulawesi Barat	Permasalahan Kabupaten Mamuju
Umum	Wilayah Sulawesi		
Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat			

Sumber : Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, Rancangan Awal RPJPD Sulawesi Barat 2025-2045



Tabel 3.3 Identifikasi Pokok Masalah Pembangunan Kabupaten Mamuju

Pokok Masalah Evaluasi RPJPD 2005-2025	Pokok Masalah KLHS Kab. Mamuju 2025-2045	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat	Belum optimalnya pertumbuhan PDB regional maupun per kapita	Menurunnya laju PDRB per kapita (2022: 3,15%; KLHS RPJPD Kab. Mamuju 2025-2045)	Rawannya wilayah Kab. Mamuju oleh bencana alam yang berdampak pada aktivitas ekonomi (IRB 2022: 161,71; KLHS RPJPD Kab. Mamuju 2025-2045)
		Penurunan angka kemiskinan belum optimal (7,57%, BPS Kab. Mamuju, 2023)	Meningkatnya garis kemiskinan (Rp 340.795,00; BPS Kab. Mamuju 2023)
		Terdapat ketimpangan ekonomi (0,38, BPS Kab. Mamuju, 2022)	Rendahnya motivasi masyarakat untuk berwirausaha
Rendahnya mutu dan daya saing sumber daya manusia	Belum maksimalnya layanan kesehatan dan pendidikan yang inklusif, serta perlindungan pada anak-anak dan perempuan dari kekerasan	Rendahnya tingkat pendidikan formal penduduk Kab. Mamuju	Menurunnya tingkat pendidikan formal penduduk Kab. Mamuju pada jenjang SD (APK SD/ sederajat: 98,09% pada tahun 2023; KLHS RPJPD Kab. Mamuju, 2025-2045)
			Belum seluruhnya penduduk Kab. Mamuju menempuh jenjang SMP (APK SMP/ sederajat: 86,02% pada tahun 2023; KLHS RPJPD Kab. Mamuju, 2025-2045)
			Belum seluruhnya penduduk Kab. Mamuju menempuh jenjang jenjang SMA (APK SMA/ sederajat: 92,59%; BPS Kab. Mamuju, 2022)
		Rendahnya tingkat literasi penduduk Kab. Mamuju	Menurunnya persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik (22,94% pada tahun 2023; KLHS RPJPD Kab. Mamuju, 2025-2045)
			Belum optimalnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan (3.103 pengunjung perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Mamuju, 2023)



Pokok Masalah Evaluasi RPJPD 2005-2025	Pokok Masalah KLHS Kab. Mamuju 2025- 2045	Masalah	Akar Masalah
			Kurangnya upaya pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pengembangan perpustakaan
		Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat	Belum tercapainya penurunan jumlah ibu yang meninggal setelah persalinan (170 / 10.000 KH, Dinas Kesehatan Kab. Mamuju, 2023)
			Belum optimalnya penurunan tingkat kematian bayi (2,2 / 1.000 KH, Dinas Kesehatan Kab. Mamuju, 2023)
			Belum optimalnya penurunan tingkat kematian balita (2,2 / 1.000 KH, Dinas Kesehatan Kab. Mamuju, 2023)
			Tingginya jumlah balita gizi buruk dan prevalensi stunting (29,1; KLHS RPJPD 2025-2045 Kab. Mamuju)
			Belum seluruhnya penduduk yang tercakup dalam Jaminan Kesehatan Nasional (33,51% pada tahun 2022; KLHS RPJPD Kab. Mamuju 2025-2045)
			Sulitnya akses penduduk ke fasilitas kesehatan
		Masih terdapat penganggur terbuka (TPT: 2,99%; BPS Sulawesi Barat 2023)	Jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada
			Kurang tersanggupnya standar upah minimum kabupaten oleh pengusaha, sehingga berpengaruh pada tingkat permintaan tenaga kerja
			Tingginya tingkat inflasi yang berpengaruh pada tingkat bunga pinjaman, sehingga mengurangi investasi pada sektor-sektor produktif yang dapat membuka lapangan kerja
		Belum optimalnya kualitas	Komposisi pangan yang dikonsumsi masih kurang beragam dan seimbang (PPH:



Pokok Masalah Evaluasi RPJPD 2005-2025	Pokok Masalah KLHS Kab. Mamuju 2025- 2045	Masalah	Akar Masalah
		konsumsi pangan	82,3; Dinas Ketahanan Pangan Kab. Mamuju 2023)
			Rendahnya intervensi penanganan terhadap wilayah rentan rawan pangan (3 desa rentan rawan pangan pada tahun 2023; Dinas Ketahanan Pangan Kab. Mamuju)
		Meningkatnya ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya prevalensi kekerasan fisik, psikologis, dan seksual terhadap anak laki-laki dan anak perempuan
			Belum optimalnya layanan komprehensif yang diberikan pada korban kekerasan terhadap perempuan (21% pada tahun 2023, KLHS RPJPD Kab. Mamuju 2025-2045)
			Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam posisi pengambilan keputusan publik dan kontribusi perempuan dalam pendapatan.
		Belum optimalnya penerapan keluarga berencana dan penggunaan alat kontrasepsi	Menurunnya proporsi perempuan usia reproduksi atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern (63,68% pada tahun 2023; KLHS RPJPD Kab. Mamuju 2025-2045)
			Meningkatnya Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) (57,7% pada tahun 2023; KLHS RPJPD Kab. Mamuju 2025-2045)
			Terdapat kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi (15,48% pada tahun 2023; KLHS RPJPD Kab. Mamuju 2025-2045)



Pokok Masalah Evaluasi RPJPD 2005-2025	Pokok Masalah KLHS Kab. Mamuju 2025- 2045	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya perkembangan perekonomian	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi beserta iklim, sarana dan prasarana pendukungnya	Rendahnya pertumbuhan ekonomi (3,15%, Kabupaten Mamuju dalam Angka 2023)	Kurangnya ketersediaan dan kondisi infrastruktur untuk menghubungkan simpul-simpul ekonomi dalam rangka meningkatkan produksi dan distribusi barang dan jasa
			Rendahnya kepastian hukum dan jaminan keamanan investasi daerah. Utamanya pada isu kepastian pelayanan perizinan dan status lahan
		Belum optimalnya kontribusi ekonomi di luar sektor pertanian dan pemerintahan	Belum terselenggaranya akses UMKM ke layanan keuangan
			Masih rendahnya jumlah kantor dan sarana-prasarana layanan keuangan
			Lambannya pemulihan aktivitas industri kecil dan menengah pascapandemi COVID-19 (pertumbuhan industri turun menjadi 5,28%; Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kab. Mamuju 2023)
			Kurangnya pengawasan aktivitas jual beli ikan, terutama hasil perikanan tangkap
			Sektor jasa perusahaan dan pengadaan listrik dan gas masih menduduki peringkat dengan kontribusi paling rendah, disebabkan oleh kurangnya infrastruktur non jalan seperti instalasi listrik, penyediaan air maupun pengelolaan sampah dan limbah
		Belum terkendalinya gejala inflasi (1,82%, BPS Prov. Sulawesi Barat 2023)	Besarnya permintaan barang dan jasa yang tidak diimbangi oleh kemudahan sarana dan prasarana distribusi
			Keterbatasan/ketiadaan pengganti barang dan jasa yang diminta, terutama ikan cakalang dan cabai
		Tingginya angka kriminalitas (25 kasus pada tahun 2022,	Belum terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat.



Pokok Masalah Evaluasi RPJPD 2005-2025	Pokok Masalah KLHS Kab. Mamuju 2025- 2045	Masalah	Akar Masalah
		Evaluasi RPJPD Kab. Mamuju 2005-2025)	Masih rendahnya penegakan hukum.
			Kurang optimalnya personil Linmas yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
			Masih lemahnya penyelesaian pelanggaran perda.
		Tingginya jumlah demonstrasi yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan (55 kasus pada tahun 2022, Evaluasi RPJPD Kab. Mamuju 2005-2025)	Masih adanya unjuk rasa dan kejadian insidental yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, yang merupakan salah satu hambatan dalam menyelesaikan aksi demonstrasi.
			Tidak adanya pemberitahuan unjuk rasa
			Kurangnya koordinasi
			Adanya provokasi yang direncanakan
			Seringnya tidak adanya perwakilan untuk melakukan diskusi
			Sikap petugas yang tidak mengindahkan perintah dan larangan
			Kurangnya personil dan terbatasnya perlengkapan pendukung.
Rendahnya kinerja tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya kemandirian keuangan daerah dan pengelolaan data pembangunan yang diperlukan dalam tata kelola pemerintahan	Belum tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi (2 kasus pada tahun 2017, Evaluasi RPJPD Kab. Mamuju 2005-2025) (IPAK: 72,2; KLHS RPJPD 2025-2045)	Hambatan struktural: bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
			Hambatan kultural: bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat.
			Hambatan instrumental: bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.



Pokok Masalah Evaluasi RPJPD 2005-2025	Pokok Masalah KLHS Kab. Mamuju 2025- 2045	Masalah	Akar Masalah
			Hambatan manajemen: bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
		Belum optimalnya pelayanan publik (IKM: 85,14% pada tahun 2022, Evaluasi RPJPD Kab. Mamuju 2005-2025)	Belum optimalnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai SAKIP: 62,79; KLHS RPJPD Kab. Mamuju 2025-2045)
			Rendahnya kompetensi dan etos melayani dari ASN
			Pemanfaatan basis data terpadu, terbaru, dan akurat, termasuk data kependudukan, untuk perencanaan dan pengambilan keputusan kebijakan masih lemah.
		Rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) masih rendah (0,07% pada tahun 2022, Kabupaten Mamuju dalam Angka 2023)
			Masih tingginya ketergantungan daerah dengan pemerintah
Belum terpenuhinya infrastruktur serta lingkungan berkelanjutan yang mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar untuk publik	Tingginya resiko bencana dan pengelolaan lingkungan yang belum optimal	Minimnya jalan berkondisi baik (proposisi jalan berkondisi baik: 32,6%; Evaluasi RPJPD Kab. Mamuju 2005-2025)	Tersumbatnya sistem drainase yang mengakibatkan genangan di badan jalan, sehingga mengurangi butiran agregat asphalt hotmix dan mengurangi daya lekat aspal
			Mutu Asphalt Hotmix yang tidak baik
			Overtonase (kelebihan beban tonase) kendaraan
			Kesalahan perencanaan tebal perkerasan jalan



Pokok Masalah Evaluasi RPJPD 2005-2025	Pokok Masalah KLHS Kab. Mamuju 2025- 2045	Masalah	Akar Masalah
			Lapis pondasi agregat yang tidak padat, menyebabkan aspal hotmix di atasnya menjadi bergelombang atau menjadi tidak stabil menahan terhadap beban lalu lintas di atasnya
			Kondisi konstruksi tanah dasar yang tidak stabil
			Faktor bencana alam
			Pelaksanaan pekerjaan pengaspalan yang tidak baik
			Tidak dilakukan perawatan jalan secara berkala
		Sulitnya akses rumah tangga terhadap air bersih (RT dengan akses air bersih: 84,88%; Evaluasi RPJPD Kab. Mamuju 2005-2025)	Pemanfaatan yang tidak optimal terhadap sumber air seperti sungai dan sumur.
			Akses mendapatkan air bersih juga terlalu jauh sehingga memerlukan pemipaan yang teramat Panjang.
		Sulitnya akses rumah tangga terhadap listrik (RT dengan listrik: 95,19%; Evaluasi RPJPD Kab. Mamuju 2005-2025)	Akses desa yang terlalu jauh dan rawan untuk dapat memasukkan jaringan listrik
			Kurangnya peran aktif masyarakat dalam mengembangkan desanya dengan menggunakan air mengalir yang bisa dapat menghasilkan listrik untuk masyarakat sekitarnya
		Belum optimalnya pengelolaan angkutan umum	Belum optimalnya uji KIR kendaraan bermotor angkutan umum
		Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup (IKLH 2023: 77,68; Dinas Lingkungan	Belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tata laksana dan tata Kelola Kualitas Lingkungan Hidup daerah
			Belum terlaksananya Penyusunan Anggaran Pengelolaan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)



Pokok Masalah Evaluasi RPJPD 2005-2025	Pokok Masalah KLHS Kab. Mamuju 2025- 2045	Masalah	Akar Masalah
		Hidup dan Kebersihan)	Belum optimalnya anggaran APBD Khusus untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), sehingga Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan baik sesuai target
			Belum ditetapkan target Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Tutupan lahan ke dalam RPJMD
			Sedikitnya jumlah kegiatan Pemantauan dengan Menggunakan Anggaran APBD, dengan tujuan untuk menambah lokasi pemantauan yang telah ditetapkan di Permen LHK No. 27 Tahun 2021.
			Kurangnya sarana dan Prasarana dalam Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
			Belum optimalnya pengelolaan dan pengolahan limbah B3 sesuai peraturan
			Belum optimalnya penanganan sampah perkotaan (53,81%, KLHS RPJPD Kab. Mamuju 2025-2045)
		Belum terwujudnya ruang terbuka hijau (RTH: 7,14%; Evaluasi RPJPD Kab. Mamuju 2005-2025)	Belum ada Peraturan Daerah yang mengatur Ruang Terbuka Hijau (RTH)
			Kurangnya dukungan anggaran dalam penanganan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
			Perlunya Penambahan area Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota.
			Pemerintah belum memprioritaskan kualitas lingkungan hidup sebagai potensi obyek wisata.
			Banyaknya pembangunan dalam Kabupaten Mamuju tanpa memperhatikan dampak terhadap lingkungan sekitarnya.

Sumber : Hasil Analisis (2024)



3.2 Isu Strategis

Isu strategis Daerah dirumuskan dengan mendasarkan pada permasalahan pembangunan daerah yang telah teridentifikasi, serta dengan memperhatikan isu strategis yang berkembang di tataran global, nasional maupun regional. Isu strategis Daerah nantinya menjadi dasar dalam perumusan Visi dan Misi.

3.2.1 Isu Strategis Internasional

Isu strategis internasional didasarkan pada megatren global yang tertuang di dalam Rancangan Akhir RPJPN Nasional tahun 2025-2045, isu strategis yang berkembang di KTT G-20 di Bali tahun 2022, dan perkembangan capaian SDG's.

3.2.1.1 Megatren Global

A. Perubahan Demografi Global

1. Populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7 miliar jiwa dan akan semakin meningkat, hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050 akan meningkatkan tantangan pada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat (pangan, energi dan air) dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan;
2. Proporsi demografi seperti bertambahnya penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan;
3. Semakin maraknya fenomena tidak memiliki anak (*childfree*), menunda pernikahan, dan perilaku kehidupan sesama jenis yang menyebabkan turunnya angka kelahiran.

B. Perubahan Geopolitik dan Geoekonomi

1. Geopolitik:



- a. Eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru yang mempengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional;
 - b. Perang antara Rusia dan Ukraina yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan tekanan bagi negara-negara lainnya, seperti inflasi global yang tinggi serta terjadinya krisis energi dan pangan;
 - c. Krisis di berbagai sektor memiliki risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan.
2. Geoekonomi:
- a. Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang;
 - b. Perekonomian global pada tahun 2050 akan meningkat sebanyak tiga kali dibanding tahun 2015 yakni USD 74,0 triliun dengan kontribusi dari 5 negara terbesar (Tiongkok, India, Amerika Serikat, Jepang dan Indonesia) mencapai kurang lebih 55 persen dari nilai output dunia.

C. Kemajuan Teknologi

1. Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan Masyarakat;
2. Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari Masyarakat;
3. Pandemi Covid-19 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor;
4. Teknologi yang berkembang di masa depan akan mempengaruhi sektor manufaktur dan sektor Pendidikan, menyebabkan sejumlah jenis pekerjaan akan tergantikan oleh teknologi, serta berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi dan cara kerja pemerintah.



D. Peningkatan Urbanisasi Dunia

1. Dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di Kawasan perkotaan pada tahun 2050 di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara emerging economies, dan urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota;
2. Tekanan penduduk dan Pembangunan perkotaan pada di negara emerging economies umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik sehingga dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh.

E. Konstelasi Perdagangan Global

1. Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika;
2. Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital;
3. Kerja sama Kawasan menciptakan hubungan perdagangan strategis.

F. Tata Kelola Keuangan Global

1. Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi pada perubahan struktur ekonomi dan demografi, di mana pergeseran komposisi demografi yang menuju aging society pada tahun 2045 berpotensi menyebabkan komposisi belanja negara akan lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun;
2. Tren penggunaan Central Bank Digital Currency (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara;



3. Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri jasa keuangan, di mana ke depan puluhan juta pekerjaan pada jasa keuangan akan menghilang namun akan tergantikan dengan pekerjaan baru dengan kemampuan (skill) yang baru.

G. Pertumbuhan Kelas Menengah (*Middle Class*)

1. Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen dari populasi dunia, di mana pertumbuhan kelas menengah yang pesat tersebut akan menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik;
2. Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru di masa mendatang, yakni pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui *virtual-metaverse*, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi.

H. Peningkatan Persaingan

Pemanfaatan Sumber Daya Alam, yakni kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang akibat bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi.

I. Perubahan Iklim

1. Perubahan iklim, bersama kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (Triple Planetary Crisis) secara global akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari;
2. Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global;



3. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia.

3.2.1.2 KTT G-20

Isu strategis internasional juga memperhatikan beberapa kesepakatan Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Tahun 2022 di Bali. G20 atau *Group of Twenty* yang merupakan forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia terdiri dari 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa. G20 merupakan representasi lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 85% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Uni Eropa, Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris dan Amerika Serikat, dan Spanyol selalu diundang sebagai tamu.

Isu-isu yang dibahas oleh para pemimpin G20 telah berkembang dari ekonomi hingga perubahan iklim, energi berkelanjutan, pengampunan utang internasional dan pajak perusahaan multinasional. Tiga isu strategis dalam G20 tahun 2022 adalah arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi energi menuju energi baru terbarukan. Sedangkan pilar prioritas presidensi G20 Indonesia 2022 meliputi peningkatan produktivitas untuk pemulihan ekonomi, membangun ekonomi dunia yang tangguh pasca pandemi, menjamin pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, menciptakan lingkungan kondusif dan kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan kepemimpinan kolektif global untuk memperkuat solidaritas.

Isu yang dibahas dalam bidang keuangan dan moneter (*finance track*) G20 adalah koordinasi kebijakan global dalam



memulihkan ekonomi termasuk terkait exit policy, membahas dampak pandemi Covid-19 di bidang kesehatan dan perekonomian, penyusunan prinsip umum pengembangan mata uang digital bank sentral (CBDC), pembiayaan berkelanjutan, digitalisasi sistem pembayaran antar negara, inklusi keuangan yang meliputi digitalisasi dan kredit UMKM serta perpajakan mencakup diantaranya reformasi perpajakan. Sedangkan isu dalam bidang non keuangan dan moneter (*sherpa track*) pada pertemuan antar menteri antara lain energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, Pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi dan industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan dan perubahan iklim, hubungan luar negeri. Isu dalam bidang non keuangan dan moneter (*sherpa track*) pada pertemuan di luar pemerintahan membahas tentang bisnis, masyarakat sipil, serikat buruh, ilmuwan, lembaga think tank, perkotaan, wanita, pemuda, parlemen, lembaga audit tertinggi.

Komitmen G20 yang merupakan kesepakatan para pemimpin dunia antara lain perlunya menegakkan hukum internasional dan sistem multilateral, menangani krisis ekonomi, termasuk melalui kerja sama kebijakan makro internasional, mengupayakan ketahanan pangan dan energi, mengadopsi teknologi digital untuk mendorong inovasi dan komitmen bersama untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan (SDGs) guna mengatasi perubahan iklim, dan memperkuat sektor kesehatan. Komitmen G20 yang telah disepakati sekaligus merupakan tantangan yang harus dihadapi.

3.2.1.3 Sustainable Development Goals (SDGs)

Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan *Millennium Development Goals* (MDGs) yang belum tercapai. Konsep SDG's



diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDG's, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.

SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Adapun tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Tahun 2016-2030 antara lain:

- 1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana-mana;
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
- 3) Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia;
- 4) Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
- 6) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
- 7) Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
- 8) Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
- 9) Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;



- 10) Mengurangi kesenjangan di dalam dan antarnegara;
- 11) Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
- 12) Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
- 13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menggantikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
- 16) Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; dan
- 17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Komitmen menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang perlu mendapatkan perhatian.

3.2.2 Isu Strategis Nasional

3.2.2.1 Pengentasan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen 2024

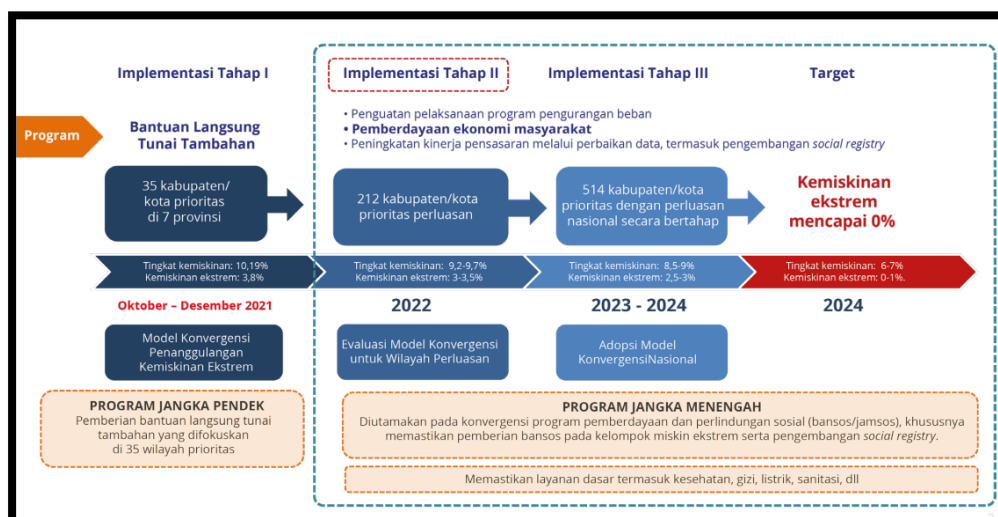
Pengurangan kemiskinan ekstrem merupakan agenda prioritas pemerintah. Sebagaimana arahan Presiden RI dalam rapat terbatas mengenai strategi percepatan pengentasan kemiskinan pada 4 Maret 2020, kemiskinan ekstrem ditargetkan turun menjadi nol persen pada 2024. Agar program lebih terarah dan target dapat



dicapai, definisi kemiskinan ekstrem perlu disepakati. Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan ukuran kemiskinan absolut yang konsisten supaya dapat dibandingkan antarnegara dan antarwaktu. Salah satunya dengan mengikuti definisi Bank Dunia, yakni paritas daya beli (*purchasing power parity*/PPP) di bawah US\$1,9 per hari.

Penduduk miskin diukur dari konsumsi makanan dan nonmakanan yang didasarkan pada ukuran moneter yang disebut dengan garis kemiskinan (GK). GK nasional sebesar Rp472.525 per kapita per bulan yang setara dengan US\$2,51 PPP per orang per hari. Adapun jumlah penduduk miskin sebanyak 27,54 juta jiwa atau 10,14 persen dari populasi (Susenas Maret 2021, BPS).

Penurunan kemiskinan ekstrem Nasional ditargetkan menjadi nol persen di tahun 2024. Tentu saja, penurunan angka nol persen diperlukan program-program yang luar biasa (*extraordinary*). Pemerintah merumuskan penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan segera mengimplementasikan tahap I dan merancang model konvergensi penanggulangan kemiskinan ekstrem sebagai tahap awal.



Gambar 3.1 Rencana Kerja Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE)

Sumber : TNP2K dan Kemenko Perekonomian, 2021



Untuk implementasi program tahap I yang dilaksanakan hingga akhir 2021, pemerintah menetapkan tujuh provinsi prioritas, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Selanjutnya, dari provinsi prioritas tersebut dipilih lima kabupaten/kota, sehingga total wilayah prioritas tahap I berjumlah 35 kabupaten/kota.

Untuk perluasan program pada 2022 atau implementasi tahap II, pemerintah merancang skenario penentuan wilayah prioritas. Cakupan dari penduduk miskin ekstrem di wilayah prioritas diputuskan mewakili sekitar 75 persen penduduk miskin ekstrem secara nasional. Dan untuk implementasi tahap III pada 2023-2024, model konvergensi dilakukan secara nasional dan menyeluruh di 514 kabupaten/kota di Indonesia.

3.2.2.2 Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pelayanan publik harus diberikan oleh pemerintah secara maksimal dan optimal kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar pelayanan yang diberikan dapat terukur, dan terarah, sehingga tingkat kepuasan masyarakat akan pelayanan pemerintah akan meningkat. Namun, tidak hanya pelayanan publik saja yang menjadi fokus utama bagi birokrasi dalam upaya menyelenggarakan urusan pemerintahan, melainkan seluruh unsur dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sangatlah penting untuk menjadi fokus, sehingga akan berdampak positif terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di era sekarang harusnya tidak lagi hanya mengandalkan sistem Front Office, melainkan pula harus menerapkan dan membuat sistem yang hemat energi, dan biaya, serta tidak lamban. Salah satu cara yang paling tepat agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan



baik yaitu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Mengingat, era sekarang telah beranjak dari sederhana menuju serba teknologi, oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk mengadopsi unsur teknologi kedalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pengadopsian teknologi dalam upaya melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan mulai diterapkan yang mana diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada peraturan tersebut, dijelaskan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Tujuan dari SPBE yaitu agar pemerintah mampu melaksanakan dan menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta membentuk layanan berbasis elektronik yang berkualitas. Adapun ruang lingkup pelaksanaan SPBE berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu:

- 1) Tata Kelola SPBE;
- 2) Manajemen SPBE;
- 3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 4) Penyelenggara SPBE;
- 5) Percepatan SPBE; dan
- 6) Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Ruang lingkup dalam upaya implementasi SPBE yang begitu kompleks tersebut memperlihatkan bahwa penerapan SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu dibutuhkan prinsip-prinsip yang harus kuat guna diterapkan dalam mengimplemntasikan SPBE. Adapun prinsip-



prinsip dalam pelaksanaan SPBE yaitu:

- 1) Efektivitas;
- 2) Keterpaduan;
- 3) Kesenambungan;
- 4) Efisiensi;
- 5) Akuntabilitas;
- 6) Interoperabilitas; dan
- 7) Keamanan.

Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa penerapan SPBE dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan bukanlah hal yang mudah. Hal ini karena penerapan SPBE yang berlatar belakang teknologi tersebut harus diimbangi oleh kualitas sumber daya yang mumpuni, baik sumber daya manusianya maupun sumber daya lainnya yang bersifat materil. Olehkarena itu, pengimplementasian SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara sistematis, dan terstruktur, sehingga prinsip-prinsip SPBE dapat terwujud.

3.2.2.3 Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintah yang melalui berbagai cara dengan tujuan, efektivitas, efisien, dan akuntabilitas. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Tata kelola pemerintahan yang baik akan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, maka semakin cepat pula pembangunan nasional diwujudkan.

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efisien, pemerintah perlu untuk menerapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi yang termuat dalam sebuah



dokumen perencanaan yang dapat mudah dipahami dan dilaksanakan oleh berbagai pihak hingga stakeholder yang terlibat. Dalam mewujudkan tata kelola reformasi tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang Reformasi Birokrasi melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* Reformasi Birokrasi nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.

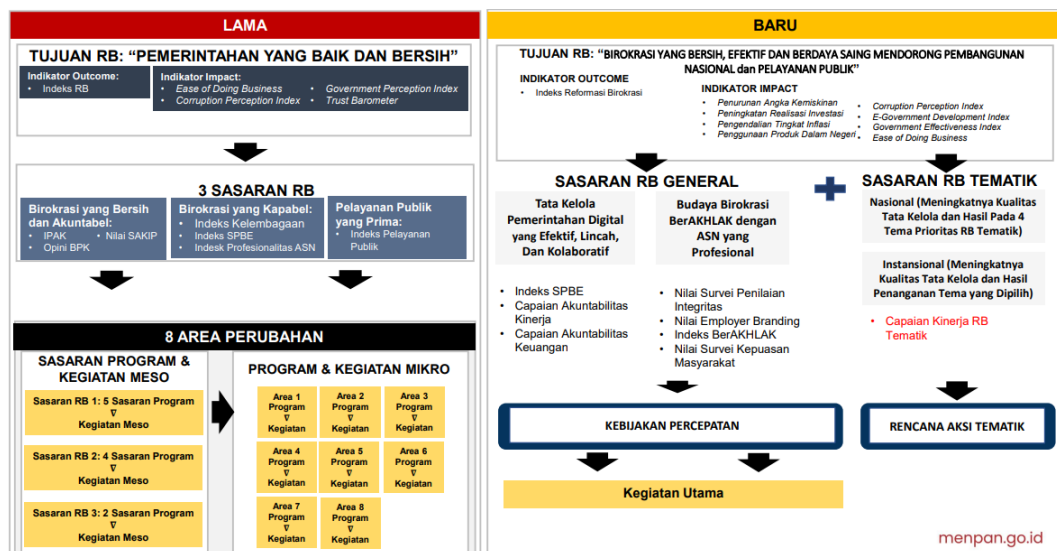
Pada akhir periode *Grand Design* RB Tahun 2010-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, upaya reformasi diharapkan telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (*governance*), semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan kemiskinan, pro lapangan pekerjaan, dan berbagai hasil nyata yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Namun, walaupun pelaksanaan RB telah memasuki periode *Road Map* terakhir *Grand Design* RB Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya RB masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan Masyarakat.

Hasil evaluasi pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diinginkan pada akhir tahun 2025. Kesenjangan tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* RB 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang



mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan RB di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).

Sehingga diperlukan penajaman Road Map RB 2020–2024 bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan RB sehingga tujuan dan sasaran strategis RB dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Hal ini tertuang dalam PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024.



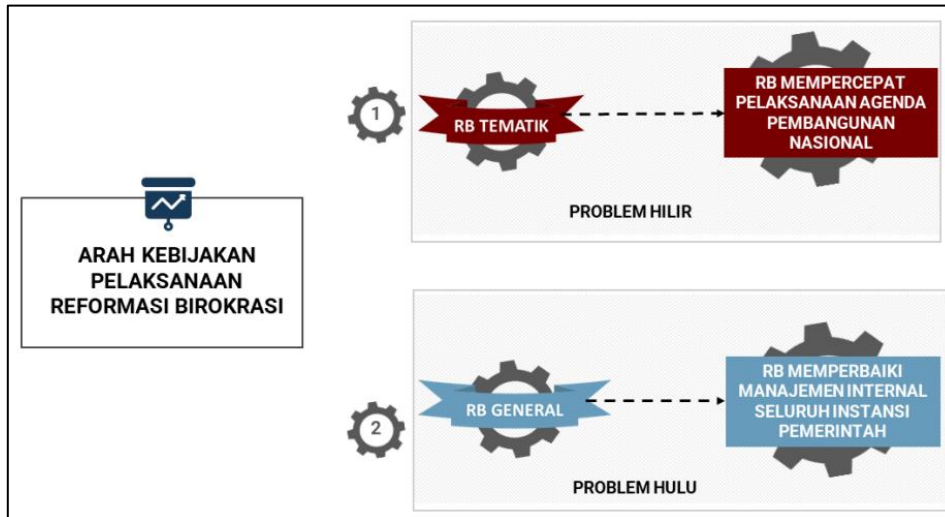
Gambar 3.2 Perbandingan Kerangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023

Penajaman fokus Reformasi Birokrasi ditujukan untuk menghadirkan percepatan (*acceleration*). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatankegiatan RB lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. *Road Map* RB 2020– 2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke



dalam dua fokus yang disebut dengan “*double track*”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik.

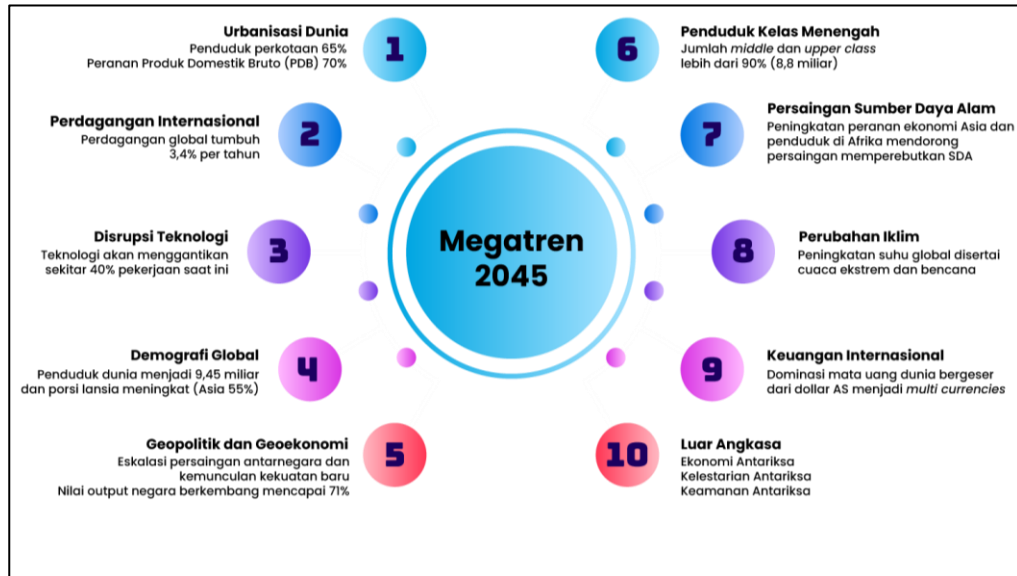


Gambar 3.3 Double Track Fokus Pelaksanaan Reformasi Birokasi

*Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokasi
Nomor 3 Tahun 2023*

3.2.2.4 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045

Tantangan global ke depan semakin kompleks mengikuti perubahan yang sangat cepat di segala aspek. Megatren global yang penting dalam 20 tahun ke depan akan merubah paradigma pembangunan global, mendorong kebijakan pro-lingkungan, adaptasi teknologi, pembangunan infrastruktur konektivitas kawasan yang lebih hijau, serta penggunaan Sistem keuangan digital.



Gambar 3.4 Megatrend Global 2045

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Isu strategis dan tantangan Pembangunan Nasional secara lengkap tersaji dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dan disampaikan sebagai berikut:

1. Rendahnya Tingkat Produktivitas di Tengah Persaingan Global yang Semakin Meningkat
2. Lemahnya Kapasitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (IPTEKIN)
3. Kuantitas dan Kualitas SDM Peneliti Belum Memadai
4. Deindustrialisasi Dini dan Produktivitas Sektor Pertanian yang Masih Rendah
5. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata
6. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Ekonomi Laut
7. Rendahnya Kontribusi UMKM dan Koperasi pada Penciptaan Nilai Tambah Ekonomi
8. Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia Selama Kurun Waktu 2010-2022 Masih Relatif Tertinggal
9. Pembangunan Belum Sepenuhnya Menerapkan Prinsip Berkelanjutan



10. Tantangan Pembangunan Energi Utamanya Peningkatan Akses Energi yang Belum Merata dan Berkualitas di Seluruh Wilayah, Masih Rendahnya Penggunaan Energi Terbarukan, dan Masih Rendahnya Efisiensi Energi
11. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Masih Menjadi Tantangan untuk Mencapai Ekonomi Hijau
12. Di Tengah Kecepatan Perkembangan Teknologi Digital, Infrastruktur dan Literasi Digital Masih Terbatas
13. Belum Optimalnya Integrasi Ekonomi Domestik Sehingga Keterkaitan Ekonomi Antarwilayah Masih Relatif Terbatas
14. Rendahnya Peran Perkotaan di Indonesia terhadap Pertumbuhan Ekonomi
15. Belum meratanya Akses dan Kualitas di Bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial untuk Menciptakan Tingkat Kemiskinan Menuju Nol Persen pada Tahun 2045.
16. Kualitas Pendidikan yang Masih Rendah
17. Belum Meratanya Akses untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan, Masih Rendahnya Pemahaman Manfaat Jaminan Sosial yang Tercermin dari Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Pekerja Informal, dan Tingkat Kepatuhan Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Masih Rendah
18. Regulasi yang Berlebih (Hyper Regulation) dan Kualitas Regulasi yang Rendah telah Menyebabkan Terjadinya Tumpang Tindih dan Disharmoni Regulasi
19. Kelembagaan Instansi Publik Masih Dicitrakan dengan Struktur yang Terfragmentasi dan Tidak Efektif
20. Proses Bisnis dan Tata Kelola Urusan Pemerintahan Masih Terfragmentasi dan Tidak Adaptif
21. Belum Terimplementasinya Manajemen Talenta Secara Merata di Seluruh K/L/D



22. ASN Berada dalam Posisi yang Rentan terhadap Intervensi Politik
 23. Belum Meratanya Kualitas Pelayanan Publik
 24. Transformasi Digital di Tingkat Pemerintahan Masih Dihadapkan oleh Berbagai Tantangan Mendasar
 25. Beberapa Permasalahan Terkait Integritas Masih Terjadi pada Partai Politik
 26. Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Pembangunan dan Demokratisasi Belum Optimal
 27. Prinsip Keterbukaan Pemerintah Belum Sepenuhnya Terarusutamakan dalam Pelaksanaan Pembangunan
 28. Sistem Hukum Belum Mampu Sepenuhnya Mewujudkan Kepastian Hukum dan Penegakkan Hukum yang Terkendali
 29. Dalam Aspek Politik, tantangan yang dihadapi terutama adalah demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis pemilihan dan hubungan formal kelembagaan
 30. Keamanan nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik Kawasan terutama di perbatasan
 31. Stabilitas ekonomi makro Indonesia saat ini cukup solid di tengah ketidakpastian global
 32. Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan
 33. Ketahanan ekologi menghadapi tantangan berupa tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan
 34. Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah Indonesia, tapi masih jauh dari kebutuhan
- Selain itu, dalam RPJPN 2025-2045 juga terdapat rancangan untuk tiap wilayah. Posisi geografis wilayah Sulawesi yang



terletak di antara ALKI II dan ALKI III berpotensi mendukung peran sebagai hub dan pintu gerbang internasional KTI. Kemudian dengan adanya pembangunan IKN di wilayah Kalimantan, wilayah Sulawesi berpeluang meningkatkan aktivitas ekonomi sebagai daerah penyangga. Komoditas dan sektor potensial bernilai tambah untuk wilayah Sulawesi di masa depan adalah komoditas pertanian, perkebunan (kakao, kelapa sawit, cengkeh, pala, rempah), perikanan tangkap (tuna, cakalan, kerapu, selar, teri), industri logam dasar (nikel, tembaga, dan emas-perak), mineral aspal, serta pariwisata. Khusus wilayah Provinsi Sulawesi Barat, sektor potensial yang bisa dikembangkan adalah pengadaan gas dan produksi es, industri karet beserta barang dari karet dan plastik, serta industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman. Sebagai bahan perbandingan potensi ekonomi, berikut distribusi persentase PDRB atas dasar berlaku tahun 2023 antara Provinsi Sulawesi Barat dengan Kabupaten Mamuju:

Tabel 3.4 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju Tahun 2023

No	Sektor PDRB	Provinsi Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	44,72	38,68
2	Pertambangan dan penggalian	2,16	3,35
3	Industri pengolahan	11,16	4,03
4	Pengadaan listrik dan gas	0,04	0,05
5	Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang	0,13	0,30
6	Konstruksi	7,33	10,17
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	9,94	10,00
8	Transportasi dan pergudangan	1,52	2,09
9	Penyediaan akomodasi makan dan minum	0,24	0,28
10	Informasi dan komunikasi	3,99	7,10



No	Sektor PDRB	Provinsi Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju
11	Jasa keuangan dan asuransi	2,11	2,72
12	Real estate	2,51	2,07
13	Jasa perusahaan	0,06	0,08
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	6,37	10,08
15	Jasa pendidikan	4,24	4,19
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,80	2,08
17	Jasa lainnya	1,66	2,73
	Produk Domestik Regional Bruto	99,98	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat 2023, BPS Kabupaten Mamuju 2023

Berdasarkan data tabel di atas, baik Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju sama-sama memiliki PDRB tertinggi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Selanjutnya industri pengolahan, perdagangan besar dan secera serta reparasi mobil dan motor, konstruksi, dan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib menyusul pada kontribusi PDRB Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan di Kabupaten Mamuju keadaannya agak berbeda, terlihat pada sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan motor, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, serta informasi dan komunikasi yang menyumbang PDRB terbesar selanjutnya.

Provinsi Sulawesi Barat telah direncanakan dalam RPJPN 2025-2045 sebagai sentra pengolahan komoditas perkebunan. Terdapat 5 (lima) prioritas arah pembangunan pada Sulawesi Barat, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia terutama untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan ketengakerjaan, serta mendorong pembangunan ekosistem riset dan inovasi;



2. Pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk penguatan rantai produksi dan rantai nilai, serta peningkatan produktivitas dan daya saing perekonomian wilayah secara berkelanjutan yang difokuskan pada kawasan industri pertambangan, kawasan industri galangan kapal, kawasan ekowisata, kawasan perikanan tangkap dan budidaya, serta industri pengolahannya, kawasan pertanian tanaman pangan, serta kawasan perkebunan kakao, kelapa, dan kopi;
3. Pembangunan sarana dan prasarana konektivitas untuk mendukung fungsi hub dan pintu gerbang internasional KTI dengan memanfaatkan ALKI II dan III, serta peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan, termasuk penataan keuangan daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kemandirian fiskal, serta penguatan stabilitas pertahanan dan keamanan di wilayah Sulawesi, khususnya di kawasan perbatasan;
5. Peningkatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, termasuk penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan resiko bencana serta penuntasan RDTR kabupaten/kota untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berbudaya.

3.2.3 Isu Strategis Regional

3.2.3.1 Pembentukan Kota Mamuju sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Barat

Hingga saat ini, semua wilayah yang berada dalam Provinsi Sulawesi Barat masih berupa kabupaten, tidak terkecuali Mamuju sebagai ibukota provinsi. Dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan tingkat provinsi, Mamuju direncanakan melakukan pemekaran wilayah, yaitu Kabupaten Mamuju dan Kota Mamuju.



Wilayah Kota Mamuju akan dijadikan ibukota Provinsi Sulawesi Barat, dengan walikota sebagai kepala daerahnya.

Untuk mewujudkan pemekaran wilayah tersebut, perlu dilaksanakan kajian untuk memenuhi parameter persyaratan dasar kewilayahan yang terdiri dari luas wilayah minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, batas usia minimal daerah provinsi, dan kabupaten/kota, dan kecamatan. Selain itu, diperlukan pula pemenuhan persyaratan dasar kapasitas daerah sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat, dengan parameter geografi; demografi; keamanan; sosial politik, adat, dan tradisi; potensi ekonomi; keuangan daerah; dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.

3.2.3.2 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sulawesi Barat terdapat sejumlah permasalahan dalam pembangunan. Beberapa permasalahan utama mencakup pembangunan Ibukota Nusantara, bonus demografi, hilirisasi industri, konektivitas wilayah, kerja sama regional Sulawesi, dan kebencanaan. Permasalahan pokok yang menjadi isu strategis Sulawesi Barat adalah:

1. Rendahnya kualitas SDM
2. Melambatnya laju pertumbuhan penduduk
3. Masih tingginya angka kemiskinan
4. Belum meratanya pembangunan antarwilayah
5. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup
6. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan

Isu Strategis Regional merupakan isu strategis yang dirumuskan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi



Sulawesi Barat Tahun 2025-2045. RPJPD Sulawesi Barat mencakup sepuluh isu strategis yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu isu strategis global, nasional, dan regional. Perinciannya adalah sebagai berikut:

A. Global:

1. Perubahan iklim dan pemanasan global
2. Pembangunan berkelanjutan
3. Kemajuan teknologi

B. Nasional:

1. Pembangunan Ibukota Nusantara (IKN)
2. Bonus demografi
3. Hilirisasi industri

C. Regional:

1. Konektivitas wilayah
2. Kerja sama regional Sulawesi
3. Kebencanaan
4. Lingkungan hidup

Provinsi Sulawesi Barat telah menyusun arahan pengembangan wilayah kabupaten yang terdiri dari 7 kawasan, antara lain:

1. Kawasan Matabe: Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Mamuju (Ibu kota Kab. Mamuju – Tampa Padang – Belang Belang (MATABE) yang potensial berfungsi sebagai pusat kegiatan terpadu kepelabuhanan, kebandarudaraan, industri, perdagangan, pergudangan, peti kemas dan pariwisata;
2. Kawasan Pendidikan: Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang menetapkan kawasan pendidikan di Ibu kota Kabupaten Majene;
3. Kawasan Lahan Pertanian Berkelanjutan: Kawasan Pertanian



Berkelanjutan (sawah beririgasi teknis, yang dipaduselaraskan dengan perencanaan dan manajemen DAS). Berlokasi di Polewali Mandar, Mamuju, Pasangkayu, dan Mamuju Tengah;

4. Kawasan Pariwisata: Mamasa (ibukota Kabupaten Mamasa) untuk mendukung KSN Pariwisata Tana Toraja dan Sekitarnya;
5. Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak: Mengembangkan Pusat-Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi Tobadak (Ibukota Kabupaten Mamuju Tengah) sebagai pusat pengembangan Kota Terpadu Mandiri agropolitan;
6. Kawasan Perkebunan: Kawasan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah, dan Mamuju serta perkebunan kakao di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
7. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil: Arahana Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari Pulau Karampuang, Pulau Balabalakang, dan Pulau Lerelerekang.

Dari ketujuh kawasan tersebut, tercatat bahwa Kabupaten Mamuju masuk dalam pengembangan 4 (empat) kawasan, yaitu Kawasan Matabe, Kawasan Lahan Pertanian Berkelanjutan, Kawasan Perkebunan, dan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

3.2.4 Isu Strategis Kabupaten Mamuju

3.2.4.1 Telaahan Evaluasi RPJPD Kabupaten Mamuju 2005-2025

1. Indeks Pembangunan Manusia



IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Selain merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Di Indonesia, IPM merupakan data strategis karena digunakan sebagai ukuran kinerja pemerintah. Untuk Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mamuju, Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan 2005 berada pada 61,65, namun pada Capaian pada Tahun 2021 sebesar 68,32.

2. Angka Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll) Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Angka Kemiskinan di Kabupaten Mamuju memiliki Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan 2005 sebesar 27,70, namun pada Capaian pada Tahun 2021 sebesar 22,3 yang dianggap masih



sangat tinggi. Maka dari itu, kemiskinan merupakan salah satu permasalahan di Kabupaten Mamuju.

3. Angka Pengangguran

Dalam konsep ketenagakerjaan, penduduk dibagi dalam 2 kelompok yaitu penduduk yang berusia 0-14 tahun dan kelompok penduduk yang berusia 14 tahun atau lebih. Sementara penduduk usia 14 tahun atau lebih dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu bukan angkatan kerja (sekolah, ibu rumah tangga, pensiunan) dan kelompok angkatan kerja. Penduduk angkatan kerja dibagi dalam dua kelompok yaitu bekerja dan mencari kerja. Penduduk yang termasuk mencari kerja inilah yang dinamakan Pengangguran Terbuka. Angka Pengangguran di Kabupaten Mamuju mencapai 3,25% pada Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan 2005, namun pada Capaian pada Tahun 2021 sebesar 3,06%.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mamuju mencapai 11,37% pada Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan 2005, namun pada Capaian pada Tahun 2021 sebesar 2,4%. Rendahnya pertumbuhan ekonomi, selain diakibatkan oleh pandemi COVID-19 dan bencana gempa bumi, juga menjadi indikasi dari belum optimalnya perkembangan perekonomian di Kabupaten Mamuju.

3.2.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045

Kabupaten Mamuju telah menyusun laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045. Kajian tersebut menghasilkan rumusan isu-isu strategis dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)



Prioritas, yang disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.5 Perumusan Isu-Isu Strategis dari Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan Prioritas**

No	TPB Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis
1.	TPB 11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan TPB 12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan TPB 13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya TPB 15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	1. Meningkatnya Indeks Risiko Bencana 2. Tidak adanya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan 3. Meningkatnya jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana 4. Belum tercapainya target Persentase sampah perkotaan yang tertangani. 5. Belum adanya Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. 6. Menurunnya jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan 7. Belum adanya Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. 8. Belum adanya Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkatkan Sistem Peringatan Dini, Pengurangan Risiko Bencana, dan Pengelolaan Lingkungan untuk Mengurangi Dampak Bencana dan Kerugian Ekonomi
2.	TPB 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh	1. Meningkatnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. 2. Meningkatnya prevalensi stunting (pendek dan sangat	Belum Optimalnya Akses Pelayanan Kesehatan, Pola Hidup Sehat



No	TPB Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis
	Penduduk Semua Usia TPB 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. 3. Meningkatnya Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun 4. Belum tercapainya target persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. 5. Menurunnya Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) 6. Meningkatnya Angka Kematian Neonatal (AKN) 7. Meningkatnya Angka Kematian Bayi (AKB) 8. Meningkatnya kejadian malaria 9. Meningkatnya persentase merokok pada umur ≤ 18 tahun. 10. Menurunnya proporsi perempuan usia reproduksi atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. 11. Belum tercapainya target Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) 12. Belum tercapainya target Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang 13. Meningkatnya Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). 14. Meningkatnya unmet need pelayanan kesehatan 15. Menurunnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	Dan Pemenuhan Gizi Yang Memadai
3.	TPB 1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala	1. Menurunnya proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkatnya kerentanan Masyarakat miskin akibat



No	TPB Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis
	Bentuk Dimanapun. TPB 10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara TPB 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	2. Menurunnya prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. 3. Belum tercapainya target persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. 4. Belum tercapainya target persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. 5. Belum tercapainya target Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat. 6. Meningkatnya Indeks Risiko Bencana 7. Meningkatnya jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana 8. Belum tersedianya Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. 9. Belum tersedianya Jumlah kebijakan yang diskriminatif 10. Belum tercapainya target persentase SD/MI berakreditasi minimal B. 11. Belum tercapainya target Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. 12. Menurunnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ Sederajat 13. Belum tercapainya target Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat. 14. Belum tercapainya target Angka Partisipasi Kasar (APK)	belum meratanya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat



No	TPB Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis
		Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 15. Menurunnya Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	
4.	TPB 6. Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	2. Belum tercapainya target Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. 3. Belum tercapainya target Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. 4. Belum tercapainya target Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. 5. Belum adanya rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. 6. Belum dilaksanakannya pembangunan IPLT	Kurangnya Akses terhadap Air Bersih dan Penanganan Limbah yang Tidak Memadai Mengakibatkan Terciptanya Lingkungan yang Tidak Sehat bagi Masyarakat
5.	TPB 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua Inovasi	1. Menurunnya laju pertumbuhan PDB per kapita. 2. Belum tercapainya target PDB per kapita 3. Tidak bertambahnya jumlah kantor bank dan ATM 4. Tidak bertambahnya rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum). 5. Belum terlaksananya akses UMKM ke layanan keuangan 6. Menurunnya Jumlah wisatawan mancanegara. 7. Menurunnya Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. 8. Menurunnya Jumlah devisa sektor pariwisata.	Kurangnya Efektivitas Promosi Wisata Menghambat Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Sektor Pariwisata



No	TPB Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis
6.	TPB 16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan TPB 5. Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan TPB 17 Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	1. Meningkatnya Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan 2. Meningkatnya Proporsi rumah tangga yang memiliki anak yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis 3. Meningkatnya Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. 4. Meningkatnya Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. 5. Menurunnya Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 6. Menurunnya Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). 7. Belum adanya kebijakan yang diskriminatif berdasarkan pelanggaran diskriminasi 8. Belum tercapainya target rasio penerimaan pajak terhadap PDB. 9. Menurunnya persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik. 10. Menurunnya persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama. 11. Menurunnya persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS). 12. Meningkatnya prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Khususnya Yang Berkaitan Pelayanan Publik, Ketertiban Umum Serta Ketidaksetaraan Gender



No	TPB Prioritas	Permasalahan	Isu Strategis
		13. Belum tercapainya target persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. 14. Menurunnya proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. 15. Meningkatnya Unmet need KB	

Sumber : Laporan KLHS RPJPD Kabupaten Mamuju Tahun 2024

Tabel 3.6 Penentuan Isu Strategis per Urusan Kabupaten Mamuju

Urusan	Permasalahan	Isu Strategis per Urusan
Pendidikan	Masih terdapat penduduk yang belum menuntaskan pendidikan 12 tahun	Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan
	Masih terdapat tenaga guru yang belum tersertifikasi	
Kesehatan	Masih adanya kasus kematian ibu, kematian bayi (AKB) dan kematian balita (AKBa).	Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dan pemahaman masyarakat tentang kesehatan
	Masih ditemukannya gizi buruk, gizi kurang, dan stunting pada balita	
	Masih kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat	
	Belum optimalnya sarana, prasarana dan tenaga layanan kesehatan	
	Masih terdapat penduduk yang belum tercakup dalam jaminan kesehatan	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rendahnya Konektifitas antar wilayah	Perlunya pembangunan konektivitas antarwilayah dan pemeliharaan sarana dan prasarana
	Masih Kurangnya Drainase beserta pemeliharaannya	
	Masih rendahnya akses terhadap Air Minum	



Urusan	Permasalahan	Isu Strategis per Urusan
	Tingginya pelanggaran terhadap Penataan Ruang	
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih tingginya luasan Kawasan kumuh perkotaan	Perlunya penanggulangan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni
	Masih terdapat rumah tidak layak huni	
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Belum optimalnya penyediaan data sektor terkait	Perlunya peningkatan penegakan Perda, penjagaan ketertiban, dan waktu tanggap kebakaran
	Belum optimalnya upaya penjagaan ketertiban, ketenteraman dan pencegahan tindak kejahatan	
	Belum optimalnya patroli yang dilakukan oleh petugas Satpol Pamong Praja, disebabkan keterbatasan jumlah personil, sarana dan prasarana dan keterbatasan anggaran untuk operasional patroli	
	Belum maksimalnya Penegakan PERDA dan Pemberantasan penyakit masyarakat	
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) belum mematuhi standar layanan maksimal 15 menit di setiap kejadian kebakaran, disebabkan oleh keterbatasan personil dan sarana prasarana yang tidak memenuhi standar Nasional pemadam kebakaran.	
Penanggulangan Bencana Daerah	Belum tersedianya Peta Resiko Bencana	Perlu meningkatkan manajemen mitigasi bencana
	Belum tersedianya Rencana Penanggulangan Bencana	
	Belum tersedianya rencana kontijensi per ancaman	
	Masih kurangnya sistem peringatan dini per ancaman	



Urusan	Permasalahan	Isu Strategis per Urusan
	Belum optimalnya rencana evakuasi. Jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara Belum optimalnya penyediaan logistik bantuan selama masa tanggap darurat Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia dalam penanganan bencana	
Tenaga Kerja	Masih banyaknya pengangguran, dan rendahnya penempatan kerja Terbatasnya pelatihan peningkatan keterampilan pencari kerja, terlihat dari tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat, dan jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Sulitnya menyatukan kesepakatan perselisihan hak dan kepentingan antarpengusaha sebagai pemberi kerja dan pekerja Permintaan tenaga kerja lebih tinggi dibanding lapangan kerja Masih terjadinya kasus sengketa perusahaan dengan tenaga kerja dan pelaksanaan K3 di perusahaan Masih rendahnya pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan Kualitas dan kompetensi tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar kerja Tidak adanya kesepakatan tentang upah antara pengusaha dengan tenaga pekerja serta sarana hubungan industrial di perusahaan belum berjalan sesuai peran dan fungsinya terhadap angka sengketa pengusaha-pekerja setiap tahunnya Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama disebabkan Pihak yang berselisih kurang memahami aspek positif/penyelesaian perselisihan lewat perjanjian bersama	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan penanganan konflik hubungan industrial



Urusan	Permasalahan	Isu Strategis per Urusan
	Besaran pencarian kerja yang terdaftar yang ditempatkan disebabkan ketidaksesuaian antara jenis pendidikan dan kebutuhan pasar kerja.	
	Terbatasnya jumlah perusahaan yang menerapkan K3 terhadap keselamatan dan perlindungan kerja	
	Belum semua pekerja/buruh di perusahaan didaftarkan dalam kepesertaan jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan	
	Masih rendahnya daya saing tenaga kerja	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam posisi pengambilan keputusan publik dan kontribusi perempuan dalam pendapatan.	Meningkatkan pembinaan masyarakat dan lembaga terkait kesetaraan gender dan perlindungan anak
	Belum optimalnya layanan komprehensif yang diberikan pada korban kekerasan terhadap perempuan	
	Masih adanya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	
Pangan	Masih adanya desa rawan pangan dan belum semua Desa tertangani	
	Rendahnya antusiasme masyarakat dalam mengonsumsi sumber pangan selain beras	Perlu meningkatkan ketahanan pangan
	Belum optimalnya pola pangan harapan, dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pemenuhan pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman.	
Pertanahan	Belum optimalnya pengelolaan pertanahan	
	Belum adanya identifikasi aset tanah negara guna mendukung program strategis pemerintah baik kabupaten, propinsi maupun pusat	Meningkatkan pengamanan lahan sebagai aset daerah
	Belum semua lahan bersertifikat termasuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	



Urusan	Permasalahan	Isu Strategis per Urusan
Lingkungan Hidup	Menurunnya Indeks Kualitas Air akibat pengolahan limbah rumah tangga yang belum optimal, eksploitasi air tanah, dan berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH)	Terdapat potensi penurunan daya dukung ekologi
	Meningkatnya volume sampah akibat minimnya sarana dan prasarana persampahan dan penambahan penduduk	
	Pengelolaan wilayah hutan lindung belum optimal, sehingga dapat menimbulkan konflik agraria dan konflik sosial	
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Masih terdapat penduduk yang belum memiliki KTP	Perlunya optimalisasi pelayanan dan sosialisasi tentang kependudukan dan pencatatan sipil
	Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	
	Masih kurangnya kesadaran tentang pentingnya akte kelahiran	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kurangnya Regulasi dan sarana prasarana di tingkat Kabupaten yang mendukung terhadap upaya peningkatan keberdayaan masyarakat	Perlunya optimalisasi pembinaan masyarakat dan desa, khususnya desa, aparatur, dan LPM
	Banyaknya inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) yang tidak teridentifikasi di tingkat desa serta sarana dan prasarana pembentukan posyantek masih sangat kurang	
	Kurangnya kompetensi, kualifikasi dan motivasi pengelola lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	
	Kurang Maksimalnya pembinaan ke desa mengenai pentingnya profil desa/kelurahan	
	Belum optimalnya kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan desa, termasuk pengelolaan profil desa/kelurahan	



Urusan	Permasalahan	Isu Strategis per Urusan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Menurunnya proporsi perempuan usia reproduksi atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Perlunya pencegahan kehamilan dini, perencanaan kehamilan, dan pembinaan masyarakat terkait KB
	Meningkatnya Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	
	Terdapat kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi	
Perhubungan	Belum optimalnya uji KIR kendaraan bermotor angkutan umum	Mengoptimalkan pengelolaan kendaraan bermotor angkutan umum
Komunikasi dan Informatika	Layanan infrastruktur komunikasi di beberapa wilayah kecamatan belum memadai	Pelayanan infrastruktur komunikasi bdi seluruh wilayah
	Perlu optimalisasi peran dan fungsi Kelompok Informasi Masyarakat	
	Masih rendahnya pemberian informasi kebijakan kepada masyarakat	
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Belum optimalnya pertumbuhan koperasi	Meningkatkan pertumbuhan dan pembinaan terhadap koperasi dan UMKM
	Jumlah koperasi yang memiliki sertifikat nomor induk koperasi yang masih sangat sedikit, dan koperasi yang telah mengikuti pelatihan belum secara keseluruhan	
	Usaha skala Mikro yang mengalami pertumbuhan menjadi wirausaha baru masih rendah, dan jumlah usaha mikro yang bermitra juga belum maksimal	
	Belum optimalnya pertumbuhan UMKM	
Penanaman Modal	Perlunya peningkatan kualitas kajian penanaman modal di Kabupaten Mamuju	Perlunya peningkatan layanan dan sosialisasi tentang penanaman modal
	Belum optimalnya realisasi investasi berskala nasional (PMA dan PMDN)	
	Kurangnya data pendukung potensi investasi untuk dituangkan dalam promosi penanaman modal	



Urusan	Permasalahan	Isu Strategis per Urusan
	Perlunya penyediaan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan, dan fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan	
	Perlunya penetapan regulasi terkait pemberian insentif dan kemudahan berusaha, serta beberapa dokumen terkait penanaman modal yang belum terpenuhi	
	Kurangnya Sosialisasi ke pelaku usaha terkait Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan secara online, serta penyampaian LKPM online	
	Database yang belum akurat	
	Kurangnya sarana dan prasarana	
	Belum terwujudnya Mal Pelayanan Publik	
	Diperlukan peningkatan dalam pengendalian penanaman modal meliputi pemantauan, pembinaan, dan pengawasan bagi pelaku usaha	
	Penyusunan regulasi penyelenggaraan penanaman modal sekaligus percepatan pelaksanaan berusaha	
	Pengimplementasian penyelenggaraan perizinan Online Single Submission (OSS) berbasis resiko	
Kepemudaan dan Olah Raga	Masih kurangnya prestasi pemuda karena pembinaan kelembagaan pemuda yang belum optimal	Meningkatkan produktivitas pemuda dan prestasi olah raga
	Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan pemuda tentang kewirausahaan	
	Masih kurangnya prestasi olahraga karena pembinaan terhadap atlet dan pelatih belum optimal	
Statistik	Lemahnya ketersediaan data sektoral guna menunjang perencanaan pembangunan pada masing-masing perangkat daerah	Perlunya integrasi data statistik sektoral dari seluruh perangkat daerah



Urusan	Permasalahan	Isu Strategis per Urusan
Persandian	Kurangnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) Persandian dalam pengamanan aplikasi atau sistem elektronik dalam tata kelola pemerintahan.	Meningkatkan kompetensi SDM di bidang persandian
Kebudayaan	Belum adanya Dokumen pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah sehingga Kabupaten Mamuju belum mendapat bantuan dari pusat untuk kegiatan penyelenggaraan Festival seni dan budaya	Meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya daerah
	Belum adanya sinergi antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta dan masyarakat belum cukup kuat dalam usaha untuk memajukan kebudayaan daerah	
	Banyak kegiatan pelestarian kebudayaan belum memiliki landasan hukum yang kuat yang berkaitan dengan tata kelola kebudayaan	
Perpustakaan	Belum optimalnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Meningkatkan layanan perpustakaan kepada publik untuk mencapai pembangunan literasi
	Kurangnya upaya pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pengembangan perpustakaan	
Kearsipan	Tidak tersedianya Sistem Jaringan Informasi Arsip	Perlunya membangun sistem kearsipan dan kompetensi SDM tentang kearsipan
	Kurangnya Tenaga Kearsipan yang Bersertifikat	
	Kurangnya SDM dalam penatausahaan arsip untuk seluruh Perangkat Daerah	
Kelautan dan Perikanan	Kurangnya pengawasan aktivitas jual beli ikan, terutama hasil perikanan tangkap	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas perikanan
	Belum optimalnya produksi hasil olahan ikan	
	Masih kurangnya tingkat konsumsi ikan	
Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD masih sangat rendah	Perlunya merancang konsep pariwisata



Urusan	Permasalahan	Isu Strategis per Urusan
	Pengembangan infrastruktur, daya tarik dan tata kelola destinasi pariwisata (akses, amenities dan atraksi wisata) belum tertata dengan baik dan belum terintegrasi dengan lintas sektor	sebagai sektor perekonomian potensial
	Rendahnya Investasi di Sektor Pariwisata	
	Kepemilikan lahan pengembangan destinasi masih sangat kurang serta dokumen (sertifikasi) kepemilikan lahan belum tertata dengan baik	
	Belum maksimalnya analisa pasar wisatawan, branding dan aktivitas promosi serta belum adanya event tetap daerah	
	Belum adanya destinasi unggulan daerah serta dukungan pengembangan sentra produk ekonomi kreatif lokal di setiap kawasan destinasi	
	Masih kurangnya program dukungan terhadap Ekonomi Kreatif sesuai Amanah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif	
Pertanian	Cenderung tidak stabilnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Kurang stabilnya tingkat produktivitas sektor pertanian
	Menurunnya Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	
	Pada umumnya produksi tanaman pangan di Kabupaten Mamuju mengalami fluktuasi	
	Belum optimalnya pendataan dan penerbitan STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya)	
	Perubahan iklim global yang berpengaruh pada hasil pertanian dan perkebunan	
	Masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian dan nilai tambah petani.	
	Belum optimalnya aktivitas ekonomi pertanian dari hulu ke hilir.	



Urusan	Permasalahan	Isu Strategis per Urusan
	Menurunnya luas lahan pertanian akibat adanya alih fungsi lahan dan revisi permen PU terkait daerah irigasi kewenangan kabupaten	
	Ketersediaan data pertanian belum memadai.	
	Rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian.	
	Tingginya gangguan hama dan penyakit tanaman pertanian dan perkebunan, serta peternakan.	
Perdagangan	Kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok	Menciptakan kondusivitas dan peningkatan sarana-prasarana pada kegiatan perdagangan
	Produk dan Promosi produk industri lokal (asal Kabupaten Mamuju) masih dirasa kurang	
	Persaingan antara UMKM/pasar tradisional dengan pasar modern	
	Sertifikasi produk UMKM masih kurang	
	Distribusi produk UMKM ke pasar modern belum terakomodir	
	Kualitas dan kuantitas Infrastruktur pasar tradisional belum memadai	
	Belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan	
	Masih kurangnya cakupan pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan terutama yang berkaitan dengan kelayakan produk perdagangan	
Perindustrian	Belum optimalnya pertumbuhan industri	Perlunya meningkatkan pembinaan industri
	Kualitas industri belum memenuhi standar, dilihat dari rendahnya jumlah industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi dan jumlah industri yang telah menerapkan teknologi baru	
	Banyaknya IKM yang belum memiliki Izin Usaha Industri Kecil (P-IRT dan Halal)	



Urusan	Permasalahan	Isu Strategis per Urusan
Transmigrasi	Belum adanya penempatan Transmigran swakarsa	Meningkatkan kinerja transmigrasi pada seluruh aspek dan tahapan
	Belum Optimalnya fasilitasi hubungan kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi	
	Perlunya pengembangan permukiman transmigrasi sesuai dengan standar minat kebutuhan masyarakat	
Sekretariat Daerah	Belum optimalnya kualitas penataan peraturan perundang-undangan daerah, hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan target penetapan perda, penyusunan berbagai peraturan bupati dan peningkatan kapasitas SDM bidang hukum	Meningkatkan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan daerah dan kelembagaan perangkat daerah
	Belum semua perangkat daerah menyusun SOP, SPP dan SKM dengan baik	
	Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi terhadap pembangunan daerah	
	Rendahnya ketersediaan dan kualitas SDM pengadaan barang dan jasa	
	Masih rendahnya Nilai Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), yaitu baru mencapai CC pada tahun 2020	
Sekretariat DPRD	Belum optimalnya standar operasional prosedur dilaksanakan	Meningkatkan akuntabilitas dalam program dukungan DPRD
	Kebutuhan operasional AKD lebih besar dibanding ketersediaan dukungan operasional AKD	
	Program DPRD untuk melaksanakan fungsinya dilakukan dengan dukungan operasional yang tidak sesuai dengan kebutuhan operasional yang rasional dan ideal	
Perencanaan	Kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan belum optimal	Meningkatkan koordinasi dan



Urusan	Permasalahan	Isu Strategis per Urusan
	Program Kegiatan OPD belum sepenuhnya memberikan kontribusi terhadap capaian indikator kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	sinkronisasi pembangunan
Keuangan	Proses penyusunan APBD yang belum sesuai dengan tahapan dalam peraturan yang berlaku	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
	Kurangnya instrumen penganggaran/Peraturan/Juklak/Juknis/SOP yang digunakan dalam proses penyusunan APBD	
	Kurangnya pemahaman SKPD dalam proses penyusunan dokumen penganggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan Dokumen	
	Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD);	
	Masih kurang jelasnya alur penyusunan anggaran belanja Hibah dan Bantuan Sosial;	
	Masih banyak SDM Pengelola Akuntansi di SKPD yang bukan berlatar belakang pendidikan Akuntansi sehingga masih memerlukan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan	
	Kurangnya pemahaman pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset terhadap penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual	
	Belum tertibnya administrasi pengendalian belanja di SKPD	
	Pelaksanaan penyerapan anggaran sebagian besar menumpuk di akhir tahun anggaran	
	Regulasi terkait pengelolaan aset belum memadai	
	Belum optimalnya akurasi data aset pada tiap-tiap SKPD	
	Pensertifikatan Aset berupa Lahan milik Pemerintah Kabupaten Mamuju belum optimal terkait warkah bukti kepemilikan	
	Prosedur penilaian BMD belum memadai	



Urusan	Permasalahan	Isu Strategis per Urusan
	Realisasi pendapatan asli daerah belum optimal, disebabkan karena regulasi yang mendukung pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya perda yang belum ditetapkan baik berkaitan dengan pajak daerah maupun retribusi daerah	
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Masih adanya kasus indisipliner pegawai dan belum optimalnya penegakan disiplin aparatur	Meningkatkan penegakan disiplin dan optimalisasi SDM
	Belum Optimal tenaga fungsional daerah	
Penelitian dan Pengembangan	Terkait presentase implementasi rencana kelitbangan dan pemanfaatan hasil kelitbangan belum menjadi acuan utama dalam penerapan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan implementasi hasil riset dan inovasi pada pembangunan daerah
	Presentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah masih sangat terbatas	
	Kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah masih sangat lemah	
Inspektorat	Meningkatnya regulasi yang baru dalam pelaksanaan pengawasan sehingga memerlukan pemahaman dari pemeriksa dan obyek pemeriksaan (perangkat daerah).	Meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur pengawasan
	Masih kurangnya kapasitas SDM pemeriksa sehingga tingkat kelulusan dalam diklat penjenjangan belum optimal	
	Kurangnya kepedulian perangkat daerah untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan	
Kewilayahan	Belum meratanya Infrastruktur antar wilayah Kecamatan	Meningkatkan pemerataan infrastruktur antarkecamatan dan pelayanan publik
	Belum optimalnya kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan	
	Belum optimalnya implementasi pelimpahan kewenangan kepada Camat	
	Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat	Meningkatkan pemahaman



Urusan	Permasalahan	Isu Strategis per Urusan
Kesatuan Bangsa dan Politik	Masih Kurangnya Pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	masyarakat terkait wawasan kebangsaan dan demokrasi
	Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat	
	Terbatasnya jumlah pembinaan politik daerah guna meningkatkan partisipasi politik dalam pemilu	
	Masih rendahnya tingkat partisipasi pemilih	
	Penyelesaian Konflik SARA belum dapat ditangani secara maksimal	
	Masih tingginya angka penyalahgunaan NAPZA	
	Belum optimalnya upaya deteksi dini dalam penanganan konflik sosial	

Sumber : Hasil Analisis (2024)

Secara teknis, proses tahapan penentuan isu strategis diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting, dan permasalahan-permasalahan pembangunan Kabupaten Mamuju, yang ditinjau dari kebijakan-kebijakan terkait mengenai pembangunan Kabupaten Mamuju. Penentuan isu tersebut terasaji dalam Daftar Panjang Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Mamuju berdasarkan urusan pembangunan di Kabupaten Mamuju. Berikut Penentuan daftar panjang Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Mamuju.

Tabel 3.7 Daftar Panjang Isu Strategis per Urusan Kabupaten Mamuju dan Penentuan Isu Strategis Daerah

Urusan	Daftar Panjang Isu Strategis	Isu Strategis Daerah
Pendidikan	Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan	IS.3 Pembangunan Sumber Daya Manusia



Urusan	Daftar Panjang Isu Strategis	Isu Strategis Daerah
Kesehatan	Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dan pemahaman masyarakat tentang kesehatan	IS.3 Pembangunan Sumber Daya Manusia
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perlunya pembangunan konektivitas antarwilayah dan pemeliharaan sarana dan prasarana	IS.2 Pembangunan yang Aman dan Berkelanjutan dengan Berwawasan Lingkungan Hidup
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perlunya penanggulangan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni	IS.2 Pembangunan yang Aman dan Berkelanjutan dengan Berwawasan Lingkungan Hidup
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Perlunya peningkatan penegakan Perda, penjagaan ketertiban, dan waktu tanggap kebakaran	IS.4 Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perlu meningkatkan manajemen mitigasi bencana	IS.4 Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi
Tenaga Kerja	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan penanganan konflik hubungan industrial	IS.3 Pembangunan Sumber Daya Manusia
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan pembinaan masyarakat dan lembaga terkait kesetaraan gender dan perlindungan anak	IS.3 Pembangunan Sumber Daya Manusia
Pangan	Perlu meningkatkan ketahanan pangan	IS.3 Pembangunan Sumber Daya Manusia
Pertanahan	Meningkatkan pengamanan lahan sebagai aset daerah	IS.1 Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi



Urusan	Daftar Panjang Isu Strategis	Isu Strategis Daerah
Lingkungan Hidup	Terdapat potensi penurunan daya dukung ekologi	IS.2 Pembangunan yang Aman dan Berkelanjutan dengan Berwawasan Lingkungan Hidup
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perlunya optimalisasi pelayanan dan sosialisasi tentang kependudukan dan pencatatan sipil	IS.1 Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Perlunya optimalisasi pembinaan masyarakat dan desa, khususnya desa, aparatur, dan LPM	IS.3 Pembangunan Sumber Daya Manusia
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perlunya pencegahan kehamilan dini, perencanaan kehamilan, dan pembinaan masyarakat terkait KB	IS.3 Pembangunan Sumber Daya Manusia
Perhubungan	Mengoptimalkan pengelolaan kendaraan bermotor angkutan umum	IS.2 Pembangunan yang Aman dan Berkelanjutan dengan Berwawasan Lingkungan Hidup
Komunikasi dan Informatika	Pelayanan infrastruktur komunikasi bdi seluruh wilayah	IS.1 Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Meningkatkan pertumbuhan dan pembinaan terhadap koperasi dan UMKM	IS.4 Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi
Penanaman Modal	Perlunya peningkatan layanan dan sosialisasi tentang penanaman modal	IS.4 Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi
Kepemudaan dan Olah Raga	Meningkatkan produktivitas pemuda dan prestasi olah raga	IS.3 Pembangunan Sumber Daya Manusia



Urusan	Daftar Panjang Isu Strategis	Isu Strategis Daerah
Statistik	Perlunya integrasi data statistik sektoral dari seluruh perangkat daerah	IS.1 Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi
Persandian	Meningkatkan kompetensi SDM di bidang persandian	IS.1 Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi
Kebudayaan	Meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya daerah	IS.3 Pembangunan Sumber Daya Manusia
Perpustakaan	Meningkatkan layanan perpustakaan kepada publik untuk mencapai pembangunan literasi	IS.3 Pembangunan Sumber Daya Manusia
Kearsipan	Perlunya membangun sistem kearsipan dan kompetensi SDM tentang kearsipan	IS.1 Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi
Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas perikanan	IS.4 Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi
Pariwisata	Perlunya merancang konsep pariwisata sebagai sektor perekonomian potensial	IS.4 Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi
Pertanian	Kurang stabilnya tingkat produktivitas sektor pertanian	IS.4 Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi
Perdagangan	Menciptakan kondusivitas dan peningkatan sarana-prasarana pada kegiatan perdagangan	IS.4 Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi
Perindustrian	Perlunya meningkatkan pembinaan industri	IS.4 Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi



Urusan	Daftar Panjang Isu Strategis	Isu Strategis Daerah
Transmigrasi	Meningkatkan kinerja transmigrasi pada seluruh aspek dan tahapan	IS.4 Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi
Sekretariat Daerah	Meningkatkan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan daerah dan kelembagaan perangkat daerah	IS.1 Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi
Sekretariat DPRD	Meningkatkan akuntabilitas dalam program dukungan DPRD	IS.1 Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi
Perencanaan	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan	IS.1 Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi
Keuangan	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	IS.1 Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatkan penegakan disiplin dan optimalisasi SDM	IS.1 Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi
Penelitian dan Pengembangan	Meningkatkan implementasi hasil riset dan inovasi pada pembangunan daerah	IS.1 Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi
Inspektorat	Meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur pengawasan	IS.1 Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi
Kewilayahan	Meningkatkan pemerataan infrastruktur antarkecamatan dan pelayanan publik	IS.1 Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi



Urusan	Daftar Panjang Isu Strategis	Isu Strategis Daerah
Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatkan pemahaman masyarakat terkait wawasan kebangsaan dan demokrasi	IS.4 Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi

Sumber : Hasil Analisis (2024)

Tabel 3.8 Integrasi Isu Strategis RPJPN 2025-2045, RPJPD Sulawesi Barat 2025-2045, dan RPJMD Kabupaten Mamuju 2021-2026

Isu Strategis			
RPJPN 2025-2045	RPJPD Sulawesi Barat 2025-2045	RPJMD Mamuju 2021-2026	RPJPD Mamuju 2025-2045
1. Megatren	1. Kerjasama Regional Sulawesi	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	IS.1 Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi
1. Megatren 2. Daya Tampung	1. Konektivitas Wilayah 2. Lingkungan Hidup	Pengendalian Tata Ruang dan Penyediaan Infrastruktur Dasar Berwawasan Lingkungan	IS.2 Pembangunan yang Aman dan Berkelanjutan dengan Berwawasan Lingkungan Hidup
1. Megatren 2. Kependudukan		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	IS.3 Pembangunan Sumber Daya Manusia
1. Megatren 2.	1. Kerjasama Regional Sulawesi	Kondusifitas Wilayah	IS.4 Pertumbuhan



Isu Strategis			
RPJPN 2025-2045	RPJPD Sulawesi Barat 2025-2045	RPJMD Mamuju 2021-2026	RPJPD Mamuju 2025-2045
Kependudukan 3. Modal Sosial dan Budaya 4. Kekayaan Alam 5. Kekuatan Maritim 6. Perubahan Iklim 7. Daya Dukung	2. Kebencanaan	Dampak Covid-19 dan Bencana Alam Gempa Bumi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	dan Ketahanan Ekonomi

Sumber : Hasil Analisis (2024)



Pemerintah
Kabupaten Mamuju

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH



BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

4.1 Visi Kabupaten Mamuju 2025-2045

Visi pembangunan daerah harus dapat menjawab permasalahan daerah maupun isu-isu strategis daerah serta dapat diselesaikan dalam jangka menengah maupun dalam jangka panjang pembangunan daerah. Visi pembangunan daerah dalam RPJPD selain berdasarkan kepada permasalahan dan isu strategis daerah, visi tersebut juga berdasarkan kepada hasil telaah dan analisis terhadap Dokumen Perencanaan Induk lainnya, seperti RPJPD Provinsi Sulawesi Barat 2025-2045 dan RPJPN 2025-2045, sehingga dapat menghasilkan Visi yang selaras dan berkualitas selama 20 (dua puluh) tahun kedepan.

Perumusan visi Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2045 juga tetap memperhatikan **visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045**, yaitu ***“Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”***, kemudian memperhatikan **RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045** dengan visi ***“Sulawesi Barat yang Malaqbi, Maju, Berkelanjutan Dalam Ekosistem Hijau dan Biru yang Inklusif”***. Sebagai upaya keselarasan dan sinergi dalam upaya pembangunan daerah, maka visi pembangunan Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2045 yaitu ***“Kabupaten Mamuju Keren (Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman) yang Maju Adil dan Berkelanjutan”***. Berikut ini adalah penyandingan keselarasan visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional, visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Barat, dan Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2045.



Tabel 4.1 Visi Nasional-Provinsi Sulawesi Barat-Kabupaten Mamuju 2025-2045

Visi RPJPN	Visi RPJPD Provinsi	Visi RPJPD Kabupaten
Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan	Sulawesi Barat yang Malaqbi, Maju, Berkelanjutan Dalam Ekosistem Hijau dan Biru yang Inklusif	Kabupaten Mamuju Keren (Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman) yang Maju, Adil, dan Berkelanjutan

Sumber: Tim Penyusun Perencanaan Jangka Panjang Daerah Kab. Mamuju, 2024

Tabel 4.2 Keselarasan Definisi Visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional-Provinsi Sulawesi Barat-Kabupaten Mamuju 2025-2045

Keselarasan Visi Nasional-Provinsi-Kabupaten					
Visi RPJPN	Definisi Visi RPJPN	Visi RPJPD Provinsi	Definisi Visi RPJPD Provinsi	Visi RPJPD Kabupaten	Definisi Visi RPJPD Kabupaten
Berdaulat	Ketahanan, Kesatuan, Mandiri, dan Aman	Malaqbi	Keinginan untuk mencapai derajat manusia mulia dan bermartabat, dimana seluruh sikap dan perilakunya mencerminkan manusia yang beradab, yang mengedepankan nilai-nilai akhlak, etika, moral, dan agama.	Maju	Kabupaten Mamuju pada Tahun 2045: 1. Pembangunan SDM yang Berkualitas 2. Pembangunan Ekonomi dan Sosial 3. Tata Kelola Pemerintahan



Keselarasan Visi Nasional-Provinsi-Kabupaten					
Visi RPJPN	Definisi Visi RPJPN	Visi RPJPD Provinsi	Definisi Visi RPJPD Provinsi	Visi RPJPD Kabupaten	Definisi Visi RPJPD Kabupaten
Maju	Berdaya, Modern, Tangguh, Inovatif, dan Adil	Maju	Pencapaian kondisi daerah yang maju dan kehidupan masyarakat yang lebih berkualitas.	Adil	Kabupaten Mamuju pada Tahun 2045: 1. Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang
Berkelanjutan	Lestari, dan Seimbang antara Pembangunan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan	Berkelanjutan	Pembangunan ekosistem ekonomi hijau dan biru Provinsi Sulawesi Barat mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan mengharmonisasikan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan, dan pembangunan tata-kelola.	Berkelanjutan	Kabupaten Mamuju pada Tahun 2045: 1. Lingkungan Hidup 2. Keamanan dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat 3. Kesatuan Bangsa dan Politik
		Ekosistem Ekonomi Hijau	kondisi perekonomian Sulawesi Barat yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya serta inklusif secara sosial sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan, keadilan		



Keselarasan Visi Nasional-Provinsi-Kabupaten					
Visi RPJPN	Definisi Visi RPJPN	Visi RPJPD Provinsi	Definisi Visi RPJPD Provinsi	Visi RPJPD Kabupaten	Definisi Visi RPJPD Kabupaten
			sosial, pengurangan resiko lingkungan dan kelangkaan ekologi melalui pengelolaan lingkungan dan potensi sumberdaya alam dalam rangka pencapaian Sulawesi Barat yang Malaqbi, Maju dan Berkelanjutan secara menyeluruh.		
		Ekonomi Biru	Upaya pemanfaatan sumberdaya laut secara berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif melalui berbagai sektor penting diantaranya perikanan, energi terbarukan, pariwisata, transportasi air, serta mitigasi perubahan iklim guna tercapainya Sulawesi Barat yang Malaqbi, Maju dan Berkelanjutan.		

Sumber: Tim Penyusun Perencanaan Jangka Panjang Daerah Kab. Mamuju, 2024



Melalui visi pembangunan Kabupaten Mamuju selama 20 (dua puluh) tahun tersebut, diharapkan seluruh *stakeholder* di Kabupaten Mamuju mampu untuk secara bersama-sama meningkatkan dan mengoptimalkan sumber daya serta kapasitasnya, sehingga terwujud ***“Kabupaten Mamuju Keren (Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman) yang Maju Adil dan Berkelanjutan”***. Visi pembangunan tersebut memiliki makna yang mendalam dengan tujuan yang besar. Adapun penyelarasan visi perumusan dan penjelasan terhadap visi Kabupaten Mamuju diatas menghasilkan pilar-pilar visi yang masing-masing pilar memiliki makna atau penjelasan tersendiri sebagaimana tabel dibawah ini:



**Tabel 4.3 Penjelasan Pokok-Pokok Visi Pembangunan
Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2045**

Visi Kabupaten	Visi	Telaah Visi
Kabupaten Mamuju Keren (Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman) yang Maju, Adil, dan Berkelanjutan	Maju	Kabupaten Mamuju Maju adalah Kabupaten yang Hebat dan Kuat melalui Pembangunan SDM, Pembangunan Ekonomi dan Sosial, serta Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dengan Berbasis Teknologi Informasi
	Adil	Kabupaten Mamuju Adil adalah Kabupaten dengan Konektivitas Terdepan melalui Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Tangguh dan Modern
	Berkelanjutan	Kabupaten Mamuju Berkelanjutan adalah Pembangunan Kabupaten yang Berdaya Saing Berwawasan Lingkungan Hidup Aman dan Nyaman

Sumber: Tim Penyusun Perencanaan Jangka Panjang Daerah Kab. Mamuju, 2024

4.2 Sasaran Visi Kabupaten Mamuju 2025-2045

Sasaran Visi adalah bentuk perwujudan perencanaan yang lebih teknis dari visi. Sasaran visi disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota terkait, sehingga dalam hal ini terdapat 5 (lima) sasaran visi Kabupaten Mamuju tahun 2025-2045.

Tabel 4.4 Sasaran Visi Kabupaten Mamuju 2025-2045

Sasaran Visi	Indikator	Periode			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Peningkatan Pendapatan Per Kapita	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	63,62	75,45	87,29	101,49
	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)				



Sasaran Visi	Indikator	Periode			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	4,72	5,36	5,99	6,76
Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	5,95	4,69	3,43	1,92
	Rasio Gini (Indeks)	0,348	0,328	0,308	0,284
	Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi (%)	26,24	26,56	26,89	27,45
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,87	7,27	7,67	8,15
Peningkatan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,70	3,80	3,90	4,02
Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	75,62	79,20	83,04	87,48
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Menuju <i>Net Zero Emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	68,05	76,05	84,05	93,65
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	86,20	86,46	86,59	87,12

Sumber: Telaah Tim Penyusun Perencanaan Jangka Panjang Daerah Kab. Mamuju, 2024

4.3 Misi Kabupaten Mamuju 2025-2045

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi, maka terdapat misi pembangunan. Rumusan misi yang tertuang dalam Dokumen



RPJPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2045 dikembangkan dengan memperhatikan visi pembangunan jangka panjang Daerah, misi pembangunan jangka panjang Nasional, dan misi pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Barat. Mengingat, misi berperan sebagai pedoman (*guidence*) dalam memfokuskan pencapaian tujuan, kemudian menjadi dasar dalam pengalokasian sumber daya, dan menetapkan kerangka tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai dasar bagi pengembangan tujuan organisasi.

Rumusan misi juga berperan sebagai alat motivasi (*motivator*), yaitu sebagai sumber inspirasi kepada pihak-pihak terkait. Rumusan Misi juga dapat berfungsi sebagai alat promosi (*billboard*), yaitu mampu menarik *stakeholder* tertentu (Pemerintah, Masyarakat, dan lain-lain). Dapat disimpulkan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2045 disusun untuk memperjelas langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi pembangunan jangka panjang Daerah periode 2025-2045. Adapun keselarasan dan penjelasan misi pembangunan Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut.



Tabel 4.5 Keselarasan Misi Nasional-Provinsi Sulawesi Barat-Kabupaten Mamuju 2025-2045

Misi RPJPN 2025-2045	Misi RPJPD Kabupaten Mamuju 2025-2045	Misi RPJPD Provinsi
Misi 1. Mewujudkan Transformasi Sosial	Misi 1. Mewujudkan Transformasi Sosial yang Berkualitas	Misi 1. Mewujudkan Transformasi Sosial
Misi 2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi	Misi 2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Berkualitas	Misi 2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi
Misi 3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	Misi 3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Berkualitas	Misi 3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola
Misi 4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia	Misi 4. Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh Demokrasi, Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Misi 4. Menciptakan Keamanan Daerah Tangguh Demokrasi, Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
Misi 5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi	Misi 5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Misi 5. Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
Misi 6. Pembangunan Kewilayahan	Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Misi 6. Mengedepankan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
Misi 7. Dukungan sarana dan prasarana yang	Misi 7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Misi 7. Mengutamakan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan



Misi RPJPN 2025-2045	Misi RPJPD Kabupaten Mamuju 2025-2045	Misi RPJPD Provinsi
berkualitas dan ramah lingkungan		
Misi 8. Kestinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas	Misi 8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan	Misi 8. Menjaga Kestinambungan Pembangunan

Sumber: Telaah Tim Penyusun Perencanaan Jangka Panjang Daerah Kab. Mamuju, 2024



1. Misi 1. Mewujudkan Transformasi Sosial yang Berkualitas.

Misi 1 akan difokuskan kepada upaya untuk Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berpendidikan, dan untuk Mewujudkan Pembangunan Kesehatan yang Berkualitas. Sumberdaya manusia yang berkualitas menjadi modal utama didalam mewujudkan Kabupaten Mamuju yang lebih maju. Sumber daya manusia yang berdaya saing yaitu adalah sumber daya manusia Kabupaten Mamuju yang cerdas, dan memiliki pendidikan yang berkarakter berdasarkan pada nilai-nilai lokal. Sumberdaya manusia yang berkualitas tidak hanya melalui penguatan pembangunan pada sektor pendidikan saja, melainkan juga pada sektor kesehatan. Melalui pembangunan kesehatan yang berkualitas maka akan membentuk Sumber daya manusia Kabupaten Mamuju yang sehat.

2. Misi 2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Berkualitas.

Misi 2 akan difokuskan kepada upaya untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pertumbuhan Ekonomi, Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengentasan Kemiskinan, dan Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat.

Kesejahteraan Masyarakat merupakan syarat mutlak tercapainya Visi Kabupaten Mamuju. Kesejahteraan Masyarakat tidak hanya dapat ditingkatkan melalui Pertumbuhan Ekonomi yang baik, melainkan pula melalui upaya Pengentasan Kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang menurun menjadi parameter keberhasilan terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat yang kuat menjadi salah satu fokus pembangunan Kabupaten



Mamuju 2025-2045 dengan harapan mampu meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

3. Misi 3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Berkualitas.

Misi 3 difokuskan kepada upaya untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas.

Aparatur merupakan aktor utama dalam pembangunan maka aparatur pemerintah harus berkualitas dengan didukung oleh sistem tata kelola yang berkualitas sehingga berdampak terhadap pembangunan daerah. Prinsip tata kelola yang telah diakui mampu memberikan pengaruh positif adalah prinsip *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik). Prinsip-prinsip yang terkandung dalam *good governance* yaitu *participation; rule of law; transparency; responsiveness; consensus oriented; equity; effectiveness dan efficiency; dan accountability*.

4. Misi 4. Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh Demokrasi, Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah dan Misi 5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.

Misi 4 dan Misi 5 akan difokuskan kepada upaya untuk membentuk daerah yang tangguh bencana sehingga aman dan nyaman. Kabupaten Mamuju pada Tahun 2022 berdasarkan data Indeks Risiko Bencana (IRB) diangka 161,71. Angka tersebut adalah angka yang memiliki predikat tinggi, sehingga dalam hal ini harus menjadi fokus pembangunan jangka panjang selama 20 tahun. Oleh karena itu, difokuskan kepada upaya membentuk daerah yang tangguh bencana sehingga aman dan nyaman.



5. Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, dan Misi 7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta Misi 8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan.

Misi 6 dan Misi 7 serta Misi 8 akan difokuskan kepada upaya untuk Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Hidup yang Berkualitas.

Infrastruktur merupakan salah satu komponen penting untuk menunjang perekonomian maupun pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Mamuju, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan jangka panjang daerah agar pembangunan yang dilakukan dapat terlaksana secara adil. Namun dalam pemanfaatan infrastruktur, Pemerintah perlu memperhatikan daya dukung lingkungan yang ada serta fungsi ruang sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan penyalahgunaan pemanfaatan ruang.



Pemerintah
Kabupaten Mamuju

BAB V

**ARAH KEBIJAKAN DAN
SASARAN POKOK
DAERAH**



BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Arah kebijakan merupakan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai visi dan misi RPJPD dengan efektif dan efisien. Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Perencanaan strategi tidak hanya mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Capaian pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Kabupaten Mamuju harus dapat dipertahankan dan bisa ditingkatkan melalui adaptasi perkembangan internal maupun eksternal yang ada di Kabupaten Mamuju. Arah kebijakan dan Sasaran Pokok menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah agar lebih terarah dalam menetapkan dan mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah.



5.1 Arah Kebijakan Kabupaten Mamuju 2025-2045

Tabel 5.1 Arah Kebijakan Kabupaten Mamuju 2025-2045

Visi	Misi	Arah Kebijakan Transformasi	Arah Kebijakan Kab. Mamuju 2025-2045			
			I (2025-2029) Penguatan Fondasi Transformasi	II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	III (2035-2039) Mamuju Unggul	IV (2040-2045) Mamuju Keren yang Adil Maju Berkelanjutan
Kabupaten Mamuju Keren (Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman) yang Maju, Adil, dan Berkelanjutan	Misi 1. Mewujudkan Transformasi Sosial yang Berkualitas	• Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat • percepatan penanganan stunting serta percepatan eliminasi penyakit menular • pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan berkualitas • Pengembangan sistem telemedicines yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan).	Optimalisasi Pemerataan Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan	Penguatann Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan	Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam Pembangunan SDM	SDM yang Berdaya Saing



Visi	Misi	Arah Kebijakan Transformasi	Arah Kebijakan Kab. Mamuju 2025-2045			
			I (2025-2029) Penguatan Fondasi Transformasi	II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	III (2035-2039) Mamuju Unggul	IV (2040-2045) Mamuju Keren yang Adil Maju Berkelanjutan
		• percepatan wajib belajar 13 tahun • Pemerataan Kualitas antar satuan Pendidikan • Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif • Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka				



Visi	Misi	Arah Kebijakan Transformasi	Arah Kebijakan Kab. Mamuju 2025-2045			
			I (2025-2029) Penguatan Fondasi Transformasi	II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	III (2035-2039) Mamuju Unggul	IV (2040-2045) Mamuju Keren yang Adil Maju Berkelanjutan
		• Pengentasan kemiskinan terutama pada melalui perlindungan sosial adaptif. • Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas • Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat	Penguatan Rehabilitasi dan Jaminan Sosial	Penguatan Pemberdayaan Sosial	Penguatan Perlindungan Sosial	Penguatan Kesejahteraan Sosial



Visi	Misi	Arah Kebijakan Transformasi	Arah Kebijakan Kab. Mamuju 2025-2045			
			I (2025-2029) Penguatan Fondasi Transformasi	II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	III (2035-2039) Mamuju Unggul	IV (2040-2045) Mamuju Keren yang Adil Maju Berkelanjutan
		maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.				
	Misi 2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Berkualitas	• Peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang berkelanjutan, serta pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya. • Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri pengolahan • Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan	• Optimalisasi Daya Saing Komoditas Unggulan Daerah (Produktivitas, Nilai Tambah, Distribusi, Lembaga, SDM, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi) • Optimalisasi Ekonomi Kreatif Daerah	• Optimalisasi Investasi Daerah • Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja • Optimalisasi Infrastruktur Ekonomi	• Penguatan Daya Saing Komoditas Unggulan Daerah (Produktivitas, Nilai Tambah, Distribusi, Lembaga, SDM, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi) • Penguatan Ekonomi Kreatif Daerah	• Penguatan Investasi Daerah • Penguatan Kualitas Tenaga Kerja • Penguatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Ekonomi



Visi	Misi	Arah Kebijakan Transformasi	Arah Kebijakan Kab. Mamuju 2025-2045			
			I (2025-2029) Penguatan Fondasi Transformasi	II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	III (2035-2039) Mamuju Unggul	IV (2040-2045) Mamuju Keren yang Adil Maju Berkelanjutan
		• Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui pertanian regenerative • Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah • Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok • Peningkatan rantai nilai melalui penguatan kerjasama antardaerah dan				



Visi	Misi	Arah Kebijakan Transformasi	Arah Kebijakan Kab. Mamuju 2025-2045			
			I (2025-2029) Penguatan Fondasi Transformasi	II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	III (2035-2039) Mamuju Unggul	IV (2040-2045) Mamuju Keren yang Adil Maju Berkelanjutan
		pengembangan ekspor komoditas unggulan.				
		• Optimalisasi peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif				
	Misi 3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Berkualitas	• Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah • Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. • Penguatan integritas partai politik. • Peningkatan cepat tanggap terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.	• Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel • Mewujudkan Budaya Birokrasi BerAkhlak			



Visi	Misi	Arah Kebijakan Transformasi	Arah Kebijakan Kab. Mamuju 2025-2045			
			I (2025-2029) Penguatan Fondasi Transformasi	II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	III (2035-2039) Mamuju Unggul	IV (2040-2045) Mamuju Keren yang Adil Maju Berkelanjutan
	Misi 4. Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh Demokrasi, Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	• Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal. • Penguatan pengendalian inflasi daerah. • Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah	Mengoptimalkan pelaksanaan hukum melalui penerapan Perda secara konsisten serta menciptakan kondisi yang tertib guna mewujudkan lingkungan yang aman dan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat.	Memperkuat penegakan hukum guna mewujudkan kondisi yang tertib dan aman di tengah masyarakat	Memantapkan pelaksanaan hukum sebagai landasan yang kuat dalam mewujudkan masyarakat yang kokoh dan berdaya saing	Masyarakat yang berdaulat, aman, dan hidup dalam suasana damai



Visi	Misi	Arah Kebijakan Transformasi	Arah Kebijakan Kab. Mamuju 2025-2045			
			I (2025-2029) Penguatan Fondasi Transformasi	II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	III (2035-2039) Mamuju Unggul	IV (2040-2045) Mamuju Keren yang Adil Maju Berkelanjutan
		dengan Prioritas Nasional.				
		Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial				
	Misi 5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	- Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama - peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. - Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk	1. Meningkatkan Konektivitas Wilayah melalui pemenuhan dan pemerataan infrastruktur Daerah yang Berwawasan Lingkungan Hidup 2. Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Risiko Bencana 3. Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		1. Optimalisasi Konektivitas Wilayah melalui pemenuhan dan pemerataan infrastruktur Daerah yang Berwawasan Lingkungan Hidup 2. Meningkatkan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 3. Penguatan Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Risiko Bencana 4. Penguatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	



Visi	Misi	Arah Kebijakan Transformasi	Arah Kebijakan Kab. Mamuju 2025-2045			
			I (2025-2029) Penguatan Fondasi Transformasi	II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	III (2035-2039) Mamuju Unggul	IV (2040-2045) Mamuju Keren yang Adil Maju Berkelanjutan
		perkawinan anak dan perdagangan orang.				
		• Perencanaan tata ruang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, luasan hutan, serta wilayah jelajah satwa spesies dilindungi.				
		• Ketahanan energi dengan pendekatan terpadu FEW (Food, Energy, and Water) Nexus				
		• Peningkatan Kapasitas SDM Petani dalam menerapkan pertanian cerdas Iklim				
		• Penerapan Teknologi <i>Climate smart agriculture</i> melalui penyediaan Bibit berkualitas.				
		• Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit				



Visi	Misi	Arah Kebijakan Transformasi	Arah Kebijakan Kab. Mamuju 2025-2045			
			I (2025-2029) Penguatan Fondasi Transformasi	II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	III (2035-2039) Mamuju Unggul	IV (2040-2045) Mamuju Keren yang Adil Maju Berkelanjutan
		yang dipengaruhi oleh iklim				
	Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan		Mendorong pemerataan peningkatan kualitas infrastruktur dan memperkuat konektivitas antar daerah melalui pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan, disertai percepatan penyusunan rencana pengembangan wilayah (termasuk RTRW dan RDTR), penguatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, percepatan pengadaan serta pencadangan tanah untuk kepentingan umum, dan percepatan pelaksanaan reforma agraria	Akselerasi pemerataan kualitas infrastruktur didorong melalui peningkatan konektivitas wilayah, yang didukung oleh penguatan pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang, percepatan pengadaan dan pencadangan tanah untuk kepentingan umum, serta percepatan pelaksanaan reforma agraria	Pemantapan pemerataan infrastruktur pelabuhan laut dan udara didukung penguatan tata ruang, pengadaan tanah, dan reforma agraria	Perwujudan pemerataan pembangunan Kabupaten Mamuju didukung pemantapan tata ruang, pengadaan tanah, dan reforma agraria.



Visi	Misi	Arah Kebijakan Transformasi	Arah Kebijakan Kab. Mamuju 2025-2045			
			I (2025-2029) Penguatan Fondasi Transformasi	II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	III (2035-2039) Mamuju Unggul	IV (2040-2045) Mamuju Keren yang Adil Maju Berkelanjutan
	Misi 7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan		Peningkatan sarana prasarana sumber daya air, keterjangkauan dan kualitas transportasi, penguatan energi dan komunikasi, serta penyediaan rumah layak huni dan perbaikan permukiman	Peningkatan sarana dan prasarana sumber daya air, pemerataan transportasi, integrasi antarmoda berbasis teknologi, penguatan energi dan komunikasi, serta penyediaan rumah layak huni dan perbaikan permukiman	Pemenuhan sarana dan prasarana Sumber Daya Air, peningkatan akses dan kualitas transportasi, penguatan jaringan energi dan komunikasi, serta penyediaan hunian layak dan penataan permukiman	Pemenuhan sarana dan prasarana Sumber Daya Air, pemerataan simpul transportasi, integrasi antarmoda berbasis teknologi, penguatan energi dan komunikasi, serta peningkatan hunian layak dan permukiman
	Misi 8. Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan		Penguatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, serta pengembangan pembiayaan daerah yang alternatif dan kreatif	Penguatan fiskal dan akuntabilitas daerah, serta optimalisasi pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan Blended Finance dari sumber nonpemerintah	Memaksimalkan kapasitas fiskal dan memperluas pembiayaan kreatif dari sumber nonpemerintah	Mewujudkan kapasitas fiskal daerah yang semakin kuat melalui sinergi dan pemanfaatan pendanaan dari pemerintah dan non-pemerintah secara optimal

Sumber: Tim Penyusun Perencanaan Jangka Panjang Daerah Kab. Mamuju, 2024



5.2 Sasaran Pokok Kabupaten Mamuju 2025-2045

5.2.1 Arah Pembangunan Daerah

Tabel 5.2 Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok Kabupaten Mamuju 2025-2045

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Pokok	Keterangan
1	Misi 1. Mewujudkan Transformasi Sosial yang Berkualitas	IE1 Kesehatan untuk Semua	• perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat • percepatan penanganan stunting serta percepatan eliminasi penyakit menular • pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan berkualitas • Pengembangan sistem telemedicines yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan).	1 Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,49	79,79	Mewujudkan Kesehatan untuk Semua	
				2 Kesehatan Ibu dan Anak:					
				a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)	Orang	194	174		
				b) Prevelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	%	28,79	6,26		
				3 Insidensi Tuberkulosis (per-100.000 Penduduk):					
				a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	85,47	100		
				b) Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkolosis (Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	88,45	94,65		
2	Misi 1. Mewujudkan Transformasi Sosial yang Berkualitas	IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata	• percepatan wajib belajar 13 tahun • Pemerataan Kualitas antar satuan Pendidikan • Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan	4 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	90,52	100	Mewujudkan Pendidikan Berkualitas yang Merata	
				5 Hasil Pembelajaran:					
				a) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:					



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Pokok	Keterangan
			meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif • Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka	i) Literasi membaca	%	54,97	95,98		
				ii) Numerasi	%	50,15	79,37		
				b) Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,87	16,73		
				6 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	14,24	38,59		
				7 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun	Tahun	8,49	11,38		
3	Misi 1. Mewujudkan Transformasi Sosial yang Berkualitas	IE3 Perlindungan Sosial yang Adaptif	• Pengentasan kemiskinan terutama pada melalui perlindungan sosial adaptif. • Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas • Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program	8 Tingkat Kemiskinan	%	6,97	1,92	Mewujudkan Perlindungan Sosial yang Adaptif	
				9 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	70,77	100		
				10 Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal	%				



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Pokok	Keterangan
			pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.						
4	Misi 2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Berkualitas	IE4 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	- Peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang berkelanjutan, serta pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya. - Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri pengolahan - Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan	11 Rasio PDRB Industri Pengolahan / Distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Persen) Sektor Industri Pengolahan 12 Pengembangan pariwisata: a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara c) Jumlah Tamu Wisatawan Nusantara 13 Jumlah Industri Ekonomi Kreatif di Kab/Kota 14 Produktivitas UMKM, Koperasi, dan BUMD: a) Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kab/Kota b) Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kab/Kota c) Jumlah Orang yang Berusaha Dibantu Buruh Tetap	% % Orang Orang Industri UKM IKM Orang	4,22 0,32 37 9.563 17.811 1.461 2.461	6,76 0,84 88 24.675 42 18.811 2.461	Mewujudkan Pembangunan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi yang Berkualitas	



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Pokok	Keterangan
				d) Persentase Koperasi Sehat di Kab/Kota	%	14,21	15,21		
				e) Return on Asset (ROA) BUMD	%		30		
				15 Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik :					
				a)Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,73	1,94		
				b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%				
				c) Nilai Tukar Petani	Poin	153,14	178,14		
				d) Nilai Tukar Nelayan	Poin	107,32	132,32		
				16 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	62,17	67,17		
5	Misi 2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Berkualitas	IE5 Penerapan Ekonomi Hijau	- Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui pertanian regenerative - Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah	17 Tingkat penguasaan IPTEK	%			Mewujudkan Penerapan Ekonomi Hijau	
				18 Tingkat penerapan ekonomi hijau:					
				a) Tingkat Capaian Skor Lingkungan	Poin	44,32	52		
				b) Tingkat Capaian Skor Ekonomi	Poin		NA		
6	Misi 2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Berkualitas	IE6 Transformasi Digital	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok	c) Tingkat Capaian Skor Sosial	Poin		NA	Mewujudkan Transformasi Digital yang Berkualitas	
				19 Indeks Masyarakat Digital	Indeks	43,88	64		



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Pokok	Keterangan
7	Misi 2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Berkualitas	IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Peningkatan rantai nilai melalui penguatan kerjasama antardaerah dan pengembangan ekspor komoditas unggulan.	20 Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%		NA	Mewujudkan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	
				21 Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	29,17	31,12		
				22 Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	-2,72	12,28		
8	Misi 2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Berkualitas	IE8 Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Optimalisasi peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif	23 Kota dan desa maju, inklusif, dan berkelanjutan:				Mewujudkan Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	
				a) Proporsi Kontribusi PDRB Kab/Kota terhadap PDRB Provinsi	%	24,93	27,53		
				b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%		NA		
				c) Persentase Desa Mandiri	%	1,14	13,64		
9	Misi 3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Berkualitas	IE9 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	- Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah - Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. - Penguatan integritas partai politik. - Peningkatan cepat tanggap terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.	24 Indeks Reformasi Hukum	Indeks	98	100	Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	
				25 Indeks SPBE	Indeks	2,49	4		
				26 Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,81	4,39		
				27 Indeks Integritas Nasional:					
				a) Indeks Survei Penilaian Integritas	Indeks	67,45	86,75		
				b) Nilai MCP KPK	Poin	73	88		
				c) Indeks Maturitas SPIP	Indeks	3,155	3,214		
10	Misi 4. Mewujudkan	IE10 Hukum Berkeadilan,	Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk	28 a) Persentase Penegakan Peraturan Daerah	%		NA	Mewujudkan Pembangunan	



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Pokok	Keterangan
	Keamanan Daerah Tangguh Demokrasi, Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	mengurangi tingkat kriminalitas lokal.	b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	%	100	100	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	
				29 Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	%		NA		
				30 a) Persentase Unjuk Rasa yang Aman dan Damai	%		NA		
				b) PERDA yang merupakan Inisiatif DPRD	Perda		NA		
				C) Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik	%	6	15		
11	Misi 4. Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh Demokrasi, Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	IE11 Stabilitas Ekonomi Makro	- Penguatan pengendalian inflasi daerah. - Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan Prioritas Nasional.	31 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%		NA	Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Makro	
				32 Indeks Harga Konsumen	Indeks	118,16	140,16		
				33 Pertumbuhan Investasi Daerah	%	15	17,07		
				34 Indeks Literasi Keuangan	Indeks		NA		



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Pokok	Keterangan
12	Misi 4. Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh Demokrasi, Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	IE12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial	35 Jumlah Kerjasama Daerah	Kerjasama	12	NA	Mewujudkan Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	
				36 Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,62	4,02		
13	Misi 5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE13 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama	37 Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang telah Ditetapkan terhadap Total Registrasi	%		8	Mewujudkan Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	
				38 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks		NA		
				39 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	61,39	66,55		
14	Misi 5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE14 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	- peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. - Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk	40 Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,515	0,255	Mewujudkan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Pokok	Keterangan
			perkawinan anak dan perdagangan orang.						
15	Misi 5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE15 Lingkungan Hidup Berkualitas	Perencanaan tata ruang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, luasan hutan, serta wilayah jelajah satwa spesies dilindungi.	41 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks		NA	Mewujudkan Lingkungan Hidup Berkualitas	
				42 Kualitas Lingkungan Hidup					
				a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	74,66	87,25		
				b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	76,12	100		
				c) Pengelolaan Sampah:					
				- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) / Timbulan Sampah yang Tertangani (%)	%	1,36	5,5		
				- Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	% RT	5,65	10		
16	Misi 5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Ketahanan energi dengan pendekatan terpadu FEW (Food, Energy, and Water) Nexus	43 Ketahanan energi, air, dan pangan:				Mewujudkan Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	
				a) Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh)	kWh		NA		
				b) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan					
				- Indeks Ketahanan Pangan	Indeks		NA		
				- Skor Pola Pangan Harapan	Poin	87,5	97,5		
				c) Ketahanan air:					
				- Kapasitas Air Baku (dihitung dari Data SimSPAM)	m3/detik	20	50		



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Pokok	Keterangan
				- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	%	72,76	100		
17	Misi 5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	- Peningkatan Kapasitas SDM Petani dalam menerapkan pertanian cerdas iklim - Penerapan Teknologi Climate smart agriculture melalui penyediaan Bibit berkualitas. - Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dipengaruhi oleh iklim	44 Indeks Risiko Bencana (IRB) 45 Penurunan Emisi GRK (Ton CO ₂ ≈) a) Kumulatif b) Tahunan	Indeks Ton CO ₂ ≈ Ton CO ₂ ≈	159,35 338.194,09 41.104,54	112,21 2.180.805,59 122.003,57	Mewujudkan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	

Sumber: Tim Penyusun Perencanaan Jangka Panjang Daerah Kab. Mamuju, 2024

Tabel 5.3 Sasaran Pokok Kabupaten Mamuju 2025-2045

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
1	Mewujudkan Kesehatan untuk Semua	IE1 Kesehatan untuk Semua	1 Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,49	79,79	
			2 Kesehatan Ibu dan Anak:				
			a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)	Orang	194	174	



No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
			b) Prevelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	%	28,79	6,26	
			3 Insidensi Tuberkulosis (per-100.000 Penduduk):				
			a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	85,47	100	
			b) Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkolosis (Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	88,45	94,65	
			4 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	90,52	100	
2	Mewujudkan Pendidikan Berkualitas yang Merata	IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata	5 Hasil Pembelajaran:				
			a) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				
			i) Literasi membaca	%	54,97	95,98	
			ii) Numerasi	%	50,15	79,37	
			b) Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,87	16,73	



No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
			6 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	14,24	38,59	
			7 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun	Tahun	8,49	11,38	
3	Mewujudkan Perlindungan Sosial yang Adaptif	IE3 Perlindungan Sosial yang Adaptif	8 Tingkat Kemiskinan	%	6,97	1,92	
			9 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	70,77	100	
			10 Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal	%			
4	Mewujudkan Pembangunan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi yang Berkualitas	IE4 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	11 Rasio PDRB Industri Pengolahan / Distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Persen) Sektor Industri Pengolahan	%	4,22	6,76	
			12 Pengembangan pariwisata:				
			a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0,32	0,84	
			b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	37	88	



No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
			c) Jumlah Tamu Wisatawan Nusantara	Orang	9.563	24.675	
			13 Jumlah Industri Ekonomi Kreatif di Kab/Kota	Industri		42	
			14 Produktivitas UMKM, Koperasi, dan BUMD:				
			a) Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kab/Kota	UKM	17.811	18.811	
			b) Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kab/Kota	IKM	1.461	2.461	
			c) Jumlah Orang yang Berusaha Dibantu Buruh Tetap	Orang			
			d) Persentase Koperasi Sehat di Kab/Kota	%	14,21	15,21	
			e) Return on Asset (ROA) BUMD	%		30	
			15 Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik :				
			a)Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,73	1,94	
			b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%			
			c) Nilai Tukar Petani	Poin	153,14	178,14	
			d) Nilai Tukar Nelayan	Poin	107,32	132,32	



No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
			16 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	62,17	67,17	
			17 Tingkat penguasaan IPTEK	%			
5	Mewujudkan Penerapan Ekonomi Hijau	IE5 Penerapan Ekonomi Hijau	18 Tingkat penerapan ekonomi hijau:				
			a) Tingkat Capaian Skor Lingkungan	Poin	44,32	52	
			b) Tingkat Capaian Skor Ekonomi	Poin		NA	
			c) Tingkat Capaian Skor Sosial	Poin		NA	
6	Mewujudkan Transformasi Digital yang Berkualitas	IE6 Transformasi Digital	19 Indeks Masyarakat Digital	Indeks	43,88	64	
7	Mewujudkan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20 Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%		NA	
			21 Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	29,17	31,12	
			22 Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	-2,72	12,28	
8	Mewujudkan Perkotaan sebagai Pusat	IE8 Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat	23 Kota dan desa maju, inklusif, dan berkelanjutan:				



No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	a) Proporsi Kontribusi PDRB Kab/Kota terhadap PDRB Provinsi	%	24,93	27,53	
			b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%		NA	
			c) Persentase Desa Mandiri	%	1,14	13,64	
9	Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	IE9 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24 Indeks Reformasi Hukum	Indeks	98	100	
			25 Indeks SPBE	Indeks	2,49	4	
			26 Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,81	4,39	
			27 Indeks Integritas Nasional:				
			a) Indeks Survei Penilaian Integritas	Indeks	67,45	86,75	
			b) Nilai MCP KPK	Poin	73	88	
			c) Indeks Maturitas SPIP	Indeks	3,155	3,214	
10	Mewujudkan Pembangunan Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	IE10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	28 a) Persentase Penegakan Peraturan Daerah	%		NA	
			b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	%	100	100	
			29 Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	%		NA	
			30 a) Persentase Unjuk Rasa yang Aman dan Damai	%		NA	



No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
			b) PERDA yang merupakan Inisiatif DPRD	Perda		NA	
			C) Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik	%	6	15	
11	Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Makro	IE11 Stabilitas Ekonomi Makro	31 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%		NA	
			32 Indeks Harga Konsumen	Indeks	118,16	140,16	
			33 Pertumbuhan Investasi Daerah	%	15	17,07	
			34 Indeks Literasi Keuangan	Indeks		NA	
12	Mewujudkan Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	IE12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	35 Jumlah Kerjasama Daerah	Kerjasama	12	NA	
			36 Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,62	4,02	



No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
13	Mewujudkan Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	IE13 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37 Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang telah Ditetapkan terhadap Total Registrasi	%		8	
			38 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks		NA	
			39 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	61,39	66,55	
14	Mewujudkan Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif	IE14 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif	40 Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,515	0,255	
15	Mewujudkan Lingkungan Hidup Berkualitas	IE15 Lingkungan Hidup Berkualitas	41 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks		NA	
			42 Kualitas Lingkungan Hidup				
			a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	74,66	87,25	
			b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	76,12	100	
			c) Pengelolaan Sampah:				



No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
16	Mewujudkan Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	IE16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) / Timbulan Sampah yang Tertangani (%)	%	1,36	5,5	
			- Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	% RT	5,65	10	
			43 Ketahanan energi, air, dan pangan:				
			a) Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh)	kWh		NA	
			b) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan				
			- Indeks Ketahanan Pangan	Indeks		NA	
			- Skor Pola Pangan Harapan	Poin	87,5	97,5	
			c) Ketahanan air:				
			- Kapasitas Air Baku (dihitung dari Data SimSPAM)	m3/detik	20	50	
			- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	%	72,76	100	



No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
17	Mewujudkan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	IE17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44 Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	159,35	112,21	
			45 Penurunan Emisi GRK (Ton CO ₂ ≈)				
			a) Kumulatif	Ton CO ₂ ≈	338.194,09	2.180.805,59	
			b) Tahunan	Ton CO ₂ ≈	41.104,54	122.003,57	

Sumber: Tim Penyusun Perencanaan Jangka Panjang Daerah Kab. Mamuju, 2024

Tabel 5.4 Arah Pembangunan Kabupaten Mamuju 2025-2045

No	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok
1	IE1 Kesehatan untuk Semua	Mewujudkan Kesehatan untuk Semua
2	IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata	Mewujudkan Pendidikan Berkualitas yang Merata
3	IE3 Perlindungan Sosial yang Adaptif	Mewujudkan Perlindungan Sosial yang Adaptif
4	IE4 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Mewujudkan Pembangunan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi yang Berkualitas
5	IE5 Penerapan Ekonomi Hijau	Mewujudkan Penerapan Ekonomi Hijau



No	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok
6	IE6 Transformasi Digital	Mewujudkan Transformasi Digital yang Berkualitas
7	IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Mewujudkan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
8	IE8 Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Mewujudkan Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
9	IE9 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
10	IE10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Mewujudkan Pembangunan Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial
11	IE11 Stabilitas Ekonomi Makro	Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Makro
12	IE12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Mewujudkan Ketangguhan Diplomasu dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan
13	IE13 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Mewujudkan Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
14	IE14 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif	Mewujudkan Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif
15	IE15 Lingkungan Hidup Berkualitas	Mewujudkan Lingkungan Hidup Berkualitas



No	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok
16	IE16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Mewujudkan Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
17	IE17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Sumber: Tim Penyusun Perencanaan Jangka Panjang Daerah Kab. Mamuju, 2024

5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi

Tabel 5.5 Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Mamuju 2025-2045

MISI / TRANSFORMASI	NO	RPJPD 2025-2045
Transformasi Sosial	1	Mewujudkan Perluasan upaya promotif-preventif pembudayaan perilaku hidup sehat.
	2	Mewujudkan Percepatan penanganan stunting serta percepatan eliminasi penyakit menular seperti malaria melalui pendekatan integrasi multisektor dan rekayasa lingkungan habitat vektor.
	3	Mewujudkan Penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services), khususnya daerah perdesaan yang sulit diakses.
	4	Mewujudkan Pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan berkualitas dengan mengutamakan tenaga kesehatan masyarakat lokal yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif



MISI / TRANSFORMASI	NO	RPJPD 2025-2045
	5	Mewujudkan Pengembangan sistem telemedicines yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan).
	6	Mewujudkan Percepatan wajib belajar
	7	Mewujudkan Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat ke bekerjaan tinggi.
	8	Mewujudkan penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif
	9	Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka.
	10	Pembangunan ekosistem riset dan inovasi, serta ekosistem pariwisata yang berbasis digital untuk meningkatkan perluasan lapangan kerja.
	11	Pengentasan kemiskinan terutama pada melalui perlindungan sosial adaptif.
	12	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.



MISI / TRANSFORMASI	NO	RPJPD 2025-2045
	13	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.
	14	Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.
	15	Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.
	16	Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat – setidaknya 10 persen penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.
	17	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.
	18	Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif



MISI / TRANSFORMASI	NO	RPJPD 2025-2045
Transformasi Ekonomi	19	Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.
	20	Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.
	21	Peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang berkelanjutan, serta pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya.
	22	Peningkatan kapasitas dan kerjasama pelaksanaan pendidikan dan riset berbasis bioekonomi dan bioteknologi, disertai peningkatan manajemen sumber daya.
	23	Peningkatan kontribusi pusat-pusat pertumbuhan baru untuk pengembangan produk unggulan dalam mendukung pengembangan wilayah.
	24	Optimalisasi peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif.
	25	Peningkatan produktivitas BUMD.
	26	Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan.
	27	Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.
	28	Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui pertanian regeneratif.
	29	Peningkatan rantai nilai melalui penguatan kerjasama antardaerah dan pengembangan ekspor komoditas unggulan.
	30	Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri pengolahan.



MISI / TRANSFORMASI	NO	RPJPD 2025-2045
	31	Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
	32	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
	33	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
	34	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja.
	35	Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.



MISI / TRANSFORMASI	NO	RPJPD 2025-2045
	36	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.



MISI / TRANSFORMASI	NO	RPJPD 2025-2045
Transformasi Tata Kelola	37	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran). (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.
	38	Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah.
	39	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
	40	
	41	Peningkatan cepat tanggap terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.
	42	Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.
	43	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan pemerintahan digital.



MISI / TRANSFORMASI	NO	RPJPD 2025-2045
	44	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, pengangguran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.
	45	Pengawasan proses pengembangan karier promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.
Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	46	Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal.
	47	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan Prioritas Nasional.
	48	Penguatan pengendalian inflasi daerah.
	49	Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	50	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.
	51	Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal, dan pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial seperti perkawinan anak.
	52	Diversifikasi pangan untuk meningkatkan derajat kesehatan.



MISI / TRANSFORMASI	NO	RPJPD 2025-2045
	53	Perencanaan tata ruang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, luasan hutan, serta wilayah jelajah satwa spesies dilindungi.
	54	Penguatan efektivitas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam pengelolaan kawasan hutan sesuai dengan fungsinya.
	55	Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan nonstruktural, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan adaptasi pemulihan pasca bencana.
	56	Pembangunan infrastruktur tanggap bencana berbasis lingkungan dan penggunaan teknologi seperti flood early warning system.
	57	Penguatan kapasitas dan kesiapsiagaan bencana pada kelompok rentan.
	58	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
	59	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
	60	Pemberdayaan dan pelibatan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang Pembangunan.
	61	Penerapan upaya konservasi air hujan untuk pemenuhan kebutuhan air domestik.
	62	Pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk menunjang sawah beririgasi produktif eksisting.



MISI / TRANSFORMASI	NO	RPJPD 2025-2045
	63	Pengembangan natural based solution untuk pengendalian banjir seperti perkuatan tanggul alami di sungai dan konservasi mangrove di pesisir.
	64	Penguatan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa kawasan konservasi untuk menjaga keberadaan hutan alam dan bakau serta menjaga luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi diantaranya anoa dan babi rusa.
	65	Peningkatan kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian cerdas iklim.
	66	Penerapan teknologi climate smart agriculture melalui penyediaan bibit berkualitas.
	67	Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dipengaruhi oleh iklim.
	68	Pewujudan pencegahan, penurunan, dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim.
	69	Ketahanan energi dengan pendekatan terpadu FEW (Food, Energy, and Water) Nexus.
	70	Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat.
	71	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
	72	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Provinsi Sulawesi Barat.
Implementasi Transformasi	73	Penuntasan RDTR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut.
	74	Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.
	75	Dukungan pengembangan pelabuhan untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi.



MISI / TRANSFORMASI	NO	RPJPD 2025-2045
	76	Pemanfaatan ALKI II secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global.
	77	Dukungan pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll On/Roll-Off) angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh Wilayah Sulawesi.
	78	Dukungan pengembangan bandara utama yang integrasi dengan pengembangan wilayah.
	79	Pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan daerah pada koridor utama untuk mendukung integrasi rantai pasok domestik (menghubungkan kawasan ekonomi dan pelabuhan/bandara).
	80	Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan.
	81	Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.
	82	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.
	83	Persiapan lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal.
	84	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.
	85	Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.
	86	Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.



MISI / TRANSFORMASI	NO	RPJPD 2025-2045
	87	Pengelolaan sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman pada daerah rawan air.
	88	Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemecuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman.
	89	Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).
	90	Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim.
	91	Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik.
	92	Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
	93	Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.
	94	Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah kepulauan dan afirmasi.
	95	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
	96	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten



MISI / TRANSFORMASI	NO	RPJPD 2025-2045
	97	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan sasaran prioritas Provinsi dan Nasional.
	98	Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.
	99	Pengembangan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.
	100	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.

Sumber: Tim Penyusun Perencanaan Jangka Panjang Daerah Kab. Mamuju, 2024

5.2.3 Indikator Utama Pembangunan

Tabel 5.6 Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Mamuju 2025-2045

Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target 2025-2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
IE1 Kesehatan untuk Semua	1 Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,3	75,77	77,6	79,79
	2 Kesehatan Ibu dan Anak:					
	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)	Orang	190	185	180	174
	b) Prevelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	%	22,08	17,86	12,59	6,26
	3 Insidensi Tuberkulosis (per-100.000 Penduduk):					
	a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus	%	90	93,8	98,52	100



Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target 2025-2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
	tuberkulosis (treatment coverage)					
	b) Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	90	91,55	93,1	94,65
	4 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	91,97	100	100	100
IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata	5 Hasil Pembelajaran:					
	a) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:					
	i) Literasi membaca	%	69,22	78,14	87,06	95,98
	ii) Numerasi	%	58,22	65,28	72,34	79,37
	b) Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,59	15,16	15,87	16,73
	6 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	20,33	25,2	31,29	38,59
	7 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun	Tahun	9,24	9,79	10,53	11,38
IE3 Perlindungan	8 Tingkat Kemiskinan	%	5,7	4,69	3,43	1,92
	9 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	94,25	100	100	100



Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target 2025-2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
Sosial yang Adaptif	10 Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal	%	NA			
IE4 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	11 Rasio PDRB Industri Pengolahan / Distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Persen) Sektor Industri Pengolahan	%	4,85	5,36	5,99	6,76
	12 Pengembangan pariwisata:					
	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0,38	0,55	0,68	0,84
	b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	43	55	70	88
	c) Jumlah Tamu Wisatawan Nusantara	Orang	4.228	14.925	18.825	24.675
	13 Jumlah Industri Ekonomi Kreatif di Kab/Kota	Industri	18	24	32	42
	14 Produktivitas UMKM, Koperasi, dan BUMD:					
	a) Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kab/Kota	UKM	18.061	18.261	18.551	18.811
	b) Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kab/Kota	IKM	1.711	1.911	2.161	2.461
	c) Jumlah Orang yang Berusaha Dibantu Buruh Tetap	Orang	NA			



Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target 2025-2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
	d) Persentase Koperasi Sehat di Kab/Kota	%	14,46	14,66	14,91	15,21
	e) Return on Asset (ROA) BUMD	%	12	20	25	30
	15 Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik :					
	a)Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,53	2,38	2,18	1,94
	b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%				
	c) Nilai Tukar Petani	Poin	159,39	164,39	170,64	178,14
	d) Nilai Tukar Nelayan	Poin	113,57	118,57	124,82	132,32
	16 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	63,42	64,42	65,67	67,17
	17 Tingkat penguasaan IPTEK	%	NA			
IE5 Penerapan Ekonomi Hijau	18 Tingkat penerapan ekonomi hijau:					
	a) Tingkat Capaian Skor Lingkungan	Poin	49	50	51	52
	b) Tingkat Capaian Skor Ekonomi	Poin	NA	NA	NA	NA
	c) Tingkat Capaian Skor Sosial	Poin	NA	NA	NA	NA
IE6 Transformasi Digital	19 Indeks Masyarakat Digital	Indeks	42	46	58	64
IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20 Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	NA	NA	NA	NA



Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target 2025-2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
	21 Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	29,66	30,05	30,53	31,12
	22 Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	1,03	4,03	7,78	12,28
IE8 Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23 Kota dan desa maju, inklusif, dan berkelanjutan:					
	a) Proporsi Kontribusi PDRB Kab/Kota terhadap PDRB Provinsi	%	25,58	26,1	26,75	27,53
	b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	NA	NA	NA	NA
	c) Persentase Desa Mandiri	%	4,55	6,82	11,36	13,64
IE9 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24 Indeks Reformasi Hukum	Indeks	99,5	100	100	100
	25 Indeks SPBE	Indeks	3	3,07	3,5	4
	26 Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,2	3,52	3,91	4,39
	27 Indeks Integritas Nasional:					
	a) Indeks Survei Penilaian Integritas	Indeks	85	85,5	86	86,75
	b) Nilai MCP KPK	Poin	85	85,5	87	88
	c) Indeks Maturitas SPIP	Indeks	3,169	3,181	3,196	3,214
IE10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	28 a) Persentase Penegakan Peraturan Daerah	%	NA	NA	NA	NA
	b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	%	100	100	100	100
	29 Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	%	NA	NA	NA	NA
	30 a) Persentase Unjuk Rasa yang Aman dan Damai	%	NA	NA	NA	NA



Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target 2025-2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
	b) PERDA yang merupakan Inisiatif DPRD	Perda	NA	NA	NA	NA
	C) Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik	%	6	10	12	15
IE11 Stabilitas Ekonomi Makro	31 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	NA	NA	NA	NA
	32 Indeks Harga Konsumen	Indeks	123,66	128,06	133,56	140,16
	33 Pertumbuhan Investasi Daerah	%	16,32	16,52	16,77	17,07
	34 Indeks Literasi Keuangan	Indeks	NA	NA	NA	NA
IE12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	35 Jumlah Kerjasama Daerah	Kerjasama	NA	NA	NA	NA
	36 Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,72	3,8	3,9	4,02
IE13 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37 Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang telah Ditetapkan terhadap Total Registrasi	%	3	4	6	8
	38 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	NA	NA	NA	NA
	39 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	62,89	63,87	65,09	66,55
IE14 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	40 Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,449	0,397	0,333	0,255



Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target 2025-2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
IE15 Lingkungan Hidup Berkualitas	41 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	NA	NA	NA	NA
	42 Kualitas Lingkungan Hidup					
	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	86,46	86,59	87,12	87,25
	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	85	91	96	100
	c) Pengelolaan Sampah:					
	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) / Timbulan Sampah yang Tertangani (%)	%	3,5	4	4,5	5,5
	- Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	% RT	8	8,5	9	10
IE16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43 Ketahanan energi, air, dan pangan:					
	a) Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh)	kWh	NA	NA	NA	NA
	b) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan					
	- Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	NA	NA	NA	NA
	- Skor Pola Pangan Harapan	Poin	90	92	94,5	97,5
	c) Ketahanan air:					
	- Kapasitas Air Baku (dihitung dari Data SimSPAM)	m3/detik	30	38	46	50



Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target 2025-2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	%	81	90	95	100
IE17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44 Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	147,57	138,14	126,36	112,21
	45 Penurunan Emisi GRK (Ton CO ₂ ≈)					
	a) Kumulatif	Ton CO ₂ ≈	573.928,56	977.395,80	1.494.013,71	2.180.805,59
	b) Tahunan	Ton CO ₂ ≈	65.724,31	85.335,83	108.574,72	1.22.003,57

Sumber: Tim Penyusun Perencanaan Jangka Panjang Daerah Kab. Mamuju, 2024



Pemerintah
Kabupaten Mamuju

BAB VI

PENUTUP



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2045 merupakan rencana pembangunan jangka panjang yang bersifat 20 (dua puluh) tahun dengan terbagi kedalam 4 (empat) periode perencanaan jangka menengah. Oleh karena itu terdapat beberapa arah kebijakan pada setiap periodenya dengan tujuan menjadi kunci kesuksesan Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam melaksanakan pembangunan daerah. Penyusunan RPJPD Kabupaten Mamuju 2025-2045 ini memperhatikan/mempedomani Dokumen RPJPN 2025-2045, RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045, dan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Dokumen Lainnya yang berkaitan.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2045 ini melibatkan seluruh aktor pembangunan yang didukung pula dengan peran aktif masyarakat, dunia usaha dan akademisi. Dokumen RPJPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2045 ini memuat tentang kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan dan manajemen risiko, mekanisme perubahan, komunikasi publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Diharapkan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok Kabupaten Mamuju selama 20 (dua puluh) tahun kedepan dapat



tercapai, sehingga mampu memberikan kebermanfaatan langsung kepada masyarakat secara adil, dan merata, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama peningkatan kesejahteraan dan perekonomian seluruh masyarakat Kabupaten Mamuju. Oleh karena itu diperlukan komitmen dan peran dari semua pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Mamuju yang (Maju, Adil, Berkelanjutan).

6.1.1 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2045, konsistensi atau keselarasan antar dokumen perencanaan adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Hal ini dikarenakan untuk memastikan implementasi program-program pembangunan di tingkat daerah berjalan dengan optimal.

Konsistensi dan keselarasan tersebut akan berkaitan dengan rencana keuangan daerah, sehingga harus sesuai dengan kemampuan pendanaan daerah. Dalam hal ini, maka dokumen perencanaan daerah yang meliputi RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Dokumen (RKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang diarahkan untuk mendukung Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan secara Nasional harus saling berkaitan dan selaras sehingga mencapai kerangka kerja logis dengan tetap memperhatikan kemampuan daerah.

6.1.2 Sistem Insentif

Sistem insentif dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Mamuju tahun 2025-2045 adalah sistem yang digunakan sebagai strategi untuk mendorong pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sistem ini akan mengarah kepada manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Harapannya dapat



memaksimalkan partisipasi aktif semua unsur secara luas sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas Pembangunan.

6.1.3 Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tujuan Pembangunan daerah dibutuhkan pengendalian yang berkelanjutan dan partisipatif dengan berbasis sistem yang dilaksanakan melalui pemantauan, evaluasi dan manajemen resiko terintegrasi. Artinya sistem tersebut harus dilaksanakan dari tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan, sehingga berdampak terhadap kualitas kebijakan Pembangunan.

Perencanaan dan implementasi kebijakan tersebut, harus didukung melalui pengendalian pembangunan. Tujuannya adalah untuk memastikan konsistensi/keselarasan perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas pembangunan daerah, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun swasta. Sementara pada pengendalian implementasi kebijakan melalui pembangunan yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengendalian pembangunan harus diwujudkan dalam regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian dan manajemen resiko yang menjadi pedoman sistem kinerja pemerintah.

6.2 Pembiayaan Pembangunan.

Skema pembiayaan peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dapat mencakup beberapa strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sektor publik pertama penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi penataan regulasi dan pembentukan kelembagaan yang adaptif, teknologi digital proses bisnis, inovasi mekanisme pelaksanaan, kedua perluasan Kerjasama bilateral dan multilateral keuangan untuk pengembangan pembiayaan, ketiga penguatan instrument



kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha khususnya dari aspek regulasi tata Kelola dan kelembagaan.

Peningkatan kapasitas sektor nonpublic di lakukan dengan mekanisme insentif pajak, keringanan regulasi, atau penyediaan infrastruktur yang mendukung untuk mendorong investasi swasta yang sangat berperan penting dalam pelaksanaan program-program pembangunan dan mencapai tujuan-tujuan jangka panjang. Mendorong pembentukan kemitraan publik-swasta yang kuat untuk mendukung implementasi program-program Pembangunan.

Sistem manajemen investasi yang berkualitas sehingga kapasitas pembiayaan dapat digunakan secara optimal dengan Langkah penajaman identifikasi investasi publik, proses penyempurnaan dan penilaian proyek investasi daerah, pemantauan dan pengendalian proyek investasi publik, keterlibatan Masyarakat dalam siklus investasi, tata kelembagaan dan regulasi serta kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen investasi publik, transparansi dan akuntabilitas aspek investasi publik.



BUPATI MAMUJU
SITTI SUTINAH SUHARDI

